

Jaga Infrastruktur untuk Indonesia Maju



2019
Laporan Tahunan





Jaga Infrastruktur untuk Indonesia Maju

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam menyokong kemajuan Indonesia. Infrastruktur yang berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan, pemerataan dan kemandirian ekonomi sehingga cita-cita bangsa untuk Indonesia maju dapat tercapai. Tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam upaya pembangunan infrastruktur mendorong Pemerintah untuk mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII. Melalui PT PII Pemerintah Indonesia memberikan dukungan Pemerintah bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional.

Satu dekade kami lalui dengan menjalankan kegiatan usaha untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Selama itu pula, kami senantiasa bekerja keras membangun ekosistem dan pemahaman terkait pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Melalui pengalaman serta pembelajaran dari kegagalan dan keberhasilan yang telah dicapai, PT PII dapat menjaga pembangunan infrastruktur di antaranya dengan memberikan masukan dalam perencanaan dan penyiapan proyek, membantu koordinasi antar pemangku kepentingan proyek, membantu meningkatkan kualitas dokumen proyek hingga melakukan pemantauan proyek yang telah beroperasi untuk memastikan manfaat yang diterima masyarakat.

Berdasarkan pencapaian tersebut, Pemegang Saham memberikan kepercayaan kepada PT PII untuk mengembangkan kegiatan usaha dengan memberikan mandat untuk menjamin pinjaman langsung terhadap pembangunan proyek infrastruktur serta melakukan penyiapan dan pendampingan transaksi atau *Project Development Facility* (PDF) proyek KPBU melalui penugasan Kementerian Keuangan.

Memasuki dekade kedua, dengan mandat-mandat baru yang diberikan, merupakan saat bagi kami memantapkan langkah selanjutnya untuk semakin mengokohkan peran PT PII dalam mengawal pembangunan infrastruktur demi menjaga cita-cita bangsa untuk Indonesia maju.

Kesinambungan Tema



2015

Memacu Investasi, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

Peran dan kehadiran PT PII yang memiliki kredibilitas tinggi bagi penjaminan keamanan investasi di bidang pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan pada saat itu, baik secara internasional maupun nasional. PT PII mampu memberikan kepercayaan dan minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor infrastruktur.



2016

Dukungan Berkelanjutan terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

PT PII berkomitmen untuk fokus mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia dengan memberikan penjaminan atas proyek-proyek yang berkualitas melalui kerangka evaluasi, strukturisasi dan pengelolaan mitigasi risiko dalam tahapan pemantauan guna memastikan keberlanjutan dari pembangunan proyek yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di persaingan ekonomi dunia.



2017

Infrastruktur Mempersatukan Bangsa melalui Penjaminan

Memberikan kontribusi pada pembangunan infrastruktur, sesuai dengan nawacita Pemerintah yang menginginkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Melalui kontribusi PT PII sebagai lembaga penjamin dalam pembangunan infrastruktur ini, diharapkan mampu menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

**2018****Dengan PII, Infrastruktur Jadi Teratur**

Dengan alokasi risiko yang adil dan berimbang, penjaminan yang diberikan Perseroan terhadap proyek infrastruktur akan memberikan kepastian pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Begitu juga kepastian bagi lembaga-lembaga penyedia pendanaan. Dengan demikian, peran PT PII menjadi sangat penting, yaitu membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih teratur.

**2019****Jaga Infrastruktur untuk Indonesia Maju**

Satu dekade kami lalui dengan menjalankan kegiatan usaha untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Selama itu pula, kami senantiasa bekerja keras membangun ekosistem dan pemahaman terkait pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Memasuki dekade kedua, dengan mandat-mandat baru yang diberikan, merupakan saat bagi kami memantapkan langkah selanjutnya untuk semakin mengokohkan peran PT PII dalam mengawal pembangunan infrastruktur demi menjaga cita-cita bangsa untuk Indonesia maju.

Kilas Kinerja

Proyek

Total Nilai Investasi

Rp212,4 triliun

PT PII telah memberikan penjaminan untuk 22 (dua puluh dua) proyek infrastruktur dari 6 (enam) sektor

Pada tahun 2019, PT PII memberikan penjaminan atas 3 (tiga) proyek infrastruktur baru dengan skema KPBU yaitu Proyek Kereta Api Makassar - Parepare, Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah dan Proyek Jalan Tol Semarang-Demak, serta penjaminan pinjaman langsung untuk pembangunan Proyek Hydropower Program. Dengan demikian hingga tahun 2019, PT PII telah menjamin 22 (dua puluh dua) proyek infrastruktur dari 6 (enam) sektor dengan total nilai investasi Rp212,4 triliun. Selain itu, PT PII juga mendapatkan penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (PDF) untuk Proyek Proving Ground BPLJSKB di tahun 2019.

Skor GCG



89,082
Sangat Baik

Penilaian atas penerapan GCG PT PII tahun 2019 dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan memperoleh hasil skor sebesar 89,082 kategori "Sangat Baik". Perolehan nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 86,709 juga dengan kategori "Sangat Baik".

Kinerja Keuangan



RASIO *LEVERAGING* TAHUN 2019

Sampai dengan tahun 2019, dengan PMN sejumlah Rp8 triliun PT PII dapat mendukung Proyek Infrastruktur dengan nilai investasi sebesar Rp212,4 triliun.

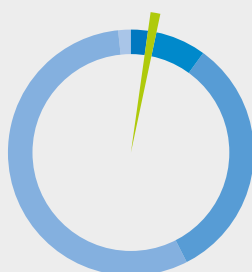


Pariwisata



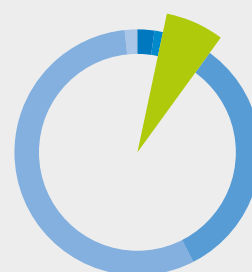
0,6X

Transportasi



0,1X

Telekomunikasi dan Informatika



1,7X



2019 26,5X

Nilai
Investasi
Proyek

Rp212,4
triliun

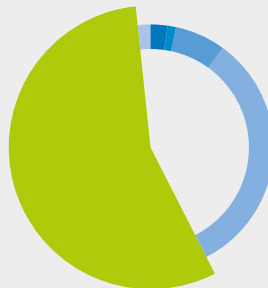


Ketenagalistrikan



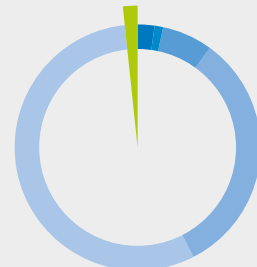
8,5X

Jalan



15,2X

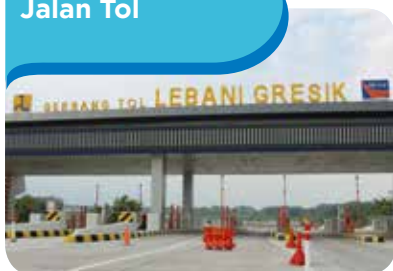
Air Minum



0,4X

MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI PROYEK YANG DIJAMIN PT PII

Jalan Tol



Kontribusi

Total panjang 11 ruas tol yang dijamin 688 Km (68% target penyediaan jalan tol 2015-2019). Preservasi jalan Nasional 29,87 Km ruas jalan Sumatera; Dampak ekonomi dihitung pada salah satu ruas di Jawa Timur



Nilai Tambah Ekonomi

± Rp15 triliun

Periode Proyek
2017 - 2051

Telekomunikasi



Kontribusi

Palapa Ring & Satelit Multifungsi:

- Pemerataan konektivitas data layanan akses internet di Indonesia
- Palapa Ring: 8.479 Km kabel optik lintas pulau
- Satelit: menghubungkan 149.400 titik layanan offline di Indonesia (incl. kawasan 3T)



Nilai Tambah Ekonomi

± Rp15 triliun

Periode Proyek
2016 - 2033

SPAM



Kontribusi

3 Proyek SPAM:

- Umbulan, Lampung, Semarang Barat
- Total debit produksi 5.750 liter/detik
- Untuk melayani ± 1,95 juta jiwa (± 391 ribu sambungan)



Nilai Tambah Ekonomi

± Rp3,5 triliun

Periode Proyek
2018 - 2042

Transportasi



Kontribusi

KA Makassar - Parepare:

- Penyediaan trase 142 Km (tahap I jalur KA Trans-Sulawesi)
- Pemenuhan target pembangunan jalur KA 3.258 Km pada tahun 2019



Nilai Tambah Ekonomi

± Rp17,8 triliun

Periode Proyek
2019 - 2038

Ketenagalistrikan



Kontribusi

PLTU Batang:

- Penyediaan pasokan listrik 2x1.000MW untuk pulau Jawa
- Peningkatan rasio elektrifikasi nasional
- Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional



Nilai Tambah Ekonomi

± Rp120 triliun

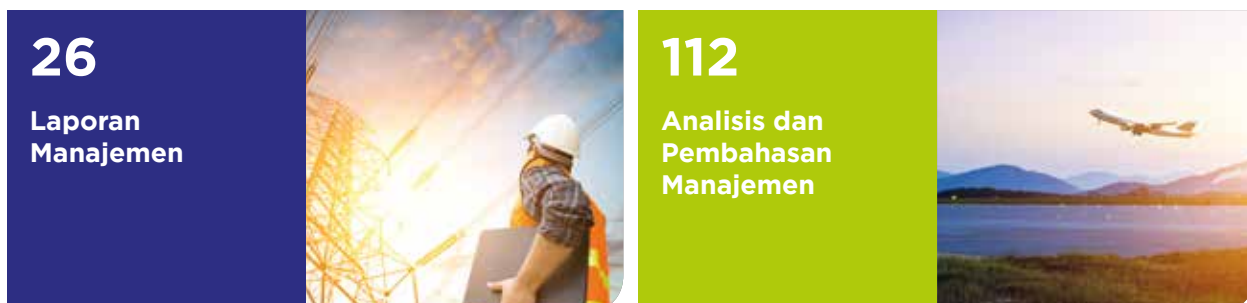
Periode Proyek
25 tahun

Dengan PMN sebesar Rp8 triliun, PT PII dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pada 5 sektor yang berdampak pada peningkatan tenaga kerja sekitar 250 ribu orang per tahun dan nilai tambah ekonomi

Keterangan:

- * Kajian ini dibantu oleh LPEM FEB UI (2017) dan PUSTRAL UGM (2018) - diolah
- ** Besaran hasil dampak ekonomi bergantung pada
 1. cakupan wilayah proyek;
 2. dasar tahun yang digunakan dalam penentuan asumsi; serta
 3. lama masa konsesi proyek infrastruktur

Daftar Isi



- 2 KESINAMBUNGAN
TEMA
- 4 KILAS KINERJA

01

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

- 14 Ikhtisar Keuangan
- 18 Ikhtisar Saham
- 18 Penghentian Sementara
Perdagangan Saham
(*Suspension*) dan/atau
Penghapusan Pencatatan
Saham (*Delisting*)
- 19 Aksi Korporasi
- 19 Informasi Obligasi, Sukuk,
atau Obligasi Konversi
yang masih Beredar
- 20 Peristiwa Penting

02

LAPORAN MANAJEMEN

- 28 Laporan Dewan Komisaris
- 36 Laporan Direksi
- 48 Tanggung Jawab atas
Laporan Tahunan 2019

03

PROFIL PERUSAHAAN

- 52 Identitas Perusahaan
- 54 Riwayat Singkat
Perusahaan
- 56 Satu Dasawarsa
PT Penjaminan
Infrastruktur Indonesia
(Persero)
- 66 Bidang Usaha
- 68 Struktur Organisasi
- 70 Visi, Misi, dan Budaya
Perusahaan
- 72 *Brand* Perusahaan
- 74 Profil Dewan Komisaris
- 77 Profil Direksi
- 79 Profil Pejabat Eksekutif
- 80 Data Jumlah Karyawan
dan
Pengembangan
Kompetensi
- 82 Komposisi Pemegang
Saham
- 83 Struktur Grup
- 83 Daftar Entitas Anak,
Entitas Asosiasi
dan Ventura Bersama
- 83 Kronologi Penerbitan
Saham
- 83 Kronologi Penerbitan
dan/atau
Pencatatan Efek Lainnya
- 84 Nama dan Alamat
Lembaga Profesi
dan Penunjang
Perusahaan
- 85 Penghargaan dan
Sertifikasi
- 86 Informasi *Website*
Perusahaan

- 88 Program Pengembangan
Kompetensi Dewan
Komisaris, Direksi,
Komite-Komite,
Sekretaris Perusahaan,
dan Satuan Pengawasan
Internal
- 91 Nama dan Alamat Entitas
Anak, Entitas Asosiasi,
Kantor Cabang dan
Perwakilan Luar Negeri
Serta Kantor Wilayah
Kantor Cabang, *Sub
Branch*, Perwakilan
Luar Negeri dan Kantor
Wilayah

04

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

- 94 Sumber Daya Manusia
- 106 Teknologi Informasi

05

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

- 114 Tinjauan Makroekonomi
dan Industri
- 118 Tinjauan Operasi per
Segmen Usaha
- 158 Analisis Kinerja Keuangan
- 166 Informasi Keuangan
Material Lainnya
- 178 Informasi Kelangsungan
Usaha

180

Tata Kelola
Perusahaan



278

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan



06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 182 Pendahuluan
- 190 Rapat Umum Pemegang Saham
- 195 Dewan Komisaris
- 202 Komisaris Independen
- 203 Direksi
- 211 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
- 213 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- 214 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
- 218 Hubungan Afiliasi
- 219 Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
- 220 Kebijakan Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- 222 Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
- 238 Audit Internal
- 242 Unit Manajemen Risiko
- 247 Sekretaris Perusahaan
- 249 Akuntan Publik
- 250 Manajemen Risiko
- 260 Sistem Pengendalian Internal
- 264 Perkara Penting
- 264 Sanksi Administratif
- 264 Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 265 Benturan Kepentingan
- 265 Kode Etik Perusahaan

- 267 Pengungkapan Budaya Perusahaan
- 268 Kebijakan Anti Gratifikasi
- 270 Kebijakan Anti Korupsi
- 271 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- 272 Sistem Pelaporan Pelanggaran
- 276 Pemenuhan Penyampaian Laporan Keberlanjutan 2019
- 276 Praktik *Bad Corporate Governance*
- 277 Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

- 293 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 297 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Tanggung Jawab terhadap Konsumen
- 299 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
- 301 Testimoni



07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 280 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 285 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan Operasi yang Adil
- 287 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 289 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup



08

304 INFORMASI KEUANGAN AUDITED

01



Ikhtisar Kinerja Keuangan



- 14 Ikhtisar Keuangan
- 18 Ikhtisar Saham
- 18 Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)
- 19 Aksi Korporasi
- 19 Informasi Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi yang masih Beredar
- 20 Peristiwa Penting



IKHTISAR KEUANGAN

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

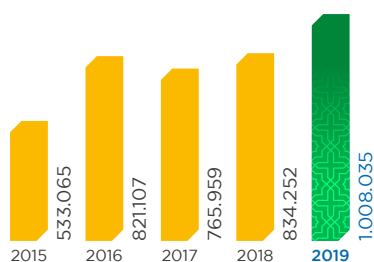
Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
Pendapatan Usaha	1.008.035	834.252	765.959	821.107	533.065
Beban Usaha	(413.629)	(356.787)	(313.824)	(315.946)	(213.974)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	594.406	477.465	452.135	505.161	319.091
Laba Tahun Berjalan	529.420	471.080	470.469	502.447	339.455
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	-
Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan *	646.568	330.378	528.230	536.751	335.548
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	-	-	-	-	-
Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) per Saham	-	-	-	-	-
Dividen kepada Pemegang Saham	155.456	101.151	100.650	-	-

*: PT PII merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia dan bukan perusahaan terbuka, sehingga tidak terdapat laba yang diatribusikan baik kepada pemilik entitas induk maupun kepentingan non pengendali.



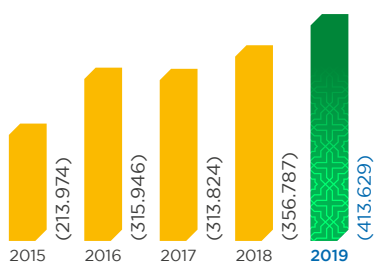
Pendapatan Usaha

(dalam jutaan Rupiah)



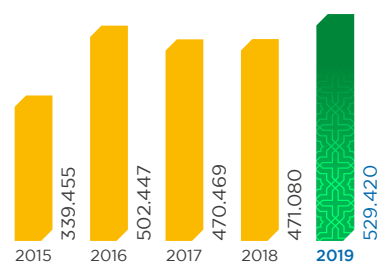
Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)



Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)



Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

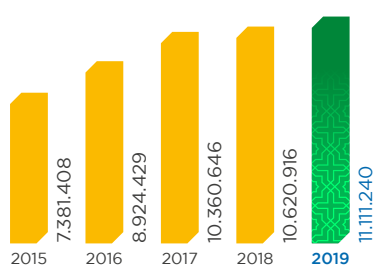
Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
Aset					
Kas dan Setara Kas	26.809	1.699.179	1.443.048	2.895.545	1.616.841
Investasi	10.881.161	8.673.174	8.672.826	5.785.731	5.522.139
Piutang Usaha	113.189	79.986	74.836	68.689	72.248
Piutang Lainnya	12.581	8.978	6.979	3.936	981
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka	1.570	2.448	2.423	4.685	8.317
Pajak Dibayar di Muka	4.210	368	-	-	-
Aset Tetap	14.499	18.776	16.267	20.650	1.913
Aset Tak Berwujud	1.824	1.195	992	1.690	2.376
Beban Tangguhan	26.697	43.360	41.665	57.941	74.593
Beban <i>Front End</i>	-	-	763	763	763
Aset Pajak Tangguhan	23.331	88.106	95.501	77.010	79.350
Uang Jaminan yang Dapat Dikembalikan	5.369	5.346	5.346	7.789	1.887
Jumlah Aset	11.111.240	10.620.916	10.360.646	8.924.429	7.381.408
Liabilitas					
Utang Usaha	3.772	7.481	3.342	4.960	9.510
Utang Pajak	2.439	4.816	3.484	2.483	3.053
Biaya yang Masih Harus Dibayar, Penyisihan dan Utang Lain-lain	37.990	42.913	28.722	37.597	27.993
Pendapatan Tangguhan	10.968	8.510	8.085	5.385	22.313
Pinjaman Penerusan	55.127	55.127	45.276	35.805	21.981
Liabilitas Imbalan Kerja	29.161	21.398	20.293	14.335	9.445
Jumlah Liabilitas	139.457	140.245	109.202	100.565	94.295
Ekuitas					
Modal Saham	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	6.000.000
Rugi Belum Direalisasi atas Kepemilikan Aset Keuangan	6.404	(111.375)	32.356	(25.878)	(61.303)
Rugi Aktuarial	212	843	(2.186)	(1.714)	(593)
Saldo Laba					
- Ditentukan Penggunaannya	140.000	116.446	92.922	67.800	50.800
- Tidak Ditentukan Penggunaannya	2.825.167	2.474.757	2.128.352	1.783.656	1.298.209
Jumlah Ekuitas	10.971.783	10.480.671	10.251.444	8.823.864	7.287.113
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	11.111.240	10.620.916	10.360.646	8.924.429	7.381.408

Ikhtisar Keuangan Penting



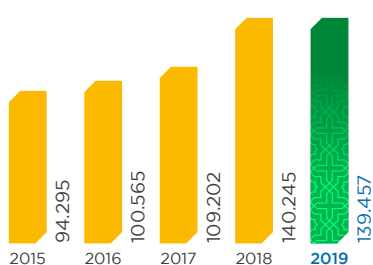
Aset

(dalam jutaan Rupiah)



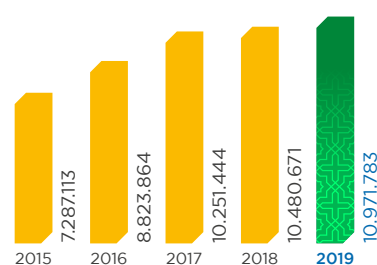
Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)



Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)



RASIO-RASIO KEUANGAN

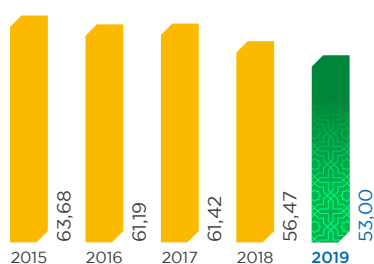
(dalam persentase)

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
Marjin Laba Operasional	58,97	57,23	59,03	61,52	59,96
Marjin Laba Bersih	53,00	56,47	61,42	61,19	63,68
ROE	4,91	4,55	5,14	6,53	5,99
BOPO	25,00	26,00	23,16	23,02	20,95



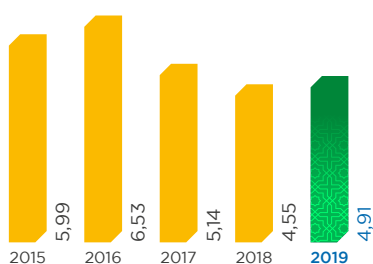
Marjin Laba Bersih

(dalam persentase)



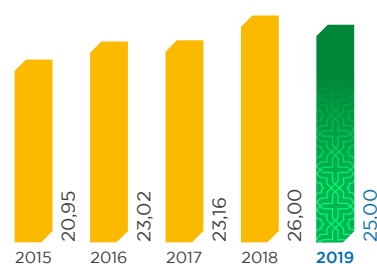
ROE

(dalam persentase)



BOPO

(dalam persentase)





IKHTISAR RINCIAN PENDAPATAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2019	2018	2017	2016	2015
Pendapatan Penjaminan	104.040	46.624	60.730	177.649	-
• Pendapatan Provisi dan Komisi	69.300	19.400	38.600	172.121	-
• Pendapatan premi	34.740	27.224	22.130	5.528	-
Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi	28.127	32.716	-	-	-
Pendapatan Pengelolaan Dana	875.868	754.912	705.229	643.457	533.065
• Deposito	618.506	486.086	470.102	398.921	439.345
• Pendapatan Bunga	257.301	267.411	235.126	236.569	93.720
• Laba atas Penjualan Obligasi	-	1.415	-	7.968	-
• Investasi Reksa Dana	-	-	-	-	-
• Laba atas Penjualan Reksa Dana	61	1.415	-	-	-
Total Pendapatan	1.008.035	834.252	765.959	821.107	533.065

Ikhtisar Saham

Hingga periode tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) belum melakukan aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, maupun di bursa efek manapun. Sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang:

1. Jumlah saham yang beredar;
2. Kapitalisasi pasar;
3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
4. Volume perdagangan.

Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Mengingat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) belum mencatatkan sahamnya di bursa saham, maka Perseroan tidak mengalami peristiwa penghentian sementara perdagangan saham atau pun penghapusan pencatatan saham.



Aksi Korporasi

Selama tahun 2019, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham mengingat Perseroan belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Perseroan juga tidak melakukan aksi korporasi lain, seperti akuisisi atau lainnya.

Informasi Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi yang masih Beredar

Sampai dengan akhir tahun 2019, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, sehingga tidak terdapat informasi yang memuat tentang:

1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*);
2. Tingkat bunga/imbalan;
3. Tanggal jatuh tempo; dan
4. Peringkat obligasi/sukuk

Peristiwa Penting

8 Januari



Penandatanganan Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin Aceh

Penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Zainoel Abidin antara Dirjen PPR dengan Direktur Utama PT PII. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Induk Proyek Infrastruktur RSUD Zainoel Abidin antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Pemerintah Daerah Aceh pada tanggal 4 Desember 2018 serta terbitnya Keputusan Menteri Keuangan untuk penugasan khusus kepada PT PII pada tanggal 5 Desember 2018 untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin Aceh oleh PT PII ini merupakan proyek ke-5 (lima) dan proyek sektor kesehatan ke-2 (dua) setelah RSK Dharmais serta merupakan proyek skema KPBU pertama yang menggunakan KPBU Syariah.

18 Januari



PT PII Bersama Kementerian Keuangan dan Kominfo Tes Sinyal Proyek KPBU Palapa Ring Tengah

PT PII mengadakan kegiatan Tes Sinyal Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Palapa Ring Tengah bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi & Informatika (Kominfo), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendesa), Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan serta Gubernur Sulawesi Utara. Proyek Palapa Ring merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional dan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik khususnya sektor telekomunikasi serta percepatan pelaksanaan Proyek Infrastruktur Strategis/ Prioritas Nasional.

1 April



PT PII Menandatangani MoU dengan ICIEC

Pelaksanaan kegiatan “High Level Meeting dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (“MoU”) antara PT PII dengan The Islamic Corporation for the Insurance of Investment dan Export Credit/ICIEC di Jeddah, Arab Saudi. ICIEC merupakan salah satu anggota dari grup Islamic Development Bank (IsDB) yang menyediakan jaminan investasi dan kredit ekspor sesuai dengan Sharia Islam kepada investor dari negara anggota ICIEC atau negara pengekspor. Dalam hal ini, bentuk kerja sama yang dimaksud antara PT PII dengan ICIEC adalah mengenai pengembangan dan investasi infrastruktur, melalui penyediaan dukungan dan jaminan yang relevan untuk proyek-proyek/ infrastruktur yang mana salah satu pihak atau keduanya dapat menyediakan penjaminan untuk proyek-proyek tersebut.

5 April



PT PII Memberikan Penjaminan pada Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Celebes Railway Indonesia (CRI) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Proyek ini berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor transportasi perkeretaapian sekaligus merupakan proyek KPBU pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan. Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare ini mengadopsi skema *Build Operate Transfer* (BOT)/‘Bangun Guna Serah’ dengan nilai investasi belanja modal Rp1,1 triliun dan biaya operasi Rp1,9 triliun, dengan masa konsesi selama 18,5 tahun. Proyek dengan skema *Availability Payment* ini akan melayani area meliputi 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

3 Mei



PT PII Memberikan Penjaminan pada Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia untuk Koneksi Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia

PT PII melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). SATRIA merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur. Dengan mengimplementasikan skema KPBU, proyek ini merupakan wujud upaya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan alternatif pembiayaan untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan akuntabel.

24 Juni



PT PII Menerima Penghargaan sebagai “PPP Agency of the Year 2019” di Asia

PT PII menerima penghargaan pada Asia Infrastructure Award sebagai “PPP Agency of The Year 2019” dengan kategori Institution Award, yang diberikan oleh The Asset. Penghargaan ini semakin memperkuat posisi PT PII sebagai satu-satunya *single window policy* untuk memberikan jaminan pemerintah dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di kawasan Asia.

Peristiwa Penting

22

Agustus



PT PII Raih “Top GRC Award” 2019

PT PII meraih penghargaan sebagai Top GRC 2019 #4Star pada ajang penghargaan TOP GRC 2019 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Asia Business Research Center. Dalam ajang tersebut, Direktur Utama PT PII juga mendapatkan penghargaan sebagai *The Most Committed Leader* 2019. Pencapaian ini merupakan hasil dari kesungguhan dan komitmen PT PII dalam penerapan *Governance, Risk & Compliance* (GRG).

23

Agustus



Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek KPBU *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi

Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi antara Perseroan yang diwakili oleh Direktur Utama dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan. Tujuan dari pembangunan proyek *Proving Ground* yang bertaraf internasional pertama di Indonesia ini di antaranya adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan melalui kepastian laik jalan kendaraan sebelum kendaraan diproduksi secara massal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta menerapkan standar internasional di bidang otomotif.

5

September



Penandatanganan Perjanjian Penjaminan atas pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan atas pinjaman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk pembiayaan *Hydropower Programme*. Bertempat di Kementerian Keuangan RI, PT PII melakukan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT PLN (Persero) serta penandatanganan Perjanjian Penjaminan dengan Kementerian Keuangan dan KfW.

23 September



PT PII Memberikan Penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang-Demak

Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ruas Jalan Tol Semarang-Demak antara Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PPSD) yang merupakan konsorsium dari Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Misi Mulia Metrikal. Dalam acara tersebut, PT PII juga melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dengan PT PPSD selaku BUP dan Perjanjian Regres dengan Menteri PUPR selaku PJPK pada proyek Ruas Jalan Tol Semarang – Demak yang merupakan proyek KPBU ke-11 pada sektor Jalan Tol yang diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII. Cakupan Proyek Jalan Tol Semarang-Demak meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut yang berlokasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan panjang jalan tol mencapai 27 km, dan nilai investasi sebesar Rp15,3 triliun.

14 Oktober



Peresmian Operasi Proyek KPBU Palapa Ring

Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo meresmikan beroperasinya Palapa Ring yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional dengan menghubungkan seluruh kabupaten/kota di wilayah Barat, Tengah, maupun Timur Indonesia. Palapa Ring merupakan jaringan tulang punggung nasional yang menghubungkan kabupaten/kota di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dan juga sebagai wujud dari afirmasi pemerintah untuk menyediakan sambungan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T). Melalui, skema KPBU, proyek Palapa Ring menggunakan skema pengembalian investasi melalui mekanisme *Availability Payment* (AP) yang didukung Kementerian Keuangan melalui instrumen dan regulasi terkait.

14 November



PT PII Raih Penghargaan Annual Report Award 2018

PT PII berhasil meraih penghargaan sebagai Juara ke-3 Laporan Tahunan Terbaik 2018 untuk kategori BUMN Keuangan *Non-Listed* dalam ajang *Annual Report Award* (ARA) 2018 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencapaian ini merupakan bentuk komitmen PT PII sebagai *Special Mission Vehicle* Kementerian Keuangan atas pelaksanaan prinsip transparansi dan *Good Corporate Governance* yang mendukung pencapaian visi dan misi PT PII secara berkelanjutan.

Peristiwa Penting

4 Desember



Menteri Keuangan RI Lantik M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama PT PII (Persero)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengangkat M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama PT PII melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 890/KMK.06/2019 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Direktur Utama PT PII (Persero) dilaksanakan di Kementerian Keuangan RI, Jakarta dengan disaksikan oleh jajaran pejabat Kementerian Keuangan serta Dewan Komisaris PT PII.

5 Desember



PT PII Kembali Terima Penghargaan "ASEAN Risk Award 2019"

PT PII mendapatkan 3 penghargaan sebagai Juara ke-1 dari ASEAN Risk Award 2019 untuk 3 kategori, yaitu *Public Risk*, *Public Initiative* dan *Risk Educator*. Dari 8 kategori yang dipersaingkan, PT PII dinominasikan untuk 5 kategori yaitu *GRC Award Nominees*, *Risk Champion Nominees*, *Public Initiative Nominees*, *Public Risk Nominees*, dan *Risk Educator Nominees*. Penghargaan ini merupakan wujud upaya dari segenap manajemen dan karyawan untuk secara berkelanjutan menerapkan implementasi manajemen risiko sesuai *best practice* di PT PII dan mendorong pengelolaan risiko sektor publik utamanya untuk pengembangan infrastruktur Pemerintah.

6 Desember



Program CSR PT PII Buka Peluang Kewirausahaan bagi Masyarakat di KEK Mandalika

PT PII melaksanakan peresmian Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terkait Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok. Bentuk program CSR yang dijalankan adalah terkait dengan Pelatihan Perubahan Mindset dan Membangun Mimpi, Pelatihan Dasar (kewirausahaan dasar seperti membuka wawasan/mindset, keuangan, dan pemasaran), Pelatihan teknis, Bantuan sarana/prasarana kelompok wirausaha, peningkatan usaha, *branding* serta *mentoring* Pendampingan komunitas wirausaha. Program CSR ini dilaksanakan untuk mewujudkan terciptanya dan tersedianya lapangan usaha yang sesuai dengan kompetensi dan harapan komunitas dengan modal pengetahuan, keterampilan dan sarana/prasarana yang difasilitasi oleh PT PII. Diharapkan, program ini akan menciptakan nilai ekonomi bagi keluarga dan kelompoknya serta adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan produk dari UMKM sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di KEK Mandalika.

12 Desember



Peresmian Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek Elevated II

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan beroperasinya Proyek KPBU Jalan Tol Jakarta-Cikampek *Elevated* II yang merupakan salah satu dari 11 (Sebelas) Proyek jalan tol yang dijamin oleh PT PII. Jalan tol Jakarta-Cikampek II *Elevated* memiliki panjang 36 km dan nilai investasi sebesar Rp16,2 triliun dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) yaitu Kementerian PUPR dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek.

19 Desember



PT PII Mendapatkan Rekor Muri Melalui Program CSR Pembuatan *Ecobrick*

PT PII menyelenggarakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk Pelatihan membuat *Ecobrick* kepada siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dengan melibatkan lebih dari 1.000 siswa dan mendapatkan apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan kategori "Pelatihan Membuat *Ecobrick* kepada Pelajar dalam Jumlah Terbanyak". Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran, dan tanggung jawab dalam penggunaan bahan plastik terutama bagi peserta anak-anak usia sekolah dasar (SD), serta meningkatkan kreativitas siswa dan sekolah dalam membuat dan mengembangkan hasil *Ecobrick* dengan mengembangkannya menjadi barang-barang yang dapat bermanfaat sekaligus menyelamatkan lingkungan.



02



Laporan Manajemen



- 28 Laporan Dewan Komisaris
- 36 Laporan Direksi
- 48 Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019



Laporan Dewan Komisaris



Ayu Sukorini
Komisaris Utama

“

“Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) PT PII menekankan kepada pelaksanaan mandat dan dua fungsi pokok PT PII, yaitu sebagai *fiscal tools* dan korporasi.”

”



Pemegang Saham yang Kami hormati.

Selama tahun 2019, Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) PT PII menekankan kepada pelaksanaan mandat dan dua fungsi pokok PT PII, yaitu sebagai *fiscal tools* dan korporasi. Mandat dan fungsi utama ini mendorong PT PII untuk fokus pada penguatan bisnis penjaminan baik KPBU maupun Non KPBU, serta membangun skema penjaminan kredibel untuk mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain itu, upaya memastikan adanya kesinambungan *pipeline* juga menjadi fokus utama di tahun 2019, antara lain melalui peran yang lebih aktif dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk mengamankan *pipeline*.

Dalam mengupayakan mandat dan fungsi utama tersebut, PT PII terus melanjutkan praktik tata kelola yang baik sebagai fondasi bagi terciptanya organisasi yang bersih dan dihormati. Upaya Perseroan untuk mewujudkan pelaksanaan mandat dan dua fungsi pokok PT PII ini, sangat mewarnai pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di dalam pengawasan atas pelaksanaan maupun pertanggungjawaban RKAP tahun 2019.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Dewan Komisaris aktif memberikan arahan dan masukan kepada Direksi melalui rapat-rapat reguler yang diadakan minimal sebulan sekali. Selain itu, pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi juga dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan, diluar rapat rutin bulanan, dalam hal Perusahaan menghadapi isu-isu krusial yang perlu segera diambil keputusan. Sepanjang tahun 2019, rapat gabungan tersebut telah diadakan sebanyak 14 (empat belas) kali. Dewan Komisaris juga memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam bentuk surat tertulis, jika melalui rapat tidak memungkinkan, atau Dewan Komisaris memandang pemberian nasihat dengan surat tertulis lebih efektif.

Dewan Komisaris juga memberdayakan Komite-Komite di bawahnya, untuk menindaklanjuti arahan dan masukan kepada Direksi. Secara reguler sekurang-kurangnya satu bulan sekali, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, melakukan penelaahan dan pembahasan dengan tim teknis di bawah Direksi untuk tindak lanjutnya. Selama tahun 2019 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat dengan Divisi-Divisi PT PII masing-masing sebanyak 16 (enam belas) dan 12 (dua belas) kali.



Laporan Dewan Komisaris

Dalam rangka melakukan pengujian atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2019 dan capaian indikator kinerja, sesuai dengan hasil dari proses pengadaan yang telah dilakukan, kami telah mengusulkan kepada RUPS Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk untuk melakukan audit keuangan atas Laporan Keuangan PT PII tahun 2019. RUPS telah menyetujui KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - *A member of the PricewaterhouseCoopers network of firms* sebagai auditor ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PII (Persero) tahun 2019. Audit tersebut telah diselesaikan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - *A member of the PricewaterhouseCoopers network of firms* pada tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat Tanpa Modifikasi.

KINERJA OPERASIONAL

Berdasarkan laporan yang telah diaudit tersebut, kinerja operasional yang dicapai perusahaan cukup baik. Sepanjang tahun 2019, terdapat tiga proyek KPBU yang telah ditandatangani perjanjian penjaminannya, yaitu: KA Makassar - Parepare, Satelit Multifungsi dan Pembangunan Proyek Jalan Tol Semarang-Demak. Sehingga sampai dengan tahun 2019, terdapat total 22 (dua puluh dua) proyek yang telah ditandatangani perjanjian penjaminannya dengan nilai maksimum eksposur penjaminan sebesar Rp55,7 triliun, 18 (delapan belas) proyek di antaranya telah efektif penjaminannya dengan nilai maksimum eksposur penjaminan sebesar Rp37,25 triliun. Realisasi Rasio Penjaminan terhadap Ekuitas (*Gearing Ratio*) pada tahun 2019 adalah sebesar 5,1 kali, lebih tinggi dari anggaran sebesar 4,9 kali. Realisasi *Gearing Ratio* ini masih dalam batas yang diperkenankan sesuai PMK 95/PMK.08/2017, yaitu maksimal sebesar 10 kali.

Sementara itu untuk penjaminan non KPBU, pada tahun 2019, telah ditandatangani perjanjian penjaminan atas pinjaman KfW kepada PT PLN dengan eksposur penjaminan maksimal sebesar Rp656 miliar untuk proyek *Hydropower Programme*. Dengan demikian secara akumulatif sampai dengan akhir 2019, terdapat 2 proyek penjaminan non KPBU yang telah dijamin oleh PT PII.

Untuk unit bisnis Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*-PDF), pada tahun 2019, PT PII memperoleh penugasan PDF

untuk Proyek Proving Ground Bekasi. Secara total, sejak tahun 2018 PT PII telah memperoleh 6 (enam) penugasan PDF. Di antara 6 (enam) proyek tersebut, satu proyek telah mencapai tahap penandatanganan perjanjian kerja sama, yaitu proyek KA Makassar-Parepare.

Seiring dengan meningkatnya jumlah proyek yang dijamin oleh Perseroan, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi untuk dapat mempertajam *pipeline* proyek sehingga diperoleh *pipeline* yang berkualitas yang juga dapat memberikan dampak pada efisiensi Beban Pengembangan Usaha. Langkah-langkah ekstensifikasi PJPK baru dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah telah dilakukan untuk memperluas basis PJPK potensial. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memberikan arahan dan dukungan kepada Direksi untuk memproses proyek dengan cepat, akuntabel, dan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KINERJA KEUANGAN

Secara umum, Dewan Komisaris menilai kinerja keuangan Perseroan sampai dengan akhir tahun 2019 cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- Perseroan membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp1.008,03 miliar atau 97% dari target sebesar Rp1.040,62 miliar. Pencapaian ini ditopang oleh realisasi Pendapatan Penjaminan sebesar Rp104,04 miliar (81% dari anggaran sebesar Rp128,13 miliar), Pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp875,87 miliar (107% dari anggaran sebesar Rp818,03 miliar), dan Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi sebesar Rp28,13 miliar (30% dari anggaran sebesar Rp94,46 miliar).
- Realisasi beban usaha sebesar Rp413,63 miliar atau 80% dari anggaran sebesar Rp516,47 miliar.
- Realisasi BOPO pada tahun 2019 mencapai sebesar 25%. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan angka yang ditargetkan di dalam RKAP 2019, yaitu sebesar 35%.
- Realisasi Laba Sebelum Pajak adalah sebesar Rp594 miliar, lebih tinggi 13% dibandingkan anggaran sebesar Rp524,15 miliar.

Setelah memperhitungkan estimasi Pajak Penghasilan, realisasi Laba Setelah Pajak sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp529,42 miliar atau lebih tinggi 5% di atas anggaran sebesar Rp504,78 miliar.

Dengan tingkat laba tersebut di atas, realisasi margin laba bersih mencapai sebesar 53%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target RKAP 2019, yaitu sebesar 49%.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, Dewan Komisaris juga telah mempunyai IKU berdasarkan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). IKU ini merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas & tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Adapun untuk pencapaian Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris semua target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Sesuai ketentuan, realisasi IKU Dewan Komisaris juga telah direview oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan di laporkan kepada RUPS (melalui surat kami nomor S-03/PII/DK/0120 tanggal 31 Januari 2020). Berdasarkan hasil *review* tersebut nilai IKU Dewan Komisaris mencapai 104%.

PENILAIAN KINERJA KOMITE

Pencapaian nilai IKU tersebut juga tidak lepas dari peran Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Sesuai ketentuan, Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajemen, Dewan Komisaris PII dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Fungsi pengawasan dan penasihat ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin yang diadakan dengan Direksi serta melalui pendelegasian tugas dan kewenangan

kepada masing-masing Komite terkait. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan perusahaan sebelum dilaporkan ke Pemegang Saham dan stakeholder lainnya serta melakukan pengkajian atas laporan penilaian internal Perseroan serta tugas-tugas lainnya sesuai penguasaan yang diberikan Dewan Komisaris.

Sementara itu, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memonitor pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan GCG pada Perseroan. Komite Pemantau Risiko juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perseroan serta merekomendasikan arah kebijakan jika diperlukan.

Dewan Komisaris secara reguler melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2019 komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. Hal ini misalnya dilihat dari pencapaian IKU secara keseluruhan yang dicapai oleh Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN GCG

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam mengupayakan mandat dan fungsi utama tersebut, PT PII selalu kami dorong untuk terus melanjutkan praktik tata kelola yang baik sebagai fondasi bagi terciptanya organisasi yang bersih dan dihormati. Oleh karena itu, aspek *Corporate Governance* dan Pengelolaan Risiko di Perusahaan merupakan salah satu fokus kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Sejalan dengan hal tersebut, dan merujuk amanat PMK No. 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, PT PII telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)



Laporan Dewan Komisaris

sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas penerapan GCG tahun 2019. Berdasarkan hasil assessment BPKP, skor implementasi GCG PT PII Tahun 2019 adalah sebesar 89,08 (kategori “Sangat Baik”), naik dari capaian tahun sebelumnya sebesar 86,7.

Peningkatan capaian tahun 2019 menunjukkan perbaikan secara kontinyu yang telah dilakukan oleh semua insan yang ada di PT PII baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG setiap tahunnya, Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk mencermati dan memperhatikan beberapa area yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Sehingga diharapkan implementasi GCG dapat semakin membaik setiap tahunnya. Penerapan GCG yang semakin baik ini, juga diharapkan dapat makin meningkatkan kinerja dan kiprah PT PII di dalam pembangunan infrastruktur.

AUDIT INTERNAL

Dewan Komisaris juga sangat memperhatikan penerapan pilar GCG melalui pemberdayaan audit internal. Dewan Komisaris melalui Komite Audit senantiasa mencermati pelaksanaan audit internal dalam rangka memberikan keyakinan atas berjalannya fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam pandangan Dewan Komisaris fungsi audit internal telah memberikan *assurance* atas berjalannya fungsi-fungsi di Perseroan melalui pelaksanaan audit atau bentuk kegiatan lain. Pada tahun 2019, audit internal telah dilakukan atas pengelolaan fungsi *Project Monitoring and Claim Management*, *Corporate Social Responsibility*, proses penjaminan Proyek Kereta Api Makassar-Parepare, serta proses penyiapan proyek dan pendampingan transaksi KPBU.

Hasil audit atas fungsi-fungsi tersebut memberikan keyakinan bahwa fungsi-fungsi tersebut telah dilakukan dengan baik dan tidak terdapat temuan dengan risiko tinggi. Namun demikian Dewan Komisaris tetap meminta agar manajemen segera menindaklanjuti semua rekomendasi secara tepat

waktu serta mengambil *lesson learned* dari temuan audit tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan bisnis Perseroan. Dewan Komisaris juga menugaskan Komite Audit bersama fungsi audit internal dan fungsi lain pada organ Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjaga praktik GCG Perseroan.

PENGELOLAAN RISIKO

Aspek lain dalam pelaksanaan GCG yang juga menjadi perhatian Dewan Komisaris adalah aspek pengelolaan risiko. Pelaksanaan fungsi pengawasan atau pembinaan atas aspek ini dilakukan secara langsung di dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi maupun tidak langsung melalui Komite Pemantauan Risiko (KPR). KPR secara reguler, paling tidak setiap satu bulan sekali, bertemu dengan Tim Direksi yang terkait dengan Pengelolaan Risiko. Dalam hal pengelolaan risiko ini, menurut hemat kami, sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari praktik pengelolaan risiko yang dilakukan perusahaan, di antaranya Penyusunan Profile Risiko dan Monitoring yang dilakukan secara reguler, penyusunan *Risk Impact Analysis* (RIA) dari proyek-proyek yang dijamin, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Praktik pengelolaan risiko yang baik juga telah diakui oleh pihak eksternal dengan diperolehnya penghargaan Juara ke-1 pada ASEAN Risk Award 2019, khususnya untuk tiga kategori, yaitu *Public Risk*, *Public Initiative* dan *Risk Educator*.

Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan kepada PT PII untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, mengingat hal ini merupakan *core* bisnis dari perusahaan. Dalam konteks ini, Dewan Komisaris sangat mendukung Pengembangan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Model *Enterprise Risk Management* yang tengah dilakukan oleh PT PII. Dengan pengembangan dan penyempurnaan ini diharapkan kerangka pengelolaan risiko PT PII dapat senantiasa sejalan dengan perluasan mandat yang diterima maupun praktik-praktik terbaik merujuk pada standar baru yang berlaku, baik dalam ISO 31000:2018 maupun 2017 COSO *Enterprise Risk Management*.



WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas implementasi GCG, sejak tahun 2018 Perusahaan telah menyusun, mensosialisasikan serta mengimplementasikan Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS). Sesuai dengan Pedoman tersebut Perusahaan juga telah menyiapkan saluran pengaduan yang langsung dan terjamin kerahasiaan pelapor. Dewan Komisaris secara aktif terlibat dalam penyiapan infrastruktur WBS tersebut baik secara langsung maupun melalui Komite Audit.

Sesuai Pedoman, Dewan Komisaris juga akan terlibat aktif untuk menangani pengaduan apabila informasi pelanggaran yang disampaikan menyangkut anggota Direksi atau Komite dan Anggota Dewan Komisaris. Sampai dengan akhir tahun 2019, Perusahaan belum menerima pengaduan sehingga belum ada informasi dari WBS yang perlu ditindaklanjuti. Untuk penguatan WBS ini, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah memberikan arahan, terutama terkait keanggotaan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3).

PENGELOLAAN CSR

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk komitmen PT PII dalam tanggung jawab sosial dan etika untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan program CSR diharapkan juga dapat meningkatkan citra positif dan reputasi baik Perusahaan.

Pelaksanaan Program CSR telah mengacu pada sejumlah peraturan yang ada, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, manajemen telah meratifikasinya dengan melahirkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK: SK-004/BOD/CSR/2015 tentang Besaran Dana Penyaluran Sponsorship, Donasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Landasan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan CSR Perseroan.

Selama tahun 2019 program CSR ini disalurkan pada berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan, bidang pemberdayaan ekonomi, bidang lingkungan serta bidang kesehatan. Pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya, dipergunakan untuk membantu pembekalan mutu produk lokal daerah maupun pemberdayaan perempuan melalui pelatihan inovasi industri rumah tangga. Sementara untuk bidang lingkungan hidup, antara lain diberikan untuk perbaikan sarana sanitasi/toilet masyarakat maupun kampung ramah lingkungan. Karena itu, Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan CSR oleh Perseroan telah berada di jalur yang tepat. Secara eksternal, praktik terbaik di dalam pengelolaan CSR oleh PT PII juga telah diakui, di antaranya dengan ditetapkannya PT PII sebagai pemenang TOP CSR Awards #4, yaitu sistem kebijakan dan tata kelola CSR PT PII, berada pada tingkat “sangat baik” dan mendukung strategi bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

Mengingat pentingnya pelaksanaan program CSR, Dewan Komisaris telah memberikan arahan kepada Direksi agar senantiasa meningkatkan tata kelola Program CSR melalui kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan secara optimal memberikan manfaat kepada warga terdampak proyek.



Laporan Dewan Komisaris



M. Rahman Ritza
Komisaris

Ayu Sukorini
Komisaris Utama

Mariatul Aini
Komisaris



PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya prospek usaha untuk tahun 2020 yang telah dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris meyakini, dalam menyusun prospek usaha Perseroan ke depan, Direksi telah mempertimbangkan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal, yang mengacu pada perkiraan kondisi ekonomi Indonesia ke depan didasarkan pada asumsi dan kebijakan pemerintah, seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sedangkan asumsi internal, terutama yang dijadikan pertimbangan adalah proyek yang akan dijamin serta memberikan pendapatan bagi Perseroan.

Sesuai ketentuan, prospek usaha dituangkan secara formal di dalam RKAP 2020, yang berisi antara lain rencana aksi korporasi, target laba dan aset, target operasional, dan lainnya. Dukungan komisaris atas RKAP 2020 diberikan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain yaitu (i) Penyusunan RKAP 2020 telah disusun dengan mengakomodir masukan/arahan Dewan Komisaris, (ii) kesesuaian dengan arahan Pemegang Saham, dimana pertumbuhan pendapatan usaha diperkirakan dapat meningkat sebesar 5,5% dan pertumbuhan laba bersih sebesar 4,5%, (iii) kesesuaian dengan arah Arah Strategis Pengembangan Jangka Panjang PT PII yang dituangkan di dalam RJPP 2018-2020. Dengan

demikian, Dewan Komisaris berpandangan bahwa dasar penyusunan prospek usaha yang dibuat oleh Direksi telah memiliki pijakan yang sangat baik.

Dengan dasar penilaian tersebut, Dewan Komisaris juga berpandangan bahwa target yang telah ditetapkan untuk pencapaian tahun 2020 sangat realistis, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Serta dengan dukungan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik serta keandalan teknologi informasi.

PENUTUP DAN APRESIASI

Atas upaya Direksi dan seluruh jajaran manajemen yang telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Direksi beserta jajarannya telah mampu menghadapi tantangan dalam perekonomian dan memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan infrastruktur.

Akhirnya, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham atas kepercayaan yang diberikan. Ke depannya, Dewan Komisaris akan tetap berupaya memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan pemberian nasihat kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

Jakarta, 31 Desember 2019

Ayu Sukorini
Komisaris Utama

Laporan Direksi



M. Wahid Sutopo
Direktur Utama

“

Pada tahun 2019, PT PII kembali menekankan kepada mandat dan dua fungsi pokok PT PII sebagai *fiscal tools* dan Perseroan Terbatas. Mandat dan fungsi utama ini mendorong PT PII untuk fokus pada penguatan bisnis penjaminan dan membangun skema penjaminan kredibel guna mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia.

”



Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas capaian kinerja di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2019. Memasuki tahun ke-10 dari keberadaannya (didirikan pada 30 Desember 2009), nilai proyek-proyek KPBU yang mendapatkan jaminan pemerintah melalui PT PII melampaui Rp210 triliun pada akhir tahun 2019. Di samping itu, PT PII juga mencatatkan jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung dari KfW (Bank Pembangunan Jerman) kepada PT PLN (Persero) untuk beberapa proyek pembangkit listrik tenaga air dan menuntaskan proses pendampingan transaksi untuk proyek prasarana kereta api Makassar-Parepare.

Pada tahun 2019 ini, PT PII juga berhasil mendapatkan apresiasi berupa penghargaan atas capaian kinerjanya, di antaranya penghargaan *Public Private Partnership (PPP) Agency of The Year* pada ajang *The Asset Tripple A Asia Infrastructure Award 2019* serta Peringkat Ketiga Kategori BUMN Keuangan *Non-Listed* pada penghargaan *Annual Report Award 2018* dan 3 (tiga) penghargaan di bidang *Public Risk*, *Public Initiative* dan *Risk Educator* di ajang *ASEAN Risk Award*.

Pencapaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari insan PT PII (karyawan, Direksi, Dewan Komisaris) dan dukungan para pemangku kepentingan dan Pemegang Saham yang senantiasa memberikan arahan selama ini.

Para Pemangku Kepentingan yang kami muliakan,

Kami membuka lembaran tahun buku 2019 dengan melaksanakan berbagai kebijakan strategis. Dalam kaitan tersebut melalui laporan tahunan ini kami akan memaparkan pencapaian kinerja Perseroan, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kami sebagai Direksi kepada segenap pemangku kepentingan, serta sekaligus sebagai implementasi transparansi PT PII yang senantiasa berupaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkesinambungan dalam menjalankan bisnis Perusahaan.



Laporan Direksi

MAKRO EKONOMI 2019

Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan disertai dengan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini relatif tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana perekonomian global dihadapkan pada gejala ketidakpastian yang ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Bank Indonesia mencatat bahwa terdapat sejumlah perkembangan positif terkait dengan perundingan untuk mengakhiri perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok serta kejelasan proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), meskipun sejumlah risiko geopolitik masih berlanjut. Kesepakatan tahap I perundingan perdagangan AS-Tiongkok sempat menurunkan ketidakpastian global dan meningkatkan optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Sejumlah indikator dini ekonomi global seperti keyakinan pelaku ekonomi, *Purchasing Manager Index* (PMI) dan pesanan ekspor menunjukkan perbaikan pada Desember 2019-Januari 2020.

Meski demikian, proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) merebak akhir Januari 2020. Covid-19 diprediksi akan menekan perekonomian Tiongkok dan menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global. Di pasar keuangan global, merebaknya wabah Covid-19 yang menjadi pandemi global akan meningkatkan risiko sehingga mendorong aliran dana investasi global dari negara berkembang kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman (*safe haven*), serta memberikan tekanan kepada mata uang negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah risiko tertundanya prospek pemulihan perekonomian dunia. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,02%, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2018 sebesar 5,17% namun merupakan pencapaian yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara G-20 lainnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang permintaan domestik yang terjaga, sedangkan kinerja ekspor menurun sejalan pengaruh perlambatan permintaan global dan penurunan harga komoditas.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali sesuai nilai fundamentalnya sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Inflasi tetap terkendali pada level

yang rendah sebesar 2,72% dan mendukung stabilitas perekonomian. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan terus menjadi perhatian. Kemudian, menjelang akhir tahun 2019, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 5,00%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 5,75%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prediksi inflasi yang terkendali, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat. Upaya ini mampu menjaga kecukupan likuiditas, khususnya di pergantian tahun, dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

Ekonomi dalam negeri yang terjaga menjadi momentum pembangunan infrastruktur. Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan proyek infrastruktur yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan perlu adanya perbaikan-perbaikan serta pembangunan infrastruktur baru guna menunjang kehidupan bermasyarakat. Proyek infrastruktur yang banyak tentunya membutuhkan sumber pendanaan yang sangat besar. Keterbatasan pemerintah dalam mendanai proyek infrastruktur menyebabkan perlu adanya pola kerjasama yang dibuat dalam rangka mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana yang menjadi dalam bagian RPJMN 2020-2024.

Sesuai dengan PP No. 35 tahun 2009 (yang kemudian diubah dengan PP No. 50 tahun 2016) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN dan *Special Mission Vehicles* (SMV) di bawah naungan Kementerian Keuangan didirikan guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) melalui penyediaan jaminan pemerintah atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah untuk proyek infrastruktur berskema KPBU.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

Kebijakan Strategis

Sebagai BUMN dan *Special Mission Vehicles* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, Perseroan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian

jaminan bagi proyek infrastruktur berskema KPBU. Melalui perluasan mandat usaha dan pelaksanaan tugas dari fungsi-fungsi tersebut, Perseroan berperan aktif mendukung rencana strategis Pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui percepatan penyediaan infrastruktur untuk masyarakat.

Pada tahun 2019, PT PII kembali menekankan kepada mandat dan dua fungsi pokok PT PII sebagai *fiscal tools* dan Perseroan Terbatas. Mandat dan fungsi utama ini mendorong PT PII untuk fokus pada penguatan bisnis penjaminan dan membangun skema penjaminan kredibel guna mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dalam melakukan percepatan pemberian penjaminan pada proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di bidang infrastruktur, tahun 2019 menjadi momentum bagi PT PII untuk terus membangun *pipeline* proyek infrastruktur yang berkelanjutan dengan berperan secara aktif dalam penyiapan dan pendampingan transaksi proyek. Di tahun ini, PT PII juga senantiasa berupaya memperkuat bisnis penjaminan baik KPBU maupun Non KPBU serta terus memperkuat peran PT PII sebagai *sovereign risk manager*, khususnya melalui pemantauan risiko penjaminan yang kuat. Pelaksanaan strategi tersebut tidak lepas dari upaya PT PII untuk terus melanjutkan praktik tata kelola yang baik serta membangun organisasi yang bersih dan bermartabat.

Pada tahun 2019, sebagaimana telah direncanakan, kami tetap fokus kepada pemrosesan proyek-proyek baru dari tahapan awal yakni *screening* dan *consultation & guidance* serta memperkuat segmen usaha penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang diharapkan dapat menghasilkan banyak proyek ke depannya. Selain kegiatan penjaminan, kami secara aktif mengembangkan potensi kegiatan usaha selain dari mandat utama yang berupa penjaminan pada proyek infrastruktur, yaitu memberi masukan secara aktif kepada regulator dan melakukan tindak lanjut korporasi dalam menyikapi perubahan-perubahan yang diperlukan. Kami juga terus memperkuat penerapan kebijakan dukungan/pendampingan proyek yang telah dimulai sejak tahun sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas proyek infrastruktur Pemerintah untuk ditransaksikan dengan skema KPBU.

Dalam rangka meraih potensi bisnis, pada tahun 2019 kami menjalankan sejumlah strategi yang didasarkan pada pengalaman PT PII meliputi pelaksanaan *pipeline* yang berkelanjutan, penguatan bisnis penjaminan, pengelolaan risiko pemerintah, serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

1. Pelaksanaan *pipeline* proyek yang berkelanjutan dan penguatan bisnis penjaminan

Perseroan menargetkan perluasan cakupan sektor proyek yang dijamin sehingga portofolio proyek penjaminan dapat lebih beragam dengan berfokus pada penguatan bisnis penjaminan baik penjaminan proyek KPBU maupun penjaminan pinjaman langsung serta membangun skema penjaminan kredibel demi mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain itu, kami juga berupaya untuk memastikan adanya kesinambungan *pipeline* yang dilakukan antara lain melalui peran yang lebih aktif dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang diharapkan dapat membawa PT PII bergerak ke hulu pada sektor prioritas sehingga dapat memastikan kesinambungan proyek yang akan dijamin PT PII.

Sampai dengan akhir tahun 2019, upaya kami dalam melakukan penguatan bisnis berhasil mencapai beberapa hal sebagai berikut:

- Penerimaan penugasan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi untuk 6 (enam) proyek, di sektor jalan, perhubungan dan kesehatan.
- Penjaminan untuk 22 (dua puluh dua) proyek infrastruktur, terdiri dari 20 (dua puluh) penjaminan proyek KPBU dan 2 (dua) penjaminan pinjaman langsung.
- Dalam rangka peningkatan kapasitas *stakeholder* tentang skema KPBU, Pelaksanaan program-program IIGF Institute dalam mendukung bisnis PT PII melalui:
 - a. Pembuatan jurnal infrastruktur berisikan hasil riset dan kebijakan mengenai pengembangan infrastruktur berskema KPBU
 - b. Pelaksanaan riset berbasis sektor KPBU seperti pembuatan studi pendahuluan sektor-sektor penjaminan yang baru.
 - c. Pengembangan sistem *E-learning* untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, efektivitas, efisiensi biaya dan fleksibilitas serta mengembangkan standar kompetensi



Laporan Direksi

KPBU yang materi pembelajarannya diperkaya dengan berbagai sumber pembelajaran multimedia yang dapat diperbaharui oleh pengajar serta diakses kapan dan dimana saja.

- d. Peningkatan pengetahuan terkait ekosistem KPBU, melalui pelaksanaan *capacity building* bagi para pemangku kepentingan dimana IIGF Institute telah menyelenggarakan 25 *capacity building* selama tahun 2019.
- Pengembangan standar kompetensi KPBU berupa sertifikasi KPBU standar internasional, yaitu *Certification PPP Profesional* (CP3P) yang di tahun 2019 telah berkembang menjadi CP3P *Accredited Training Organization* (ATO) untuk level foundation.
- Bekerjasama dengan Kantor Bersama KPBU (PPP Office) yang beranggotakan 7 Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan KPBU di tingkat pemerintah pusat.

2. Pengelolaan Risiko Pemerintah (*Sovereign Risk Management*)

Perseroan juga telah mengelola risiko-risiko pemerintah melalui pemantauan risiko-risiko proyek penjaminan yang mencapai 94,39% risiko aman dari total 107 risiko yang dijamin oleh Perseroan dimana tidak terdapat klaim penjaminan sepanjang tahun 2019.

3. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Governance*)

Perseroan telah secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas tata kelola Perseroan selama tahun 2019 sebagaimana tercermin dalam perolehan skor *assessment* atas penerapan GCG oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni 89,082 ("Sangat Baik") serta Peningkatan Perseroan yang telah mencapai AAA untuk nasional dan BBB untuk internasional (*sovereign rating*) dari Lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating.

3. Implementasi Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah mengimplementasikan *integrated IT Platform support* dimana dalam era digitalisasi dan teknologi serta perkembangan kebutuhan Perusahaan saat ini, teknologi informasi diharapkan dapat mendukung bisnis Perusahaan ke depannya

sebagai pelaksanaan mandat dan operasional Perusahaan yang lebih efisien dan efektif.

Pencapaian Kinerja 2019

Pada tahun 2019, PT PII menandatangani 4 (empat) Perjanjian Penjaminan atas, dimana 1 (satu) di antaranya adalah penjaminan atas pinjaman langsung. Keempat proyek tersebut adalah Proyek KPBU Kereta Api Makassar-Parepare, Satelit Multifungsi Pemerintah, Jalan Tol Semarang-Demak dan jaminan pemerintah atas pinjaman langsung kepada PT PLN (Persero) untuk Proyek *Hydropower Programme*

Selain itu, terdapat 5 (lima) proyek yang penjaminannya berlaku efektif di tahun 2019 yakni Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Proyek SPAM Semarang Barat, Proyek Jalan Tol Cikampek II Selatan, serta Proyek *Hydropower Programme*.

Hingga akhir tahun 2019, PT PII telah melaksanakan mandat yang diberikan, dengan memberikan penjaminan untuk 22 proyek infrastruktur di berbagai sektor yakni sektor ketenagalistrikan, telekomunikasi, air minum, jalan tol, transportasi dan pariwisata dengan total nilai investasi mencapai Rp212,4 triliun. Dari seluruh proyek tersebut, 18 (delapan belas) proyek di antaranya telah efektif dijamin.

Dengan nilai proyek-proyek yang dijamin mencapai Rp212,4 triliun, maka pemanfaatan (*leveraging*) Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada PT PII hingga akhir tahun 2019 telah mencapai 26,5 kali, berdasarkan nilai PMN sebesar Rp8 triliun. Sedangkan dari aspek kapasitas penjaminan, dengan ekuitas sebesar Rp10,97 triliun, *gearing ratio* Perseroan berada pada 5,1x berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas proyek yang dijamin sebesar Rp55,7 triliun.

Di sisi lain, sampai dengan tahun 2019 kami juga telah menerima penugasan dari Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi atau *Project Development Facility* (PDF) untuk 6 (enam) proyek infrastruktur KPBU yang dikembangkan oleh 4 (empat) Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yakni meliputi Proyek Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Sumatera Selatan dan Proyek Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Riau (PJPK Kementerian PUPR), Proyek Kereta Api Makassar-Parepare dan Proyek *Proving Ground*, Bekasi (PJPK Kementerian Perhubungan), Proyek RS Kanker

Dharmais (PJPK Kementerian Kesehatan), dan Proyek RSUD Zainoel Abidin (PJPK Pemprov NAD Aceh).

Berbagai penerapan kebijakan strategis dan pencapaian operasional telah memberikan pengaruh terhadap kinerja laba rugi Perseroan. Di tahun 2019, untuk pertama kalinya kami berhasil mencatatkan Pendapatan Usaha di atas Rp1 triliun yakni sejumlah Rp1.008,03 miliar, naik secara signifikan sebesar 20,83% atau sebesar Rp173,78 miliar dibanding pendapatan usaha di tahun 2018. Pendapatan Usaha Perseroan terdiri dari Pendapatan Penjaminan sebesar Rp104,04 miliar, Pendapatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF) sebesar Rp28,13 miliar dan Pendapatan Pengelolaan Dana sebesar Rp876 miliar.

Sedangkan Beban Usaha tercatat sebesar Rp413,63 miliar sehingga menghasilkan tingkat rasio BOPO sebesar 25% dan Margin Laba Bersih sebesar 53%. Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan tersebut sebagai hasil pendapatan pengelolaan dana, peningkatan kegiatan usaha penjaminan proyek dan pendampingan transaksi KPBU serta penjaminan pinjaman langsung. Pencapaian ini memberikan pengaruh pada keberhasilan Perseroan untuk mencatatkan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp529,42 miliar.

Dari sisi posisi keuangan, Perseroan kembali berhasil mencatatkan pertumbuhan aset mencapai 4,62% atau sebesar Rp490,32 miliar menjadi Rp11.111,24 miliar pada tahun 2019, dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp10.620,92 miliar. Secara umum peningkatan total aset Perseroan dipengaruhi oleh tingginya pendapatan dari hasil pengelolaan dana.

Komposisi portofolio investasi merupakan komponen terbesar dalam aset, yaitu mencapai 97,93%. Piutang usaha merupakan komponen terbesar kedua dengan porsi 1,02% dari total aset. Sementara dari sisi pertumbuhan, komponen investasi mengalami pertumbuhan yang tertinggi dibandingkan seluruh komponen aset, dengan kenaikan 25,46% atau Rp2.207,99 miliar dibandingkan tahun 2018 yang diikuti oleh pertumbuhan piutang usaha.

Posisi ekuitas Perseroan mencapai Rp10.971,78 miliar, tumbuh 4,69% atau sebesar Rp491,11 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp10.480,67 miliar. Komponen terbesar dari ekuitas adalah modal saham yang mencapai Rp8.000,00 miliar atau 72,91% dari total ekuitas.

Perbandingan antara Target dan Realisasi

Selain pencapaian kinerja yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat kami sampaikan pencapaian kinerja Perseroan berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi juga sangat baik. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019, Perseroan berhasil meraih pendapatan mencapai 96,87% dari target yang sebesar Rp1.040,62 miliar, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.008,03 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan mampu mencapai 113,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp524,15 miliar, dengan realisasi pencapaian sebesar Rp594,40 miliar. Sedangkan laba tahun berjalan pada tahun 2019 mencapai 104,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp504,78 miliar dengan pencapaian sebesar Rp529,42 miliar.

Dari sisi posisi keuangan, Perseroan mencatatkan pencapaian total aset sebesar 101,39% dengan realisasi sebesar Rp11.111,24 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.958,68 miliar. Pencapaian kinerja yang baik juga terlihat dari pencapaian Perseroan terhadap ekuitas yang mencapai 101,09% dari yang ditargetkan sebesar Rp10.853,37 miliar, dengan pencapaian pada tahun buku sebesar Rp10.971,78 miliar.

Tantangan dan Antisipasinya

Kami menyadari sepenuhnya bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2019. Dari sisi makroekonomi dalam negeri, penurunan suku bunga acuan (BI 7 Day Repo Rate) berdampak pada pengelolaan dana investasi Perseroan. Kemudian, dari sisi operasional proyek, perubahan atau pergantian pejabat PJPK selama proses penjaminan proyek, pemenuhan standar kelayakan pada proses penilaian proyek potensial, dinamika pada proses persetujuan proyek di tingkat pemerintah daerah provinsi atau kabupaten, serta tantangan lainnya yang berpotensi membawa dampak tidak tercapainya tahapan proyek penjaminan yang diharapkan.

Proses bisnis dan proyek Perseroan melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal mulai dari Kementerian, Lembaga ataupun BUMN/BUMD. Dengan demikian, keberhasilan kami dalam menjalankan kegiatan bisnis sangat bergantung pada dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Mengantisipasi hal ini, kami mengoptimalkan peran sebagai fasilitator dari pemangku kepentingan terkait serta menengahi berbagai isu yang ada selama proyek berlangsung



Laporan Direksi

guna melancarkan proses proyek. Kami juga terus melakukan pendampingan serta *capacity building* untuk memberikan pemahaman dan mendapatkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

Di samping itu, kami juga dihadapkan pada tantangan kapasitas dan kecukupan modal untuk memastikan bahwa PT PII dapat menjalankan mandat sebagai penjamin proyek infrastruktur. Oleh sebab itu PT PII juga melaksanakan penjaminan bersama dengan Kementerian Keuangan serta berupaya untuk terus memperkuat kerja sama dan hubungan dengan lembaga multilateral sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan PT PII.

Untuk itu, mengantisipasi tantangan yang ada, perbaikan dan perubahan lingkungan internal dalam rangka perbaikan berkelanjutan senantiasa dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja dari berbagai aspek. Pengalaman dan pengetahuan kami selama satu dekade berdiri, menjadi bekal bagi PT PII untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur nasional. Kami optimis bahwa prospek bisnis Perseroan pada masa mendatang akan semakin baik dan pencapaian kinerja yang semakin bertumbuh dapat diraih, serta mampu menangkap berbagai peluang maupun beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks pada masa mendatang.

KINERJA PENDUKUNG BISNIS

Sumber Daya Manusia

Kami sepenuhnya menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu keunggulan kompetitif dalam mendukung tercapainya kesuksesan Perusahaan. Oleh karena itu, PT PII menjalankan strategi dan pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan strategi Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta kompetensi yang dibutuhkan pada saat ini maupun masa yang akan datang. PT PII meyakini bahwa SDM yang andal dan mumpuni mampu memberikan kontribusi penting bagi kinerja dan kesinambungan Perseroan. Kehadiran SDM yang profesional dan kompeten akan membuat Perseroan mampu mewujudkan visi dan misi serta rencana kerja berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan SDM di lingkungan PII berada di bawah Divisi Human Capital. Divisi ini melakukan penyempurnaan kebijakan secara berkala dan

optimalisasi pelaksanaan praktik ketenagakerjaan sepanjang siklus kepegawaian. Kesadaran tersebut dilandasi atas pemahaman bahwa kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM akan menentukan masa depan Perseroan.

Menyadari pentingnya pengelolaan SDM, pada awal tahun 2019, Perseroan melakukan internalisasi nilai budaya Perusahaan yang dikenal sebagai InTIME melalui program budaya. Program budaya merupakan keberlanjutan dari program revitalisasi budaya sehingga dapat terinternalisasi dengan baik dan positif. Program tersebut juga menjadi bagian dari perilaku seluruh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari serta menjadi bagian dari pembentukan diri yang berkarakter profesional secara berkesinambungan dan konsisten. Internalisasi nilai budaya Perusahaan dilakukan oleh setiap Direktorat yang ada di PT PII di bawah koordinasi Divisi Human Capital. Divisi Human Capital membentuk tim Internalisasi Budaya yang terdiri dari *Change Leader*, *Change Champion* dan *Change Agent* yang berperan dalam menyusun program-program budaya dan mengimplementasikannya ke dalam perbaikan-perbaikan proses bisnis dan bekerja secara internal.

PT PII juga terus mengembangkan potensi karyawan sebagai bagian dari strategi dan upaya untuk mencapai target usaha yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, sebanyak 115 karyawan telah mengikuti pelatihan baik pelatihan yang terkait dengan pengembangan kompetensi teknis maupun *softskill*, melalui pelatihan *in-house training*, *knowledge sharing* dan *public training*. Di samping itu, Perseroan juga melaksanakan program #PIIHealthy2019 sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan karyawan. Program ini terdiri dari penyediaan fasilitas klinik Kesehatan karyawan yang berfungsi sebagai sarana konsultasi Kesehatan serta pemantauan *improvement* Kesehatan karyawan.

Pada tahun 2019, PT PII mulai melaksanakan *review* tengah tahun atas pencapaian kinerja seluruh karyawan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *monitoring* untuk mencapai target kinerja individu, divisi dan korporasi tahun 2019. Perseroan melalui Divisi Human Capital juga tetap berupaya untuk mengimplementasikan budaya *coaching* sebagai salah satu bentuk Pengembangan SDM seperti tahun-tahun sebelumnya. Implementasi budaya *coaching* ini kembali terlaksana pada awal tahun 2019 melalui program pelatihan *coaching* untuk Senior Leader.



Teknologi Informasi

Selain pengelolaan SDM yang tepat, penggunaan teknologi informasi menjadi faktor penting lainnya yang dapat menopang keberlanjutan bisnis Perseroan. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat membawa Perseroan mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodasi perubahan dan tantangan perkembangan usaha. Perseroan terus mengembangkan dan memanfaatkan TI yang tepat guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi serta menjadikan sistem manajemen risiko yang dimiliki berjalan dengan efektif.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai inisiatif di bidang teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis meliputi:

a) *Stakeholder and Project Database:*

Pengembangan dari aplikasi COO *Dashboard* yang berfungsi sebagai integrasi data dan pemutakhiran informasi dari proyek-proyek yang ditangani oleh PT PII dan informasi pemangku kepentingan yang terlibat terhadap proyek-proyek tersebut.

b) *Sistem Informasi Proyek (SIP) KPBU:*

Aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk proses penjarangan proyek KPBU yang potensial berdasarkan informasi awal PJPK dan nilai dari *assessment* sistem tersebut. *Assessment* tersebut juga berfungsi agar PJPK dapat mengetahui sejauh mana kesiapan proyek dan hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan penilaian dan rekomendasi yang diberikan. Aplikasi ini digunakan pada tahap *scanning* dan *screening* proyek membantu dalam memilih dan melihat kesiapan calon proyek untuk skema KPBU.

c) *E-learning:*

Aplikasi yang berfungsi untuk *platform* pembelajaran dalam bentuk *website* yang dimiliki oleh IIGF-Institute dan merupakan adaptasi dari kurikulum *General Active Learning Program* (GALP).

d) *Server Hyperconverged:*

Penambahan kapasitas *server* dan menjadikan *server* lebih *compact* dari yang sebelumnya serta memberikan fleksibilitas lebih baik dari *server* konvensional serta optimalisasi penggunaan program-program aplikasi yang ada.

e) *Billing Monitoring System:*

Aplikasi yang berfungsi sebagai monitor jadwal pembayaran, status pembayaran, dan pembuatan Invoice terkait *fee* proyek yang dijamin oleh PT PII.

f) *Single Sign On:*

Aplikasi sebagai Portal utama karyawan dalam melakukan akses aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh PT PII.

PROSPEK USAHA

Selain kebijakan strategis dan pencapaian kinerja periode 2019, perlu kami sampaikan pula sikap optimis kami bahwa prospek usaha PT PII pada masa-masa mendatang akan semakin baik. Sikap optimis terhadap prospek usaha tersebut dapat dilihat dari dua faktor, yaitu perkembangan makroekonomi dan kondisi lingkungan internal Perseroan.

Perkembangan Makroekonomi 2020 dan Antisipasi Perseroan

Pada masa mendatang, pertumbuhan ekonomi 2020 yang semula diprediksikan sebesar 5,1 – 5,5% sebagai tren pemulihan global, akan dicatat jauh lebih rendah sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan implikasinya. Revisi prediksi ini terutama karena pengaruh jangka pendek tertahannya prospek pemulihan ekonomi dunia pasca meluasnya COVID-19, yang memengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dibutuhkan dalam rangka memperkuat sumber, struktur, dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendorong investasi melalui proyek infrastruktur dan implementasi program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.

Mengantisipasi segala tantangan yang ada, pada tahun 2020, PT PII tetap berfokus dalam membangun *pipeline* proyek yang berkelanjutan, memperkuat bisnis penjaminan baik KPBU dan *direct lending* (pinjaman langsung). Di samping itu, Perseroan juga akan terus memperkuat peran melalui penerapan manajemen risiko penjaminan yang kuat.

Pada masa mendatang, Perseroan menargetkan untuk melakukan perluasan cakupan sektor proyek sehingga portofolio proyek penjaminan dapat lebih beragam. Target proyek penjaminan KPBU yang berproses dan

Laporan Direksi

akan mencapai tahapan penandatanganan perjanjian di tahun 2020 dengan jumlah 6 (enam) proyek yang terdiri dari 2 (dua) proyek di sektor jalan, 2 (dua) proyek di sektor transportasi, 1 (satu) proyek di sektor air minum, dan 1 (satu) proyek di sektor kesehatan. Sedangkan target proyek penjaminan pinjaman langsung yang berproses dan akan mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan di tahun 2020 adalah 2 (dua) proyek dari sektor ketenagalistrikan.

Selain itu, Perseroan juga akan fokus untuk melaksanakan penugasan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi di tahun 2020 dengan jumlah 2 (dua) proyek bergantung pada realisasi penugasan dari Kementerian Keuangan.

Strategi 2020

Selaras dengan Rencana Jangka Panjang 2018-2022, PT PII fokus untuk lebih memantapkan pengembangan bisnis secara menyeluruh tidak hanya pada bidang usaha penjaminan KPBU namun kegiatan usaha di berbagai bidang lainnya, dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan dan pengalaman pada pemrosesan penjaminan yang telah dilakukan. Sehingga, penjaminan untuk pinjaman langsung lebih optimal.

PT PII juga menetapkan strategi untuk tahun 2020 sebagai tahun keberlanjutan proses bisnis untuk terus membangun *pipeline* proyek yang berkesinambungan, memperkuat bisnis penjaminan baik KPBU maupun *direct lending* (pinjaman langsung) serta terus memperkuat peran PT PII sebagai *sovereign risk manager*, khususnya melalui manajemen risiko penjaminan yang kuat. Untuk itu, memasuki dekade kedua keberadaannya PII meluncurkan inisiatif *#jagainfrastruktur*, *#publicriskeducator*, *#developmentriskmanager* dan *#hubinfrastrukturindonesia*

Pada masa mendatang, Perseroan akan menjalankan berbagai kebijakan strategis sebagai berikut:

- 1) Keberlangsungan *pipeline* penjaminan KPBU melalui kesinambungan dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi serta mengupayakan pengembangan ekosistem infrastruktur sebagai bagian dari inisiatif *#jagainfrastruktur*
- 2) Percepatan Kesiapan Proyek dan penguatan kapasitas PJKP melalui Pengembangan Peran dan Cakupan *IIGF Institute* sebagai bagian inisiatif *#publicriskeducator*

- 3) Penguatan Bisnis Penjaminan melalui sinergitas dengan SMV lain dan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari inisiatif *#hubinfrastrukturindonesia*
- 4) Optimalisasi peran manajemen risiko proyek dengan mempertahankan tingkat pengendalian risiko aman, meningkatkan pemanfaatan sistem pemantauan risiko yang dapat diakses oleh *stakeholders* melalui *website* Perseroan, serta berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman *Lenders* akan nilai tambah penjaminan melalui pemantauan risiko yang efektif. Sebagai bagian dari inisiatif *#developmentriskmanager*
- 5) Pengelolaan dana yang pruden dan profesional sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- 6) Menjaga tata kelola, kredibilitas dan reputasi PT PII melalui keterbukaan informasi, transparansi proses, akuntabilitas keuangan dan ketahanan bisnis.
- 7) Pengembangan SDM yang berfokus pada program perencanaan kepemimpinan, regenerasi dan kaderisasi posisi kunci, *engagement* karyawan, internalisasi budaya organisasi serta peningkatan kapasitas individu.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bagi kami, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya merupakan suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Kami memahami bahwa praktik terbaik prinsip-prinsip GCG yang efektif secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan dan mengendalikan Perseroan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta patuh pada norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai Perusahaan yang dijunjung tinggi oleh seluruh jajaran Perusahaan. Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* juga dapat mendorong Perseroan untuk menciptakan nilai bagi Perusahaan (*shareholder value*) secara maksimal.

Prinsip-prinsip GCG menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Dalam praktiknya di lingkungan PT PII, GCG diimplementasikan melalui organ Tata Kelola Perusahaan yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi, serta Organ Tata Kelola Pendukung lainnya.

Dapat kami sampaikan bahwa sepanjang tahun 2019, wujud implementasi penguatan penerapan GCG yang telah dilakukan Perseroan, antara lain, melalui:

1. Evaluasi atas *soft structure* GCG sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis;
2. Pembaharuan Pedoman dan kebijakan internal terkait penerapan GCG;
3. Membangun kesadaran dan meningkatkan pemahaman Insan Perusahaan terhadap praktik *Governance, Risk and Compliance* (GRC) melalui forum diskusi dan sosialisasi.

Dalam hal penerapan manajemen risiko, Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan, *Risk Management* dan Internal Audit senantiasa bekerjasama dengan Organ Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan GRC yang terintegrasi dan efektif untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, di tahun 2019, salah satu aktivitas utama penerapan manajemen risiko PT PII di antaranya melakukan kegiatan untuk meningkatkan *awareness* manajemen risiko secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan dengan menyelenggarakan Forum *Governance Risk and Compliance*.

PT PII memberikan gambaran mengenai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC) di dalam Perusahaan yang telah berjalan dan ditingkatkan secara berkesinambungan. PT PII berperan sebagai pihak penjamin risiko serta mengembangkan tata kelola dan transparansi di dalam ekosistem proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan juga manfaat secara ekonomi dan sosial atas proyek-proyek yang diberikan penjaminan oleh PT PII. Selain itu, peran PT PII secara rutin mengadakan pengembangan kapasitas (*capacity building*) kepada pemerintah baik pusat dan daerah tentang bagaimana pemerintah dalam mengembangkan proyek infrastruktur, dapat mengelola dan menjaga risiko secara lebih efektif.

Upaya kami dalam melakukan penguatan penerapan GCG dan GRC juga tercermin dalam meningkatnya skor *assessment* GCG dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, skor *assessment* BPKP terhadap penerapan GCG PT PII adalah 89,082 ("Sangat Baik"), meningkat dari tahun 2018 sebesar 86,7 ("Sangat Baik"). Sepanjang tahun 2019, PT PII juga meraih apresiasi dari pihak eksternal berupa penghargaan dari berbagai *event* baik di tingkat nasional dan internasional di bidang GRC sebagai hasil dari peningkatan penerapan GRC PT PII. Penghargaan yang berhasil diraih Perseroan meliputi *Top Governance, Risk & Compliance* (GRC)

dan *Most Committed Leader* pada ajang *Award 2019*; *3rd Winner* Kategori BUMN Keuangan Non-Listed, pada acara *Annual Report Award 2019*; serta meraih *1st Winner Public Initiative, Public Educator*, dan *Public Risk* pada acara *ASEAN Risk Award 2019*.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PT PII sebagai entitas bisnis mengemban tugas moral untuk mengembangkan kegiatan usaha pada saat yang sama turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian dalam negeri. Perseroan juga senantiasa melayani seluruh pemangku kepentingan dengan penuh integritas, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Pertumbuhan usaha yang diraih PII selama ini juga tak lepas dari peran serta masyarakat umum. Untuk itu, Perseroan pun memberikan perhatian terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat.

Melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*), Perseroan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat dan lingkungan. Program dan kegiatan CSR Perseroan diselenggarakan dengan senantiasa bertujuan untuk memberikan manfaat luas terhadap masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Bagi kami, pelaksanaan CSR merupakan bentuk kepedulian secara berkelanjutan dari Perseroan terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja, melindungi kepentingan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

Perseroan menyadari peran penting untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Karena itu, Perseroan akan terus berusaha untuk memahami kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda, dengan tetap memperhatikan dampak dari operasional bisnis. Selain itu, Perseroan secara berkala akan melakukan



Laporan Direksi



M. Wahid Sutopo
Direktur Utama

Salusra Satria
Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek

evaluasi terhadap kebijakan atas proses keberlanjutan di dalam operasional bisnis Perusahaan dan perilaku investasi sehingga dapat mengelola risiko secara tepat, termasuk berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di tempat Perseroan menjalankan dan mengelola proyek infrastruktur.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah merealisasikan anggaran kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar Rp1,735 miliar yang disalurkan pada tempat utamanya dimana proyek-proyek dan lokasi usaha Perseroan berada. Implementasi program CSR mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor SK-003/BOD/CSC/0518 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

PT PII melaksanakan CSR dengan merujuk pada empat pilar utama kegiatan yang menjadi target penting dalam aktivitas CSR Perseroan, yaitu: Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sosial dan Budaya, serta Lingkungan. Selain itu, di luar Empat Pilar Utama tersebut, PT PII juga melaksanakan program-program CSR lain seperti donasi dan partisipasi *sponsorship*. Hal ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menjaga *relation* dan *engagement* dengan masyarakat, lingkungan maupun para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan CSR Perseroan pada aspek sosial kemasyarakatan diarahkan pada program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar Perseroan

berkegiatan. Pada tahun 2019, Perseroan telah menjalankan kegiatan CSR yang berkaitan dengan bidang sosial kemasyarakatan di sekitar lingkungan Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang menasar kepada ibu-ibu rumah tangga dan mempunyai dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat setempat.

Dalam bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, PT PII telah melaksanakan kegiatan dalam Program Membuat Eco Brick dengan melibatkan target peserta sebanyak 1.000 (seribu) pelajar SD yang tersebar pada 3 (tiga) sekolah di Jakarta Selatan dengan tujuan mendidik anak-anak peserta Sekolah Dasar (SD) menanamkan kebiasaan baik mencintai lingkungan dimulai usia dini serta memberikan edukasi tentang lingkungan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan

salah satu solusinya mengurangi sampah plastik, yaitu dengan mengolah limbah plastik menjadi *ecobrick* sekaligus mengurangi risiko bencana.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN KOMISARIS

Pada tahun buku 2019, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Perseroan menerima pengunduran diri Armand Hermawan setelah mengabdikan selama 10 tahun di Perseroan untuk mengabdikan diri dan berkarir di tempat lain. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras yang diberikan selama ini.

Sehingga komposisi anggota Direksi pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Nomor SK
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	Keputusan Menteri Keuangan 890/KMK.06/2019
Salusra Satria	Direktur	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.06/2017

APRESIASI DAN PENUTUP

Sebagai rangkaian kata penutup, kami atas nama seluruh jajaran Direksi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami sepanjang tahun 2019. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas segala nasihat dan saran yang diberikan kepada Direksi. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh pelanggan dan mitra usaha, atas dukungan, kepercayaan dan kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh karyawan yang telah berkarya dengan penuh dedikasi dan

kecintaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mendukung upaya untuk mewujudkan Visi, Misi dan Target Perseroan secara bahu membahu tanpa mengenal lelah.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan segenap pihak lainnya yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu, yang senantiasa telah menjalin kerjasama terbaik sehingga Perseroan dapat mencapai berbagai target peningkatan usaha dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Memasuki dekade kedua PT PII, melalui mandat yang dipercayakan oleh Pemegang Saham, kami optimis dapat berkontribusi lebih untuk pembangunan dan kemajuan bangsa.

Jakarta, 31 Desember 2019


M. Wahid Sutopo
 Direktur Utama



Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019

Statement of Accountability for the 2019 Annual Report

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2019 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Jakarta, 16 Maret 2020

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

Ayu Sukorini*

Komisaris Utama
President Commissioner

M. Rahman Ritza*

Komisaris
Commissioner

Mariatul Aini

Komisaris
Commissioner

*) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 402/KMK.06/2017
based on the Decree of the Minister of Finance Number 402/KMK.06/2017

Statement of Accountability of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2019 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in the 2019 Annual Report of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) has been presented in full and shall be fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Jakarta, 16th March 2020

DIREKSI Board of Directors



M. Wahid Sutopo

Direktur Utama
President Director



Salusra Satria

Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek
Finance and Project Assessment Executive Director



03



Profil Perusahaan



52	Identitas Perusahaan
54	Riwayat Singkat Perusahaan
56	Satu Dasawarsa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
66	Bidang Usaha
68	Struktur Organisasi
70	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
72	Brand Perusahaan
74	Profil Dewan Komisaris
77	Profil Direksi
79	Profil Pejabat Eksekutif



- 80 Data Jumlah Karyawan dan Pengembangan Kompetensi
- 82 Komposisi Pemegang Saham
- 83 Struktur Grup
- 83 Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- 83 Kronologi Penerbitan Saham
- 83 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
- 84 Nama dan Alamat Lembaga Profesi dan Penunjang Perusahaan

- 85 Penghargaan dan Sertifikasi
- 86 Informasi *Website* Perusahaan
- 88 Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal
- 91 Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Kantor Cabang dan Perwakilan Luar Negeri Serta Kantor Wilayah Kantor Cabang, *Sub Branch*, Perwakilan Luar Negeri dan Kantor Wilayah

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

Nama Panggilan

PT PII



Perubahan Nama

Hingga periode 31 Desember 2019, Perusahaan tidak mengalami perubahan nama.



Bidang Usaha

Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur



Tanggal Pendirian

30 Desember 2009



Anggaran Dasar dan Perubahan

- Akta Pendirian oleh Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH. LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009.
- Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dirubah dengan Akta No. 8 tanggal 5 Desember 2019 oleh Notaris Arry Supratno, S.H.



Komposisi Pemegang Saham

100% milik Negara Republik Indonesia, dengan demikian PT PII:

- Tidak menerbitkan warkat saham
- Tidak memiliki kebijakan ESOP



Status Perusahaan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan



Modal Dasar

Rp9.000.000.000.000, terdiri dari 9.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp8.000.000.000.000, terdiri dari 8.000.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000 per lembar saham



Total Aset 2019

Rp11,11 triliun



Alamat Kantor Pusat

Capital Place, Lt 7 & 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia
Telp. 021-5795 0550, Fax. 021-5795 0040



E-mail Perusahaan

info@iigf.co.id



Website Perusahaan

<https://www.ptpii.co.id>



Menu Website Perusahaan

Berisikan antara lain:

- Profil Perusahaan
- Profil Dewan Komisaris dan Direksi
- Model Bisnis dan Layanan Perusahaan
- Struktur Pemegang Saham
- Laporan Tahunan 5 Tahun Terakhir
- Dokumen *Good Corporate Governance*



Riwayat Singkat Perusahaan

Sejak awal pendiriannya, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) didesain untuk meningkatkan jembatan kerjasama publik – privat dalam infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menuju dekade kedua sejak didirikan, peran PT PII untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur semakin besar, dengan diperluasnya mandat untuk menjamin proyek non-KPBU serta pendampingan proyek, mulai dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Infrastruktur merupakan pondasi kemajuan bangsa. Perbaikan infrastruktur lama dan pembangunan infrastruktur baru diperlukan untuk memacu peningkatan dan kesinambungan kinerja ekonomi nasional yang berujung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Ditengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah menjawab tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan membuka ruang bagi swasta untuk turut berkontribusi mengejar percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Untuk mendukung berjalannya KPBU di Indonesia, pada 30 Desember 2009 Pemerintah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/"PT PII", yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan sebagai layanan satu pelaksana (*single window*) dalam mengevaluasi, menyusun struktur penjaminan serta pemberian jaminan bagi proyek infrastruktur berskema KPBU. Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur. Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengalangan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Penjaminan infrastruktur melalui PT PII merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah untuk memberikan kepastian kepada swasta terkait komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam perjanjian KPBU. Kehadiran PT PII diharapkan mampu meningkatkan kepastian dalam perolehan pembiayaan (*financial close*) proyek melalui peningkatan kelayakan kredit atau *bankability* dari proyek-proyek KPBU, dengan tetap menjaga kepentingan Pemerintah, utamanya terkait kewajiban kontingensi yang mungkin timbul kepada Pemerintah.

PT PII dirancang untuk menjadi lembaga penjaminan yang kredibel. Hal ini dilakukan melalui tata kelola perusahaan yang baik, didukung dengan transparansi, profesionalisme dan independensi yang tinggi. Untuk menjalankan fungsi penjaminan sebagai bidang usaha utama, hingga saat ini, Pemerintah telah melakukan penyertaan modal dari APBN ke PT PII sebesar Rp8 triliun. PT PII secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan akan meningkatkan kapasitas penjaminannya melalui kerja sama dengan berbagai institusi keuangan, baik institusi multilateral (Bank Dunia, ADB, IDB, MIGA), institusi bilateral, dan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009, PT PII mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan atas proyek Non KPBU. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2018 tentang Tata Cara



Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.

Selain itu, sejak 2018 PT PII juga mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan dalam melakukan pendampingan atas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek infrastruktur dengan skema KPBU yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan tidak lagi terbatas pada penjaminan, tetapi juga melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Sebagai realisasi dari mandat tersebut, hingga tahun 2019, PT PII telah melaksanakan penjaminan atas 20 (dua puluh) proyek infrastruktur skema KPBU dan 2 (dua) proyek infrastruktur skema Non KPBU yang terdiri dari berbagai sektor, antara lain 11 proyek

sektor jalan, 4 proyek sektor telekomunikasi dan informatika, 3 proyek sektor air minum, 1 proyek sektor transportasi, 2 proyek sektor ketenagalistrikan, dan 1 proyek sektor pariwisata dengan total nilai investasi lebih dari Rp200 triliun. Penjaminan PT PII tidak hanya diberikan untuk proyek yang memiliki nilai komersial tinggi namun juga proyek dengan kelayakan marginal namun memiliki manfaat sosial ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dari sisi penyiapan, PT PII telah mendapatkan penugasan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi untuk 6 (enam) proyek yang meliputi sektor jalan, transportasi dan kesehatan.

Selain pelaksanaan mandat-mandat tersebut, PT PII juga terus berupaya untuk membangun ekosistem dan pemahaman terkait pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia sehingga PT PII dapat mewujudkan visinya untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Satu Dasawarsa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)



2009

Pembentukan PT PII

Pada tanggal 30 Desember 2009, Pemerintah Indonesia mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia sebesar Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur.

2010

Peresmian

Operasional PT PII

Pada tanggal 11 Mei 2010, PT PII secara resmi mulai beroperasi sesuai mandatnya untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur berskema KPBU sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Perpres

No. 78/2010 dan PMK 260/2010

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 78/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Peraturan Presiden ini mengokohkan keberadaan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan menandakan dimulainya era baru proses penjaminan infrastruktur Indonesia.

Untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, yang menjadi pedoman PT PII selaku BUPI untuk menjamin proyek infrastruktur.



2011

MoU

antara PT PII dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Pada tanggal 24 Januari 2011, PT PII menandatangani MOU bersama Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) untuk mempromosikan investasi infrastruktur melalui berbagai kegiatan bersama. MIGA merupakan grup Bank Dunia yang memberikan jaminan investasi terhadap risiko non-komersial bagi negara anggota MIGA yang melakukan investasi di negara berkembang anggota MIGA.



Acuan Alokasi Risiko

Pada tanggal 31 Maret 2011, PT PII menerbitkan dokumen Acuan Alokasi Risiko yang berisi acuan mengenai kategori dan distribusi risiko infrastruktur yang akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Bersamaan dengan itu, PT PII juga meluncurkan Panduan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan ilustrasi langkah-langkah dalam proses pemberian penjaminan infrastruktur oleh PT PII.

Penandatanganan

Penjaminan Proyek PLTU Jawa Tengah

Tanggal 6 Oktober 2011, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah. Proyek ini merupakan proyek dengan skema KPBU pertama yang berhasil diwujudkan oleh Pemerintah menggunakan fasilitas penjaminan bersama oleh PT PII dan Kementerian Keuangan RI.

Satu Dasawarsa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

2012

Penandatanganan

Nota Kesepahaman antara PT PII dengan ICIEC

Pada tanggal 20 April 2012, PT PII dan Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credits (ICIEC) telah menandatangani Nota Kesepahaman bersamaan dalam acara Asia Finance and Risk Mitigation Forum 2012 di Makati City, Filipina.



IIGF Institute

Soft launching IIGF Institute dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PII dengan tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada tentang program peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan terhadap penyediaan infrastruktur.

Penambahan Modal Disetor

Perusahaan telah menerima PMN sebesar Rp1 triliun pada tanggal 17 Desember 2012 sehingga total kapasitas penjaminan PT PII menjadi Rp4,5 triliun.

2013

Peningkatan

Kapasitas Penjaminan dan Pengakuan Peringkat Kredit



Pada awal tahun 2013 Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman dari World Bank Loan senilai USD 25 juta dan implementasi *Co-guarantee* dengan MIGA senilai USD50 juta untuk peningkatan kapasitas penjaminan serta mendapatkan Peringkat Kredit. Perseroan mendapatkan peringkat kredit BBB- (*outlook* stabil) dari Fitch Rating, lembaga pemeringkat keuangan internasional, setara dengan peringkat Pemerintah Indonesia yang menunjukkan pengakuan atas kapasitas dan kinerja keuangan Perseroan.

Indonesia

Infrastructure Roundtable II (IRR)

Pada tanggal 28 Februari 2013, IIGF Institute Bersama dengan UI, ITB dan UGM menyelenggarakan Indonesia Infrastructure Roundtable II dengan topik 'Investasi Sektor Swasta pada Bidang Air Minum di Kabupaten Tangerang'.



2014

*Kerja sama***dengan Universitas Sriwijaya
dan Hasanuddin**

PT PII melalui IIGF Institute menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sriwijaya (18 Agustus 2014) dan Universitas Hasanuddin (17 Oktober 2014) untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kemitraan dalam bina lingkungan, sosial dan masyarakat.

*Seminar***Nasional Infrastruktur
Untuk Rakyat**

PT PII, bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan seminar nasional bertema "Infrastruktur untuk Rakyat, Kembalinya Peran Negara dalam Penyediaan Infrastruktur Dasar" sebagai bentuk sosialisasi hasil acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) tahun 2013-2014 yang disponsori oleh PT PII.

2015

*Terbitnya***Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2015**

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur memperluas sektor proyek infrastruktur berskema KPBU yang dapat dijamin PT PII menjadi 19 sektor termasuk sektor infrastruktur sosial.

PLTU *Batang***Jawa Tengah (CJPP)**

Pada 28 Agustus 2015, dilaksanakan acara peletakan batu pertama untuk pembangunan proyek PLTU Jawa Tengah-Batang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, PT PLN, PT PII dan investor pengembang. Proyek ini merupakan proyek KPBU sektor listrik pertama yang akan memperoleh penjaminan dari PT PII.



Satu Dasawarsa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

2015



Penerbitan

Pernyataan Kesediaan Penjaminan untuk Proyek SPAM Umbulan

PT PII menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan/*In Principle Approval* (IPA) untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 29 September 2015.

Penerbitan

Pernyataan Kesediaan Penjaminan untuk Proyek Palapa Ring

PT PII menerbitkan Pernyataan Kesediaan Penjaminan/*In Principle Approval* (IPA) untuk proyek telekomunikasi Palapa Ring yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 20 November 2015.

Pembentukan UNIID

PT PII melalui IIGF Institute memfasilitasi pembentukan Jaringan Kerja antar Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Infrastruktur atau *University Network for Indonesia Infrastructure Development* (UNIID) pada 16 Desember 2015 sebagai forum para akademisi untuk berkontribusi mendorong pengembangan infrastruktur nasional.

Peluncuran

Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII)

Tanggal 17 Desember 2015, PT PII bersama para ahli di bidang infrastruktur meresmikan Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) yang merupakan hasil gagasan para ahli di bidang infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga profesional domestik di bidang infrastruktur.

2016



Proyek Palapa Ring Barat

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Barat dilakukan oleh PT PII dengan PT Palapa Ring Barat selaku Badan Usaha dan antara PT PII dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pada tanggal 29 Februari 2016. *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat dilaksanakan pada 25 Juli 2016.

2016

Proyek Palapa Ring Tengah

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Barat dilakukan oleh PT PII dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku Badan Usaha dan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) pada tanggal 4 Maret 2016. *Financial Close* Proyek Palapa Ring Tengah dilaksanakan pada 29 September 2016.

Penandatanganan

Perjanjian Penjaminan 4 Jalan Tol

PT PII di tahun 2016 menandatangani perjanjian penjaminan sebanyak 4 (empat) proyek di sektor Jalan Tol yaitu Jalan Tol Batang- Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung.

Financial Close

PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW

Pada tanggal 6 Juni 2016, telah dicapai tahap *financial close* untuk proyek PLTU Batang Jawa Tengah berkapasitas 2 x 1.000 MW dengan nilai investasi sekitar US\$4 miliar (±Rp52 triliun). Proyek ini telah mendapatkan penjaminan pemerintah melalui Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII.



SPAM Umbulan

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Meta Adhya Tirta dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Gubernur Jawa Timur, dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016 untuk menjamin Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. *Financial Close* Proyek SPAM Umbulan dilaksanakan pada 30 Desember 2016.

Penandatanganan

MoU dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

PT PII menandatangani Nota Kesepahaman dengan Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada 2 Agustus 2016 terkait dengan pendampingan/pertimbangan di bidang hukum. Pendampingan yang dilakukan oleh Jamdatun diharapkan dapat memberikan kepastian agar proyek yang dijamin oleh PT PII tidak terkendala persoalan hukum. Kerja sama ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap institusi terkait.

Satu Dasawarsa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

2016

Proyek Palapa Ring Timur

PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Timur pada 29 September 2016. Penandatanganan dilakukan di Istana Negara dengan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perekonomian dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Perluasan Mandat PT PII

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur memperluas mandat PT PII untuk dapat menjamin proyek-proyek infrastruktur di luar skema KPBU.

2017

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan 6 Jalan Tol

Sepanjang tahun 2017 PT PII menandatangani perjanjian penjaminan sejumlah 6 (enam) proyek Jalan Tol yaitu: (1) Cileunyi- Sumedang-Dawuan (2) Serang-Panimbang (3) Jakarta- Cikampek II Elevated (4) Krian-Legundi-Bunder-Manyar yang keempatnya ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2017, dan 2 (dua) proyek Jalan Tol lainnya yang ditandatangani pada bulan Desember 2017 yaitu (5) Probolinggo-Banyuwangi dan (6) Jakarta-Cikampek II Selatan.

Groundbreaking SPAM Umbulan

Bertempat di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, pada 29 Maret 2017 dilaksanakan seremonial *Groundbreaking* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla serta Gubernur Jawa Timur. Proyek SPAM Umbulan merupakan salah satu ikon proyek air dan proyek daerah yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Financial Close Proyek Palapa Ring Timur

Financial Close Proyek Palapa Ring Timur pada 29 Maret 2017 melengkapi *Financial Close* Proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah yang sebelumnya telah dicapai pada bulan Juli dan September tahun 2016.





2017

Penghargaan

Pada tahun 2017 PT PII mendapatkan penghargaan dari ASEAN Risk Award – *Public Initiative Category* yang diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy dan penghargaan sebagai BUMN terbaik di bawah Kementerian Keuangan dari Majalah Investor.

Tajaran Direksi Baru

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 885/KMK.06/2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 27 November 2017, maka pada tanggal 28 November 2017 dilaksanakan pelantikan Direksi PT PII (Persero) oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Menteri Keuangan RI selaku Pemegang Saham mengangkat Bapak Armand Hermawan sebagai Direktur Utama, serta Bapak Salusra Satria dan Bapak M Wahid Sutopo sebagai Direktur.

2018

Penandatanganan

Penjaminan Proyek SPAM Bandar Lampung

Pada 14 Februari 2018, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dan regres proyek yang pertama di tahun 2018, yaitu untuk proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung. Proyek ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung selaku Badan Usaha Pelaksana.



Penandatanganan

Penjaminan Proyek SPAM Semarang Barat

Pada 23 November 2018, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat.

Satu Dasawarsa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

2018

Penandatanganan

Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan Pinjaman Proyek KEK Mandalika

Pada 28 Desember 2018, PT PII menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) sehubungan dengan Penjaminan Pinjaman Proyek Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok.

Penugasan dan Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU

Pada tahun 2018, PT PII mendapatkan penugasan dari Kementerian Keuangan untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU, 1) Perkeretaapian Umum Makassar-Parepare yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, 2) Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan, 3) Jalan Lintas Timur Riau yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, dan 4) Rumah Sakit Kanker Dharmais yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Penghargaan

Pada tahun 2018 PT PII kembali mendapatkan penghargaan dari ASEAN Risk Award sebagai pemenang dari kategori Public Initiative. Selain itu PT PII juga meraih penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted Companies pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2018.



2019

Penandatanganan

Perjanjian Penugasan dan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin Aceh

Penandatanganan Perjanjian Penugasan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) RSUD Zainoel Abidin antara Dirjen PPR dengan Direktur Utama PT PII dilaksanakan pada 8 Januari 2019. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Induk Proyek Infrastruktur RSUD Zainoel Abidin antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Pemerintah Daerah Aceh pada tanggal 4 Desember 2018 serta terbitnya Keputusan Menteri Keuangan untuk penugasan khusus kepada PT PII pada tanggal 5 Desember 2018 untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.



2019

PT PII *Memberikan* Penjaminan pada Proyek KPBU Kereta Api Makassar – Parepare

Pada 5 April 2019, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Celebes Railway Indonesia (CRI) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP). Proyek ini berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor transportasi perkeretaapian sekaligus merupakan proyek KPBU pertama sektor transportasi di lingkup Kementerian Perhubungan.



PT PII *Memberikan* Penjaminan pada Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia

Pada 3 Mei 2019 PT PII melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penjaminan dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). SATRIA merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Indonesia.

PT PII *Memberikan* Penjaminan Proyek KPBU Ruas Jalan Tol Semarang - Demak

Pada 23 September 2019 dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Ruas Jalan Tol Semarang-Demak antara Kementerian PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PPSD) yang merupakan konsorsium dari Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Misi Mulia Metrikal.

Pelantikan

Direktur Utama PT PII (Persero)

Pada tanggal 5 Desember 2019, dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama PT PII melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 890/KMK.06/2019 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Penghargaan

Pada tahun 2019 PT PII mendapatkan berbagai penghargaan berskala nasional, regional dan internasional yaitu juara 3 Annual Report Award 2018 Kategori BUMN Keuangan Non-Listed, juara 1 dari ASEAN Risk Award untuk kategori Public Risk, Public Initiative dan Risk Educator serta penghargaan sebagai "PPP Agency of The Year" dari Asia Infrastructure Award.

Bidang Usaha



KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR TERAKHIR

Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir PT PII, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan:

1. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah dalam perjanjian kerja sama Pemerintah dan badan usaha dalam proyek-proyek infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontingensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit (*credit worthiness*) proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha di bidang infrastruktur.
2. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya terkait penyediaan infrastruktur, yang timbul sebagai akibat dari:
 - a. Pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan;
 - b. Penerbitan obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya;
3. Pemberian penjaminan terhadap kewajiban finansial dari pihak lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian dukungan fasilitasi penyiapan proyek infrastruktur, penilaian kelayakan, dan pemantauan risiko serta hal-hal lain terkait penyediaan penjaminan Pemerintah.

5. Kerjasama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan multilateral dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c.
6. Usaha patungan atau penyertaan modal pada badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sejenis dengan maksud dan tujuan Perseroan.
7. Pemberian jasa konsultasi dan penyediaan informasi untuk meningkatkan kualitas alokasi risiko dan struktur pembiayaan proyek dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
8. Kegiatan lainnya untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Bidang Usaha yang dijalankan oleh PT PII adalah sesuai dengan Bidang Usaha yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar.

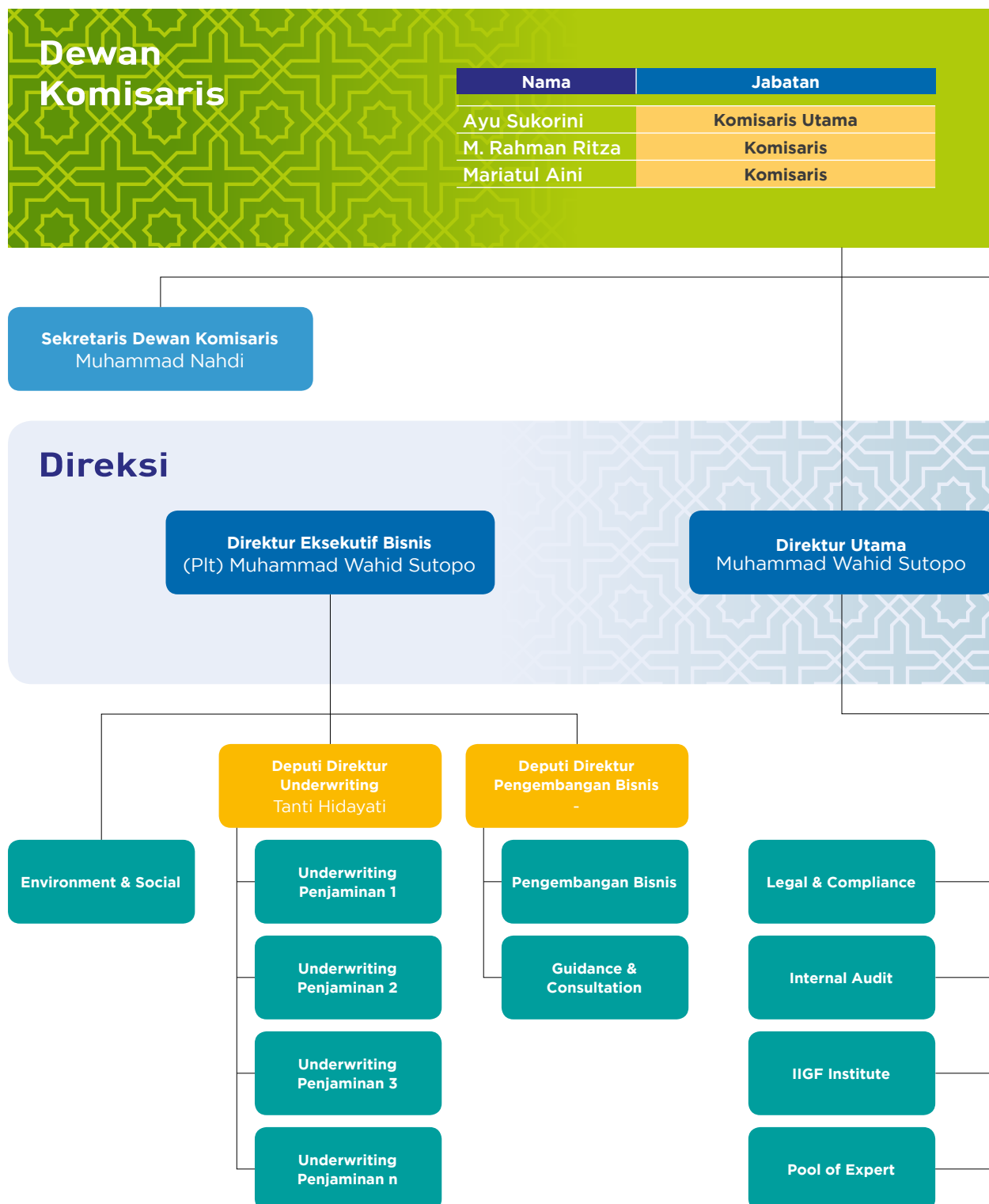
Produk dan Jasa

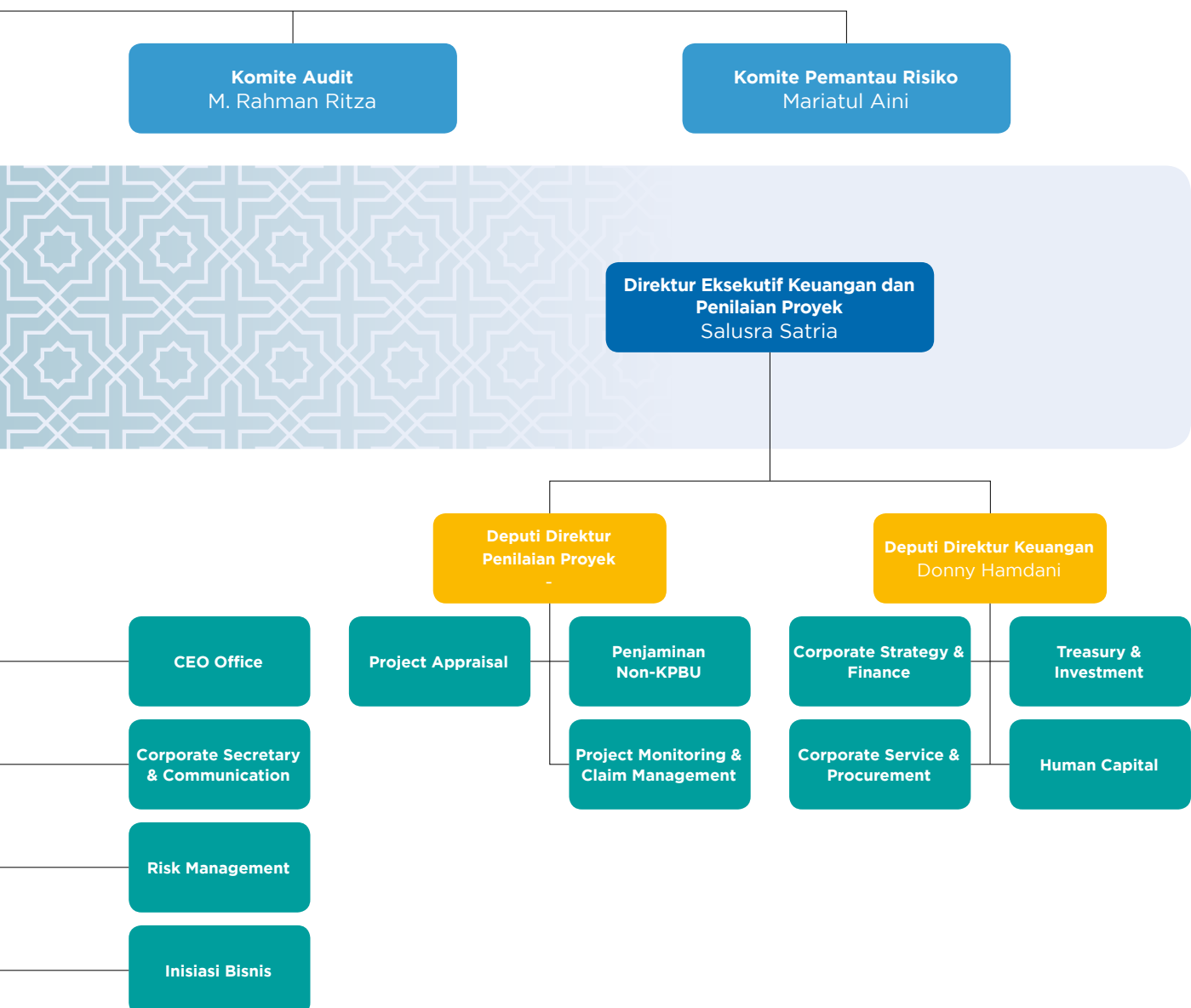
1. Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur untuk proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
2. Penjaminan Pemerintah terhadap pinjaman dan penerbitan obligasi BUMN untuk membiayai penyediaan infrastruktur (Non-KPBU);
3. Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (*Project Development Facility*).

19 Sektor yang Dapat Diberikan Penjaminan

	Air Minum		Transportasi
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat		Jalan
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat		Sumber Daya Air dan Irigasi
	Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan		Sistem Pengelolaan Persampahan
	Konservasi Energi		Ketenagalistrikan
	Fasilitas Perkotaan		Telekomunikasi dan Informatika
	Pariwisata		Fasilitas Pendidikan
	Kesehatan		Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Kesenian
	Lembaga Pemasyarakatan		Kawasan
	Perumahan Rakyat		

Struktur Organisasi







Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Visi

Menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Misi

Memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

- Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.
- Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

Pengesahan Visi dan Misi

Visi dan Misi PT PII telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode 2018-2022 pada tanggal 27 Desember 2017.



Budaya Perusahaan

INTEGRITY



- Menjaga komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas
- Taat terhadap aturan Perusahaan
- Bertanggung jawab atas setiap perbuatan, perkataan dan keputusan

TEAM WORK



- Memberikan kontribusi keterampilan dan pengetahuan
- Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perusahaan

THINK BIG



- Memiliki pemikiran luas dan mutakhir
- Senantiasa meningkatkan pengetahuan, terbuka terhadap perkembangan

MUTUAL TRUST



- Pemenuhan standar layanan yang ada
- Saling percaya dan saling hormati

EXCELLENCE



- Memberikan yang terbaik dalam melaksanakan semua tugas
- Berupaya untuk melakukan perbaikan berkesinambungan

Brand Perusahaan



● BRAND/LOGO

Ide dasar logo PT PII merujuk pada kerajinan karya seni asli penduduk Indonesia, yaitu kerajinan anyaman yang merepresentasikan mandat PII untuk menjadi jembatan penggerak percepatan pembangunan infrastruktur.



Pada logo PT PII, terdapat 2 (dua) warna yang dominan yaitu warna biru dan hijau.



Warna biru pada logo mengandung makna: *trust* (terpercaya), *responsibility* (tanggung jawab) dan *strength* (kekuatan). Warna tersebut merepresentasikan PT PII sebagai perusahaan yang terpercaya, bertanggung jawab dan profesional untuk mewujudkan visi PT PII menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.



Warna hijau pada logo mengandung makna: *growth* (pertumbuhan), *financial* (keuangan), *harmony* (keseimbangan, keselarasan) dan *environment* (lingkungan; masyarakat). Warna tersebut sejalan dengan misi PT PII untuk memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang:

- Memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia;
- Melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel; dan
- Meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

Profil Dewan Komisaris



Ayu Sukorini
Komisaris Utama

52 tahun, Warga Negara Indonesia.
Berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Universitas Satya Wacana, Salatiga (1990)
- Master of Arts (MA) dalam bidang ekonomi dari Universitas Colorado, Denver, Amerika Serikat (1998)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris pada 2009 dengan dasar penunjukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.06/2009 tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Kemudian diangkat kembali pada 29 Mei 2017 sebagai Komisaris Utama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 402/KMK.06/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Pengalaman Kerja

- Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017-sekarang)
- Direktur Pinjaman dan Hibah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015-2017).
- Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012-2015)
- Anggota Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2009-2017)
- Direktur Strategi dan Portfolio Utang, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2008-2012)

Rangkap Jabatan

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Hubungan Afiliasi

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Pendidikan/Pelatihan

Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini



M. Rahman Ritza
Komisaris

60 tahun, Warga Negara Indonesia.
Berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1985) - Magister Jurusan Business Administration, Drake University (1993)
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris pada 29 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 402/ KMK.06/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Pengalaman Kerja	- Inspektur Bidang Investigasi, Kementerian Keuangan (2011-2019) - Inspektur Bidang VII, Kementerian Keuangan (2008-2011) - Inspektur Bidang VI, Kementerian Keuangan (2007-2008)
Rangkap Jabatan	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG
Hubungan Afiliasi	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG
Pendidikan/Pelatihan	Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini

Profil Dewan Komisaris



Mariatul Aini
Komisaris

56 tahun, Warga Negara Indonesia.
Berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan	- Insinyur di bidang Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor (1987) - Master of Business Administration The University of Wisconsin, Amerika Serikat (1994)
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali menjabat sebagai Komisaris pada 21 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 861/KMK.06/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Pengalaman Kerja	- Sekretaris Ditjen Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2018-sekarang) - Komisaris pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2017-2018) - Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2016-2018) - Sekretaris Ditjen Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2014-2016) - Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (2011-2014) - Komite Remunerasi PT Pertamina Gas (2009 – 2011)
Rangkap Jabatan	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG
Hubungan Afiliasi	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG
Pendidikan/Pelatihan	Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini

Profil Direksi



Muhammad Wahid Sutopo
Direktur Utama
merangkap Plt. Direktur Eksekutif Bisnis

50 tahun, Warga Negara Indonesia.
 Berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (1993) • Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) (2002)
Riwayat Jabatan	
Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 885/KMK.06/2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan diangkat sebagai Direktur Utama melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 890/KMK.06/2019 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Pengalaman Kerja	• Direktur Strategy & Business Development PT Perusahaan Gas Negara (Persero) (2016-2017) • Komisaris Utama PT PGAS Telekomunikasi Nusantara (2011-2017) • Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (2011-2016) • Group Head Perencanaan dan Pengendalian Korporat, Corporate Secretary serta Kepala Divisi Hubungan Investor PT Indosat Tbk (2008-2011) • Group Head of Revenue Assurance PT Indosat, Tbk (2006-2008) • Head of Investor Relations PT Indosat, Tbk (2001-2006)
Rangkap Jabatan	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG
Hubungan Afiliasi	Penjelasan disampaikan pada bagian GCG
Pendidikan/Pelatihan	Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini

Profil Direksi



Salusra Satria

Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek

54 tahun, Warga Negara Indonesia.
Berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1990)
- Master di Bidang Keuangan dari Macquarie University, Sydney, Australia (1993)
- Program Diploma di Bidang Strategi Bisnis dan Kepemimpinan dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Belanda (2016)

Riwayat Jabatan

Dasar Hukum Pengangkatan

Pertama kali diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 885/KMK.06/2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Pengalaman Kerja

- Direktur Eksekutif Penjaminan & Manajemen Risiko, Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2016)
- Direktur Eksekutif Klaim & Resolusi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan (2010-2013)
- Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan RI (2000-2005)

Rangkap Jabatan

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Hubungan Afiliasi

Penjelasan disampaikan pada bagian GCG

Pendidikan/Pelatihan

Informasi tentang pendidikan/pelatihan disajikan pada bagian tersendiri di bab ini



Profil Pejabat Eksekutif



Donny Hamdani

Deputi Direktur Keuangan

40 tahun, Warga Negara Indonesia.
Berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan

Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000)

Pengalaman Kerja

EVP CFO Office, Plt. EVP Corporate Strategy & Finance (1 Januari 2017-31 Desember 2017)



Tanti Hidayati

**Deputi Direktur Underwriting
Penjaminan**

47 tahun, Warga Negara Indonesia.
Berdomisili di Jakarta

Riwayat Pendidikan

Sosial Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor; Jurusan: Agribisnis

Pengalaman Kerja

- 2011-2016: SVP Project and Guarantee Consultation
- 2017-2018: EVP Project Guarantee & Consultation
- 2018-saat ini: Deputi Direktur Underwriting Penjaminan

Data Jumlah Karyawan dan Pengembangan Kompetensi

DATA JUMLAH KARYAWAN

Hingga periode 31 Desember 2019, jumlah karyawan PT PII adalah sebanyak 132 orang naik 3,13% dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 128 orang. Dengan komposisi sebanyak 111 orang merupakan karyawan tetap dan sebanyak 21 karyawan tidak tetap. Jumlah karyawan pada tahun 2019 telah menyesuaikan kebutuhan Perseroan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi yang dimiliki dan dibutuhkan PT PII. Rincian jumlah karyawan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Karyawan berdasarkan Work Level

Uraian	2019	2018	2017
Deputy Director	2	2	-
Executive Leader	7	5	4
Senior Leader	27	27	26
Middle Level	44	46	34
Staff	54	50	43
Total	132	128	107

Jumlah Karyawan berdasarkan Level Jabatan

Uraian	2019	2018	2017
EVP	7	5	4
VP SVP	27	27	26
DSM AVP	25	27	21
AM-M	40	36	28
Staf	33	33	28
Total	132	128	107

Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Uraian	2019	2018	2017
Tetap	111	100	84
Tidak Tetap	21	28	23
Total	132	128	107

Jumlah Karyawan berdasarkan Gender

Uraian	2019	2018	2017
Laki-laki	73	69	54
Perempuan	59	59	53
Total	132	128	107

Jumlah Karyawan berdasarkan Usia

Uraian	2019	2018	2017
41-56	30	27	23
31-40	52	54	36
20-30	50	47	48
Total	132	128	107

Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	2019	2018	2017
Doktoral	4	4	4
Pasca Sarjana	51	52	38
Sarjana	71	68	61
Diploma	6	4	4
Total	132	128	107

DATA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Sepanjang tahun 2019, seluruh karyawan PT PII dari berbagai level jabatan telah mengikuti beragam pelatihan, baik yang diselenggarakan secara *inhouse* maupun *public training* sebagaimana data berikut:

2019 (Orang)	2018 (Orang)	2017 (Orang)	2016 (Orang)
115	118	115	97

Selama tahun 2019, PT PII telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan karyawan dalam bentuk *inhouse*, *knowledge sharing* dan *public training* sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Training	Total Peserta (orang)	Rata-Rata Peserta (orang)
<i>Inhouse Training</i>	11	418	38
<i>Knowledge Sharing</i>	6	312	52
<i>Public Training</i>	81	241	3

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2019

Pada tahun 2019, PT PII telah mengeluarkan total biaya pendidikan dan pelatihan karyawan dalam rangka pengembangan kompetensi yang dibutuhkan Perseroan mencapai Rp3,64 miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp2,6 miliar.

Komposisi Pemegang Saham

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI



KEPEMILIKAN SAHAM YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH

Kepemilikan Saham PT PII 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, oleh karena itu hanya terdapat 1 (satu) pemegang saham yang memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih, yakni Negara Republik Indonesia.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase
Negara Republik Indonesia	8.000.000 lembar	100%

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Saham PT PII sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sehingga tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PII di Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Lembar Saham		
		Pada PT PII	Di Luar PT PII	Jumlah Lembar Saham
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	x	x	x
Mariatul Aini	Komisaris	x	x	x
M. Rahman Ritza	Komisaris	x	x	x

Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Lembar Saham		
		Pada PT PII	Di Luar PT PII	Jumlah Lembar Saham
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	x	x	x
Salusra Satria	Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek	x	x	x



Struktur Grup

Hingga periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle Company*, sehingga tidak ada hal yang dapat dilaporkan terkait Struktur Grup Perusahaan.

Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Hingga akhir tahun 2019, PT PII tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle Company*.

Kronologi Penerbitan Saham

Hingga akhir tahun 2019, saham PT PII dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia dan tidak pernah terdaftar di bursa saham mana pun, sehingga tidak ada informasi yang diberikan mengenai kronologis penerbitan saham (termasuk penempatan pribadi) dan/atau daftar saham dari awal hingga akhir tahun fiskal.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Hingga 31 Desember 2019, PT PII belum pernah menerbitkan efek dalam bentuk apapun yang diperdagangkan di bursa manapun, sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.



Nama dan Alamat Lembaga Profesi dan Penunjang Perusahaan

Lembaga dan Profesi Penunjang	Nama Lembaga dan Profesi Penunjang	Alamat	Periode Penugasan	Biaya
Biro Administrasi Efek dan Pemeringkatan Efek	Hingga saat ini, PT PII bukan merupakan perusahaan publik dan emiten yang menerbitkan saham dan obligasi sehingga tidak menggunakan jasa biro administrasi efek dan pemeringkat efek.			
Kantor Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920	Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2019	Rp864.000.000
Perusahaan Penilai	Hingga 31 Desember 2019, PT PII tidak memiliki rekanan Perusahaan Penilai.			
Notaris	Notaris Arry Supratno, S.H.	Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur Nomor 89, Jakarta Pusat 10210	Pembuatan Akta BA RUPS Tahunan RKAP	Rp25.000.000
			Pembuatan Akta Perubahan Direksi Perseroan	Rp25.000.000
			Pembuatan Akta Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan	Rp25.000.000
			Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Rp25.000.000
			Pembuatan Akta BA RUPS Tahunan Tahun Buku 2018	Rp25.000.000
			Pembuatan Akta Perubahan Dewan Komisaris Perseroan	Rp17.500.000
			Total	Rp142.500.000
Aktuaris	PT Dayamandiri Dharmakonsilindo	Jl. Pakubuwono VI No. 61 Gunung, Kebayoran Baru Jakarta 12120	Tahun 2019	Rp13.750.000 (sebelum pajak)

Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN

Tanggal	Penghargaan	Ajang	Penyelenggara	Masa Berlaku Penghargaan
24 Juni 2019	Public Private Partnership (PPP) Agency of The Year	The Asset Tripple A Asia Infrastructure Award 2019	The Asset Magazine, Hong Kong	1 (satu) tahun
22 Agustus 2019	- Top Governance, Risk & Compliance (GRC) - Most committed leader	Top Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2019	Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Asia Business Research Center	1 (satu) tahun
14 November 2019	3rd Winner Kategori BUMN Keuangan Non-Listed	Annual Report Award 2018	Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, dan Ikatan Akuntan Indonesia.	1 (satu) tahun
5 Desember 2019	1st Winner - Public Initiative - Public Educator - Public Risk	Asean Risk Award 2019	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)	1 (satu) tahun

SERTIFIKASI

Pada September tahun 2019, PT PII secara resmi menjadi *Certification PPP Profesional (CP3P) Accredited Training Organization (ATO)* untuk Level *Foundation* dari *Accrediting Professional Manager Globally (APMG)*. APMG PPP Certification Program merupakan program yang didukung oleh ADB, EBRD, IDB, IsDB dan World Bank Group untuk sertifikasi PPP. Sebagai ATO APMG, PT PII telah memiliki 4 (empat) orang *Certified Trainer*, 32 (tiga puluh dua) orang CP3P Level *Foundation* dan 2 (dua) orang CP3P Level *Preparation*.

Informasi Website Perusahaan

PT PII memiliki *website* Perusahaan yakni <https://www.ptpii.co.id/> yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. PT PII membuat *website* tersebut sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta memperhatikan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik yang memuat informasi penting antara lain mengenai informasi pemegang saham, Kode Etik, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Laporan Tahunan, Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite, dan Satuan Pengawasan Internal. Khusus mengenai RUPS, informasi yang disajikan di *website* meliputi mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pemanggilan RUPS dan tanggal RUPS. *Website* PT PTII juga dapat ditampilkan dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Informasi secara rinci kesesuaian *Website* Perusahaan sebagai berikut:

Kriteria ARA

Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu



Kesesuaian dengan
Website PII

Ada
Terdapat pada menu
"Tentang PT PII"

Link

<https://ptpii.co.id/en/about-pt-pii/organizational-structure>

Kriteria ARA

Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)



Kesesuaian dengan
Website PII

Ada
Terdapat pada menu
"Berita dan Publikasi"

Link

<https://ptpii.co.id/en/news-publication/publications/annual-report>

Kriteria ARA

Isi Kode Etik



Kesesuaian dengan
Website PII

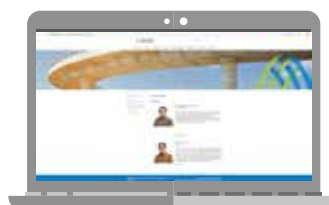
Ada
Terdapat pada menu
"Manual Kebijakan
Perusahaan"

Link

<https://ptpii.co.id/en/news-publication/publications/corporate-governance>

Kriteria ARA

Profil Dewan Komisaris dan Direksi



Kesesuaian dengan
Website PII

Ada
Terdapat pada menu
"Tentang PT PII"

Link

<https://ptpii.co.id/id/about-pt-pii/management/board-of-directors>

Kriteria ARA

Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal



Kesesuaian dengan Website PII

Ada
Terdapat pada menu "Manual Kebijakan Perusahaan"

Link

<https://ptpii.co.id/id/news-publication/publications/corporate-governance>

Kriteria ARA

Dewan Komisaris



Kesesuaian dengan Website PII

Ada
Terdapat pada menu "Manajemen-Dewan Komisaris"

Link

<https://ptpii.co.id/id/about-pt-pii/management/board-of-commissioners>

Kriteria ARA

Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan.



Kesesuaian dengan Website PII

Ada
Terdapat pada menu "Berita dan Publikasi"

Link

<https://ptpii.co.id/id/news-publication/news>

Kriteria ARA

Direksi



Kesesuaian dengan Website PII

Ada
Terdapat pada menu "Manajemen-Direksi"

Link

<https://ptpii.co.id/id/about-pt-pii/management/board-of-directors>

Kriteria ARA

Capaian dan prospek perusahaan



Kesesuaian dengan Website PII

Ada
Terdapat pada menu "Proyek"

Link

<https://ptpii.co.id/id/project/recent-projects>

Kriteria ARA

Pemegang saham



Kesesuaian dengan Website PII

Ada
Terdapat pada menu "Tentang PT PII"

Link

<https://ptpii.co.id/en/about-pt-pii/organizational-structure>



Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Nama	Program Pengembangan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Ayu Sukorini	Speaker for Sekolah Pimpinan Utama BI (SESTABI) and Executive Leadership Program BI	Bank Indonesia Institute	Jakarta	1 April 2019
	Indonesia-Canada Financial Sector Policy Dialogue	Kementerian Keuangan	Kanada (Ottawa dan Toronto)	8-10 April 2019
	Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue	Kementerian Keuangan	Jakarta	29 April 2019
	FSB Regional Consultative Group for Asia	Financial Stability Board	Malaysia	14 Juni 2019
	International Seminar on Facing Softening Global Economy	Lembaga Penjamin Simpanan	Bali	21-23 agustus 2019
	High-level conference on Global Stablecoins	Financial Stability Board	Basel, Swiss	16 September 2019
	FSB ReSG meeting	Financial Stability Board	Basel, Swiss	18-19 September 2019
	Kebijakan Sektor Keuangan Nasional: Tantangan dan Strategi	Bank Indonesia Institute	Jakarta	26 September 2019
	Seminar Keuangan Inklusif	Kementerian Keuangan	Bandar Lampung	10 Oktober 2019
	FATF Plenary Week	Financial Action Task Force	Paris	13-18 Oktober 2019
	Forum GRC (GRC Industry 4.0)	PT PII (Persero)	Jakarta	11 November 2019
Rahman Ritza	2019 IIA Indonesia National Conference Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR	IIA Indonesia	Solo, Indonesia	24-25 Juli 2019
Mariatul Aini	Sosialisasi dan Arahan APBN 2019	DJA	Jakarta	8 Januari 2019
	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DJA	Jakarta	15 Januari 2019
	Sosialisasi Kebijakan APBN	DJA	Jakarta	11 Februari 2019
	Sosialisasi Pmk Nomor 190/PMK.01/2018 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan	DJA	Jakarta	14 Februari 2019
	Stakeholder Gathering Pusdiklat Keuangan Umum	Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK, Kemenkeu	Jakarta	20 Juni 2019
	Rapat Kerja DJA Tahun 2019	DJA	Jakarta	17 Oktober 2019
	Capacity Building dengan tema "Idea To Change"	DJA	Sumatera Barat	6-8 November 2019
	Workshop "Coaching Hebat Kinerja Organisasi Mantap"	Pusdiklat Pengembangan SDM, BPPK, Kemenkeu	Jakarta	6 Desember 2019



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Nama	Program Pengembangan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
M. Wahid Sutopo	Feasibility study related to the oceanographic research vessels invitation Technical Meetings and Visits	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Paris, Perancis	25 Februari-2 Maret 2019
	ANU Crawford Leadership Forum	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Canberra, Australia	23-25 Juni 2019
	PwC Leadership Series, BUMN Hadir untuk Negeri	PricewaterhouseCoopers (PwC)	Jakarta	29 Maret 2019
	Workshop strategi dan arah kebijakan pendanaan pembangunan 2020 - 2024	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	Jakarta	1 Agustus 2019
Salusra Satria	Vietnam Scalling Up Energy Efficiency Workshop Project Implementing Entity	The World Bank	Hanoi, Vietnam	14-16 Januari 2019
	Focus Eastern Indonesia Business Forum	Konsulat Jenderal RI di Sydney, Badan Koordinasi Penanaman Modal, PwC Sydney dan Basudara Maluku Global	Sydney, Australia	21-23 Maret 2019
	Korea Railways and Logistic Fair	Korea Rail Network Authority	Busan, Korea Selatan	12-15 Juni 2019
	Pelatihan Eksekutif Geothermal Project Management	PT Geodipa Energi (Persero) & Institut Teknologi Bandung	Bogor, Indonesia	Agustus-September 2019

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Nama	Program Pengembangan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Rahman Ritza	2019 IIA Indonesia National Conference	IIA Indonesia	Solo, Indonesia	24-25 Juli 2019
	Empowering Internal Auditors: Embracing The 4IR			
Ahmad Ghufro	Forum GRC (GRC Industry 4.0)	PT PII (Persero)	Jakarta	11 November 2019
	International Workshop and On-Site Learning Program: Best Practices In Implementing GRC in Era Revolution Industry 4.0-The Role of Assurance and Oversight Functions	YPIA Indonesia dan IIA New Zealand	Queenstown & Auckland, New Zealand	5-8 Agustus 2019

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Nama	Program Pengembangan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Iqbal Islami	Digital Transformation in Government: Innovating Public Policy & Service	Harvard Kennedy School	USA	10-15 Maret 2019
	Forum GRC (GRC Industry 4.0)	PT PII (Persero)	Jakarta	11 November 2019
Ferry Irawan	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. 2	Lembaga Administrasi Negara	Jakarta	Semester II Tahun 2019
	Forum GRC (GRC Industry 4.0)	PT PII (Persero)	Jakarta	11 November 2019



Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Internal

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Program Pengembangan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Senior Enlightenment Day 2019	BCW - KornFerry	Bogor	20 Februari 2019
Workshop Jurnalis Perusahaan	Majalah MIX-SWA	Jakarta	28 Februari 2019
Alternative Disputes Resolution Seminar: 2019 Indonesian ADR outlook	Assegaf Hamzah & Partners Law Firm	Jakarta	13 Maret 2019
Konsep Keuangan Negara "Perencanaan dan Penggunaan APBN"	Kementerian Keuangan	Jakarta	5 Mei 2019
Workshop Annual Report Berbasis Kriteria ARA 2018	Komisi Nasional Kebijakan Governance	Jakarta	26-27 Juni 2019
Memperkuat Daya Saing BUMN dengan Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat	Bogor	28 Juni 2019
The 7 th Indonesia Corporate Communication Summit 2019 - Prospect and Challenge for Corcomm in Digital Era	Intipesan	Jakarta	17-18 Juli 2019
Building Public Trust through Digital Literacy	PR Indonesia	Bali	29-31 Oktober 2019
The Power of Social Media : Social Media Strategic for Public Relations Campaign Effective	PR Indonesia	Batam	10-11 Desember 2019

PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT AUDIT INTERNAL

Nama	Program Pengembangan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Catur Priyoni	Sharing Session FKSPI Asgara Jaskeu Plus 2019 : Peran Auditor Internal dalam Gerakan Anti Fraud pada BUMN	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern	Jakarta	25 April 2019
	Internal Audit in The Era of VUCA and Digitalization	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern	Semarang	21 - 23 Agustus 2019
	Menyongsong Penerapan Standar Auditing 701 – Komunikasi Key Audit Matters	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	Jakarta	28 Agustus 2019
	PPP and the Cybersecurity Challenge on E-Government	Kementerian ATR	Jakarta	20 September 2019
	Diklat Anti-Korupsi Dasar untuk Satuan Pengawas Internal BUMN/D & Anak Perusahaan	Pusat Edukasi Antikorupsi KPK-RI	Jakarta	15-17 Oktober 2019
	Social Media Investigation	The Institute of Internal Auditors Indonesia	Jakarta	19 November 2019
	Practical Approach and Ethical Considerations in Cybersecurity Audit	The Institute of Internal Auditors Indonesia	Jakarta	17 Desember 2019
Christine	Certified Internal Auditor (CIA) Review	PPA FEBUI	Jakarta	24 Juni - 30 Desember 2019
Ken Auva Maulida	Internal Audit in The Era of VUCA and Digitalization	Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern	Semarang	21 - 23 Agustus 2019



Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Kantor Cabang dan Perwakilan Luar Negeri Serta Kantor Wilayah Kantor Cabang, *Sub Branch*, Perwakilan Luar Negeri dan Kantor Wilayah

Hingga akhir tahun 2019, PT PII tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi, kantor cabang dan kantor perwakilan sehingga tidak terdapat informasi terkait hal ini.



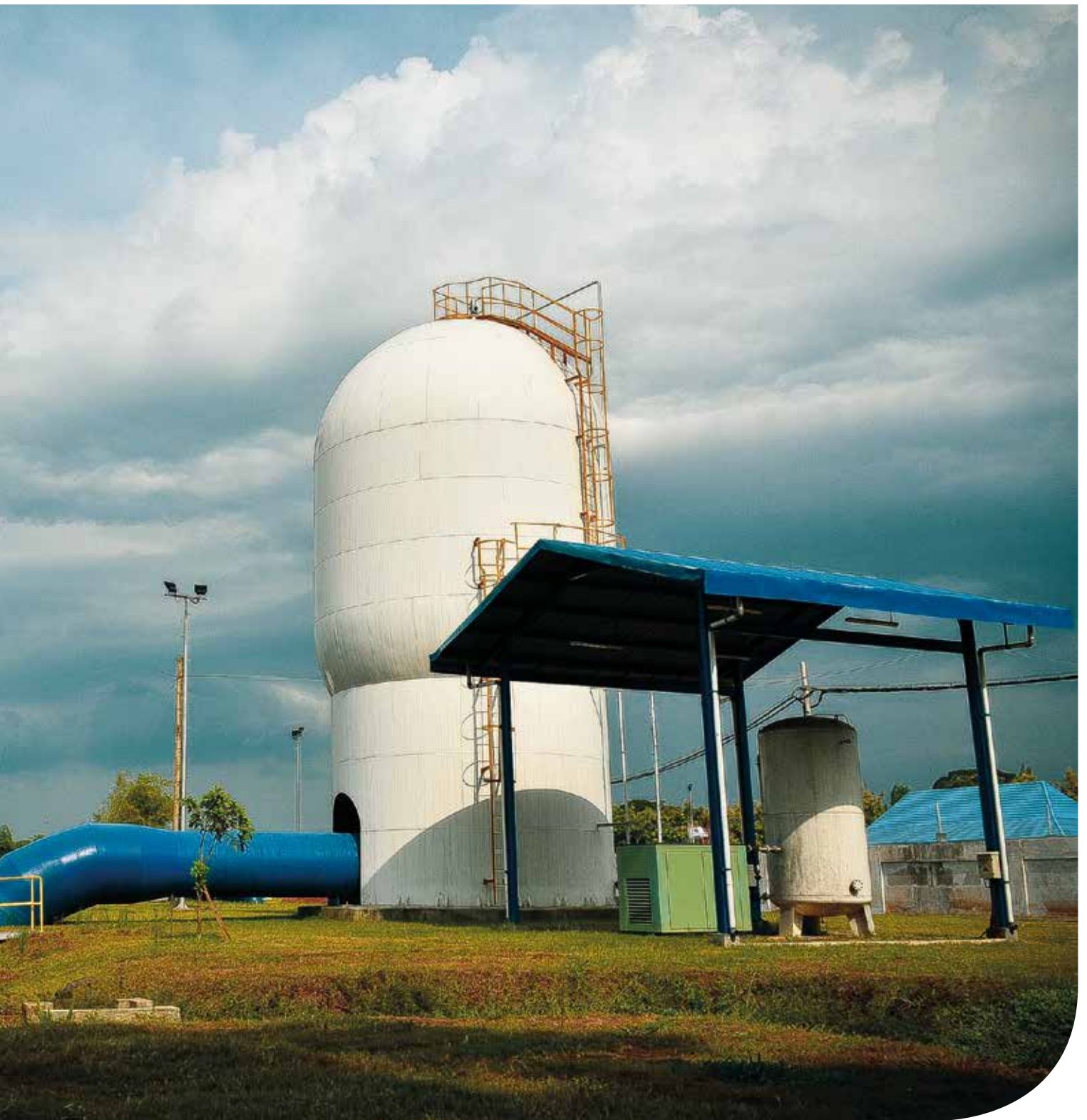
04



Tinjauan Pendukung Bisnis



94 Sumber Daya Manusia
106 Teknologi Informasi





Sumber Daya Manusia

PT PII menjalankan strategi dan pengelolaan SDM yang terus disesuaikan dengan strategi Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta kompetensi yang dibutuhkan pada saat ini maupun masa yang akan datang.

PT PII sepenuhnya menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu keunggulan kompetitif dalam mendukung tercapainya kesuksesan Perusahaan. Dengan SDM yang berkualitas dan berkomitmen, upaya pencapaian target usaha yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Perseroan juga dapat tercapai. Oleh karena itu, PT PII menjalankan strategi dan pengelolaan SDM yang terus disesuaikan dengan strategi Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta kompetensi yang dibutuhkan pada saat ini maupun masa yang akan datang.

PT PII meyakini bahwa SDM yang andal dan mumpuni mampu memberikan kontribusi penting bagi kinerja dan kesinambungan Perseroan. Kehadiran SDM yang profesional dan kompeten akan membuat Perseroan mampu mewujudkan visi dan misi serta rencana kerja berkelanjutan yang telah ditetapkan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM 2019

Sejak tahun 2015, pengembangan SDM telah melalui beberapa inisiatif untuk dapat mempertajam dan mendukung penuh pencapaian visi dan misi Perusahaan serta pengembangan individu positif yang lebih terukur dan terarah. Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM, yang dimulai sejak rekrutmen, pengembangan individu dan perencanaan jenjang karier. Komitmen pengembangan SDM di PII telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sejak Perseroan berdiri. Manajemen menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengembangan SDM untuk mendukung dan mengakselerasi kinerja bisnis.

PT PII senantiasa memastikan SDM diperlakukan secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang perbedaan gender, ras, maupun hal diskriminatif lainnya. Strategi dan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan terutama mengacu pada ketentuan regulasi yang ada, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



Pelatihan

115 karyawan



Di tahun 2019, sebanyak 115 karyawan telah mengikuti pelatihan baik pelatihan yang terkait dengan pengembangan kompetensi teknis maupun *softskill*. Secara umum pelatihan yang ada di PT PII dikelompokkan menjadi 3: *in-house training*, *knowledge sharing* dan *public training*.



Pengelolaan SDM di lingkungan PII berada di bawah Divisi Human Capital. Divisi ini melakukan penyempurnaan kebijakan secara berkala dan optimalisasi pelaksanaan praktik ketenagakerjaan sepanjang siklus kepegawaian. Kesadaran tersebut dilandasi atas pemahaman Perseroan bahwa kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM akan menentukan masa depan Perseroan.

Secara garis besar, tugas, tanggung jawab, peran dan lingkup Divisi Human Capital dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berkontribusi aktif dalam meningkatkan optimalisasi dan produktivitas unit kerja.
2. Memastikan pemenuhan kebutuhan SDM Perusahaan melalui proses seleksi dan rekrutmen SDM yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sesuai dengan pendekatan terkini.
3. Memastikan efektivitas pelaksanaan program pengembangan berdasarkan arahan strategis organisasi sehingga program pengembangan kompetensi memenuhi kebutuhan perusahaan maupun individu karyawan.
4. Memastikan terselenggaranya sistem penilaian kinerja yang terstruktur, objektif dan adil di seluruh unit kerja dalam organisasi.
5. Memastikan terselenggaranya sistem kompensasi dan benefit yang berlandaskan prinsip *internally fair & externally competitive*.
6. Berkontribusi dalam mencapai sasaran unit kerja yang telah ditetapkan serta melakukan pengembangan berkelanjutan setiap tahun.



Sumber Daya Manusia

PENCAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SDM 2019

Pada era teknologi sekaligus revolusi industri keempat saat ini, Perseroan dihadapkan pada perkembangan dunia bisnis yang semakin berkembang dengan cepat. Kondisi ini membuat kebutuhan akan kompetensi SDM yang andal semakin meningkat. Dalam rangka mengikuti perkembangan industri, PT PII melalui Divisi Human Capital telah menyusun fokus kinerja dan rencana strategis sepanjang tahun 2019 yang berkesinambungan dari tahun sebelumnya.

Pertama, Perseroan melakukan internalisasi nilai budaya Perusahaan yang dikenal sebagai InTIME melalui program budaya pada awal tahun 2019. Program ini merupakan program berkelanjutan dari program revitalisasi budaya sehingga dapat terinternalisasi dengan baik dan positif, menjadi bagian dari perilaku seluruh karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan menjadi bagian dari pembentukan diri berkarakter profesional secara berkesinambungan dan konsisten. Internalisasi tersebut dilakukan oleh tiap-tiap Direktorat yang ada di PT PII di bawah koordinasi Divisi Human Capital. Divisi Human Capital membentuk tim Internalisasi Budaya yang terdiri dari *Change Leader*, *Change Champion* dan *Change Agent*. Tim internalisasi Budaya tersebut berperan dalam membuat program-program budaya dan bersama Divisi Human Capital melakukan *monitoring* konsistensi pelaksanaan program budaya sepanjang tahun 2019.

Terdapat 3 (tiga) program budaya dari setiap Direktorat yaitu “Ngobras” untuk Direktorat Bisnis, “Hellow PII” untuk Direktorat Utama dan “Kongkow Bareng” serta Lomba Inovasi untuk Direktorat Keuangan dan Penilaian Proyek. Seluruh program telah dijalankan sejak awal tahun hingga penghujung tahun 2019. Kegiatan Implementasi Program Budaya ini ditutup dengan pelaksanaan *Culture Gathering* di masing-masing Direktorat. Keberhasilan program ini akan tetap dikembangkan di tahun berikutnya.

Kedua, Perseroan menyadari bahwa kesehatan menjadi bagian seorang karyawan dapat bekerja secara optimal sehingga tahun 2019 Perseroan memiliki program #PIIHealthy2019. Program ini terdiri

dari penyediaan fasilitas klinik Kesehatan karyawan yang berfungsi sebagai sarana konsultasi kesehatan serta pemantauan *improvement* kesehatan karyawan. Selain itu, agar karyawan dapat menjalankan aktivitas fisik dengan mudah PT PII menyelenggarakan berbagai macam kegiatan olahraga seperti badminton, voli, zumba, yoga, basket, golf, *mini soccer* dan futsal secara rutin setiap bulan serta menyediakan fasilitas ruang olahraga. PT PII menghimbau seluruh karyawan untuk melakukan *Medical Check Up* (MCU), baik di *provider* kesehatan yang dipilih secara pribadi maupun MCU *On Site* yang diselenggarakan di PT PII sehingga Perseroan dapat melanjutkan pemantauan Kesehatan karyawan di tahun berikutnya.

Ketiga, tahun 2019 PT PII mulai melaksanakan *review* tengah tahun atas pencapaian kinerja seluruh karyawan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *monitoring* untuk mencapai target kinerja individu, divisi dan korporasi tahun 2019.

Keempat, Divisi Human Capital juga tetap berupaya untuk mengimplementasikan budaya *Coaching* sebagai salah satu bentuk Pengembangan SDM seperti tahun-tahun sebelumnya. Implementasi budaya *Coaching* ini kembali terlaksana pada awal tahun 2019 melalui program pelatihan *Coaching* untuk *Senior Leader*.

ROADMAP PENGELOLAAN SDM

Perseroan memiliki *roadmap* pengembangan SDM sebagai acuan program pengembangan. Penetapan *roadmap* ini terintegrasi dan merupakan bagian penting dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Roadmap pengembangan SDM menjadi acuan bagi program-program pengembangan SDM, sehingga lebih optimal dan tepat sasaran. Selain itu, program pengembangan juga menjadi lebih terarah, sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Perseroan. *Roadmap* pengelolaan SDM tersebut digambarkan sebagai berikut:





Sumber Daya Manusia

PENCAPAIAN ROADMAP PENGEMBANGAN SDM

Realisasi *roadmap* pengembangan SDM pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman teknis kompetensi telah dilakukan untuk seluruh karyawan melalui program pelatihan *in-house*.
2. Manajerial dan Kepemimpinan menjadi bagian penting dalam pengembangan karyawan dan menjadi faktor penting dalam proses promosi.
3. Revitalisasi budaya perusahaan telah melibatkan sebagian karyawan.

ORGANISASI PENGELOLAAN SDM

Perseroan mengelola sumber daya manusia melalui Divisi Human Capital dengan fokus terhadap 4 (empat) area, yaitu:

HR Operation

Fungsi dari *HR Operation* di antaranya meliputi fungsi administratif dan *employee relation management*. Fungsi administratif yang dilakukan, yaitu pengelolaan data karyawan, mempersiapkan dokumen kontrak karyawan serta mengelola system HRIS yang ada di perusahaan. Fungsi *employee relation* ini bertanggung jawab untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang positif.

Payroll

Payroll berperan besar dalam remunerasi karyawan serta benefit kesejahteraan karyawan lainnya, yang meliputi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) serta asuransi.

Rekrutmen

Fungsi rekrutmen dalam Divisi Human Capital berperan besar dan terus menjadi fokus utama di Perusahaan seiring dengan semakin meningkatnya Bisnis PT PII serta perubahannya. Tantangan besar dalam fungsi ini adalah mendapatkan SDM yang tepat, akurat dan cepat

Strategy & Culture

Pada fungsi ini Human Capital berperan penting untuk menyelaraskan perkembangan bisnis Perusahaan dengan pengembangan SDM, baik melalui pelatihan, rotasi, mutasi serta pengembangan

karier SDM Perusahaan. Pada fungsi ini, Human Capital juga bertanggung jawab dalam hal penilaian kinerja, pengembangan dan *job grading* serta budaya Perusahaan.

SISTEM REKRUTMEN

Seiring dengan perubahan dan tantangan perkembangan industri, dalam menjaring SDM terbaik Perseroan menitikberatkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas tinggi, mempunyai kemampuan untuk beradaptasi pada perubahan dan memiliki kompetensi unggul sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Dalam setiap proses rekrutmen, PT PII menerapkan asas kesamaan kesempatan, kewajaran dan keterbukaan dalam proses rekrutmen dan seleksi.

Proses rekrutmen dan seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan. Pada tahun 2019, Perseroan telah merekrut 21 (dua puluh satu) karyawan baru, baik yang berstatus *pro-hire* maupun *fresh graduates*. Karyawan-karyawan baru dari berbagai posisi tersebut ditempatkan di sejumlah divisi.

Dalam memenuhi kebutuhan SDM, Perseroan menjalankan proses rekrutmen atau pencarian kandidat melalui sumber internal dan sumber eksternal. Untuk sumber internal dilakukan melalui program pengembangan internal karyawan. Sedangkan sumber eksternal diperoleh melalui kerja sama dengan situs lowongan kerja, sosial media, dan *Employee Referral*. Selain itu, strategi pencarian kandidat juga dilakukan melalui keikutsertaan secara rutin dalam kegiatan *job fair*.

Untuk mendapatkan kandidat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan, Perseroan menggunakan beberapa metode seleksi, di antaranya *assessment*, wawancara dan tes kesehatan. Pada proses seleksi, Perseroan tidak hanya menekankan pada kompetensi atau keterampilan teknis kandidat, namun juga pada kepribadian dan perilaku.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menjalankan sistem rekrutmen secara menyeluruh, serta terus berupaya memperbaharui metodologi maupun penggunaan dari alat penilaian dalam proses rekrutmen. Hal tersebut bertujuan untuk



mendapatkan hasil identifikasi kompetensi yang lebih akurat. Setiap calon karyawan akan melalui berbagai proses evaluasi seperti pemeriksaan latar belakang, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, media sosial dan kondisi kesehatan untuk memastikan karyawan yang bergabung dengan Perseroan adalah kandidat yang terbaik.

PENGEMBANGAN KARIER

PT PII telah menyiapkan jalur karir untuk setiap jabatan berdasarkan pada kelompok jabatan yang telah dibentuk dalam mendukung pengembangan karir karyawan. Adapun kelompok yang dimaksud, meliputi: *business development*, *project*, *risk*, *legal*, *finance* dan *business support*.

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Sistem Manajemen Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh karyawan maupun satuan kerja. Sistem ini disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perusahaan serta Kontrak Manajemen PII. Penilaian kinerja masing-masing individu karyawan dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik dan transparan.

Proses evaluasi kinerja dilakukan secara berkala menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *Balanced Score Card* (BSC) atau lebih dikenal dengan istilah BSC KPI. Selain itu, untuk pertama kalinya PT PII melakukan evaluasi kinerja tengah tahun yang bertujuan sebagai bentuk *monitoring* pencapaian kinerja individu, divisi dan perusahaan tahun 2019. Tindak lanjut penilaian kinerja dan kompetensi adalah perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan, rotasi, mutasi dan promosi bagi karyawan.

PRINSIP PERSAMAAN HAK

PT PII senantiasa menjunjung tinggi persamaan hak para karyawan. Setiap karyawan, tanpa memandang perbedaan gender, suku, agama, serta perbedaan lainnya, mendapatkan hak yang sama dalam pengembangan karir serta kesempatan lainnya di lingkungan Perseroan.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PT PII mengembangkan potensi karyawan sebagai bagian dari strategi dan upaya untuk mencapai target usaha yang telah ditetapkan. Untuk itulah, pemberian fasilitas pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan berkesinambungan menjadi sangat penting dan terus dilakukan oleh Perseroan.

Proses pembelajaran tersebut dilakukan melalui beragam cara, misalnya melalui pendidikan, pelatihan dan *workshop*, baik secara internal maupun secara eksternal bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya perusahaan serta profesionalitas.

Komitmen Pemberian Kesempatan yang Sama kepada Seluruh Karyawan

Salah satu fokus pengembangan kompetensi karyawan adalah melalui program pendidikan dan pelatihan. Perseroan juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan individu untuk menunjang keberhasilan kinerja, karier SDM, serta diselaraskan dengan kebutuhan Perseroan dengan mengacu pada strategi bisnis yang diterapkan. Program pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui program internal maupun eksternal dan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dampak dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

PT PII menjamin tidak terjadi tindakan diskriminasi dalam memperlakukan karyawan sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing untuk mencapai kinerja yang *excellence*.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

Di tahun 2019, sebanyak 115 (seratus lima belas) karyawan telah mengikuti pelatihan baik pelatihan yang terkait dengan pengembangan kompetensi teknis maupun *softskill*. Secara umum pelatihan



Sumber Daya Manusia

yang ada di PT PII dikelompokkan menjadi 3: *in-house training*, *knowledge sharing* dan *public training*. Rincian pelatihan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis Pelatihan	Jumlah Pelatihan	Total Peserta (orang)	Rata-Rata Peserta per Pelatihan (orang)
<i>Inhouse Training</i>	11	418	38
<i>Knowledge Sharing</i>	6	312	52
<i>Public Training</i>	81	241	3

In-house Training

Divisi Human Capital bertanggungjawab untuk mengadakan *in-house training* dengan topik yang bersifat non-teknis maupun forum atas topik-topik tertentu. Detail topik pelatihan beserta total peserta dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Judul <i>In-house Training</i>	Jumlah Peserta
Basic Life Support and Basic Fire Fighting	20
Becoming an Empowering and Engaging Leader	27
Coaching Program untuk VP-SVP PT PII Tahun 2019	15
Economic Infrastructure Forum	43
Konsep Keuangan Negara "Perencanaan dan Penggunaan APBN"	74
Microsoft Power BI	15
Professional brand image and smart lobbying	29
Senior Enlightenment Day 2019	32
Smart Lobbying & Strategy to Become the +1 IIGF Professional	40
Training Infografis (Presentation Skill)	88
Workshop Internalisasi Budaya PT PII	35
Total	418
Rata-Rata	38

Knowledge Sharing

Bentuk lain dari pengembangan di PII adalah *knowledge sharing* dimana kegiatan ini adalah kegiatan *sharing session* dari karyawan yang telah mengikuti pelatihan di luar kantor, *sharing* informasi atas topik tertentu dengan mengundang pihak eksternal dan keikutsertaan karyawan PT PII dalam kegiatan *sharing session* dengan pihak eksternal. Rinciannya disampaikan pada tabel di bawah ini.

Judul <i>Knowledge Sharing</i>	Jumlah Peserta
<i>Capacity Building</i> Pemprov Sumatera Barat dan Pemkot Semarang	6
Fintech Development : Big Data, Machine Learning, Block Chain & Cryptocurrencies	104
Forum GRC 2019	92
Health Talk "Be Active and Get Healthy"	58
PPP and the Cybersecurity Challenge on E-Government	47
Pelaksanaan Pemantauan Proyek Direct Lending & Pemaparan Rencana Kerja dalam Penerimaan Penugasan Proyek Penjaminan Pinjaman Langsung	5
Total	312
Rata-Rata	52

Public Training

Pada tahun 2019, Untuk kategori *public training*, terdapat 81 (delapan puluh satu) topik pelatihan yang diikuti oleh karyawan. *Public training* ini adalah pelatihan yang diajukan karyawan untuk meningkatkan kompetensinya baik *technical* maupun *softskill* dengan cara mendaftarkan pelatihan ke penyelenggara pelatihan di luar PT PII.

Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari upaya PT PII melakukan investasi pada sumber daya manusia yang merupakan aset penting Perseroan. Pada tahun 2019, total biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut mencapai Rp3,64 miliar.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

PT PII menilai bahwa pegawai memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis perusahaan, karena perkembangan diri pegawai akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, penting bagi PT PII untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai secara personal terhadap perusahaan tempatnya bekerja.

Keterlibatan dan antusiasme pegawai terhadap pekerjaan dan tempat bekerja dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan dengan lebih efektif, efisien dan kompetitif. PT PII melakukan survei terhadap tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan serta memastikan aspek-aspek SDM yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan karyawan.

Pada tahun 2019, survei dilaksanakan secara *online* pada periode tanggal 13-17 Januari 2020 bekerjasama dengan PT Binar Consulting (BRIGHT). Hasil dari survei tersebut, rata-rata tingkat kepentingan dari tiap aspek adalah 4,45 membuktikan bahwa dari setiap komponen yang diukur dianggap penting oleh partisipan dan rata-rata tingkat kepuasan dari tiap aspek adalah 3,84 atau dapat dikategorikan Puas.

Melalui survei tersebut, Perseroan dapat memperoleh gambaran mengenai kekuatan yang dimiliki dan hal-hal yang perlu ditingkatkan, serta menjadi fondasi dalam menyusun langkah-langkah peningkatan guna mendukung pencapaian kinerja dan pertumbuhan Perseroan yang lebih baik pada masa mendatang.



Dwi Susanto
Karyawan PT PII

Saya bergabung dengan PT PII di April 2015 dan saat ini sudah hampir 5 tahun berkarir bersama keluarga besar PT PII. Awal kenal dengan PT PII saat dihubungi oleh *Head Hunter* dan dijelaskan siapa dan bagaimana bisnis PT PII dilakukan. Hal yang meyakinkan saya untuk bergabung dengan perusahaan ini adalah perusahaan *financial* di Indonesia yang menjadikan aspek lingkungan dan sosial menjadi salah satu *concern* dalam bisnisnya, dan kebetulan pada saat itu sedang memegang proyek yang di *support* oleh MIGA di perusahaan lama. Setelah berdiskusi dengan keluarga, Bismillah saya bergabung dengan PT PII.

Setelah berkarir hampir 5 tahun, hal yang membuat berkesan adalah hubungan antar karyawan yang relatif beragam dari sisi usia namun hubungan baik dan dapat bekerjasama untuk mencapai target. Selain itu, bisnis PT PII yang unik dan mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia secara tidak langsung menjadi kebanggaan untuk berkontribusi untuk pembangunan di Indonesia. Terakhir, saya merasa masih banyak ruang *improvement* yang dapat dilakukan di PT PII yang memperkaya pengalaman dan karir bagi diri saya.

Sumber Daya Manusia



Soraya Adhe Setiani
Karyawan PT PII

PT PII merupakan BUMN yang terkait dengan infrastruktur, saya ingin merasakan bagian dari bekerja untuk Negeri terutama terkait dengan infrastruktur yang saat ini mempunyai peranan penting di Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan awal saya tertarik bergabung dengan PT PII

Sejak saya bergabung dengan PT PII di Tahun 2016, PT PII sekarang ini tidak hanya menjaga marwahnya sebagai penjaminan infrastruktur, namun juga berperan dalam menjaga dan mengawal proses infrastruktur dari hulu sampai hilir. Hal ini tidak lepas dari lingkungan dan peran Karyawan dan Manajemen yang berintegritas dan semangat dalam bekerja, sehingga PT PII saat ini bisa menjadi Rumahnya Infrastruktur.



Dian Ariani
Karyawan PT PII

Bagi saya, bergabung menjadi keluarga besar PT PII memberikan kebanggaan tersendiri. Sejalan dengan visi misi PT PII, adalah suatu hal yang selalu saya syukuri untuk bisa secara aktif ambil bagian dan terlibat langsung dalam proyek-proyek yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Komitmen Peningkatan Produktivitas

Perseroan berkomitmen untuk membangun dan memelihara Hubungan Industrial yang sehat dan harmonis sebagai sebuah sistem hubungan kerja yang sehat dan konstruktif antara karyawan, Perseroan dan Pemerintah (Tripartit).

Tujuan akhir pengaturan Hubungan Industrial di lingkungan Perseroan adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan dan Perseroan. Untuk itu, Perseroan menempatkan karyawan sebagai mitra strategis dalam membangun dan memelihara hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja melalui komunikasi secara berkala dan berkesinambungan.

Kegiatan dalam Jalinan Hubungan Industrial

Perseroan selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka, positif dan progresif untuk menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis. Beberapa pendekatan yang dilakukan adalah dengan kegiatan-kegiatan dalam bentuk *townhall meeting* yang melibatkan seluruh karyawan atau *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan *Senior Leaders*. Dalam kegiatan tersebut terjadi penyampaian-penyampaian pesan Perseroan kepada karyawan dan memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya terhadap Perseroan.

BUDAYA KERJA

Perseroan telah memiliki budaya kerja yang dikenal dengan INTIME (*Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust dan Excellence*). Pada tahun sebelumnya, Perseroan melakukan revitalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang sudah ada untuk memastikan kesesuaian nilai-nilai tersebut dalam mendukung pencapaian-pencapaian Perseroan dalam jangka panjang. Keluaran dari revitalisasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program budaya yang melibatkan karyawan terpilih dari level Staf sampai *Executive Vice President* (EVP).

Secara berkesinambungan, pada tahun 2019, Perseroan melakukan program internalisasi budaya dengan membentuk 3 tim budaya sesuai dengan jumlah Direktorat yang ada di PT PII. Tim Budaya terdiri dari *Change Leader, Change Champion* dan *Change Agent*. Tiap tim Internalisasi Budaya memiliki program budaya yang diimplementasi sesuai dengan *issue* dan kebutuhan dari masing-masing Direktorat dan terlaksana sejak awal tahun 2019 hingga penghujung tahun 2019. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan implementasi budaya tahun 2019, program Internalisasi Budaya ditutup dengan kegiatan *Culture Gathering* dari masing-masing direktorat.

STRATEGI REMUNERASI

Remunerasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam menarik (*attract*), memotivasi (*motivate*), dan mempertahankan (*retain*) karyawan-karyawan terbaik dalam rangka penyediaan SDM yang berkualitas. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang dinamis, responsif, kompetitif, adil dan seimbang, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan penerapan remunerasi di lingkungan Perseroan didasarkan atas kinerja Perseroan dan karyawan, yang disesuaikan dengan strategi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Remunerasi juga disusun dengan mempertimbangkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku seperti ketenagakerjaan, maupun melakukan *benchmark* dengan organisasi sejenis lainnya.

Survei dan *benchmarking* remunerasi dengan perusahaan dari industri yang sama diharapkan dapat mempertahankan karyawan terbaik dengan remunerasi yang kompetitif di pasar tenaga kerja.

Setiap tahun Perseroan melakukan beberapa penyesuaian terkait struktur remunerasi. Struktur ini difokuskan kepada unsur kompetitif dengan eksternal dan unsur *fairness* dalam penerimaan pendapatan karyawan sesuai dengan masing-masing level dan kinerja selama ini.

Dengan demikian, komponen remunerasi di Perseroan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Gaji pokok
2. Tunjangan Jabatan
3. Tunjangan Perumahan
4. Tunjangan Komunikasi
5. Tunjangan Transportasi

PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan serta upaya mempertahankan karyawan, Perseroan senantiasa terus meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui berbagai aspek. Hingga saat ini, selain komponen yang tertuang dalam sistem remunerasi, karyawan juga mendapatkan fasilitas, antara lain:

1. Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta asuransi.
2. Program pengembangan karyawan seperti program peningkatan jenjang pendidikan, dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.
3. Dukungan pada kebutuhan karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanaan kegiatan olah raga.
4. Bantuan bagi karyawan yang mengalami duka cita.
5. Dan lain-lain.

Sumber Daya Manusia

MANFAAT PASCA KERJA

Pemberian jaminan hari tua atau pensiun merupakan salah satu bentuk penghargaan Perseroan atas loyalitas dan kontribusi karyawan selama aktif bekerja. Jaminan ini juga memberi ketenangan dan motivasi yang lebih dalam berkarya bagi seluruh karyawan yang bekerja di PII.

Pensiun karyawan PII ditetapkan pada usia 56 tahun. Bagi karyawan yang telah berusia 55 tahun dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP). Dalam masa itu, PII memberikan pelatihan wirausaha dan pelatihan purnabakti, sehingga diharapkan para karyawan dapat mempersiapkan diri di masa mendatang.

Karyawan yang telah memasuki usia purnabakti (56 tahun), diberikan kompensasi sesuai peraturan. Sedangkan karyawan tetap yang diikutsertakan dalam Program Hari Tua mendapatkan Kompensasi Jaminan Hari Tua sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

TINGKAT TURN OVER KARYAWAN

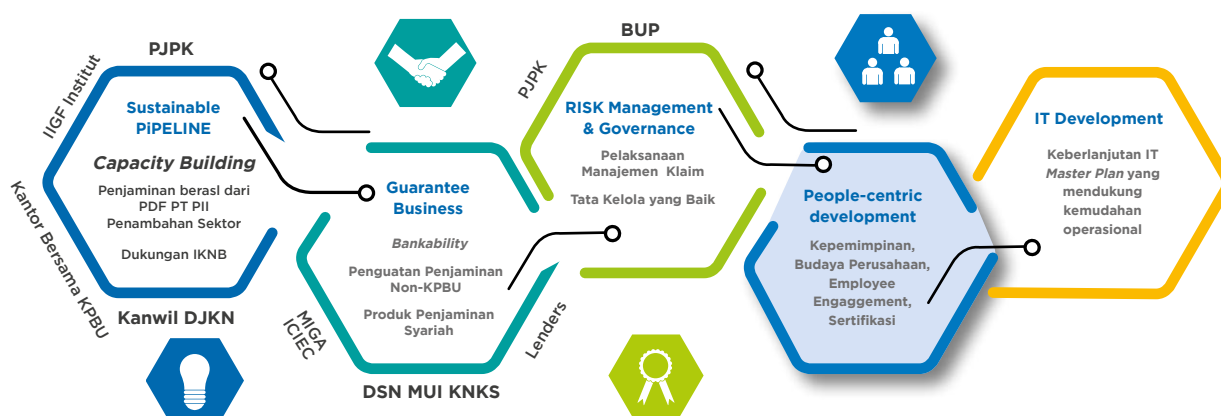
Tingkat *turn over* karyawan Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

2017		2018		2019	
Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase	Jumlah (orang)	Persentase
7	7%	9	7,6%	9	6,8%

Upaya pengendalian *turnover* karyawan tahun 2019 yaitu menyediakan fasilitas *softloan* karyawan, menyediakan fasilitas yang mendukung *work-life balance* karyawan PT PII. Memberikan *experience* bekerja di PT PII yang menarik bagi seluruh karyawan melalui kegiatan *Culture Gathering*, *Employee Gathering*, *Family Gathering* dan aktivitas lainnya selama tahun 2019.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2020

Menghadapi tantangan dan perubahan di industri yang terus berkembang dengan cepat, pengembangan SDM memerlukan perencanaan strategi yang berkesinambungan. Sesuai dengan inisiatif strategi Perseoran, di tahun 2020 pengembangan SDM Perseroan akan fokus terhadap 4 (empat) hal yaitu: *Leadership*, *Corporate Culture*, *Employee Engagement* dan Sertifikasi.







Teknologi Informasi

Perseroan senantiasa mengelola dan mengembangkan TI yang terarah dan efektif dalam menyediakan layanan sesuai dengan standar ekspektasi dan kebutuhan Perseroan.

PT PII menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat membawa Perseroan mencapai akselerasi pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodasi perubahan dan tantangan perkembangan usaha. Perseroan terus mengembangkan dan memanfaatkan TI yang tepat guna menyediakan layanan terbaik serta meminimalisasi risiko operasional bisnis yang dihadapi serta menjadikan sistem manajemen risiko yang dimiliki berjalan dengan efektif.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI 2019

PT PII mengembangkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan memberikan nilai lebih terhadap percepatan bisnis melalui fokus dan kebijakan strategis di bidang TI. Melalui Divisi Corporate Service & Procurement, Perseroan mengelola dan mengembangkan TI yang terarah dan efektif dalam menyediakan layanan sesuai dengan standar ekspektasi dan kebutuhan Perseroan.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menerapkan strategi di bidang TI dengan fokus untuk melakukan integrasi terhadap aplikasi yang sudah ada sesuai konsep *System Oriented Architecture* (SOA), termasuk infrastruktur yang menunjangnya. Di samping itu, Perseroan juga memiliki dan mengimplementasikan *Information Technology* (IT) Policy dan SOP IT dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dengan memperhatikan tren teknologi di industri.

Secara struktur organisasi, Perseroan menetapkan Komite Pengarah TI dengan Direktur Eksekutif Bisnis sebagai *team leader* Komite Pengarah TI.



Investasi Pengembangan Teknologi Informasi

Rp5,8 miliar



Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menginvestasikan dana kurang lebih dari Rp5,8 miliar untuk pengembangan teknologi informasi



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI tersebut antara lain diuraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Jabatan	Deskripsi Pekerjaan
1	Team Leader	- Menyetujui prosedur dan kebijakan pemantauan <i>Master Plan</i> TI. - Bertanggung jawab atas penyelesaian rencana kegiatan yang tercantum dalam <i>Road Map</i> TI. - Menyampaikan keterbukaan informasi atas nama Komite Pengarah TI
2	Team Member	- Melakukan <i>review</i> untuk memastikan investasi dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan kebutuhan dan prioritas bisnis yang tertuang dalam <i>Master Plan</i> TI. - Memonitor dan mengevaluasi efektivitas penerapan Kebijakan TI di lingkungan Perseroan. - Melakukan <i>review</i> terhadap kinerja Tata Kelola TI secara periodik. - Memberikan persetujuan terhadap inisiatif dan rencana investasi TI untuk mendukung layanan TI kepada <i>user</i> dan <i>customer</i>. - Mengidentifikasi perwakilan yang akan ditugaskan di Komite Pengarah TI serta pihak berwenang bila ada eskalasi masalah terkait Proyek TI. - Memberikan data/informasi terkait <i>trend</i> TI ke depan; - Menyampaikan masalah utama terkait proyek TI maupun kemampuan para pihak dalam Proyek dalam memenuhi kewajiban kontraknya. - Menganalisis dan mengajukan kebutuhan untuk menggunakan jasa konsultan atau ahli terkait dengan Proyek TI. - Membuat anggaran tahunan Komite Pengarah TI. - Memfasilitasi penyelesaian masalah dengan pihak terkait TI.

Sebagai tambahan selain tugas dan tanggung jawab di atas, Komite Pengarah TI juga diharapkan untuk dapat menjadi penghubung TI dengan *user* dan manajemen.



Teknologi Informasi

PERAN DAN FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI

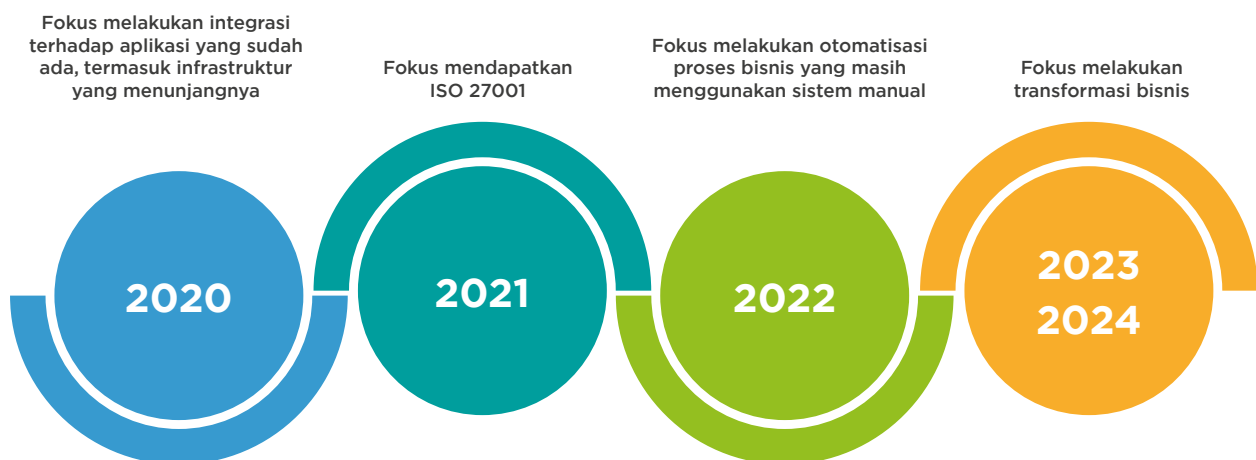
Di lingkungan Perseroan, penerapan teknologi informasi terkini dapat mempermudah proses bisnis. Perseroan juga terus mengembangkan TI melalui *Information Technology Master Plan* (ITMP), sehingga pada masa mendatang TI akan memiliki peran yang lebih besar dalam mendukung kegiatan operasional, bukan hanya sebagai *support*, namun berkembang menjadi *enablers* bahkan menjadi *business transformer*.

BOARD CHARTER/MANUAL TEKNOLOGI INFORMASI

PII telah menetapkan IT *Policy*, SOP dan Instruksi Kerja TI. Manual-manual tersebut berisi, antara lain mengenai kebijakan dan prosedur tentang perencanaan dan operasional TI.

ROADMAP PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

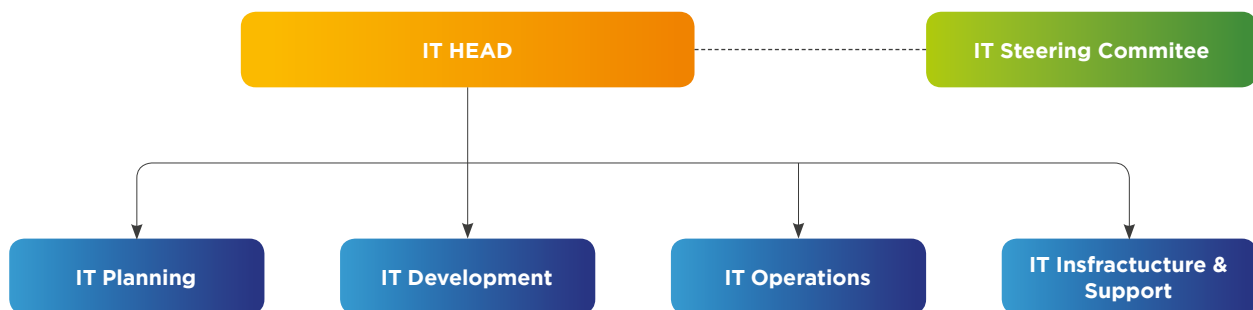
Perseroan telah menyusun dan menerapkan *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai acuan pengembangan TI. ITMP yang dijadikan acuan dalam pengembangan teknologi informasi serta diimplementasikan pada jangka waktu periode 2019-2023. Tahapan *roadmap* pengelolaan TI Perseroan adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Secara organisasi, pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Perseroan berada di Divisi Corporate Service & Procurement. Pengelolaan TI dilaksanakan bersama dengan Komite Pengarah TI dalam rangka implementasi ITMP. Dalam pengelolaan TI terdapat bagian-bagian yang bertanggung jawab atas berjalannya tata kelola teknologi informasi, bagian itu adalah: Perencanaan TI, Pengembangan TI, Operasional TI serta bagian sarana dan pendukung.

IT Organization Unit



Pimpinan Divisi	Staff	IT Steering Committee
Deki S. Wibowo	- Febrian Dwiputra - Redo Pratama - Outsource	M. Wahid Sutopo - Donny Hamdani - Deki S. Wibowo - Roedy Purwanto

Profil Pimpinan Divisi

Deki S. Wibowo

Vice President Corporate Service

Warga negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta. Pertama kali diangkat melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-028/DRK/HC/0118 pada 17 Januari 2018.

Riwayat Pendidikan

Menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1999)

Riwayat Pekerjaan

Bergabung dengan PT PII mulai tahun 2015. Sebelumnya adalah Dewan Pengurus Dana Pensiun Semen Cibinong (2015), Indonesia ICS Compliance Head PT Holcim Indonesia (2007-2015), Assistant Manager - Corporate Finance PT Motorola Indonesia (2006-2007), Senior Auditor PricewaterhouseCoopers (2000-2006), Auditor KAP Presetio Utomo (1999-2000).

Sertifikasi SDM di Bidang Teknologi Informasi

Pada 2019, sertifikasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi adalah:

1. CIA (Certified Internal Auditor) CAI (Certified Audit Internal)
2. CCNA (Certified Cisco Network Administrator)
3. CEH (Certified Ethical Hacker)
4. CRMP (Certified Risk Management Professional)
5. IT Project Management
6. COBIT (Control Objectives for Information and related Technologies)
7. VMWare certification related (Virtual Machine)
8. Visual studio certification related
9. CERG (Certified in Enterprise Risk Governance)
10. CPA (Certified Public Accountant)
11. ITIL (Information Technology Infrastructure Library)



Teknologi Informasi

PELAKSANAAN KEGIATAN 2019

Pada 2019, PT PII telah melakukan rangkaian penguatan dan pengembangan TI yang dilakukan melalui sejumlah program aplikasi, sebagai berikut:

Stakeholder and Project Database:

Pengembangan dari aplikasi COO Dashboard yang berfungsi sebagai integrasi data dan pemutakhiran informasi dari proyek-proyek yang ditangani oleh PT PII dan informasi pemangku kepentingan yang terlibat terhadap proyek-proyek tersebut.

SIP KPBU:

Aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk proses penjarangan proyek KPBU yang potensial berdasarkan informasi awal PJPB dan nilai dari *assessment* sistem tersebut. *Assessment* tersebut juga berfungsi agar PJPB dapat mengetahui sejauh mana kesiapan proyek dan hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan penilaian dan rekomendasi yang diberikan.

E-learning:

Aplikasi yang berfungsi untuk platform pembelajaran dalam bentuk *website* yang dimiliki oleh IIGF-Institute dan merupakan adaptasi dari kurikulum *General Active Learning Program* (GALP).

Server Hyperconverged:

Penambahan kapasitas dan membuat *server* menjadi lebih *compact* dari yang sebelumnya serta memberikan fleksibilitas lebih baik dari server konvensional serta optimalisasi penggunaan program-program aplikasi yang ada.

Billing Monitoring System:

Aplikasi yang berfungsi sebagai monitor jadwal pembayaran, status pembayaran, dan pembuatan *invoice* terkait *fee* dari proyek yang ditangani oleh PT PII.

Single Sign On:

Aplikasi sebagai Portal utama karyawan dalam melakukan akses aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh PT PII.

Visitor Management:

Aplikasi pendukung kegiatan operasional perusahaan dalam pencatatan mobilitas pengunjung.

INVESTASI DAN EVALUASI KINERJA

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menginvestasikan dana kurang lebih dari Rp5,8 miliar untuk pengembangan teknologi informasi. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur *Server Hyperconverged* senilai Rp2,3 miliar; *Software Development* sebesar Rp500 juta meliputi *Stakeholder and Project Database*, *E-learning*, dan SIP KPBU; serta penambahan peralatan pendukung lainnya senilai Rp3 miliar.

HASIL EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI

Pada tahun 2019, Perseroan kembali melakukan *IT Maturity Assessment* dengan pendekatan metode COBIT. Dari hasil evaluasi tersebut, aktivitas selama 2019 telah dijalankan sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan dalam ITMP sehingga IT Maturity mengalami peningkatan dan akan dilanjutkan dan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

RENCANA STRATEGI 2020

Pada tahun 2020, Perseroan akan mengembangkan TI yang berfokus pada integrasi terhadap aplikasi yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan sesuai konsep *System Oriented Architecture* (SOA), termasuk infrastruktur yang menunjangnya. Perseroan juga akan menerapkan ISO 27001 Data Center; implementasi Sistem Digitalisasi Dokumen Perusahaan; serta *Executive Dashboard*.





05



Analisis dan Pembahasan Manajemen



- 114 Tinjauan Makroekonomi dan Industri
- 118 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
- 158 Analisis Kinerja Keuangan
- 166 Informasi Keuangan Material Lainnya
- 178 Informasi Kelangsungan Usaha





Tinjauan Makroekonomi dan Industri

PT PII sebagai salah satu *Special Mission Vehicle (SMV)* Kementerian Keuangan bertindak sebagai *single window* dalam mengevaluasi kelayakan proyek Infrastruktur, membantu mengembangkan struktur proyek dan penjaminan yang *bankable* dan *workable*, memonitor kelancaran rencana mitigasi risiko Proyek sampai kepada memproses klaim.

INDUSTRI INFRASTRUKTUR

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan jaringan Infrastruktur dan industri jasa penyelenggaraan Infrastruktur maupun manufakturnya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Pembangunan Infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan daya saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Upaya pemerataan salah satunya dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur di luar pulau Jawa mengingat lebih dari 150 juta jiwa atau sekitar 60% dari jumlah penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Dengan demikian diharapkan terwujudnya pembangunan dan pengembangan yang lebih merata guna mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Pemerintah menyadari bahwa masih terdapat permasalahan Infrastruktur yang dihadapi utamanya yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi, antara lain: (1) rendahnya pertumbuhan pembangunan Infrastruktur, (2) pertumbuhan Infrastruktur belum mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan (3) belum meratanya pembangunan prasarana dan sarana yang selama ini masih terfokus di pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, tantangan bidang Infrastruktur adalah (1) meningkatkan aksesibilitas akibat ketidaktersediaan prasarana dan sarana Infrastruktur, (2) kesiapan bidang Infrastruktur khususnya dalam lingkup ASEAN, dan (3) kesiapan bidang Infrastruktur dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi.

Dalam rangka mendorong percepatan penyediaan Infrastruktur nasional, Pemerintah telah merencanakan program pengembangan dan perbaikan Infrastruktur sebagaimana tertuang



dalam RPJMN (2015-2019) yang utamanya menysasar wilayah dengan tingkat ketersediaan Infrastruktur rendah seperti Indonesia Timur. Fokus utama pada terciptanya pembangunan dan penguatan Infrastruktur dasar untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat melalui berbagai proyek jalan nasional dan jalan tol, pengembangan bandara, dan pelabuhan. Pemerintah juga berupaya menyediakan Infrastruktur penunjang konektivitas nasional, baik berupa jaringan transportasi maupun telekomunikasi, yang terintegrasi guna mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah juga berkomitmen melakukan optimalisasi dan pemerataan pembangunan Infrastruktur kebutuhan primer seperti penyelenggaraan layanan air minum dan juga yang bersifat sosial (*social infrastructure*) seperti kesehatan, dan pendidikan. Dimana hal ini disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal*).

Pada RPJMN (2020-2024), arah strategis pembangunan berkelanjutan mengacu pada sasaran transformasi digital dengan mengutamakan prinsip keterhubungan satu sama lain (*connecting living*) dan kemampuan mengumpulkan serta menganalisa berbagai informasi dengan berfokus pada pembangunan manusia, ekonomi, wilayah, Infrastruktur dan polhumhanham. Pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu sektor Pengarusutamaan Transformasi Digital yang mengarah pada pembangunan jaringan 5G, pemanfaatan *Big Data* dalam efisiensi transportasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan dengan teknologi digital. Melalui transformasi digital diharapkan terciptanya negara Indonesia yang semakin maju, mandiri, adil dan makmur.



Tinjauan Makroekonomi dan Industri

Ketersediaan Infrastruktur memadai merupakan salah satu kunci meningkatkan daya saing dan mempercepat pergerakan roda perekonomian nasional. Saat ini, upaya Pemerintah dalam menyediakan layanan Infrastruktur yang merata kepada masyarakat masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana jumlah kebutuhan Infrastruktur berdasarkan data RPJMN (2020-2024) mencapai Rp6.445 triliun atau meningkat sebesar 34% dari RPJMN (2015-2019) sebesar Rp4.796,2 triliun. Jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran Pemerintah dalam pemenuhan Infrastruktur yang baru sekitar 57% dari total kebutuhan investasi, Pemerintah memerlukan sumber pembiayaan alternatif untuk dapat memenuhi kesenjangan target investasi baik untuk penyediaan Infrastruktur di tingkat pusat maupun daerah.

Menyiasati kondisi tersebut, Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait secara aktif mengembangkan strategi, kebijakan, maupun skema pembiayaan alternatif untuk menarik partisipasi pihak swasta seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun instrumen kebijakan melalui penugasan BUMN untuk dapat memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek Infrastruktur khusus. Penerapan skema pembiayaan alternatif yang telah diperkuat dari berbagai sisi (kebijakan, fasilitas, dasar hukum/regulasi) diharapkan mampu mengurangi beban pada APBN sekaligus mempercepat penyelenggaraan Infrastruktur yang merata di wilayah Indonesia.

Posisi PT PII

Salah satu skema pembiayaan alternatif yang semakin gencar didorong Pemerintah selama beberapa tahun terakhir adalah melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. Skema KPBU pada prinsipnya melibatkan partisipasi swasta baik dari sisi pembiayaan, kemampuan membangun dan mengelola proyek hingga pengalaman di bidang Infrastruktur. Melalui KPBU, Pemerintah berharap terjadi peningkatan kualitas penyediaan Infrastruktur dan pengadaan Badan Usaha yang kompetitif melalui

kompetisi dalam investasi dan tahapan seleksi yang terbuka dan transparan. Diharapkan pula terjadi optimalisasi *quality spending* atas anggaran Pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas yang maksimal.

Dukungan Pemerintah terhadap skema KPBU tercermin dari penguatan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian sektor terkait sesuai tupoksi masing-masing di setiap tahapan. Pemerintah juga telah mendirikan Kantor Bersama KPBU (*PPP Joint Office*) yang beranggotakan lintas instansi strategis yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, LKPP, BKPM, dan PT PII, yang berperan untuk membantu para pelaku KPBU untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek dan isu yang mungkin timbul, *debottlenecking* permasalahan KPBU proyek-proyek yang sedang berproses dengan salah satunya menjadi perantara atas *stakeholders* terkait Proyek, sampai memonitor proyek-proyek yang sedang berjalan. Dengan adanya *PPP Joint Office*, diharapkan *sustainability* dari proyek KPBU dapat terwujud.

Selain itu, Pemerintah telah pula menyiapkan kebijakan dukungan fiskal seperti *Viability Gap Fund* (VGF) dan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan/*Availability Payment* (AP) untuk proyek-proyek yang dikerjasamakan dengan KPBU. Hal ini mengingat tingginya risiko dan banyaknya proyek yang tidak layak secara finansial utamanya proyek-proyek di sektor sosial. Pemerintah juga telah menyediakan beberapa fasilitas di antaranya Fasilitas Penyiapan Proyek/*Project Development Facility* (PDF) guna membantu penanggung jawab proyek atau yang dikenal juga dengan istilah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") dalam meningkatkan kesiapan proyek dan Penjaminan Pemerintah melalui PT PII.

PT PII sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan bertindak sebagai *single window* dalam mengevaluasi kelayakan proyek Infrastruktur, membantu mengembangkan struktur proyek dan penjaminan yang *bankable* dan *workable*, memonitor kelancaran rencana mitigasi risiko Proyek sampai kepada memproses klaim terhadap penjaminan jika terjadi *default* PJPK.

Tujuan utamanya adalah memastikan kelayakan proyek (*feasibility*) dan *bankability* secara ekonomi dan sosial serta meningkatkan kelayakan kredit (*creditworthiness*) proyek di samping menjaga keberlangsungan dan kesinambungan (*sustainability*) dari proyek. Pelaksanaan mandat utama PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) untuk memberikan Penjaminan atas kewajiban finansial PJPK dalam proyek-proyek KPBU mengacu pada Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Kehadiran penjaminan PT PII juga memberikan kepastian bagi pihak swasta atas risiko-risiko yang mungkin timbul dari pemenuhan kewajiban Pemerintah yang berpotensi mengganggu pengembalian investasi selama masa konsesi.

PT PII secara aktif turut membantu meningkatkan kesiapan dan kapasitas PJPK melalui identifikasi dan penyaringan proyek (*screening*) di tingkat kementerian teknis dan Pemerintah Daerah sejak tahap perencanaan proyek. Selain memproses penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU, PT PII sejak tahun 2018 juga telah melaksanakan mandat baru dalam hal pendampingan PJPK di tahapan penyiapan dan transaksi melalui penugasan PDF dari Kementerian Keuangan.

Di samping itu, sejak tahun 2019, PT PII dipercaya untuk melakukan mandat dalam memberikan penjaminan bersama (*co-guarantee*) dengan Kementerian Keuangan dengan skema pembiayaan di luar KPBU, yaitu penjaminan atas pinjaman BUMN kepada lembaga multilateral yang disebut juga sebagai *credit guarantee*. Hal ini menjadi wujud komitmen PT PII dalam mendukung instrumen kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek Infrastruktur khusus. Melalui penjaminan PT PII dan/atau penjaminan bersama dengan Kementerian Keuangan diharapkan pinjaman BUMN dapat memperoleh suku bunga mendekati suku bunga *sovereign* sehingga secara signifikan mengurangi biaya investasi Infrastruktur.

Melalui berbagai pendekatan instrumen dan kebijakan yang diterapkan Pemerintah tersebut, diharapkan beban kepada APBN dapat berkurang sehingga dapat dialokasikan untuk membiayai kebutuhan proyek prioritas lain seperti proyek-proyek di wilayah Indonesia Timur dan Papua dengan lebih optimal. Melalui pendekatan ini pula Pemerintah mampu mewujudkan proyek Infrastruktur yang tidak hanya memiliki nilai komersial tinggi seperti proyek-proyek jalan tol tetapi juga proyek dengan nilai kelayakan marjinal namun memiliki manfaat sosial yang besar bagi masyarakat, agar tujuan akhir pemerataan pembangunan Infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diwujudkan.



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Sejak pendiriannya hingga akhir tahun 2019, Perseroan telah berhasil melaksanakan dua kegiatan usaha utama, yaitu segmen usaha penjaminan dan segmen usaha pengelolaan dana sesuai dengan tujuan pendirian dan mandat yang diberikan oleh Pemegang Saham.



Proyek Infrastruktur

22

Proyek



Sampai dengan tahun 2019, PT PII telah memberikan penjaminan atas 20 proyek infrastruktur skema KPBU dan 2 proyek infrastruktur skema Non KPBU yang terdiri dari berbagai sektor

Seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia terdorong untuk menyiapkan dukungan fiskal dan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta dalam skala besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan tujuan untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek infrastruktur dalam skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Perseroan kemudian juga mendapatkan mandat baru, yaitu untuk melakukan penjaminan atas pinjaman Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (penjaminan pinjaman langsung). Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 101/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman



dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur. Melalui mandat tersebut, maka penjaminan yang dapat diberikan bukan hanya terbatas terhadap proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU.

Sejalan dengan misi Perseroan untuk memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur, Pemerintah memberikan penugasan baru kepada Perseroan untuk melakukan pendampingan dan penyiapan transaksi atas proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Mandat tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018.

PT PII dirancang untuk menjadi lembaga penjaminan yang kredibel. Hal ini dilakukan melalui tata kelola perusahaan yang baik, yang didukung dengan transparansi dan independensi yang sangat tinggi. Pada akhir tahun 2019, Perseroan telah berhasil

melaksanakan dua kegiatan usaha utama, yaitu segmen usaha penjaminan dan segmen usaha pengelolaan dana sesuai dengan tujuan pendirian dan mandat yang diberikan oleh Pemegang Saham.

SEGMENT USAHA UTAMA

Segmen Usaha Penjaminan

Pada awal pendiriannya, PT PII bergerak dalam bidang penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, terdapat 19 sektor proyek infrastruktur yang dapat diberikan penjaminan oleh Perseroan.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

	Air Minum
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
	Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
	Konservasi Energi
	Fasilitas Perkotaan
	Pariwisata
	Kesehatan
	Lembaga Pemasyarakatan
	Perumahan Rakyat

	Transportasi
	Jalan
	Sumber Daya Air dan Irigasi
	Sistem Pengelolaan Persampahan
	Ketenagalistrikan
	Telekomunikasi dan Informatika
	Fasilitas Pendidikan
	Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Kesenian
	Kawasan

Pada 7 November 2016, PT PII mendapatkan perluasan mandat untuk dapat memberikan penjaminan atas proyek Non-KPBU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. Perluasan mandat tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur yang mulai berlaku di tahun 2018.

Penugasan tersebut menunjukkan bahwa PT PII berperan dalam menjalankan kebijakan satu pelaksana bagi pemerintah dalam mengevaluasi proyek infrastruktur, menstruktur penjaminan, dan memproses klaim. Kebijakan satu pelaksana adalah kebijakan pemerintah yang menugaskan PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang beroperasi sebagai suatu entitas “single window” dalam melakukan proses penilaian (*appraisal*), dan penyusunan struktur (*structuring*)

untuk semua penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan konsistensi dalam proses pemberian penjaminan serta pengelolaan klaim. Dengan demikian, kepercayaan investor akan meningkat sehingga turut terlibat dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Keberhasilan dari usaha penjaminan adalah upaya Perseroan untuk memfasilitasi serta mendorong keberhasilan transaksi bagi PJPK dalam hal ini Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah melalui penyediaan penjaminan untuk proyek KPBU yang baik. Perseroan dapat meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan efisien.

PT PII secara aktif turut membantu meningkatkan kesiapan dan kapasitas PJPK sejak tahap perencanaan proyek utamanya di Kementerian teknis dan Pemerintah Daerah. Selain memproses penjaminan pemerintah untuk proyek KPBU, PT PII sejak tahun 2018 juga telah melaksanakan mandat

baru dalam hal pendampingan PJPK di tahap penyiapan dan transaksi melalui penugasan *Project Development Facility* (PDF) Kementerian Keuangan.

PT PII juga telah menjalankan mandat baru Perseroan di luar skema KPBU, yakni untuk penjaminan atas pinjaman BUMN (skema Non KPBU). Dengan demikian transparansi dan konsistensi PT PII dalam mendukung percepatan infrastruktur diharapkan dapat terwujud.

Sampai dengan tahun 2019, PT PII telah memberikan penjaminan atas 20 proyek infrastruktur skema KPBU

dan 2 proyek infrastruktur skema Non KPBU yang terdiri dari berbagai sektor, antara lain 11 proyek sektor jalan, 4 proyek sektor telekomunikasi dan informatika, 3 proyek sektor air minum, 1 proyek sektor transportasi, 2 proyek sektor ketenagalistrikan, dan 1 proyek sektor pariwisata dengan total nilai investasi lebih dari Rp200 triliun. Penjaminan PT PII tidak hanya diberikan untuk proyek yang memiliki nilai komersial tinggi tetapi juga untuk proyek dengan kelayakan marjinal namun memiliki manfaat sosial ekonomi yang besar bagi masyarakat. Secara rinci, proyek-proyek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

 2 Proyek Sektor Ketenagalistrikan	 4 Proyek Sektor Telekomunikasi dan Informatika	 11 Proyek Sektor Jalan	 3 Proyek Sektor Air Minum	 1 Proyek Sektor Pariwisata	 1 Proyek Transportasi
- Central Java Power Plant - Hydropower Programme	- Palapa Ring Paket Barat - Palapa Ring Paket Tengah - Palapa Ring Paket Timur - Satelit Multi Fungsi	- Jalan Tol Batang-Semarang - Jalan Tol Manado-Bitung - Jalan Tol Pandaan-Malang - Jalan Tol Balikpapan-Samarinda - Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated - Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan - Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar - Jalan Tol Serang-Panimbang - Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi - Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan - Jalan Tol Semarang-Demak	- SPAM Umbulan - SPAM Kota Bandar Lampung - SPAM Semarang Barat	KEK Mandalika	KA Makassar - Parepare

Kapasitas Penjaminan

Kapasitas PT PII untuk melakukan penjaminan proyek-proyek Infrastruktur masih sepenuhnya mengandalkan ekuitas perusahaan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disetor penuh ke dalam modal saham Perseroan. Kemampuan modal sangat menentukan kapasitas untuk menyediakan penjaminan bagi proyek-proyek KPBU Infrastruktur. Kecukupan atas kapasitas penjaminan menjadi prioritas bagi pemerintah, karena berpengaruh terhadap kredibilitas PT PII di mata

investor potensial dalam pengembangan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, PT PII dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga multilateral untuk memberikan penjaminan bersama.

Hingga akhir tahun 2019, PT PII telah menjamin 22 proyek dengan estimasi nilai proyek sebesar Rp212,4 triliun dan nilai penjaminan sebesar Rp55,7 triliun. Dengan demikian, rasio nilai penjaminan terhadap ekuitas PT PII (*gearing ratio*) sebesar Rp10,97 triliun adalah 5,1x.

Portofolio Proyek Penjaminan

Sektor Ketenagalistrikan		
1	PLTU Jawa Tengah (Batang)	2 x 1.000 MW Rp 61,46 triliun
2	Hydropower Programme	35.000 MW Rp 6,57 triliun
Sektor Telekomunikasi		
3	Palapa Ring Paket Barat	1.711 Km Kabel Laut 427 Km Kabel darat Rp 1,23 triliun
4	Palapa Ring Paket Tengah	1.797 Km Kabel Laut 1.289 Km Kabel darat Rp 1,09 triliun
5	Palapa Ring Paket Timur	4.508 Km Kabel Laut 2.379 Km Kabel darat Rp 5,09 triliun
6	Satelit Multi Fungsi	150 Gbps Rp 6,42 triliun

Sektor Jalan		
7	Jalan Tol Batang - Semarang	75 Km Rp 14,49 triliun
8	Jalan Tol Manado - Bitung	39,9 Km Rp 5,12 triliun
9	Jalan Tol Pandaan - Malang	38,49 Km Rp 6,44 triliun
10	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	99,35 Km Rp 9,97 triliun
11	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated	36,4 Km Rp 16,23 triliun
12	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	60,1 Km Rp 8,41 triliun





13	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	38,3 Km Rp 12,22 triliun
14	Jalan Tol Serang - Panimbang	83,7 Km Rp 5,33 triliun
15	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	172,9 Km Rp 23,39 triliun
16	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan	64 Km Rp 14,69 triliun
17	Jalan Tol Semarang - Demak	27 Km Rp 5,44 triliun

Sektor Sistem Penyediaan Air Minum

18	SPAM Umbulan - Jawa Timur	4.000 liter/detik Rp 2,06 triliun
19	SPAM Kota Bandar Lampung	750 liter/detik Rp 750 miliar
20	SPAM Semarang Barat	1.000 liter/detik Rp 417 miliar

Sektor Pariwisata

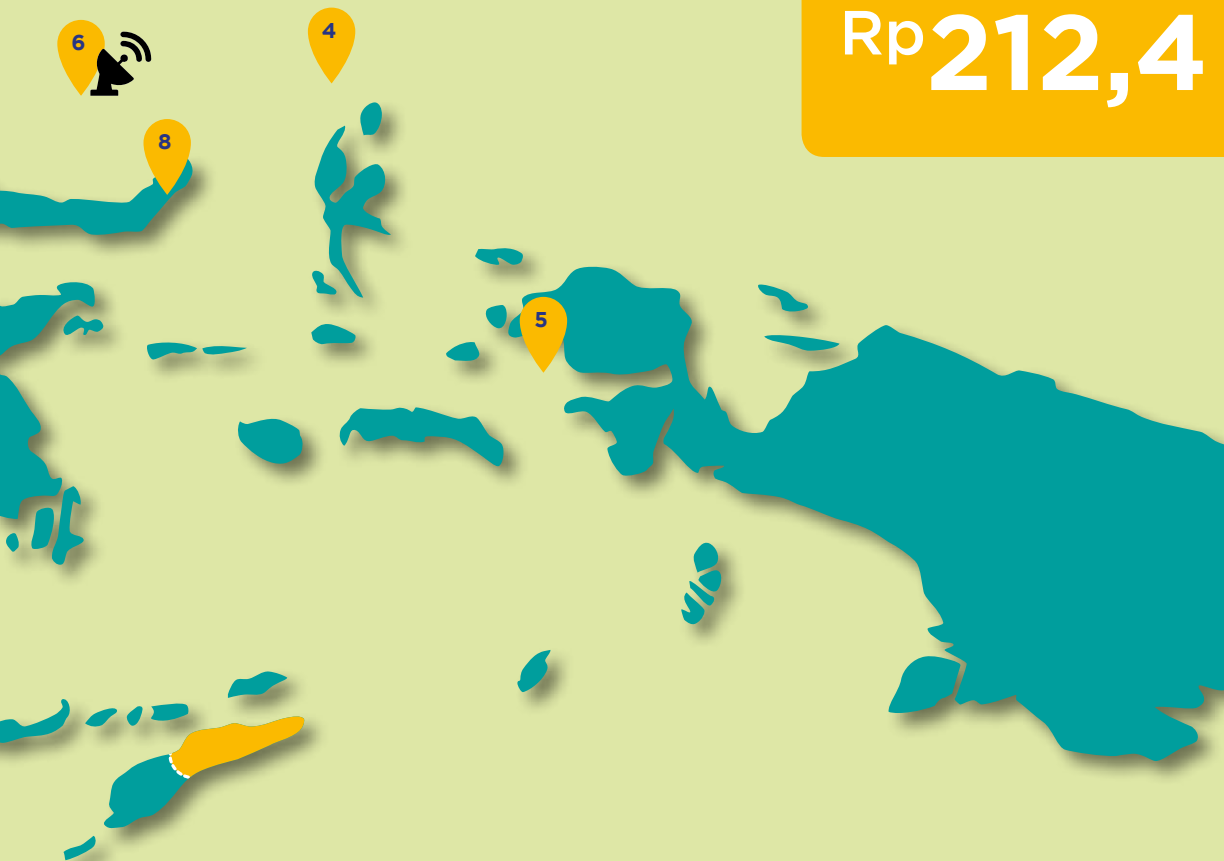
21	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Rp 4,58 triliun

Sektor Transportasi

22	KA Makassar - Parepare	Rp 1,01 triliun

Total Nilai Investasi

Rp**212,4** triliun





Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Ringkasan Status Penjaminan

No	Nama Proyek	Uraian	Nilai Proyek (Rp Juta)	Durasi Penjaminan	Efektif Penjaminan	Tahapan Proyek	Financial Close
Infrastruktur Pembangkit Listrik							
1	Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Jawa Tengah	Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara dengan kapasitas 2x1000 MW yang terletak di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	61.455.916*	16 Tahun (opsi perpanjangan hingga 21 Tahun) setelah Tanggal Operasi Komersial (TOK)	6-Jun-16	Konstruksi	3-Jun-16
2	Hydropower Programme	Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Mini Hidro yang terletak di empat provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Papua) dengan total kapasitas 195 MW	6.568.048	15 Tahun setelah Tanggal Efektif	5-Sep-19	Pra-konstruksi	5-Sep-19
Infrastruktur Telekomunikasi							
3	Palapa Ring Paket Barat	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian barat Indonesia yang berada di 5 Kabupaten/Kota dengan panjang kabel laut 1.711 Km dan kabel darat 427 Km	1.228.550	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 12 tahun setelah TOK	10-Nov-16	Operasi (2-Mar-18)	10-Nov-16
4	Palapa Ring Paket Tengah	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian tengah Indonesia yang berada di 17 kabupaten/kota dengan panjang kabel laut 1.797 Km, kabel darat 1.289 Km dan 7 tower	1.093.399	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 12 tahun setelah TOK	30-Dec-16	Operasi (21-Dec-18)	29-Sep-16
5	Palapa Ring Paket Timur	Proyek telekomunikasi dengan sistem serat optik kabel darat dan laut di daerah bagian timur Indonesia yang berada di 35 Kabupaten/Kota dengan panjang kabel laut 4.508 Km, kabel darat 2.379 Km dan 52 tower	5.087.881	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 12 tahun setelah TOK	29-Mar-17	Operasi (29-Aug-19)	29-Mar-17
6	Satelit Multi Fungsi	Satelit dengan teknologi HTS (<i>High Throughput Satellite</i>) dengan kapasitas 150 Gbps	6.420.756	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 12 tahun setelah TOK	-	Pra Konstruksi	-
Infrastruktur Jalan							
7	Jalan Tol Batang-Semarang	Terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan panjang 75 Km	14.489.527	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	20-Jun-16	Operasi (14-Jan-19)	2-Apr-18
8	Jalan Tol Manado-Bitung	Terletak di Provinsi Sulawesi Utara dengan panjang 39,9Km	5.123.287 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	6-Okt-16	Konstruksi	13-Sep-17
9	Jalan Tol Pandaan-Malang	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang 38,49 Km	6.436.030	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	3-Okt-16	Operasi (Seksi 1-3: 10-Jun-19 & Seksi 4: 30-Okt-19)	13-Sep-17
10	Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	Terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan panjang total 99,35 Km	9.972.559 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	2-Dec-16	Operasi (Seksi 2-4a: 20-Dec-19, Seksi 4b: 31-Dec-19)	21-Dec-18

Ringkasan Status Penjaminan

No	Nama Proyek	Uraian	Nilai Proyek (Rp Juta)	Durasi Penjaminan	Efektif Penjaminan	Tahapan Proyek	Financial Close
11	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 36,4 Km	16.233.409	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	8-Mei-17	Operasi (12-Des-19)	Turnkey Contract
12	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	Terletak di Provinsi Jawa Barat dengan total panjang 60,1 Km	8.408.685 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	22-Feb-19	Konstruksi	Turnkey Contract
13	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan total panjang 38,3 Km	12.224.389	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	11-Des-17	Konstruksi	Turnkey Contract
14	Jalan Tol Serang-Panimbang	Terletak di Provinsi Banten dengan total 83,7 Km	5.329.898 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	17-Nov-17	Konstruksi	Feb-19
15	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Terletak di Provinsi Jawa Timur dengan panjang ruas jalan sekitar 172,9 Km	23.391.192	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	-	Konstruksi	-
16	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	Terletak di Provinsi Jawa Barat sepanjang 64 Km	14.690.641	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	27-Jun-19	Konstruksi	Turnkey Contract
17	Jalan Tol Semarang-Demak	Terletak di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 27 Km	5.440.789 (tidak termasuk dukungan konstruksi pemerintah)	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	-	Konstruksi	-
Infrastruktur Penyediaan Air Minum							
18	SPAM Umbulan	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas air 4.000 l/detik dan panjang pipa transmisi 92,3 km dari Umbulan ke Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan	2.056.595 (tidak termasuk dukungan konstruksi Pemerintah)	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	10-Feb-17	Konstruksi	10-Feb-17
19	SPAM Kota Bandar Lampung	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas air 750 l/detik dan panjang pipa transmisi 22 km.	750.000 (tidak termasuk dukungan konstruksi Pemerintah)	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	14-Agt-18	Konstruksi	13-Agt-18
20	SPAM Semarang Barat	Proyek penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 l/detik.	417.286	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan 15 tahun setelah TOK	29-Mei-19	Konstruksi	22-Mei-19
Infrastruktur Pariwisata							
21	KEK Mandalika	Pengembangan wilayah Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang terletak di kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.	4.583.236*	35 Tahun setelah Tanggal Efektif	22-Mar-19	Pra Konstruksi	22-Mar-19

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Ringkasan Status Penjaminan

No	Nama Proyek	Uraian	Nilai Proyek (Rp Juta)	Durasi Penjaminan	Efektif Penjaminan	Tahapan Proyek	Financial Close
Infrastruktur Transportasi							
22	KA Makassar-Parepare	Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum dengan Area Layanan Sulawesi Selatan meliputi 5 Kabupaten/Kota: Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare	1.005.360	14 Tahun setelah TOK	-	Pra Konstruksi	-

*) Nilai proyek pada saat penandatanganan perjanjian penjaminan

SEGMENT USAHA PENJAMINAN KPBU

Sektor Ketenagalistrikan

Proyek PLTU Jawa Tengah (Batang) merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW, senilai Rp61,5 Triliun



PT PII berpartisipasi pada sektor kelistrikan dalam penjaminan penyediaan infrastruktur pembangkit listrik. Atas proyek pembangunan infrastruktur listrik tersebut, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT PLN (Persero) selaku PJPK untuk pengembangan proyek-proyek kelistrikan nasional. Peran serta PT PII merupakan upaya untuk membantu pemerintah dalam memenuhi peningkatan kebutuhan listrik nasional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan proyek-proyek yang dijamin PT PII disampaikan pada paparan di bawah ini.

PLTU Jawa Tengah/*Central Java Power Plant*

Proyek ini merupakan proyek infrastruktur skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama sesuai Perpres 67/2005 di mana pada saat itu masih disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Proyek tersebut berhasil diwujudkan dengan memperoleh penjaminan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) sesuai Perpres 78/2010.

Proyek PLTU Jawa Tengah merupakan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2 x 1.000 MW berlokasi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU senilai Rp61,5 triliun tersebut sedang dibangun oleh konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI) dengan skema *Build-Operate-Transfer* dengan masa konsesi 25 tahun.

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada *Power Purchase Agreement* (PPA), PTPII dan Kementerian Keuangan telah menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT BPI selaku Badan Usaha (BU) pada 6 Oktober 2011. Pada saat bersamaan, ditandatangani juga Perjanjian Regres antara PT PII dengan PT PLN (Persero) sebagai PJPK.

Dalam kenyataannya kemudian, terjadi keterlambatan dalam penerbitan beberapa perizinan yang diperlukan, penyelesaian proses AMDAL, serta

penuntasan pembebasan lahan untuk proyek. PT PII kemudian secara proaktif membentuk *Joint Monitoring Committee* (JMC) bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan, PT BPI dan PT PLN (Persero), untuk memantau upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut. Namun, sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, proses *financial close* belum dapat tercapai, sehingga diperlukan amandemen perjanjian kerjasama antara PT BPI dan PT PLN (Persero).

Pada akhirnya, *financial close* proyek ini dilaksanakan di Istana Negara pada 9 Juni 2016 yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Proyek ini merupakan langkah Pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat.

PLTU Jawa Tengah mendapatkan kucuran dana dari Japan Bank for International Cooperation dan beberapa sindikasi perbankan komersial internasional kepada PT BPI. Dengan tercapainya *financial close*, maka proyek PLTU Jawa Tengah telah dapat dimulai konstruksinya untuk mencapai target penyelesaian.

Lokasi	Kab. Batang – Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	Rp61,46 Triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	PT PLN (Persero)
Badan Usaha	PT Bhimasena Power Indonesia



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Sektor Telekomunikasi

Hingga akhir tahun 2019, PT PII telah menjalankan penjaminan pada beberapa Proyek Strategis Nasional di sektor telekomunikasi meliputi Proyek Palapa Ring dan Proyek Satelit Multi Fungsi



Jaringan Fiber Optik Tulang Punggung (Palapa Ring)

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018, dan juga termasuk Proyek Prioritas Nasional. Proyek ini adalah pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Proyek pengembangan jaringan *backbone* tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan sistem komunikasi kabel laut dan sistem komunikasi serat optik ke 57 kota/kabupaten yang belum terlayani.

Proses pelaksanaannya dibagi menjadi tiga paket: Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur dengan estimasi panjang kabel sepanjang 8.871 km. Proyek ini ditargetkan mampu mendistribusikan jaringan *broadband* dengan kecepatan 10 Mbps di daerah pedesaan dan 20 MBps di daerah perkotaan. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan konektivitas di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui pemerataan akses telekomunikasi.

Proyek Palapa Ring menjadi acuan karena merupakan proyek pertama pada sektor telekomunikasi yang memakai skema *Availability Payment* (AP) yang ditawarkan oleh pemerintah dengan skema KPBU. Berdasarkan skema tersebut, pemerintah

melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mulai membayar kepada Badan Usaha (BU) saat proyek sudah beroperasi. Skema ketersediaan layanan yang digunakan untuk proyek ini berbeda dengan skema *Viability Gap Fund* (VGF). Jika VGF menggunakan dana tunai pada masa konstruksi, maka skema ketersediaan layanan dibayar oleh PJPB kepada BU berdasarkan kinerja BU selama masa pengoperasian dan pemeliharaan. Dari sisi pemerintah, pelaksanaan pembayaran ketersediaan dilakukan melalui Badan Layanan Umum Kemenkominfo, Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI).

Palapa Ring Paket Barat

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama proyek Palapa Ring Paket Barat dilaksanakan di kantor Kementerian Keuangan pada 29 Februari 2016. Selain itu juga ditandatangani Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Palapa Ring Barat selaku BU dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kemenkominfo. Pada 25 Juli 2016, Proyek Palapa Ring Paket Barat mencapai *financial close*, di mana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku *lender* menyalurkan kredit senilai Rp875 miliar kepada PT Palapa Ring Barat.

Mengingat proyek ini telah beroperasi komersial sejak 2 Maret 2018, Pemerintah mulai membayar ketersediaan layanan kepada PT Palapa Ring Barat.

Lokasi	Provinsi Riau dan Kep. Riau
Nilai Proyek	Rp1,23 Triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Usaha	PT Palapa Ring Barat

Palapa Ring Paket Tengah

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama paket ini telah dilakukan pada 4 Maret 2016 antara Menteri Komunikasi dan Informatika selaku PJPK dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia selaku BU. Pada kesempatan yang sama, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk proyek Palapa Ring Paket Tengah. *Financial Close* dilaksanakan pada 29 September 2016 di Istana Negara dengan disaksikan oleh Presiden RI dan Proyek Palapa Ring Paket Tengah telah resmi beroperasi pada tanggal 21 Desember 2018.

Nilai investasi proyek Palapa Ring Paket Tengah tersebut mencapai Rp1,09 triliun. Proyek ini adalah Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Lokasi	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi NTT, Provinsi Papua Barat
Nilai Proyek	Rp1,09 Triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Usaha	PT Len Telekomunikasi Indonesia

Palapa Ring Paket Timur

Kerja sama proyek ini pertama kali ditandatangani pada 29 September 2016 di Istana Negara, disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dilakukan antara PT PII dengan PT Palapa Timur Telematika selaku BU dan Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kemenkominfo selaku PJPK.

Pada tanggal 29 Maret 2017, bertempat di Kantor Kemenkominfo dilakukan Penandatanganan Efektif Pembiayaan (*financial close*) antara PT Bank BNI (Persero) dan PT Palapa Timur Telematika. Dalam kesempatan yang sama juga penyerahan surat efektif penjaminan oleh PT PII kepada PT Palapa Timur Telematika. Proyek ini juga termasuk proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Lokasi	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat
Nilai Proyek	Rp5,09 Triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Usaha	PT Palapa Timur Telematika

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Satelit Multi Fungsi

Kondisi geografis Indonesia yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat guna dalam mengentaskan kesenjangan akses *broadband internet*. Proyek Satelit Multi Fungsi merupakan salah satu bentuk upaya dari Kemenkominfo dalam menuntaskan rendahnya tingkat konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan Perbatasan.

Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dilakukan antara PT PII dengan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai BU dan Perjanjian Regres proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai PJPK. Satelit Multi Fungsi merupakan proyek KPBU keempat di sektor telekomunikasi yang mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT PII setelah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur.

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, proyek Satelit Multi Fungsi dikembangkan oleh Kemenkominfo sebagai PJPK dengan dukungan penuh oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Ke depannya, tentu saja diharapkan manfaat Satelit Multi Fungsi dapat dinikmati berbagai sektor pendidikan, kesehatan, politik, hukum dan keamanan, pemerintah daerah, juga khususnya sektor keuangan untuk mendukung percepatan digitalisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi), guna mendorong percepatan realisasi keuangan inklusif di seluruh Indonesia.

Lokasi	Tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia
Nilai Proyek	Rp6,42 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Usaha	PT Satelit Nusantara Tiga

Sektor Jalan

Hingga akhir tahun 2019, terdapat 11 proyek pembangunan infrastruktur jalan tol yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII.



Salah satu sektor dimana PT PII sangat aktif berperan memberikan penjaminan terhadap proyek adalah pada sektor infrastruktur jalan tol. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk proyek-proyek jalan tol tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), yang diwakili oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Hingga akhir tahun 2019, terdapat 11 proyek pembangunan infrastruktur jalan tol yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII.

Jalan Tol Batang-Semarang

Investasi proyek jalan tol Batang-Semarang sepanjang 75 km mencapai Rp14,5 triliun. Jalan tersebut merupakan bagian dari jalan tol Trans-Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Penandatanganan proyek dilaksanakan di Kantor Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April 2016 antara Kementerian PUPR selaku PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Jasamarga Semarang Batang. Pada saat bersamaan, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara PT Jasamarga Semarang Batang dan PT PII serta Perjanjian Regres antara PT PII dengan Kementerian PUPR.

Pada tahun 2019, perkembangan terakhir dari proyek jalan tol Batang-Semarang adalah tol ini telah mulai beroperasi pada Januari 2019. Proyek yang dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini merupakan proyek tol pertama yang diberikan penjaminan oleh pemerintah melalui PT PII. Proyek tersebut juga salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018.

Lokasi	Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	Rp14,49 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Semarang Batang

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Jalan Tol Manado-Bitung

Jalan tol yang terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018. Berdasarkan Perpres No. 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Pelabuhan Bitung akan dikembangkan menjadi pelabuhan yang melayani kegiatan ekspor impor dari wilayah dan ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu, jalan yang menghubungkan Kota Manado dengan Kota Bitung tergolong sudah sangat padat dan tidak memiliki alternatif langsung sehingga menyebabkan peningkatan waktu tempuh perjalanan

dan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana penghubung untuk mendorong pergerakan penumpang, barang dan jasa dari Kota Manado sebagai pusat kegiatan perekonomian di Sulawesi Utara ke Kota Bitung.

Pembangunan jalan tol Manado Bitung dengan panjang 39,9 km ini memiliki nilai investasi mencapai Rp5,12 triliun dengan masa konsesi 40 tahun. PT Jasamarga Manado Bitung sebagai Badan Usaha Jalan Tol mengerjakan seksi 2 dari Simpang Susun Airmadidi sampai dengan Bitung sepanjang 25 km. Sedangkan pendanaan untuk seksi 1 didanai oleh Pemerintah. Nilai investasi di atas adalah hanya untuk bagian yang dikerjakan oleh PT Jasamarga Manado Bitung.

Lokasi	Provinsi Sulawesi Utara
Nilai Proyek	Rp5,12 triliun (tidak termasuk dukungan konstruksi oleh pemerintah)
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Manado Bitung

Jalan Tol Pandaan-Malang

Jalan tol ini merupakan bagian dari rencana koridor jalan utara-selatan di Provinsi Jawa Timur sebagai kelanjutan dari ruas jalan tol Gempol-Pandaan yaitu sepanjang 38,49 km. Ruas jalan tol ini akan melalui tiga daerah penting di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang.

Ruas jalan tol ini diprediksi menjadi arteri utama dari banyak alternatif ruas jalan non-tol yang menghubungkan kawasan utara dengan kawasan selatan wilayah Jawa Timur. Sepanjang ruas tol tersebut direncanakan terdapat 5 (lima) *interchange*.

Hingga akhir 2019, ruas Pandaan sampai dengan Pakis sudah beroperasi.

Ruas jalan tol Pandaan-Malang diharapkan ikut memperlancar lalu lintas, baik transportasi penumpang maupun barang dan jasa dari wilayah Pandaan dan Malang yang terkoneksi langsung dengan Kota Surabaya dan sebaliknya. Selain itu, diharapkan dengan adanya ruas jalan tol Pandaan-Malang tingkat perekonomian masyarakat di wilayah tersebut dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan volume pengunjung ke daerah tujuan wisata di Kota Malang.

Lokasi	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	Rp6,44 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Pandaan Malang

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

Proyek jalan tol ini terletak di wilayah administratif Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Kota Samarinda dan Balikpapan adalah dua kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan

dan Kota Balikpapan adalah merupakan pusat perdagangan yang menjadi pintu masuk utama ke Kalimantan Timur.

Ruas tol tersebut merupakan salah satu koridor penting bagi lalu lintas pergerakan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, merupakan

1 (satu) dari 7 (tujuh) jalan tol yang masuk ke dalam rencana sistem transportasi Provinsi Kalimantan Timur.

Tol sepanjang 99,35 km ini terdiri dari 2 (dua) paket pembangunan. Paket 1 adalah pembangunan Seksi 1 (Balikpapan-Samboja) sepanjang 22,03 km dan Seksi 5 (Balikpapan-Sepinggah) sepanjang 11,09 km. Paket 2 adalah Seksi 2 (Semboja-Muarajawa) sepanjang 30,98 km, Seksi 3 (Muarajawa-Palaran) sepanjang 17,30 km serta Seksi 4 (Palaran-Jembatan Mahkota 2) sepanjang 17,95 km. Konstruksi paket 1 merupakan tanggung jawab pemerintah, sedangkan konstruksi paket 2 merupakan tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana (PT Jasamarga Balikpapan Samarinda).

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda juga bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan paket 1 dan paket 2. Nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda sebesar Rp9,97 triliun mencakup konstruksi untuk paket 2.

Ruas tol Balikpapan-Samarinda dapat menjadi alternatif menyelesaikan permasalahan jalur lalu lintas yang padat dan meningkatkan efisiensi waktu perjalanan. Pembangunannya juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur serta meningkatkan layanan/akses mobilisasi bagi warga Kalimantan Timur. Pada akhir 2019, paket 2 sudah resmi beroperasi.

Lokasi	Provinsi Kalimantan Timur
Nilai Proyek	Rp9,97 triliun (tidak termasuk dukungan konstruksi oleh pemerintah)
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated

Proyek tol ini memiliki total panjang mencapai 36,4 km dengan investasi senilai Rp16,23 triliun. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama proyek ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016. Sedangkan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII secara bersamaan ditandatangani pada 22 Februari 2017. Tol ini telah mulai beroperasi sejak 12 Desember 2019.

Lokasi	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	Rp16,23 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek

Jalan Tol Cileunyi-Sumedang - Dawuan

Panjang proyek jalan tol yang berada di Provinsi Jawa Barat ini adalah 60,1 km dengan nilai investasi sebesar Rp8,4 triliun. Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres proyek ini ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2017. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018.

Lingkup KPBU pada proyek ini adalah konstruksi di seksi III-VI dan pengoperasian di seluruh seksi (I-VI). Nilai investasi di atas hanya mencakup konstruksi di seksi III-VI.

Lokasi	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	Rp8,41 triliun (tidak termasuk dukungan konstruksi oleh pemerintah)
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Citra Karya Jabar Tol



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar

Panjang proyek jalan tol di Provinsi Jawa Timur ini mencapai 38,3 km dengan investasi Rp12,22 triliun. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama proyek ini dilaksanakan pada 5 Desember 2016. Sedangkan Perjanjian Penjaminan antara PT PII dengan PT Waskita Bumi Wira dan Perjanjian Regres antara Kementerian PUPR dengan PT PII secara bersamaan ditandatangani pada 22 Februari 2017.

Lokasi	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	Rp12,22 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Waskita Bumi Wira

Jalan Tol Serang-Panimbang

Proyek jalan tol Serang-Panimbang ini terletak di Provinsi Banten sepanjang 83,7 km dengan nilai investasi Rp5,33 triliun. Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2017. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018.

Lingkup KPBU untuk PT Wijaya Karya Serang Panimbang adalah konstruksi di seksi I-II dan pengoperasian di seluruh seksi (I-III). Nilai investasi di atas hanya mencakup konstruksi seksi I-II. Konstruksi di seksi III sepanjang 33 km akan didanai melalui dukungan konstruksi dari Pemerintah.

Lokasi	Provinsi Banten
Nilai Proyek	Rp5,33 triliun (tidak termasuk dukungan konstruksi oleh pemerintah)
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

Hingga akhir 2019, penetapan lokasi untuk proyek ruas jalan tol Probolinggo-Banyuwangi telah diperoleh untuk Seksi I dan II. Sedangkan penetapan lokasi untuk Seksi III ditargetkan terbit di triwulan pertama 2020. Panjang proyek jalan tol yang melewati 3 Kabupaten: Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi ini sekitar 172,9 km. Nilai investasi proyek ini mencapai Rp23,39 triliun.

Lokasi	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	Rp23,39 triliun (tidak termasuk dukungan konstruksi oleh pemerintah)
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi

Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan

Penetapan lokasi untuk proyek ruas jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 30 November 2018. Proyek ini berawal di sekitar *interchange* Jatiasih, masuk ke wilayah kota Bekasi dan berakhir di sekitar *interchange* Sadang, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Panjang jalan tol tersebut mencapai 64 km.

Nilai investasi pembangunan infrastruktur jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan mencapai Rp14,6 triliun.

Lokasi	Provinsi Jawa Barat
Nilai Proyek	Rp14,69 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Jasamarga Japek Selatan

Jalan Tol Semarang-Demak

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan antara Menteri PUPR dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak (PT PPSD) pada tanggal 23 September 2019. Selanjutnya di hari yang sama, dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan oleh PT PII dan PT PPSD, dan penandatanganan Perjanjian Regres dilakukan oleh Menteri PUPR dengan Direktur Utama PT PII. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran Kementerian Keuangan RI.

Pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak, cakupan proyek yang ditandatangani meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan Tanggul Laut. Proyek ini berlokasi di Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan panjang jalan tol adalah 27 km (termasuk dukungan konstruksi oleh pemerintah sepanjang 10,69 km) dan dengan nilai investasi yang ditanggung oleh pihak PT PPSD sebesar Rp5,44 Triliun.

Lokasi	Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	Rp5,44 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Badan Usaha	PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Sektor Penyediaan Air Minum

Hingga tahun 2019 terdapat 3 (tiga) proyek pembangunan infrastruktur SPAM yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII yakni proyek SPAM Umbulan (Jawa Timur), SPAM Kota Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat.



Hingga tahun 2019 terdapat 3 (tiga) proyek pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah mendapatkan penjaminan dari PT PII yakni proyek SPAM Umbulan (Jawa Timur), SPAM Kota Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat.

SPAM Umbulan, Jawa Timur

Proyek SPAM Umbulan dimaksudkan untuk mengatasi potensi krisis air dan memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencari jalan keluar melalui pemanfaatan mata air Umbulan yang terdapat di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Mata air Umbulan dipilih karena dapat memproduksi 4.000 liter/detik dan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk 1,8 juta jiwa. Pasokan air minum untuk beberapa kota utama yang mengalami keterbatasan pasokan air minum pada beberapa kota di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan sekitarnya.

Hal ini membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur menginisiasi proyek transmisi penyediaan air bersih dari mata air Umbulan di Kabupaten Pasuruan menuju 17 titik *offtake* milik PDAM dan PDAB yang terletak di kabupaten-kabupaten dan kota-kota tersebut.

Proyek SPAM Umbulan dibangun berdasarkan skema KPBU antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku PJPK dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan selaku BU. Nilai investasi proyek SPAM Umbulan mencapai Rp2,057 Triliun dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp818 Miliar dari Kementerian Keuangan.

Pada 21 Juli 2016, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan Perjanjian Regres dengan Gubernur Jawa Timur untuk Proyek SPAM Umbulan. Proyek ini merupakan proyek sektor air dan proyek daerah pertama yang diberikan penjaminan pemerintah melalui PT PII.

Financial Close proyek dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dilanjutkan dengan penyampaian pernyataan efektif penjaminan oleh PT PII kepada PT Meta Adhya Tirta Umbulan dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri PPN dan Menteri PUPERA pada 10 Februari 2017.

Lokasi	Provinsi Jawa Timur
Nilai Proyek	Rp2,06 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Badan Usaha	PT Meta Adhya Tirta Umbulan

SPAM Kota Bandar Lampung

Proyek SPAM Lampung diinisiasi karena Kota Bandar Lampung memerlukan peningkatan dan penyediaan air minum. PDAM Way Rilau baru melayani sekitar 20% dari total penduduk kota Bandar Lampung yang berjumlah 193.290 penduduk. Selain rendahnya tingkat pelayanan PDAM Way Rilau, kendala kontur pada Kota Bandar Lampung yang berbukit-bukit juga mengakibatkan pendistribusian air minum belum merata. Nilai investasi proyek SPAM Kota Bandar Lampung mencapai Rp750 miliar dan memperoleh Dukungan Kelayakan Rp258,8 miliar dari Kementerian Keuangan.

Pada 14 Februari 2018, PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan dan PT Adhya Tirta Lampung selaku BU dan Perjanjian Regres dengan PDAM Way Rilau selaku PJPK. Sedangkan *financial close* proyek ini dapat dicapai pada 13 Agustus 2018.

Lokasi	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Nilai Proyek	Rp750 miliar
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	PDAM Way Rilau
Badan Usaha	PT Adhya Tirta Lampung

SPAM Semarang Barat

Proyek SPAM Semarang Barat bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperluas cakupan sambungan perpipaan air minum dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) kurang lebih 37.000 SR, sehingga total SR yang dapat dilayani mencapai sekitar 71.500 SR pada tahun 2030. Banyaknya SR yang saat ini belum terlayani dikarenakan keterbatasan dana dan sumber air baku yang tersedia di dalam Kota Semarang.

Proyek SPAM Semarang Barat berkapasitas 1.000 liter/detik dibangun berdasarkan skema KPBU antara Perumda Air Minum Tirta Moedal selaku PJPK dengan PT Air Semarang Barat selaku Badan Usaha. Nilai proyek SPAM Semarang Barat sebesar Rp417 miliar tanpa menggunakan Dukungan Kelayakan dari Kementerian Keuangan.

Area pelayanan SPAM Semarang Barat ditargetkan untuk melayani 3 (tiga) Kecamatan yang terbagi dalam 5 (lima) zona wilayah layanan, yaitu Kecamatan Tugu (zona 1), sebagian Kecamatan Ngaliyan (zona 2 dan 3), serta Kecamatan Semarang Barat (zona 4 dan 5).

PT PII menandatangani Perjanjian Penjaminan dengan PT Air Semarang Barat dan Perjanjian Regres dengan PDAM Tirta Moedal untuk Proyek SPAM Semarang Barat pada 23 November 2018. Adapun *Financial Close* proyek ini dicapai pada tanggal 29 Mei 2019.

Lokasi	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nilai Proyek	Rp417 miliar
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	PDAM Tirta Moedal Kota Semarang
Badan Usaha	PT Air Semarang Barat

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Sektor Transportasi

Proyek KA Makassar-Parepare merupakan proyek infrastruktur pertama dari sektor transportasi yang dijamin oleh PT PII.



Proyek KA Makassar-Parepare

PT PII memberikan jaminan pada proyek KPBU jalur kereta api Makassar-Parepare. Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang timbul dari pemerintah.

Diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya. Proyek ini juga mengadopsi skema *Build Operate Transfer* (BOT) dengan nilai investasi belanja modal Rp1 triliun dan biaya operasi Rp1,01 triliun.

Proyek dengan skema *Availability Payment* (AP) ini akan melayani area meliputi 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Lokasi	Provinsi Sulawesi Selatan
Nilai Proyek	Rp1,01 triliun
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama	Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Badan Usaha	PT Celebes Railway Indonesia

SEGMENT USAHA PENJAMINAN NON-KPBU

Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 tahun 2018, PT PII selaku BUPI melalui penugasan khusus dari Menteri Keuangan dapat berperan sebagai salah satu Penjamin dalam skema Penjaminan Pemerintah Bersama atas Pinjaman BUMN. Pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN ini terintegrasi dengan pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dan PMK Nomor 189 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN. Berdasarkan regulasi tersebut, Jaminan Pemerintah diberikan atas risiko gagal bayar dari BUMN yang melakukan pinjaman dalam penyediaan infrastruktur.

Sektor Pariwisata

Proyek Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika merupakan salah satu bagian dari program pengembangan pariwisata Indonesia. Estimasi nilai investasi untuk Proyek ini kurang lebih mencapai USD316,5 juta (Rp4,58 triliun)



Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Terletak di bagian selatan Pulau Lombok, Mandalika diharapkan dapat menjadi tujuan wisata kelas dunia berikutnya di Indonesia yang akan dikembangkan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC. Dengan luas sekitar 1.175 hektar dan menghadap ke Samudra Hindia, Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona bawah laut yang menjadi daya tarik utama.

Pembangunan dan pengembangan Mandalika akan menerapkan konsep *eco-green* dan *event based destination*. Dengan konsep *green eco-tourism*, fasilitas yang terdapat dalam kawasan ini harus ramah lingkungan agar meningkatkan nilai jual dari area

tersebut. Pasokan air bersih akan disediakan melalui proses desalinasi air atau lebih dikenal sebagai sistem SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*) dan pasokan listrik (selain dari PT PLN) akan disediakan dengan pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan konsep destinasi *event-based* akan menonjolkan pariwisata dengan menyediakan fasilitas non-akomodasi berstandar internasional yang akan menjadi daya tarik wisata sembari menikmati keindahan Mandalika. Fasilitas pariwisata yang akan dibangun dan dikembangkan antara lain hotel, vila, apartemen, *resort*, unit perumahan, lapangan golf, fasilitas rekreasi, pusat medis dan kesehatan, tempat pelatihan, desa seni, dan lainnya.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Proyek Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK Mandalika merupakan salah satu bagian dari program pengembangan pariwisata Indonesia. Program ini meliputi pengembangan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) antara lain: jaringan jalan, jaringan air bersih, normalisasi sungai, pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah, jaringan dan fasilitas listrik, dan jaringan dan fasilitas gas. Proyek ini terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencakup lahan seluas 1.175 Ha.

Dalam *Master Plan* KEK Mandalika, direncanakan pengembangan infrastruktur dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2026. Estimasi nilai investasi untuk Proyek ini adalah sebesar kurang lebih USD316,5 juta (Rp4,58 triliun) dengan rencana pembiayaan: (i) *Sovereign Loan* dari Asian Infrastructure Investment Bank sebesar USD248,4 juta (78,5%); dan (ii) Pemerintah Indonesia/ITDC/Pendanaan NIA-LPEI sebesar USD68,1 juta (21,5%).

Lokasi	Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat
Nilai Proyek	USD316.500.000
Nilai Pinjaman AIIB	USD248.390.000
Badan Usaha Milik Negara/debitur	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)
Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/kreditur	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Sektor Ketenagalistrikan

Hydropower Programme direncanakan akan diimplementasikan pada rentang tahun 2019-2024 dengan nilai pinjaman langsung dari KfW Bank sebesar EUR294,7 juta



Hydropower Programme

Hydropower Programme merupakan bagian dari rencana 10 tahun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN (Persero) yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2027 dan merupakan bagian dari Program 35.000 MW. *Hydropower Programme* ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: (1) *Tranche I* - PLTA Bakaru I+II; dan (2) *Tranche 2* - "1,000 Islands Renewable Energy for Electrification Programme Phase II (REEP II)".

Program ini memiliki objektif di antaranya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atas Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) di daerah terpencil dan terisolasi dengan menambah porsi pembangkit energi baru dan terbarukan untuk mencapai sasaran bauran energi nasional. Selain itu, program ini bertujuan untuk menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) atas penggunaan bahan bakar fosil baik pada saat *base load* dan terutama pada saat beban puncak serta meningkatkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) kepada pelanggan di sistem terkait.

Hydropower Programme direncanakan akan diimplementasikan pada rentang tahun 2019-2024

dengan nilai pinjaman langsung dari KfW Bank sebesar EUR294,7 juta. Pinjaman KfW ini akan digunakan untuk pembiayaan 6 (enam) sub proyek, yaitu: PLTA Bakaru (Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan), PLTM Lapai 1 (Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara), PLTM Kalibumi (Kab. Nabire, Papua), PLTM Riorita (Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara), PLTA Watunohu (Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara), dan PLTM Banangar (Kab. Landak, Kalimantan Barat).

Pada tanggal 5 September 2019, PT PLN (Persero) dan KfW telah menandatangani Perjanjian Pinjaman bersamaan dengan PT PII menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Penjaminan dengan PT PLN (Persero) dan Perjanjian Penjaminan dengan Kementerian Keuangan dan KfW atas pinjaman langsung tersebut.

Lokasi	Kalimantan, Sulawesi, dan Papua
Nilai Proyek	EUR420.000.000
Nilai Pinjaman KfW	EUR294.700.000
Badan Usaha Milik Negara/debitur	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/kreditur	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

KINERJA KEUANGAN SEGMENT USAHA PENJAMINAN

Hingga periode 31 Desember 2019, PT PII telah mengeluarkan beban operasi untuk segment usaha penjaminan mencapai Rp81,31 miliar, naik 35,43% dibandingkan pada periode tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp60,04 miliar. Kenaikan biaya tersebut seiring dengan meningkatnya pendapatan penjaminan baik dari KPBU dan Non-KPBU di tahun 2019.

Segment usaha penjaminan membukukan pendapatan yang berasal dari penjaminan KPBU dan Non-KPBU pada tahun 2019 sebesar Rp104,04 Miliar atau naik 123,17% dari capaian tahun 2018 sebesar Rp46,62 miliar. Hal tersebut disebabkan meningkatnya jumlah proyek yang mencapai penandatanganan maupun proyek yang penjaminannya efektif dibandingkan dengan tahun 2018.

Dalam segment usaha penjaminan, pendapatan penjaminan PT PII terutama berasal dari pendapatan provisi dan komisi berupa Upfront fee dan pendapatan premi berupa Recurring fee penjaminan.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/ *Project Development Facility (PDF)*

Sampai dengan tahun buku 2019, PT PII telah menerima penugasan untuk pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk 5 (lima) proyek, termasuk proyek sektor sosial.



Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi/*Project Development Facility (PDF)*

Memiliki pengalaman sejak tahun 2009, PT PII telah menjalankan peran serta usaha terbaiknya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui Penjaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPBU. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri infrastruktur di Indonesia, PT PII dituntut untuk terus berinovasi dan berkembang dalam menjalankan perannya demi mencapai hasil yang optimal serta pemerataan infrastruktur di Indonesia.

PT PII mendapatkan mandat baru sejak tahun 2018 yang memberikan keleluasaan bagi Perseroan menjalankan kegiatan usaha di samping memberikan jaminan pada proyek infrastruktur, tetapi juga terlibat dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Mandat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. PII berinisiasi untuk menjalankan segmen usaha baru yakni dalam hal keterlibatan secara menyeluruh di dalam proses

Penyiapan dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU melalui pembentukan Divisi Inisiasi Bisnis.

Dalam menghadapi mandat pelaksanaan tugas yang dimaksud, PT PII telah menyiapkan struktur yang berorientasi pada Proyek serta menjaga *independency* pengambilan keputusan di masing-masing fungsi (*Segregation of Function*). Struktur organisasi ini juga didukung oleh pengawakan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan penugasan tersebut dengan pengalaman Proyek Infrastruktur selama PT PII beroperasi dan juga didukung dengan *Governance* Perseroan yang sangat baik dalam pengelolaan transaksi.

Dalam proses pembangunan infrastruktur yang merupakan proyek strategis pemerintah, kontribusi PT PII sangat besar. Melalui mandat baru tersebut, Perseroan terlibat sejak perencanaan dan pendampingan transaksi sebelum proyek dilaksanakan. Dari sisi pembiayaan, Perseroan ikut menyiapkan mulai penyiapan transaksi hingga memberikan jaminan. Proyek bukan hanya menjadi *bankable*, tetapi juga meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien.

Kegiatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang dikenal sebagai *Project Development Facility (PDF)* merupakan salah satu potensi pengembangan aktivitas kegiatan Perseroan yang dikembangkan sesuai dengan rencana arah pengembangan Perusahaan tahun 2018-2022 Perseroan. Proyek-proyek yang dapat menerima fasilitas dalam mandat baru PT PII tersebut adalah proyek KPBUs Prioritas, proyek KPBUs pembangunan dan/atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri.

Pelaksanaan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Sampai dengan tahun buku 2019, PT PII telah menerima penugasan untuk pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk 6 proyek, meliputi:

1. Pembangunan Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Riau
2. Pembangunan Jalan Lintas Timur Sumatera ruas Sumatera Selatan
3. Kereta Api Makassar-Parepare
4. Pembangunan Rumah Sakit Kanker Dharmas
5. Pembangunan Rumah Sakit Zainoel Abidin (Aceh)
6. Pembangunan Proyek *Proving Ground* Bekasi

Pembangunan Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Riau dan Sumatera Selatan

Pada tanggal 21 Mei 2018 Kementerian Keuangan dan PT PII bersama-sama menandatangani Perjanjian Penugasan Fasilitas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi KPBUs Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera yang meliputi ruas Sumatera Selatan dan Riau. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas tersebut, maka PT PII memiliki kewajiban untuk melaksanakan tahapan-tahapan pada tahapan penyiapan dan transaksi yang diperlukan untuk memastikan Proyek dapat direalisasikan.

Pemilihan ruas tersebut didasari oleh langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan oleh pihak Ditjen Bina Marga yang dalam hal ini berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Proyek KPBUs Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera. Jalan Lintas Timur Sumatera merupakan layanan vital pendukung aktivitas ekonomi serta merupakan salah satu Jalan Nasional dengan akses pertumbuhan ekonomi Nasional. Oleh sebab itu, melalui skema KPBUs, Ditjen Bina Marga memiliki keyakinan bahwa skema tersebut akan memberikan efisiensi, peningkatan kualitas layanan publik serta dapat memberikan efek *leveraging* atas kapasitas belanja modal Pemerintah

dalam merealisasikan rencana pembangunan dan preservasi infrastruktur Jalan Nasional.

Ruang lingkup skema KPBUs Proyek ini meliputi atas Perencanaan Teknis; Pelaksanaan Konstruksi; Pengoperasian dan Pemeliharaan pada masa konstruksi serta masa layanan dan Pembiayaan Proyek oleh Badan Usaha yang ditunjuk melalui proses pengadaan yang adil dan transparan. Nilai investasi Proyek ini adalah sebesar Rp916,4 miliar untuk ruas Sumatera Selatan dan Rp585,3 miliar untuk ruas Riau, sedangkan sumber pengembalian Proyek ini diusulkan skema "*Availability Payment*" ("KPBUs-AP") dengan masa periode kerjasama selama 15 tahun (termasuk 3 tahun masa konstruksi).

Selain manfaat atas percepatan pembangunan akan dirasakan oleh pihak publik, dengan direalisasinya Proyek ini maka masyarakat akan dapat merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari Proyek, yakni sebagai berikut:

- i. Peningkatan kesempatan kerja dimana secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan penduduk atas pendapatan yang dihasilkan dari Proyek ini;
- ii. Mengurangi tingkat kemiskinan; serta
- iii. Mendukung kelancaran lalu lintas sehingga waktu tempuh antar wilayah dan mobilitas pengendara menjadi lebih singkat dan efektif, yang selanjutnya juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Kereta Api Makassar-Parepare

Penugasan oleh Kementerian Keuangan yang diberikan kepada PT PII atas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBUs Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare secara resmi ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2018. Melalui penugasan tersebut, maka PT PII memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan kepada PJPK dalam penyiapan dokumen lelang dan transaksi proyek sampai dengan tahapan *financial close* dalam pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare melalui skema KPBUs.

Lokasi Proyek yang akan dibangun berada di Sulawesi Selatan yang meliputi 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare. Pembangunan jalur Kereta Makassar-Parepare ini merupakan tahap 1 jaringan Kereta Api Nasional Trans-Sulawesi adalah mempercepat pemerataan pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2015-2019.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan selaku PJKP merencanakan masa kerjasama Proyek sepanjang 18,5 tahun termasuk masa konstruksi. Lingkup pekerjaan calon Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah melakukan kegiatan perancangan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, perawatan dan penyerahan (DBFOMT) aset yang dibangun, dengan nilai investasi sekitar Rp1 triliun dan pengembalian melalui skema *Availability Payment* (AP).

Dengan direalisasikannya Proyek ini, manfaat utama yang dapat dirasakan adalah peningkatan lalu lintas barang dan penumpang, pembangunan konektivitas nasional, peningkatan jumlah barang yang dapat diangkut oleh kereta api sesuai dengan target RPJMN serta sebagai pemenuhan target pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019. Selain dari manfaat utama di atas, manfaat proyek ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang meliputi:

- i. Infrastruktur jalur kereta api yang terbangun dapat memberikan efek pengganda atas PDB, serta penyerapan peningkatan kegiatan ekonomi sehingga mendukung pemerataan di ekonomi di pulau Sulawesi;
- ii. Manfaat penghematan biaya dan waktu merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan dan moda transportasi lainnya atau yang belum menggunakan moda transportasi kereta api;
- iii. Dengan dibangunnya jalur kereta api Makassar-Parepare, maka secara signifikan sektor konstruksi di daerah tersebut akan mengalami peningkatan atas angka kesempatan kerja bagi masyarakat;
- iv. Pembangunan Proyek ini dapat memicu munculnya sektor usaha pendukung yang juga mendorong pergerakan dan pertumbuhan permintaan barang dan jasa untuk kegiatan perdagangan dan industri eksisting

Pembangunan Rumah Sakit Kanker Dharmais

Penyakit kanker merupakan salah satu permasalahan kesehatan Nasional yang harus segera ditanggulangi oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan. Salah satu tantangan utama dalam pengobatan kanker di Indonesia adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia (spesialis dan spesialis onkologi) sehingga ditemukan sebesar 70% dari penderita kanker sudah dalam keadaan/stadium lanjut.

Dalam menyelenggarakan pelayanan kanker yang komprehensif dan terpadu, Rumah Sakit Kanker Dharmais ("RSKD") sebagai rumah sakit rujukan Kelas A dan Pusat Kanker Nasional harus memiliki sarana dan prasarana yang mampu mendukung kegiatan operasional rumah sakit. Untuk Dharmais sendiri, saat ini terjadi kelebihan kapasitas/*over capacity* di mana kapasitas Dharmais saat ini adalah 225 pasien/hari sedangkan permintaan penanganan kanker di Dharmais mencapai lebih dari 800-1.000 pasien/hari. Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk perawatan kanker dan karena keterbatasan fasilitas perawatan kanker tersebut, pasien lebih memilih perawatan medis di luar negeri dibandingkan dengan perawatan medis dalam negeri. Maka dari itu, perlu ada pemutakhiran kapabilitas RSKD untuk memberikan pelayanan dalam negeri yang maksimal, meliputi penegakkan diagnosis, pengobatan dan tindakan hingga pelayanan rehabilitatif bagi penderita kanker.

Penugasan tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Penugasan Fasilitas Pendampingan Penyediaan dan Transaksi Proyek KPBU RS Kanker Dharmais yang ditandatangani pada 27 Juli 2018. Proyek ini akan dilaksanakan melalui skema *Design-Build-Finance-Operation-Maintenance-Transfer* ("DBFOMT"), dimana Badan Usaha yang terpilih bertanggung jawab untuk melaksanakan perancangan (*design*), pembangunan (*build*); pembiayaan (*finance*); dan pemeliharaan (*maintenance*) dengan indikasi masa Perjanjian KPBU selama 20 (dua puluh) tahun termasuk masa konstruksi. Perkiraan nilai investasi sekitar Rp1,4 triliun dan pengembalian melalui skema *Availability Payment* (AP).

Dengan direalisasikannya Proyek ini, manfaat utama yang dapat dirasakan adalah manfaat ekonomi dari pembangunan Rumah Sakit. Di sisi lain, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan infrastruktur ini adalah sebagai berikut:

- i. *Socio-Economic multiplier* pengeluaran pemerintah yang mengindikasikan dampak sosial-ekonomi dari pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur kesehatan;
- ii. Peningkatan angka harapan hidup bagi pasien kanker yang didapat dari nilai nyawa pasien yang diselamatkan karena adanya pemuktahiran infrastruktur dan tenaga ahli kesehatan (spesialis onkologi); dan

- iii. Penghematan waktu pasien karena implementasi dari *Hospital Information System* (HIS) sehingga dapat mengurangi waktu tunggu bagi pasien-pasien dengan infrastruktur kesehatan yang baru.

Pembangunan Rumah Sakit Zainoel Abidin (Aceh)

Peningkatan atas kebutuhan tingkat kesehatan masyarakat Aceh menuju Aceh Sejahtera merupakan salah satu upaya realisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017-2022, selain daripada itu kebutuhan masyarakat Aceh atas sentra layanan kesehatan terpadu menjadi kebutuhan utama masyarakat Aceh hingga sampai saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Aceh mencanangkan pengembangan Rumah Sakit Daerah Zainoel Abidin sebagai salah satu upaya solusi permasalahan kesehatan di Provinsi Aceh.

Menjawab permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (“PDPPI”) memberikan fasilitas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU RSUD Zainoel Abidin kepada Pemerintah Provinsi Aceh selaku PJKP. Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Induk antara Kementerian Keuangan dan PJKP pada 4 Desember 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya SK Penugasan oleh Kementerian Keuangan pada 5 Desember 2018, maka PT PII secara resmi menerima amanat dalam pelaksanaan *Project Development Facility* (“PDF”).

Penugasan tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Penugasan Fasilitas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU Zainoel Abidin yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari tahun 2019.

Proyek ini akan dilaksanakan melalui skema *Design-Build-Finance-Operation-Maintenance-Transfer* (DBFOMT), dimana Badan Usaha yang terpilih bertanggung jawab untuk melaksanakan perancangan (*design*), pembangunan (*build*); pembiayaan (*finance*); dan pemeliharaan (*maintenance*) dengan indikasi masa Perjanjian KPBU selama 17 (tujuh belas) tahun termasuk masa konstruksi. Perkiraan investasi awal Program ini adalah sebesar Rp1,5 triliun.

Salah satu yang menjadi landasan untuk merealisasikan proyek ini adalah kajian dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan Rumah Sakit. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan infrastruktur ini di antaranya:

- i. *Socio-Economic multiplier* pengeluaran pemerintah yang mengindikasikan dampak sosial-ekonomi dari pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur kesehatan;
- ii. Penurunan biaya perjalanan keluar Aceh yang mengindikasikan penurunan jumlah pasien rujukan keluar baik ke dalam maupun luar negeri karena adanya pengembangan infrastruktur kesehatan;
- iii. Penyerapan tenaga kerja yang memperhitungkan penyerapan tenaga kerja karena adanya peningkatan kebutuhan dari pengembangan infrastruktur kesehatan; dan
- iv. Peningkatan produktivitas karena perkembangan tingkat kesehatan yang menunjukkan adanya penambahan produktivitas masyarakat karena perkembangan tingkat kesehatan sebagai hasil dari pengembangan infrastruktur kesehatan.

Pembangunan Proyek Proving Ground Bekasi

Kesepakatan Induk antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan telah ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 16 Juli 2019. Penugasan oleh Kementerian Keuangan yang diberikan kepada PT PII atas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU Pembangunan *Proving Ground* Bekasi secara resmi ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2019. Kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 2019, Kementerian Keuangan bersama dengan PT PII menandatangani Perjanjian Fasilitas Pendampingan Penyiapan dan Transaksi Proyek Pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

Lokasi proyek berada di area BPLJSKB Bekasi dengan PJKP adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Ruang lingkup proyek ini adalah perancangan dan pembangunan infrastruktur *Proving Ground* dan fasilitas pengujian, perawatan infrastruktur dan fasilitas, pelatihan SDM BPLJSKB, pembiayaan proyek dan penyerahan aset oleh Badan Usaha Pelaksana dengan nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun dan pengembalian investasi melalui *Availability Payment* (AP).



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Di dalam proyek ini, PJPK bertujuan untuk membangun *proving ground* berstandar UNR pertama di Indonesia. Berikut adalah identifikasi manfaat yang ditimbulkan dari Pembangunan *Proving Ground* BPLJSKB Bekasi, antara lain:

1. Menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pemenuhan standar keselamatan dan keamanan kendaraan bermotor sesuai amanah undang undang.
2. Melestarikan lingkungan dari pencemaran akibat emisi kendaraan bermotor di jalan.
3. Menjadikan produk Indonesia akan dapat langsung diterima di ASEAN.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara dari meningkatnya ekspor.

Kinerja Keuangan Segmen Usaha Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi

Kinerja keuangan untuk segmen usaha penyiapan proyek dan pendampingan transaksi menurun dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun buku 2019, total beban penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang dikeluarkan oleh Perseroan mencapai Rp28,32 miliar menurun sebesar 14,88% dari tahun 2018 yang sebesar Rp33,27 miliar.

Penurunan terutama disebabkan lebih rendahnya penggunaan biaya konsultan proyek dibandingkan tahun 2018 yang belum mencapai dokumen keluaran sejalan dengan status proyek. Beban tersebut terutama berasal dari beban karyawan dan beban konsultan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dengan total sebesar Rp25,87 miliar yang mewakili 91,34% dari total beban penyiapan proyek dan pendampingan transaksi.

Pada tahun 2019, pendapatan yang diperoleh segmen usaha penyiapan proyek dan pendampingan transaksi sebesar Rp28,13 miliar menurun sebesar 14,03% dari tahun 2018 yang sebesar Rp32,72 miliar seiring dengan penurunan kinerja beban penyiapan dan pendampingan transaksi proyek.

Segmen Usaha Pengelolaan Dana

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menempatkan dana pada sejumlah instrumen keuangan yang bervariasi berupa instrumen investasi di pasar keuangan, obligasi dan reksa dana.

Perseroan memiliki dan mengimplementasikan manual di bidang operasional terkait dengan pengelolaan dana yang menjadi pedoman dalam kegiatan serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan pengelolaan dana, misalnya melalui prinsip keadilan (*fair*) dan transparan yang diselenggarakan melalui mekanisme tender.

Strategi Pengelolaan Dana

Dinamika kondisi pasar modal dalam negeri yang sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global menjadi tantangan tersendiri untuk dapat melakukan pengelolaan dana, dimana tingkat suku bunga acuan pada tahun 2019 memiliki tren menurun dan potensi pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan melambat, akan tetapi diupayakan dapat mencapai target pendapatan pengelolaan dana yang ditetapkan.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah menempatkan dana pada sejumlah instrumen keuangan yang bervariasi berupa instrumen investasi di pasar keuangan, obligasi dan reksa dana. Komposisi dana yang ditempatkan pada instrumen-instrumen tersebut senantiasa disesuaikan sejalan dengan perkembangan kondisi pasar keuangan dengan tujuan agar tercipta manajemen risiko yang baik dan memperoleh pengembalian yang optimum.

Dalam pengelolaan dana dilakukan berpedoman pada ketentuan yang berlaku yaitu PMK Nomor 95/PMK.08/2017 dan Kebijakan Pengelolaan Dana yang ditetapkan secara internal oleh PT PII dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi, meliputi:

No	Instrumen Investasi	Ketentuan Batasan Penempatan
1.	Pasar Uang : Deposito Berjangka (termasuk Deposito <i>On Call</i>). Serifikat Deposito yang tidak dapat diperdagangkan pada Bank.	- Minimal <i>rating</i> AA - Bank Pemerintah paling tinggi 25,0% dari modal PT PII. - Bank Bukan Pemerintah paling tinggi 10,0% dari modal PT PII. - Penempatan pada Bank BUKU 2 paling tinggi 25,0% dari modal Tier I Bank yang bersangkutan.
2.	Surat Berharga Negara	
3.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.	
4.	Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa Efek.	- Korporasi BUMN minimal <i>rating</i> AA, Kporasi BUMD dan Swasta minimal <i>rating</i> AAA. - Penempatan pada setiap emiten paling tinggi 5,0% dari modal PT PII, dan seluruhnya paling tinggi 20,0% dari Modal PT PII.
5.	Reksa dana	- Penempatan pada setiap Perusahaan Manajer Investasi paling tinggi 20,0% dari total penempatan reksa dana. - Total penempatan pada reksa dana paling tinggi 10,0% dari modal PT PII.

Secara keseluruhan pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan likuiditas, sehingga pada tahun 2019 pengelolaan dana dilakukan pada instrumen pasar uang dan obligasi, dengan bobot penempatan disesuaikan dengan arah pergerakan suku bunga ke depan.

Dalam rangka menjaga transparansi, independensi, dan akuntabilitas yang baik, aktivitas pengelolaan dana dijalankan dengan:

1. Setiap penempatan dana pada pasar uang dilakukan melalui mekanisme tender, dengan melibatkan Divisi Procurement untuk menjaga independensi dari proses tender.

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

2. Setiap proses penempatan dana dilakukan dengan melibatkan Divisi Risk Management, untuk melakukan *review* perihal kesesuaian antara rencana penempatan dana dengan ketentuan.
3. Untuk memastikan keamanan aset surat berharga dan akuntabilitas proses penyelesaian transaksi (*settlement*), digunakan jasa Bank Kustodi untuk melakukan administrasi seluruh portofolio surat berharga PT PII, dan dilakukan proses rekonsiliasi data minimal satu bulan sekali dan atau sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
4. Untuk mempermudah pemantauan (*monitoring*) terhadap aktivitas pengelolaan dana yang diterima, maka digunakan beberapa rekening giro sesuai dengan masing-masing fungsi yang ditetapkan.
5. Dalam pengambilan keputusan investasi dan melakukan pemantauan kinerja instrumen investasi, dilakukan analisis dengan menggunakan data yang diperoleh dari sumber yang *independent*.

Realisasi Strategi Pengelolaan Dana 2019

Realisasi dari strategi pengelolaan dana dalam bentuk investasi pada tahun 2019 adalah:

1. Porsi Alokasi Dana Investasi

Perseroan mengalokasikan penempatan dana pada instrumen pasar uang dan pasar modal sebagai berikut:

Instrumen Investasi	Target Alokasi Penempatan (% dari Dana Kelolaan)*
Penempatan Pasar Uang/Deposito dan Sejenisnya	0-100% dari dana kelolaan
Penempatan pada Pasar Modal: Surat Utang, Surat Berharga dan Sejenisnya	0-60% dari dana kelolaan
Penempatan pada Pasar Modal: Reksa dana	0-10% dari dana kelolaan

2. Strategi dan Pengelolaan Dana Investasi

- a. Alokasi investasi sesuai Anggaran 2019 dalam rangka pencapaian KPI sebesar Rp818 miliar, telah mengikuti sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam PMK No. 95/PMK.08/2017
- b. Mengoptimalkan penempatan pada perbankan sesuai dengan kebijakan dan batas yang telah ditetapkan, dengan terus memperhatikan kecenderungan pergerakan tingkat suku bunga.

Perusahaan telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 95/PMK.08/2017 mengenai Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh BUPI yang berlaku sejak tanggal 19 Juli 2017. Peraturan tersebut, antara lain mengenai penempatan kekayaan BUPI dalam bentuk investasi. Sesuai dengan ketentuan peralihan pada Pasal 19, penempatan kekayaan BUPI dalam bentuk investasi yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku masih tetap dilaksanakan sampai dengan investasi tersebut jatuh tempo.

Portofolio investasi Perusahaan sampai dengan Desember 2019 terdiri dari investasi atas deposito berjangka (70%) dan investasi atas pendapatan tetap/obligasi (30%) dari total pengelolaan dana sebesar Rp10,9 triliun.

Berikut adalah rincian penempatan dana/kekayaan dalam bentuk investasi Perusahaan:

1. Investasi pada Deposito Berjangka

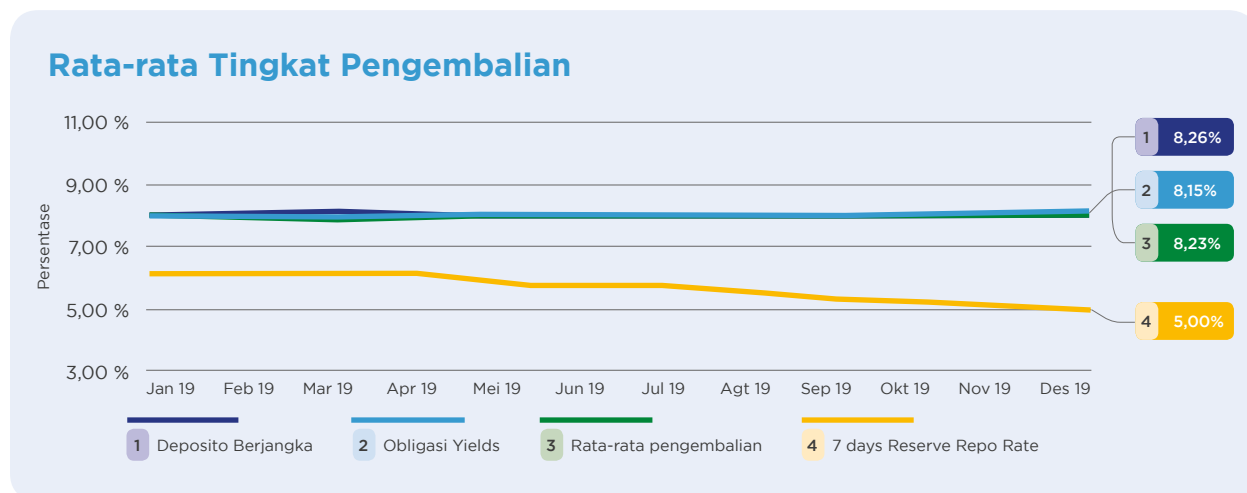
Total Investasi Deposito per Kategori Rating	Jumlah (Angka Penuh)
I. Peringkat AAA	5.941.330.000.000
1. Bank Pemerintah	3.319.590.000.000
2. Bank Swasta	2.621.740.000.000
II. Peringkat AA+	293.253.644.000
1. Bank Pemerintah	243.253.644.000
2. Bank Swasta	50.000.000.000
III. Peringkat AA	1.419.400.000.000
1. Bank Pemerintah	-
2. Bank Swasta	1.419.400.000.000
Total	7.653.983.644.000

Total Investasi Deposito per Kategori Buku Bank	Jumlah (Angka Penuh)
I. Buku IV	3.319.590.000.000
1. Bank Pemerintah	3.319.590.000.000
2. Bank Swasta	-
II. Buku III	1.832.993.644.000
1. Bank Pemerintah	243.253.644.000
2. Bank Swasta	1.589.740.000.000
III. Buku II	2.501.400.000.000
1. Bank Pemerintah	-
2. Bank Swasta	2.501.400.000.000
Total	7.653.983.644.000

2. Investasi pada Pendapatan Tetap

Penerbit Obligasi	Peringkat	Posisi 31 Desember 2019
		Nilai Obligasi (Market Value - AFS)/(Carrying Value - HTM)
Pemerintah	-	1.271.140.190.598
BUMN	AAA	1.323.642.325.936
	AA+	298.552.000.000
	AA	230.672.365.765
	A	59.105.600.000
Swasta	AA+	-
	AA	44.065.177.207
Total		3.227.177.659.507

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha



Pada tahun 2019, Perseroan mencapai pendapatan segmen pengelolaan dana sebesar Rp876 miliar dengan rata-rata tingkat pengembalian pada bulan Desember 2019 sebesar 8,23% yang masih lebih tinggi 323 basis poin dibandingkan BI 7D Repo Rate 5,00%.

Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian perusahaan lain di bidang usaha sejenis yang mencatatkan tingkat pengembalian di kisaran 7,38%, dengan melakukan metode pengelolaan dana yang mirip dengan PT PII yaitu komposisi berkisar 60% di pasar uang dan sisanya di obligasi (SBN, Obligasi Korporasi). Pengelolaan dana PT PII dilakukan secara konservatif dengan pertimbangan sebagai perusahaan yang melakukan penjaminan maka penempatan investasi diutamakan pada instrument yang relatif likuid agar dapat dicairkan dengan cepat pada saat terjadi klaim.

Segmen Kegiatan Pendukung Usaha

Kegiatan *Capacity Building* utamanya diberikan terhadap PJKP dengan proyek yang masih berada dalam tahapan awal, baik perencanaan maupun penyiapan, guna memperlancar proses pelaksanaan proyek ke depannya.

Kegiatan *Capacity Building Stakeholder*

PT PII menyadari bahwa kapasitas pemahaman sumber daya manusia (SDM) terutama Calon/Penanggu Jawab Proyek Kerja sama (PJKP) serta pemangku kepentingan memiliki peran penting bagi keberlanjutan proyek Infrastruktur khususnya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Berkaitan dengan hal tersebut, guna menunjang pengembangan bisnis sekaligus memberikan edukasi kepada pihak terkait, PT PII melalui IIGF Institute hadir untuk membangun sistem serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) secara berkala melalui program *General Active Learning Program* (GALP). Program ini difokuskan pada pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar penyediaan Infrastruktur serta meningkatkan pemahaman tentang penyediaan Infrastruktur dengan skema KPBU.

Pada pelaksanaan kegiatan *Capacity Building*, IIGF Institute bekerjasama dengan Divisi Pengembangan Bisnis serta Divisi Guidance and Consultation yang memegang peran penting sebagai fungsi terdepan dalam berhubungan dengan calon PJKP. Selain itu IIGF Institute juga bekerjasama dengan pihak eksternal di antaranya Kantor Bersama KPBU dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas serta mitra akademik nasional maupun daerah yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan proyek yang direncanakan. Kegiatan *Capacity Building* utamanya diberikan kepada PJKP dengan proyek yang masih berada dalam tahapan awal, baik perencanaan maupun penyiapan, guna memperlancar proses pelaksanaan proyek ke depannya. Pelaksanaan kegiatan ini akan menjamin mutu kualitas SDM yang baik dalam mengimplementasikan skema KPBU, sehingga akselerasi penyediaan infrastruktur dapat lebih mudah diwujudkan.

Kegiatan peningkatan kapasitas pada tahun 2020 direncanakan akan dilakukan lebih efektif pada *stakeholder* yang sudah memiliki potensi proyek. Secara spesifik kesiapan ini dapat ditinjau melalui *Screening Tools* yang sedang dikembangkan oleh PII.



1. *Capacity Building* di Sumatera
2. *Capacity Building* di Sulawesi



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Sepanjang tahun 2019, pelaksanaan program GALP dalam rangka *capacity building* dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

No	Instansi Peserta	Tanggal	Proyek
1	Pemerintah Kota Semarang	Januari 2019	PSEL Kota Semarang OBC telah diselesaikan pada November 2019, saat ini sedang dalam proses penyusunan FBC
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Januari 2019	Proyek Potensial: a. <i>Main Stadium</i> Provinsi Sumatera Barat b. Pengelolaan Limbah B3 c. Penerapan Teknologi Peueumisasi-Gasifikasi di TPA Persampahan Regional Payakumbuh d. RSUD M. Natsir e. Pembangunan Gedung IGD Terpadu RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Japan International Cooperation Agency	Februari 2019	<i>Sharing session</i> sektor Transportasi, Perumahan dan Energi Panas Bumi
4	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Februari 2019	Proyek RSUD Kalimantan Tengah OBC telah diselesaikan pada November 2019, saat ini sedang dalam proses penyusunan FBC (dibantu oleh Kementerian PPN/Bappenas)
5	Pemerintah Kota Tangerang	Februari 2019	PSEL Kota Tangerang Selatan OBC telah diselesaikan pada November 2019, saat ini dalam tahap pembuatan FBC dan memperoleh fasilitas PDF Kemenkeu
6	Pemerintah Provinsi Bali	Februari 2019	PSEL Regional Sarbagita OBC telah diselesaikan pada Desember 2019, FBC sedang dalam proses dan saat ini sedang persiapan pengajuan PDF ke Kemenkeu
7	Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang	Februari 2019	Sistem Pertanahan Nasional Finalisasi OBC melalui fasilitasi Kementerian PPN/Bappenas
8	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Februari 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU
9	Kementerian Perhubungan	April 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU
10	Kementerian Komunikasi dan Informatika	April 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU
11	Pemerintah Kabupaten Tegal	Juni 2019	Rumah Sakit dr Soesilo Tipe B OBC telah diselesaikan pada November 2019, saat ini memasuki tahap evaluasi OBC dan persiapan penyusunan FBC
12	Pemerintah Kabupaten Badung	Juni 2019	Jalan Lingkar Badung Selatan OBC telah diselesaikan pada Desember 2019, FBC akan dilaksanakan pada awal tahun 2020 Panel Utilitas Terpadu OBC telah diselesaikan pada Desember 2019, FBC sedang dalam proses dan saat ini sedang persiapan pengajuan PDF ke Kemenkeu
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan	Juni 2019	Sekolah Pelayaran di Banten, Jakarta, Surabaya dan Makassar Studi Pendahuluan telah selesai disusun untuk ke-4 lokasi Proyek pada Desember 2019. Telah dilaksanakan rangkaian acara Konsultasi Publik dan Pre-Market Sounding pada Oktober-November 2019.
14	Badan Pengawas Obat dan Makanan, Republik Indonesia	Juni 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU. Proyek Potensial: a. Laboratorium Terintegrasi Layanan Publik b. Pembangunan Gedung Layanan Publik Terpadu Badan POM
15	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Juli 2019	TOD Terminal Jatijajar Proses review DED Terminal oleh Konsultan PT Mina TOD Terminal Jatiasih Proses penyusunan Studi untuk Proyek
16	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Juli 2019	Kawasan Wisata Kabupaten Ngawi OBC akan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, <i>kick off</i> penyusunan OBC akan dilakukan pada Maret 2020.



No	Instansi Peserta	Tanggal	Proyek
17	<i>Regional Capacity Building:</i> a. Pemerintah Provinsi Bali b. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat c. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur d. Pemerintah Provinsi Maluku e. Pemerintah Provinsi Maluku Utara f. Pemerintah Provinsi Papua g. Papua Barat	Juli 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU
18	<i>Regional Capacity Building:</i> a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan d. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur e. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Agustus 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU
19	Bekerjasama dengan Lembaga Management Aset Negara (Special Mission Vehicle, Kementerian Keuangan).	September 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU
20	<i>Regional Capacity Building:</i> a. Aceh b. Sumatera Utara c. Sumatera Barat d. Riau e. Kepulauan Riau f. Jambi g. Bengkulu h. Sumatera Selatan i. Kepulauan Bangka Belitung j. Lampung	September 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU
21	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	September 2019	SPAM Banyuwangi PJPK akan segera mulai menyusun Studi Pendahuluan Proyek (target Q2 2020)
22	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	September 2019	LRT Jakarta Fase II (Pulo Gadung-Kby Lama) Proyek ini merupakan proyek Unsolicited yang diprakarsai oleh PT Pembangunan Jaya. Pemrakarsa telah menyusun Feasibility Study dan saat ini sedang direview oleh PJPK
23	Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan PT Geo Dipa Energi (Special Mission Vehicle, Kementerian Keuangan).	Oktober 2019	Proyek Potensial: a. Sektor Persampahan b. Kawasan Wisata Kalianget
24	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan PT Geodipa Energi (Special Mission Vehicle, Kementerian Keuangan).	Oktober 2019	Proyek Potensial: a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng (KWDT) b. Pembangunan Terminal Karang Kobar c. TPA Karang Kobar dan TPA Kawedan - Purworejo - Klampok d. Jalan Lingkar Selatan Banjarnegara e. Pembangunan RSUD Banjarnegara/Pengolahan Limbah Medis
25	<i>Regional Capacity Building:</i> a. Sulawesi Utara b. Gorontalo c. Sulawesi Tengah d. Sulawesi Barat e. Sulawesi Selatan f. Sulawesi Tenggara	Oktober 2019	Peningkatan <i>awareness</i> sekaligus identifikasi minat terkait KPBU
26	Pemerintah Kota Makassar	Oktober 2019	PSEL Kota Makassar Proses penyusunan OBC Proyek oleh KEITI selaku pemrakarsa; akan dibentuk Tim Simpul KPBU, Tim KPBU dan Tim Lelang Proyek

Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

No	Instansi Peserta	Tanggal	Proyek
27	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Oktober 2019	Proyek Potensial: - Pembangunan <i>Sport and Youth Center</i> (Kota Semarang) - Pembangunan Jalan Lasem-Sale (Kab. Rembang) - Pembangunan Jalan <i>Fly Over</i> Wiradesa-Kajen (Kab. Pekalongan) - Penganganan Banjir Rob (Kab. Pekalongan) - Pembangunan Kawasan Bisnis Terintegrasi (Kab. Purworejo) - Pembangunan Jalur KA Aglomerasi Kedung Sepur (Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak) - Pengembangan Pelayanan Kanker RSUD Kelet (Kab. Jepara) - Revitalisasi SPAM Regional Bergas (Kab. Brebes dan Tegal) - Perbaikan Sarpras Sekolah (Provinsi Jawa Tengah)
28	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	November 2019	Selingkar Wilis Rencana proyek masih dalam tahap pembahasan di internal Pemprov Jawa Timur Pengembangan Proyek Persampahan di Kab. Probolinggo Proyek saat ini sedang dalam tahap perencanaan untuk pengerjaan Studi Pendahuluan Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru Rencana proyek masih dalam tahap pembahasan di internal Pemprov Jawa Timur Kawasan Ekonomi Khusus Gerbang Kertosusila (Sistem Transportasi Kawasan) Rencana proyek masih dalam tahap pembahasan di internal Pemprov Jawa Timur SPAM Lintas Utara (Pantura) Proses finalisasi Dokumen Studi Pendahuluan oleh PJPk; Proyek berpotensi mengajukan fasilitasi Bappenas untuk penyusunan OBC LRT Surabaya Rencana proyek masih dalam tahap pembahasan di internal Pemprov Jawa Timur
29	DPRD Kalimantan Tengah	Desember 2019	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tipe B OBC yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas telah diselesaikan pada Desember 2019, saat ini telah memasuki persiapan lelang konsultan pendamping transaksi

Sejak tahun 2017 PT PII melalui IIGF Institute juga telah berproses untuk menjadi *Accredited Training Organization* (ATO), dan secara resmi pada 19 September 2019 telah berhasil menjadi *Certification PPP Profesional* (CP3P) ATO untuk level *foundation*. Sebagai ATO *Accrediting Professional Manager Globally* (APMG), PT PII telah memiliki 4 (empat) orang *Certified Trainer*, 32 orang CP3P *Level Foundation* dan 2 orang CP3P *Level Preparation*.

Selain kegiatan *Capacity Building*, IIGF Institute juga memiliki *stream Research and Publication*. *Research* ini sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pengembangan KPBU dan *Project Based*. Hasil *research project base* yang telah diselesaikan oleh IIGF Institute meliputi:

- Kajian Sektor Perkeretaapian
- Kajian Sektor Rumah Sakit
- Kajian Sektor Air Limbah
- Dokumen Penyusunan Proyek Jogja Agro Techno Park
- Dokumen Penyusunan Proyek Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto

Sementara untuk kategori kajian pengembangan KPBU terdiri dari *Critical Success Factor* Pembangunan Proyek Infrastruktur Air Minum dengan skema KPBU dan Kajian Kemampuan Investasi BUMN. Selanjutnya, terkait dengan *stream Publication* IIGF Institute telah mempublikasikan *Journal of Infrastructure Policy and Management* (JIPM) Vol.2 pada bulan November 2019, Laporan Riset Critical Success Factor Pembangunan Proyek Infrastruktur Air Minum dengan skema KPBU, Glossarium KPBU Edisi 2 dan *Policy Brief Indonesia Infrastructure Roundtable* (IIR) untuk kegiatan IIR 13 – 19.

Kegiatan Korporasi

Secara rutin, Perseroan menyelenggarakan kegiatan operasional lain yang dikemas dalam bentuk *corporate event*. PT PII menjalankan kegiatan perusahaan ini dengan cara menyelenggarakan sendiri atau pun terlibat dalam kegiatan yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan lain.

Tabel berikut ini menjelaskan berbagai kegiatan yang mendukung kinerja segmen usaha Perseroan sepanjang tahun 2019:

No.	Uraian Kegiatan	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
1	Penandatanganan Perjanjian Penugasan Penyiapan Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh	Aceh, Januari 2019
2	Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara PT PII dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN)	Jakarta, Januari 2019
3	Tes Sinyal Proyek KPBU Palapa Ring Tengah	Kabupaten Kepulauan Sangehi, Sulawesi Utara, Januari 2019
4	Indonesia Public – Private Partnership (PPP) Day “Beyond Boundaries: Indonesia as a Global PPP Investment Destination” bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI	Singapura, Januari 2019
5	Public Expose Proyek KPBU SPAM Regional Kamijoro bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta, Januari 2019
6	<i>Capacity Building</i> Skema Proyek KPBU untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Semarang	Jakarta, Januari 2019
7	<i>Capacity Building</i> Skema KPBU kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Proyek Pembangunan Rumah Sakit	Jakarta, Februari 2019
8	Penandatanganan MoU dengan Universitas Trilogi sebagai perguruan tinggi swasta pertama yang tergabung dalam University Networks for Indonesia Infrastructure Development (UNIID)	Jakarta, Februari 2019
9	<i>Capacity Building</i> dan <i>Kick Off</i> Pelaksanaan Penyiapan dan Pendampingan Transaksi Proyek KPDBU Pemerintah Aceh RSUD dr. Zainoel Abidin	Jakarta, Maret 2019
10	Penandatanganan Kesepakatan Bersama PT PII dengan The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) untuk Islamic Guarantee untuk Proyek RSUD dr. Zainoel Abidin dan Co-Guarantee untuk Proyek RSK Dharmais	Jeddah, April 2019
11	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk Proyek KPBU Perkeretaapian Makassar-Parepare bersama Kementerian Perhubungan sebagai PJPK	Jakarta, April 2019
12	<i>Capacity Building</i> Skema Proyek KPBU untuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan	Jakarta, April 2019
13	Infrastructure Summit “Empowering University for Continuous PPP Infrastructure Development in Regional Government” bekerja sama dengan UNIID	Bandung, April 2019
14	<i>Tele-teaching</i> (Pengajaran Jarak Jauh) Jakarta-Kepulauan Natuna-Timika sebagai bentuk pemanfaatan jaringan Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur, bekerja sama dengan Universitas Trilogi	Jakarta – Natuna – Timika, April 2019
15	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres untuk Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) bersama Kementerian Kominfo sebagai PJPK	Jakarta, Mei 2019
16	<i>Market Sounding</i> Proyek KPBU Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Kota Tangerang Selatan	Jakarta, Mei 2019
17	Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Prasetya Mulya	Jakarta, Mei 2019
18	Workshop “US – Indonesia Transportation Infrastructure Best Practices: Planning, Financing and Maintaining” bersama US Department of Transportation	Bali, Juni 2019
19	<i>Market Sounding</i> Proyek KPBU RSUD dr. Zainoel Abidin	Jakarta, Juli 2019
20	<i>Focused Group Discussion</i> (FGD) Pengembangan Potensi Infrastruktur Jawa Timur dengan Skema KPBU	Surabaya, Agustus 2019
21	Belajar bersama Menkominfo – Diskusi seputar Manfaat Sosial dan Ekonomi Pembangunan Proyek Infrastruktur Palapa Ring Barat, Tengah, Timur dan Satelit Multifungsi	Jakarta, Agustus 2019



Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

No.	Uraian Kegiatan	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
22	<i>Market Sounding</i> Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Semarang, bekerja sama dengan BKPM dan Pemkot Semarang	Semarang, Agustus 2019
23	Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) dengan Kemenhub sebagai PJPK	Jakarta, Agustus 2019
24	Workshop Percepatan Pembangunan Infrastruktur oleh BUMN melalui Pembiayaan dengan Penjaminan Pemerintah, bekerja sama dengan Kemenkeu	Bali, Agustus 2019
25	Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) ke-19 bersama UNIID	Bandung, September 2019
26	Penandatanganan Perjanjian Penjaminan atas Pinjaman PT PLN untuk Pembiayaan <i>Hydropower Program</i> dengan KfW	Jakarta, September 2019
27	Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, Perjanjian Penjaminan dan Regres Proyek KPBU Tol Semarang-Demak dengan Kementerian PUPR sebagai PJPK	Jakarta, September 2019
28	<i>Market Consultation</i> Proyek KPBU Pengembangan Pelabuhan Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub	Kendari, September 2019
29	Sosialisasi KPBU untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat dan Pembinaan Lingkungan di Wilayah Banjarnegara dan Wonosobo, bekerja sama dengan SMV Kemenkeu	Yogyakarta, Oktober 2019
30	Simposium IV – Peran Perguruan Tinggi dalam Penyiapan Proyek Infrastruktur dan Pengembangan SDM Pengelola Infrastruktur, bekerja sama dengan UNIID dan Poltek Batam	Batam – Singapura, Oktober 2019
31	FGD Penyiapan <i>Screening Form</i> Skema KPBU RSUD Kalimantan Tengah	Jakarta, November 2019
32	Pekan Kekayaan Negara bersama DJKN Kemenkeu	Jakarta, November 2019
33	FGD Proyek KPBU Pembangunan Proving Ground BPLJSKB Bekasi bersama Kementerian Perhubungan	Jakarta, November 2019
34	<i>Workshop</i> “Find Your Creativity in Social Media and Photography” bersama Biro Komunikasi Kemenkeu	Jakarta, Desember 2019
35	20 th Indonesia Infrastructure Roundtable “Optimalisasi Strategi dan Alternatif Skema Pembiayaan KPBU dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan”, bekerja sama dengan UNIID dan UGM	Yogyakarta, Desember 2019

Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan eksternal juga menjadi prioritas kegiatan operasional Perseroan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan. Pengelolaan hubungan dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan tipe serta karakteristik masing-masing *stakeholder* untuk kemudian menentukan tipe komunikasi yang sesuai. Kegiatan ini penting demi menjaga keberlanjutan proyek dalam lingkungan kegiatan usaha Perseroan.

Adapun bentuk kegiatan pengelolaan hubungan yang dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2019 antara lain:

No.	Uraian Kegiatan	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
1	Acara Pencanangan Pembangunan Bandar Udara Baru Kota Singkawang oleh Pemerintah Singkawang bersama Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM, Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Walikota Singkawang	Singkawang, Februari 2019
2	Peresmian National Export Dashboard (NED) Indonesia Eximbank oleh Menteri Keuangan	Jakarta, Maret 2019
3	<i>Talkshow</i> PUPR 4.0 Expo oleh Kementerian PUPR RI	Jakarta, Maret 2019
4	Dasabakti PT SMI bersama Menteri Keuangan	Jakarta, Maret 2019
5	The 12 th Global Infrastructure Leadership Forum (GILF12) bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR	Montreal, Canada, Maret 2019



No.	Uraian Kegiatan	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
6	<i>Groundbreaking</i> Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 2 Dieng dan Patuha milik PT Geo Dipa Energi (Persero) oleh Menteri Keuangan	Jakarta, April 2019
7	Eksibisi Basket 2019 antara PT PII, PT SMI, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu	Jakarta, Mei 2019
8	Buka Puasa PT PII dengan Pemangku Kepentingan	Jakarta, Mei 2019
9	Nuzulul Quran dan Buka Puasa Bersama Kementerian Keuangan dan SMV Kemenkeu	Jakarta, Mei 2019
10	Halal Bihalal dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Bappenas	Jakarta, Juni 2019
11	Rail Logistic Korea 2019 oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dan Korea Rail Network Agency (KRNA)	Korea, Juni 2019
12	Bloomberg Emerging + Frontier Forum 2019 bersama Kementerian Keuangan RI dan SMV Kemenkeu	London, Juni 2019
13	Indonesia Infrastructure Forum 2019 oleh BKPM Australia	Australia, Juni 2019
14	Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan ke Provinsi Lampung untuk sektor infrastruktur transportasi daerah	Lampung, Juli 2019
15	Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019 oleh KBRI London dan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) London	London, Juli 2019
16	Sosialisasi KPBU dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan	Musi Banyuasin, Sumsel, Juli 2019
17	<i>Gathering</i> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat "It's Journey to be Smart Terminal and Smart Road Infrastructure".	Jakarta, Juli 2019
18	<i>Expose</i> KPBU Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Pemprov NTB	Lombok, Agustus 2019
19	Singapore Regional Infrastructure Summit 2019 "Embracing the Regional Infrastructure Opportunities" bersama SMV Kemenkeu	Singapura, Agustus 2019
20	FCG Akselerasi Implementasi KPBU untuk Pengembangan Infrastruktur Bandar Udara di Indonesia oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara Kemenhub dalam rangka <i>Joint Research</i> dengan Japan Ministry of Land, Infrastructure and Tourism	Bali, September 2019
21	<i>Workshop</i> Sosialisasi KPBU Regional Sumatera oleh Kantor Bersama KPBU RI	Palembang, September 2019
22	<i>Workshop</i> Program Pengembangan dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR	Bogor, September 2019
23	Indonesia – Australia Business Summit (IABS) : Capitalizing Partnership, Gaining Mutual Benefit" oleh KBRI Canberra	Sydney, September 2019
24	<i>Market Sounding</i> Proyek KPBU Bandar Udara Singkawang Kalimantan Barat oleh BKPM dan Kemenhub	Jakarta, Oktober 2019
25	Beach Clean Up Day dalam rangka Hari Oeang ke-73 oleh Kementerian Keuangan	Banten, Oktober 2019
26	<i>Market Sounding</i> Proyek KPBU Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik (PSEL) pada acara West Java Infrastructure Summit 2019 oleh Pemprov Jabar dan Bank Indonesia	Bandung, Oktober 2019
27	FGD Dukungan Pemerintah untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika oleh DJPPR Kemenkeu	Lombok, Oktober 2019
28	<i>Family Gathering</i> Kementerian Keuangan RI "Maju Bersama Menghadapi Tantangan"	Jakarta, November 2019
29	Kemenkeu Mengajar "Satu Hari Mengajar, Selamanya Memberi Arti"	Jakarta, November 2019
30	Indonesia Infrastructure Development Financing oleh BAPPENAS	Jakarta, November 2019
31	Kunjungan Kementerian Keuangan ke Ontario Municipal Employee Retirement System (OMERS)	Canada, November 2019
32	<i>Market Sounding</i> Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, dan Jalan Tol Mamminasata oleh Kementerian PUPR	Jakarta, November 2019
33	Transportation Investment Forum – PPP Infrastructure Project in Indonesia bersama Kemenhub, BAPPENAS, dan BKPM	Kuala Lumpur, November 2019
34	Pengumuman Pemenang Lelang Badan Usaha Proyek KPBU Bandara Komodo, Labuan Bajo, oleh Kemenhub dan Kemenkeu	Jakarta, Desember 2019

Analisis Kinerja Keuangan

Pada tahun buku 2019, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1.008,03 miliar, tumbuh Rp173,78 miliar atau 20,83% terhadap pendapatan yang dibukukan pada tahun 2018 yang mencapai Rp834,25 miliar.

Analisis atas kinerja keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia. Analisis tinjauan keuangan ini dijabarkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - *A member of the PricewaterhouseCoopers network of firms* dengan pendapat Tanpa Modifikasi.

Analisis yang disampaikan ini telah memperhatikan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Bahasan serta analisis tentang kondisi keuangan ini disajikan dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Kinerja Posisi Keuangan
2. Kinerja Laba Rugi Komprehensif
3. Kinerja Arus Kas

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT PII berhasil membukukan aset pada tahun 2019 sebesar Rp11.111,24 miliar. Jumlah tersebut tumbuh 4,62% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp10.620,92 miliar. Sedangkan jumlah liabilitas selama tahun berjalan mencapai Rp139,46 miliar, turun 0,56% dari tahun sebelumnya sebesar Rp140,25 miliar, sedangkan ekuitas mencapai Rp10.971,78 miliar tumbuh 4,69% dari sebelumnya sebesar Rp10.480,67 miliar.

Upaya Perseroan untuk secara konsisten menjaga keuntungan dan kesinambungan pertumbuhan kinerja bisnis terus dilakukan dengan penerapan berbagai kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan yang ada. Pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan menjadi modal penting bagi PT PII untuk terus berperan aktif sebagai BUPI yang bertujuan untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui penyediaan penjaminan di bidang



Pendapatan Perseroan

20,83%



Perseroan memperoleh pertumbuhan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan usaha penjaminan proyek KPBU, penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, serta penjaminan Non-KPBU.



infrastruktur. Dengan prinsip tersebut, Perseroan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan melalui optimalisasi pendapatan penjaminan dan pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang dapat diterima.

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset	11.111,24	10.620,92	490,32	4,62
Liabilitas	139,46	140,25	(0,79)	(0,56)
Ekuitas	10.971,78	10.480,67	491,11	4,69

Aset

Perseroan kembali berhasil mencatatkan pertumbuhan aset mencapai 4,62% atau sebesar Rp490,32 miliar menjadi Rp11.111,24 miliar pada tahun 2019, dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp10.620,92 miliar. Secara umum peningkatan total aset Perseroan dipengaruhi oleh tingginya pendapatan dari hasil pengelolaan dana.

Komposisi portofolio investasi merupakan komponen terbesar dalam aset, yaitu mencapai 97,93%. Kemudian, diikuti oleh piutang usaha yang merupakan komponen terbesar kedua dengan porsi 1,02% dari total aset.

Analisis Kinerja Keuangan

Sementara dari sisi pertumbuhan, meski komponen pajak dibayar di muka mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 1.037,84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun demikian, komponen investasi mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan kenaikan 25,46% atau sebesar Rp2.207,99 miliar dibandingkan tahun 2018 yang diikuti oleh pertumbuhan piutang usaha sebesar 41,52% atau Rp33,21 miliar.

Tabel Aset

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Kas dan setara kas	26,81	1.699,18	(1.672,37)	(98,42)
Investasi	10.881,16	8.673,17	2.207,99	25,46
Piutang usaha	113,19	79,98	33,21	41,52
Piutang lainnya	12,58	8,98	3,60	40,09
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1,57	2,45	(0,88)	(35,92)
Aset tetap	14,50	18,78	(4,28)	(22,79)
Aset tak berwujud	1,82	1,20	0,62	51,67
Beban tangguhan	26,70	43,36	(16,66)	(38,42)
Pajak dibayar dimuka	4,21	0,37	3,84	1.037,84
Aset pajak tangguhan	23,33	88,10	(64,77)	(73,52)
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,37	5,35	0,02	0,37
Jumlah Aset	11.111,24	10.620,92	490,32	4,62

Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas mencapai Rp26,81 miliar pada akhir tahun 2019 turun secara signifikan 98,42% atau sebesar Rp1.672,37 miliar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.699,18 miliar. Porsi komponen kas dan setara kas dalam aset mencapai 0,24%. Penurunan kas dan setara kas terutama dipengaruhi oleh penurunan deposito yang pada akhir tahun 2019 tidak ada yang masuk dalam kategori kas dan setara kas.

Investasi

Portofolio investasi Perseroan hingga akhir tahun buku 2019 mencapai Rp10.881,16 miliar, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp8.673,17 miliar. Pertumbuhan investasi Perseroan didorong oleh peningkatan deposito berjangka yang naik 25,46% dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Komposisi portofolio investasi Perseroan pada akhir tahun 2019 meliputi deposito berjangka sebesar 70,34% dan instrumen pendapatan tetap atau obligasi sebesar 29,66%.

Liabilitas

Posisi liabilitas Perseroan pada akhir tahun 2019 mencapai Rp139,46 miliar, lebih rendah 0,56% atau sebesar Rp0,79 miliar dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp140,25 miliar. Kontribusi terbesar dalam komponen liabilitas tercatat masih dari pinjaman Pemerintah yang bersumber dari pinjaman penerusan atas dana pinjaman dari World Bank.

Tabel Liabilitas

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Utang usaha	3,77	7,48	(3,71)	(49,60)
Utang pajak	2,44	4,82	(2,38)	(49,38)
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	37,99	42,91	(4,92)	(11,47)
Pendapatan tangguhan	10,97	8,51	2,46	28,91
Pinjaman penerusan	55,13	55,13	-	0,00
Liabilitas imbalan kerja	29,16	21,40	7,76	36,26
Jumlah Liabilitas	139,46	140,25	(0,79)	(0,56)

Di tahun 2019, Perseroan mencatat komponen liabilitas yang mengalami kenaikan terbesar adalah Liabilitas Imbalan Kerja mencapai 36,26% menjadi Rp29,16 miliar, sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp21,40 miliar. Pada umumnya, seluruh komponen liabilitas mengalami kinerja yang positif.

Sedangkan pinjaman penerusan yang merupakan komponen terbesar pada liabilitas, tidak mengalami kenaikan dan tercatat sebesar Rp55,13 miliar. Pinjaman

penerusan ini menggunakan SUN *Benchmark* dengan tenor 20 tahun sebagai acuan tingkat suku bunga.

Ekuitas

Pada tahun 2019, posisi ekuitas Perseroan mencapai Rp10.971,78 miliar, tumbuh 4,69% atau sebesar Rp491,11 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp10.480,67 miliar. Komponen terbesar dari ekuitas adalah modal saham yang mencapai Rp8.000,00 miliar atau 72,91% dari total ekuitas.

Tabel Ekuitas

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Modal saham	8.000,00	8.000,00	0	0,00
Laba/Rugi belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual	6,40	(111,38)	117,78	(105,75)
Keuntungan aktuarial	0,21	0,84	(0,63)	(75,00)
Saldo laba				
• Ditentukan penggunaannya	140,00	116,45	23,55	20,22
• Tidak ditentukan penggunaannya	2.825,17	2.474,76	350,41	14,16
Jumlah Ekuitas	10.971,78	10.480,67	491,11	4,69

Analisis Kinerja Keuangan

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2019, total laba komprehensif Perseroan mencapai Rp646,57 miliar, naik secara signifikan sebesar 95,70% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp330,38 miliar. Rincian kinerja laba/rugi komprehensif dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Laba Rugi

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan	1.008,03	834,25	173,78	20,83
Beban usaha	(413,63)	(356,79)	(56,84)	15,93
Laba sebelum pajak penghasilan	594,40	477,46	116,94	24,49
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	(64,98)	(6,38)	(58,60)	918,50
Laba tahun berjalan	529,42	471,08	58,34	12,38
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun berjalan	117,15	(140,70)	257,85	(183,26)
Jumlah Penghasilan komprehensif tahun berjalan	646,57	330,38	316,19	95,70

Pendapatan

Pada tahun buku 2019, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1.008,03 miliar, tumbuh Rp173,78 miliar atau 20,83% terhadap pendapatan yang dibukukan pada tahun 2018 yang mencapai Rp834,25 miliar. Perseroan memperoleh pertumbuhan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan dari kegiatan usaha penjaminan baik KPBU maupun Non - KPBU dan pengelolaan dana.

Selama tahun 2019, Perseroan membukukan pendapatan penjaminan dari berbagai proyek yang dijamin dari sektor ketenagalistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, jalan tol, pariwisata dan transportasi, sedangkan pendapatan pengelolaan dana terutama berasal dari pendapatan bunga deposito dan pendapatan tetap. Selain itu, Perseroan juga membukukan pendapatan dari kegiatan Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility*/PDF).

Beban Usaha

Beban usaha terdiri atas beban penjaminan, beban penyiapan proyek dan pendampingan transaksi/PDF, beban administrasi dan umum, beban pengembangan usaha dan beban lainnya. Pada tahun 2019, Perseroan mencatatkan total beban usaha mencapai Rp413,63 miliar, meningkat 15,93% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp356,79 miliar.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beban pajak final dan beban penjaminan yang meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan pengelolaan dana dan pendapatan penjaminan.

Komponen terbesar dari beban usaha adalah beban pajak final yang mencapai 39,21% dari total beban. Beban pajak final mengalami kenaikan 15,96%, dari Rp139,87 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp162,19 miliar di tahun 2019. Kemudian, diikuti oleh beban administrasi dan umum yang porsinya mencapai 27,96% dari total beban usaha. Beban dari komponen ini naik 6,68% menjadi sebesar Rp115,66 miliar pada tahun 2019 dari tahun 2018 sebesar Rp108,42 miliar. Peningkatan beban administrasi dan umum salah satunya disebabkan karena adanya beban karyawan serta beban sewa yang semakin bertambah.

Beban pengembangan usaha juga tercatat mengalami kenaikan 83,66%, menjadi Rp14,05 miliar pada tahun 2019. Kenaikan tersebut berasal dari adanya peningkatan kegiatan IIGF Institute dalam mendukung kemajuan pelaksanaan penjaminan melalui *Capacity Building* serta peningkatan kegiatan loka-karya.

Tabel Beban Usaha

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Beban pajak final	(162,19)	(139,87)	(22,32)	15,96
Administrasi dan umum	(115,66)	(108,42)	(7,24)	6,68
Penjaminan	(81,31)	(60,04)	(21,27)	35,43
Penyiapan proyek dan Pendampingan Transaksi	(28,32)	(33,27)	4,95	(14,88)
Pengembangan usaha	(14,05)	(7,65)	(6,40)	83,66
Penyusutan	(8,47)	(6,49)	(1,98)	30,51
Beban bunga pinjaman	(4,62)	(4,19)	(0,43)	10,26
Amortisasi	(0,41)	(0,56)	0,15	(26,79)
Keuntungan/(kerugian) kurs, bersih	(0,07)	0,99	(1,06)	(107,07)
Penghasilan keuangan, kotor	1,13	2,63	(1,50)	(57,03)
Lain-lain	0,34	(0,08)	0,26	325,00
Jumlah beban usaha	(413,63)	(356,79)	(56,84)	15,93

Laba Tahun Berjalan

Berbagai penerapan kebijakan strategis mampu meningkatkan kinerja Perseroan dengan capaian pertumbuhan laba tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar Rp529,42 miliar tumbuh 12,38% atau sebesar Rp58,34 miliar dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp471,08 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan dari pengelolaan dana dan pendapatan penjaminan.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2019, realisasi laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp646,57 miliar, naik Rp316,19 miliar atau sebesar 95,70% terhadap realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp330,38 miliar. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan jumlah pendapatan yang secara signifikan tumbuh 20,83%.

Tabel Laba

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Laba tahun berjalan	529,42	471,08	58,34	12,38
Jumlah Laba Komprehensif tahun berjalan	646,57	330,38	316,19	95,70

Analisis Kinerja Keuangan

LAPORAN ARUS KAS

Posisi kas dan setara kas pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp26,81 miliar, turun 98,42% atau sebesar Rp1.672,37 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp1.699,18 miliar. Penurunan ini, terutama didorong oleh menurunnya dana deposito.

Tabel Arus Kas

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Arus kas dari aktivitas operasi	578,55	502,15	76,40	15,21
Arus kas dari aktivitas Investasi	(2.095,46)	(153,70)	(1.941,76)	1.263,34
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(155,46)	(92,32)	(63,14)	68,39
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	(1.672,37)	256,13	(1.928,50)	(752,94)
Kas dan setara kas awal tahun	1.699,18	1.443,05	256,13	17,75
Kas dan setara kas akhir tahun	26,81	1.699,18	(1.672,37)	(98,42)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2019, Perseroan mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp578,55 miliar, naik 15,21% atau sebesar Rp76,40 miliar dari tahun 2018 sebesar Rp502,15 miliar. Kenaikan ini merupakan akibat dari adanya kenaikan atas arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi serta kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Laba sebelum pajak penghasilan	594,41	477,47	116,94	24,49
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas				
• Beban penyusutan	8,47	6,49	1,98	30,51
• Beban amortisasi	0,41	0,56	(0,15)	(26,79)
• Beban penyisihan imbalan kerja	9,19	5,36	3,83	71,46
• Penyisihan beban tangguhan	10,73	-	10,73	100,00
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	623,21	489,88	133,33	27,22
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi				
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				
• Piutang usaha	(33,2)	(5,15)	(28,05)	544,66
• Piutang lainnya	(3,60)	(2,00)	(1,6)	80,00
• Biaya dibayar dimuka dan uang muka	0,88	(0,39)	1,27	(325,64)
• Beban tangguhan	5,93	(1,69)	7,62	(450,89)
• Pajak dibayar dimuka	(3,84)	-	(3,84)	(100,00)
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:				
• Utang usaha	(3,71)	4,14	(7,85)	(189,61)
• Utang pajak	(2,39)	1,33	(3,72)	(279,70)
• Biaya masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	(4,92)	15,06	(19,98)	(132,67)

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
• Pembayaran manfaat imbalan kerja	(2,27)	(0,22)	(2,05)	931,82
• Beban <i>front-end</i>	-	0,76	(0,76)	(100,00)
• Pendapatan tangguhan	2,46	0,43	2,03	472,09
	(44,66)	12,27	(56,93)	(463,98)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	578,55	502,15	76,40	15,21

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2019, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencapai Rp2.095,46 miliar turun 1.263,34% atau sebesar Rp1.941,76 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp153,70 miliar. Perubahan ini disebabkan oleh menurunnya arus kas yang digunakan untuk investasi pengelolaan.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Penempatan investasi	(2.090,21)	(143,93)	(1.946,28)	1.352,24
Pembelian aset tetap dan aset tak berwujud	(5,23)	(9,77)	4,54	(46,47)
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan	(0,02)	-	(0,02)	(100,00)
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	(2.095,46)	(153,70)	(1.941,76)	1.263,34

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2019, arus kas bersih Perseroan dari aktivitas pendanaan tercatat mengalami penurunan sebesar 68,39% atau sebesar Rp63,14 miliar menjadi minus Rp155,46 miliar dibandingkan tahun 2018 yang tercatat minus Rp92,32 miliar. Hal ini terjadi karena pada tahun 2019 Perseroan tidak menerima PMN.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019	2018	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pembayaran dividen	(155,46)	(101,15)	(54,31)	53,69
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan	-	(1,02)	1,02	(100,00)
Penerimaan dari pinjaman penerusan	-	9,85	(9,85)	(100,00)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(155,46)	(92,32)	(63,14)	68,39



Informasi Keuangan Material Lainnya

Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan struktur modal yang kuat dan sehat, sehingga mampu memberikan dukungan maksimal bagi pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak memiliki utang jangka panjang yang substansial untuk mendukung kepemilikan aset. Saldo utang jangka panjang Perseroan berupa pinjaman penerusan senilai Rp55,13 miliar yang dipergunakan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas dan teknis operasi Perusahaan melalui dukungan Bank Dunia (World Bank). Selebihnya adalah liabilitas imbalan kerja sebesar Rp29,16 miliar.

Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029. Selebihnya seluruh kegiatan untuk kepemilikan aset masih dibiayai oleh modal Perseroan.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Hingga akhir tahun 2019, piutang Perseroan berasal dari piutang bunga yang berasal dari investasi dalam deposito maupun obligasi, piutang penjaminan, dan piutang atas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi. Piutang Perseroan didominasi oleh piutang terkait bunga yang berasal dari investasi dalam deposito dan obligasi yang mencakup 50,47% dari total piutang, di mana Perseroan menempatkan deposito dengan mekanisme tender dan penempatan obligasi dengan memperhatikan standar yang diperbolehkan dalam *Operating Manual* Perseroan dan PMK No. 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Dengan demikian, Perseroan tidak mengalami dinamika pada tingkat kolektibilitasnya baik kolektibilitas piutang jangka pendek maupun jangka panjang.



Pertumbuhan Aset

4,62%



PT PII berhasil membukukan aset pada tahun 2019 sebesar Rp11.111,24 miliar. Jumlah tersebut tumbuh 4,62% dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp10.620,92 miliar.



Secara rinci, penjelasan dan analisis kemampuan kolektibilitas piutang Perseroan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sebagai berikut:

Tabel Kolektibilitas Piutang

Uraian	2019	2018
Persentase piutang terkait bunga (deposito dan obligasi) dari total piutang	50,47%	71,45%

STRUKTUR MODAL

Kebijakan Struktur Modal

Tujuan Perseroan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perseroan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

Informasi Keuangan Material Lainnya

Struktur Modal

Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan struktur modal yang kuat dan sehat, sehingga mampu memberikan dukungan maksimal bagi pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman atau liabilitas, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk itulah, Perseroan mengelola permodalan dengan tujuan melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan demikian, Perseroan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Aset Perseroan saat ini sebagian besar didanai dari ekuitas Perseroan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil keputusan pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. no. 145 tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah selaku pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp9,00 triliun (nilai penuh).

Pemerintah kemudian melakukan penambahan PMN beberapa kali hingga tanggal 28 Desember 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan sebesar Rp1 triliun, sehingga pada posisi 31 Desember 2017, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan tercatat sebesar Rp8 triliun. Selain modal ditempatkan, per akhir tahun 2019 Perseroan memiliki saldo penghasilan komprehensif lainnya dan saldo laba ditahan dengan total sebesar Rp2,97 triliun sebagai bagian dari ekuitas.

Tabel Struktur Modal

(dalam Rp Miliar)

Uraian	2019		2018	
	Nominal	Presentase	Nominal	Presentase
Liabilitas	139,46	1,26%	140,25	1,32%
Ekuitas	10.971,78	98,74%	10.480,67	98,68%
Total	11.111,24	100,00%	10.620,92	100,00%

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan akhir tahun 2019, PT PII tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN BUKU TERAKHIR

PT PII tidak memiliki investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.

KOMITMEN DAN KONTINGENSI

Sepanjang tahun 2019, Perseroan mencatatkan transaksi yang termasuk dalam komitmen dan kontingensi yakni komitmen sewa. PT PII menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan masa sewa sampai dengan empat tahun yang tidak dapat dibatalkan sebagai berikut:

Tabel Komitmen dan Kontingensi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	2019	2018
Tidak lebih dari 1 tahun	14.225.117	21.337.676
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun	-	14.225.117
Jumlah	14.225.117	35.562.793

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2019

PT PII telah menyusun target pencapaian kegiatan usaha yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di awal tahun. Berdasarkan RKAP 2019, Perusahaan menargetkan pendapatan sebesar Rp1.040,62 miliar, dengan realisasi pendapatan mencapai Rp1.008,03 miliar atau 96,87% dari target.

Laba sebelum pajak penghasilan ditargetkan sebesar Rp524,15 miliar dengan realisasi pencapaian sebesar Rp594,40 miliar atau mencapai 113,40% dari target yang ditetapkan. Sedangkan laba tahun berjalan pada 2019 tercatat sebesar Rp529,42 miliar, atau mencapai 104,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp504,78 miliar.

Secara rinci, informasi mengenai perbandingan antara terget yang ditetapkan Perseroan pada awal tahun 2019 dengan realisasinya di akhir tahun 2019 sebagai berikut:

(dalam Rp Miliar)

Uraian	Target RKAP 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2019: RKAP 2019 (%)
Laba Rugi Komprehensif			
Pendapatan Usaha	1.040,62	1.008,03	96,87
Beban Usaha	(516,47)	(413,63)	80,09
Laba Sebelum Pajak	524,15	594,40	113,40
Manfaat (beban) Pajak penghasilan	(19,37)	(64,98)	335,47
Laba Tahun Berjalan	504,78	529,42	104,88
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	469,95	646,57	137,58
Posisi Keuangan			
Aset	10.958,68	11.111,24	101,39
Liabilitas	105,31	139,46	132,43
Ekuitas	10.853,37	10.971,78	101,09
Total Liabilitas dan Ekuitas	10.958,68	11.111,24	101,39

PROYEKSI 2020

Pada masa mendatang, Perseroan telah menetapkan proyeksi tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020. Pada RKAP tersebut, kinerja usaha PT PII masih akan dititikberatkan pada besaran proyek yang akan dijamin dan pemrosesan proyek.

Melanjutkan pemrosesan proyek penjaminan dari tahun sebelumnya, Perseroan manargetkan pada tahun 2020 terdapat beberapa proyek baru dan proyek lanjutan yang dapat mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan serta pengakuan pendapatan *upfront fee* di tahun yang sama. Dari beberapa proyek tersebut, diproyeksikan di antaranya mencapai efektif penjaminan, sehingga *recurring fee* penjaminan juga telah dapat diakui, sedangkan satu sisanya baru mencapai tahapan efektif penjaminan di tahun 2020.

Terkait dengan penjaminan Non-KPBU, diharapkan terdapat satu proyek yang dapat diproses dan diproyeksikan mencapai tahapan penandatanganan perjanjian penjaminan. Untuk penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, terdapat 6 (enam) proyek yang merupakan kelanjutan pemrosesan proyek penjaminan dari tahun sebelumnya, dan diharapkan terdapat 2 (dua) proyek baru yang diterima penugasannya.

Proyeksi target pendapatan pengelolaan dana diasumsikan dengan menggunakan tingkat pengembalian secara rata-rata mencapai 190 bps di atas *BI 7-day repo rate* yang diasumsikan sebesar 5,25% di tahun 2020. Perseroan juga akan mempertahankan komposisi portofolio dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan pasar obligasi walaupun tingkat pengembalian investasi pada obligasi yang secara relatif memiliki tingkat

Informasi Keuangan Material Lainnya

pengembalian yang lebih tinggi, serta tetap mempertimbangkan kebutuhan likuiditas. Besaran penempatan obligasi tetap akan dipertahankan sekitar 30% atau setara dengan posisi di tahun 2020.

Untuk proyeksi rasio keuangan, rasio yang relevan untuk bisnis penjaminan menggunakan Margin Laba Bersih dan BOPO. Adapun target yang dituju pada tahun 2020 adalah Margin Laba Bersih 53% dan BOPO 48%. PT PII juga mengalokasikan pembagian dividen kepada pemegang saham, maksimum 20% dari estimasi Laba Bersih Tahun Buku 2019 atau senilai maksimal Rp106,12 miliar pada tahun 2020. Berdasarkan realisasi 2019, proyeksi keuangan untuk 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rp Miliar)

Uraian	Target RKAP 2020	Realisasi 2019
Laba Rugi Komprehensif		
Pendapatan Usaha	1.046,75	1.008,03
Beban Usaha	(495,65)	(413,63)
Laba Sebelum Pajak	551,10	594,40
Manfaat (beban) Pajak penghasilan	3,20	(64,98)
Laba Tahun Berjalan	554,30	529,42
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	564,46	646,57
Posisi Keuangan		
Aset	10.958,68	11.111,24
Liabilitas	105,31	139,46
Ekuitas	10.853,37	10.971,78
Total Liabilitas dan Ekuitas	10.958,68	11.111,24

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Hingga akhir penerbitan laporan tahunan, Perseroan tidak mencatatkan informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan.

PROSPEK USAHA

Pengembangan Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu kunci meningkatkan daya saing dan mempercepat pergerakan ekonomi nasional. Keterbatasan dana APBN dimana jumlah kebutuhan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun berdasarkan data RPJMN tahun 2020-2024 atau meningkat sebesar 34% dari RPJMN sebelumnya. Ke depan, masih sangat diperlukan sumber pembiayaan alternatif yang dapat memenuhi kesenjangan target investasi yang ada baik untuk penyediaan infrastruktur di tingkat pusat maupun daerah.

Kegiatan usaha Perseroan masih akan memiliki prospek yang sangat baik, mengingat pembangunan

infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pemerintah di tahun-tahun mendatang. Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, disebutkan ada 246 proyek yang akan dibangun. Pada umumnya, proyek-proyek tersebut merupakan proyek infrastruktur.

PT PII telah menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2018-2022 dengan berfokus pada pengembangan aktivitas Perseroan secara menyeluruh. Dalam menyusun prospek usaha Perseroan ke depan, PT PII senantiasa mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja usaha Perseroan. Untuk faktor eksternal, terutama yang menjadi bahan pertimbangan adalah asumsi yang telah dibuat pemerintah, seperti tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penggunaan asumsi makro ekonomi dan keuangan yang relevan pada kegiatan usaha PT PII tersebut, berkisar pada pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga dan inflasi. Pada

tahun 2020, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dalam negeri akan tumbuh 5,1-5,5%. Nilai tukar Rupiah juga akan terus menguat didukung kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang membaik. Penguatan Rupiah didorong pasokan valas dari para eksportir serta aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda.

Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 4 kali sebesar 100 bps sejak Juli 2019. Sejalan dengan itu, suku bunga pasar uang antar bank tenor *overnight* (PUAB O/N) secara kumulatif telah turun 96 bps dalam periode Juli-Desember 2019. Pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) sejak Juli 2019 tertransmisikan dengan baik ke suku bunga pasar uang. Di sisi lain, Inflasi 2019 tercatat 2,72% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi 2018 sebesar 3,13% serta berada dalam kisaran sasarnya sebesar 3,5%±1%. Dengan demikian, inflasi 2019 tetap rendah dan terkendali sehingga mendukung stabilitas perekonomian.

Dengan perkembangan makroekonomi tersebut, pada tahun 2020, PT PII berencana untuk lebih mengoptimalkan peran perusahaan utamanya dalam memberikan pendampingan kepada PJPK secara *end-to-end* melalui jasa pendampingan (*advisory*) guna mendorong percepatan proyek infrastruktur. Upaya pengembangan tersebut dilakukan dengan menekankan pada kualitas, keunggulan SDM serta pengalaman Perseroan selama sepuluh tahun terakhir demi terciptanya daya saing kompetitif (*competitiveness*) dan bisnis yang berkelanjutan.

Selain pengembangan lini bisnis di bidang *advisory*, PT PII juga tengah mempersiapkan diri untuk mendukung Pemerintah dalam hal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantinya PT PII diharapkan mampu mendampingi Pemerintah mengidentifikasi kebutuhan terkait pemanfaatan aset maupun layanan yang akan diberikan kepada masyarakat, serta memastikan optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah pusat di Ibu kota Negara Lama dapat dilaksanakan dengan baik.

PT PII akan melakukan penguatan kapasitas Perseroan baik dari sisi finansial, sumber daya maupun regulasi demi menjawab berbagai tantangan

dalam perkembangan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan terjadi optimalisasi peran PT PII yang dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan terkait pada masa yang akan datang.

ARAH STRATEGIS PENGEMBANGAN USAHA JANGKA PANJANG

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PII tahun 2018-2022 yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pada tahun 2019 arah strategis pengembangan jangka panjang yang dilakukan oleh PT PII berfokus pada “Portofolio Proyek yang Beragam” sebagai upaya dalam meningkatkan Jumlah Proyek dari sektor-sektor baru. Dalam mencapai target tersebut diperlukan strategi antara lain:

- a. Menjadi pemeran sentral terhadap pengembangan ekosistem infrastruktur dalam rangka mendorong proyek infrastruktur.
- b. Ekspansi mandat di bidang penyiapan proyek dan penjaminan pinjaman langsung telah berjalan.
- c. Kesenambungan jumlah proyek penjaminan KPBU secara kuantitatif.
- d. Penerimaan perbankan domestik dan internasional atas nilai tambah penjaminan (*bankability*).

Untuk mewujudkan target portofolio yang beragam dan pipeline yang berkelanjutan, strategi-strategi tersebut kemudian diterjemahkan dalam strategi yang bersinergi antar divisi, antara lain:

- a) Berperan aktif dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi untuk mengamankan *pipeline*.
- b) Memberdayakan IIGF Institute untuk mendukung bisnis PT PII
- c) Pengembangan pengetahuan ekosistem.

Sebagai bentuk peran aktif PT PII dalam penyiapan proyek dan pendampingan transaksi, PT PII melakukan analisis permasalahan dan rencana kerja yang dihadapi untuk mendukung kesinambungan *stakeholder* terutama calon PJPK. Dengan pemetaan dari hasil analisis tersebut, PT PII dapat mengidentifikasi isu pemahaman terkait KPBU, Bisnis dan Produk PT PII oleh *stakeholder* terutama bagi calon PJPK yang pemahamannya terkait KPBU masih rendah.

Melalui IIGF Institute, PT PII juga telah merealisasikan berbagai kegiatan, baik dalam bentuk *above the line* maupun *below the line*, di antaranya sosialisasi dan

Informasi Keuangan Material Lainnya

pemberian pemahaman terkait skema KPBU dan peran PT PII dalam Penjaminan Infrastruktur. Selain itu, PT PII juga membantu mendampingi PJPB agar lebih memahami KPBU sebagai suatu pilihan dalam membangun infrastruktur yang lebih baik dan meningkatkan *awareness* terhadap skema KPBU bagi investor. Hal tersebut mencerminkan peran serta kapasitas PT PII sebagai *Agent of Infrastructure Development*.

Indikator pencapaian strategis pengembangan jangka panjang PT PII yang telah dihasilkan selama tahun 2019 meliputi meningkatnya indeks pemahaman KPBU, penjaminan KPBU yang berkesinambungan, peningkatan jumlah penjaminan proyek infrastruktur oleh PT PII sesuai target serta pengembangan sektor dan PJPB baru. Dengan kata lain, Portofolio Proyek yang Beragam telah dilaksanakan dengan baik.

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut antara lain:

a. <i>General & Audiensi</i>	272 kegiatan
b. Pengusahaan Proyek	159 kegiatan
c. <i>Capacity Building</i>	32 kegiatan
d. <i>Market Sounding/Public Consultation</i>	40 kegiatan
e. Pendampingan Kajian Studi Proyek KPBU	28 kajian, yang terdiri dari penyusunan Studi Pendahuluan, penyusunan Dokumen Persiapan Proyek, Kajian Potensi KPBU dan Kajian Pengadaan Tanah
f. Pengembangan Usaha Tahap <i>Pra-Screening</i> dan <i>Stakeholder Mapping</i>	12 <i>Screening Form</i>

Sebagai acuan hasil dari survei tingkat pemahaman PJPB yang baik pada tahun 2019 adalah sebesar 4,32 dari skala 5, yang menunjukkan kenaikan dari tahun 2018 sebesar 4,09.

ASPEK PEMASARAN

Kegiatan usaha PT PII semakin berkembang tercermin dari perluasan mandat Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 dimana lingkup kegiatan PT PII saat ini tidak hanya terbatas pada penjaminan proyek Infrastruktur dengan skema KPBU.

Perluasan mandat PT PII untuk menjamin proyek Infrastruktur dengan skema pembiayaan di luar KPBU ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.

PT PII sejak tahun 2018 juga telah melaksanakan mandat baru dalam pendampingan PJPB di tahap persiapan dan transaksi melalui penugasan PDF

dari Kementerian Keuangan. Mandat Perseroan didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan tidak lagi hanya terbatas pada penjaminan, tetapi juga dapat melakukan pendampingan, baik dari tahap penyiapan hingga pelaksanaan transaksi.

Strategi Pemasaran

Sepanjang tahun 2019, PT PII secara konsisten melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada calon PJPB dan *potential market (investor dan lender)* terkait skema KPBU dan peran PT PII secara menyeluruh. PT PII kemudian merumuskan suatu strategi "*marketing mix*" dengan menganalisa peluang dan tantangan yang dihadapi hingga akhirnya menentukan serangkaian kegiatan yang harus dijalankan demi mendukung kesinambungan kinerja usaha dan *positioning* yang kuat di pasar Infrastruktur. Melalui formulasi strategi alokasi sumber daya dan anggaran yang efisien, PT PII dapat mengimplementasikan rencana dengan lebih terstruktur dan optimal.

PT PII melalui Divisi Pengembangan Bisnis (PB) telah menyusun sasaran dan inisiatif strategis bisnis guna mendukung kegiatan divisi dalam mengoptimalkan proses *scanning* maupun *screening* terhadap *pipeline*

proyek KPBU potensial di tahun 2019. Bersama dengan itu, Perseroan juga melakukan analisis pasar, khususnya terkait dengan karakteristik pasar penjaminan, sesuai dengan bidang usaha yang dijalani Perseroan.

Adapun penjelasan terkait strategi yang ditetapkan Perseroan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengusahaan Sektor Baru dan/atau Proyek di Indonesia Timur

Kegiatan ini merupakan salah satu program prioritas Divisi PB untuk mengoptimalkan potensi proyek di Kawasan Indonesia Timur guna memperoleh informasi proyek potensial yang diharapkan dapat menjadi bagian dalam *pipeline* tahun 2019. Kegiatan dilakukan dengan target membangun *awareness* PJPK terhadap KPBU dan PT PII serta menjaga hubungan yang baik utamanya melalui 3 (tiga) jenis aktivitas: *PJPK mapping*, audiensi serta, *workshop* dan *Capacity Building* bersama IIGF Institute.

2. Inovasi dalam Kegiatan Pengusahaan Proyek dan Keseluruhan Proses Internal yang Lebih Terintegrasi

PT PII melalui Divisi Pengembangan Bisnis menginisiasi pemanfaatan sistem teknologi informasi (*IT based system*) pada kegiatan pengusahaan proyek dan proses penjaminan guna meningkatkan efektivitas kegiatan. Beberapa sistem yang sedang dikembangkan oleh Perseroan antara lain:

1. Sistem Informasi Proyek KPBU

Sistem Informasi Proyek (“SIP KPBU”) merupakan aplikasi berbasis *web* dimana PJPK dapat melakukan *self-assessment* terhadap kesiapan proyek yang akan dibangun. Selain itu, PJPK juga dapat memperoleh rekomendasi dan asistensi PT PII atas informasi yang disampaikan. Dari sisi korporasi, PT PII dapat menjaring proyek dengan cakupan yang lebih luas dan mengidentifikasi tingkat kesiapan PJPK dan proyek sejak tahap awal sehingga diharapkan kegiatan pengusahaan proyek dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

2. Project Database

Project Database dikembangkan sebagai suatu *platform* yang dapat mengintegrasikan keseluruhan informasi dan progres proyek pada setiap tahapan penjaminan. Informasi proyek

yang sebelumnya telah berhasil diperoleh melalui SIP KPBU akan ditindaklanjuti ke *Project Database* untuk kemudian secara berkala akan dicatat kelanjutan dan *update*-nya sehingga PT PII dapat memonitor proyek yang akan dijamin. Melalui sistem ini diharapkan seluruh kegiatan pada masing-masing tahapan penjaminan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga dapat mempermudah kinerja perusahaan.

3. Master List PDF

Penyusunan *Masterlist PDF* dilakukan di tiap kuartal (Q1-Q4) dengan mengacu pada informasi Proyek yang di *update* berkala serta melalui pemetaan dan *monitoring* proyek. Melalui *Masterlist PDF* diharapkan PT PII mampu mengidentifikasi dan menilai proyek-proyek yang potensial bagi PT PII untuk menerima penugasan PDF. Salah satu *output* keberhasilan *Masterlist* adalah diterimanya penugasan PDF di tahun 2019 sebagai hasil *monitoring masterlist* secara berkala untuk Proyek *Proving Ground* BPLJSKB (Penugasan PDF April 2019).

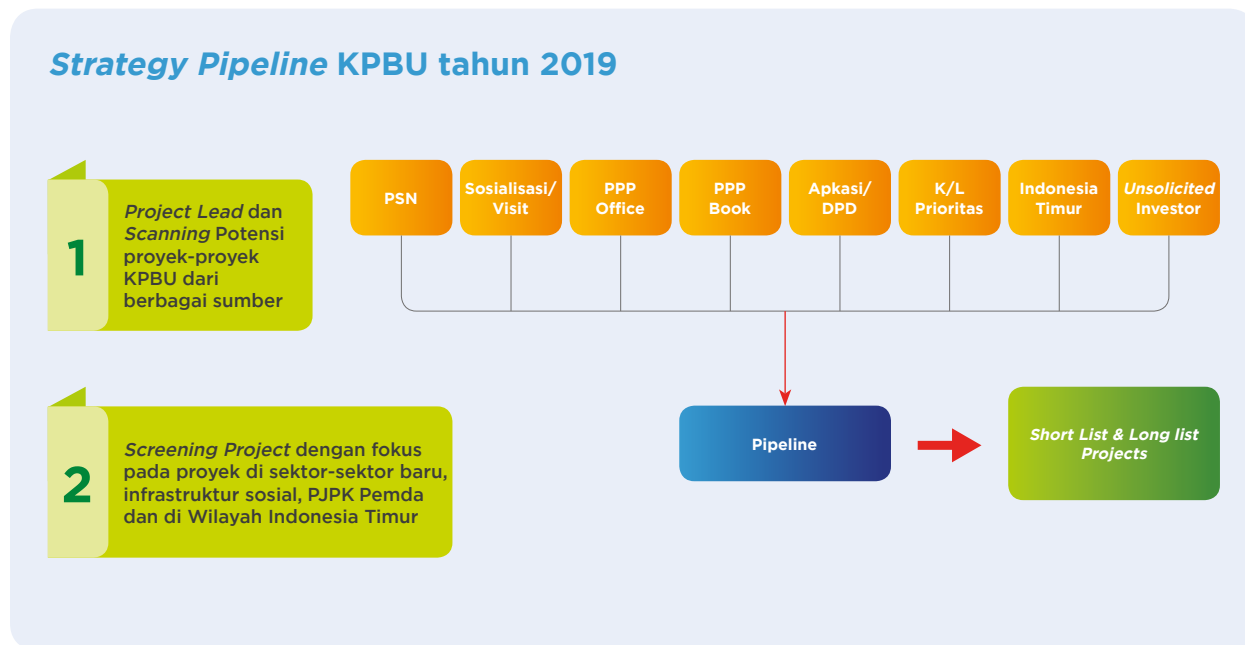
Keseluruhan sistem tersebut nantinya akan saling terkoneksi dengan aplikasi induk (*Integrated Application/System Oriented Architecture* (SOA)) guna mempermudah perolehan informasi yang diperlukan Perseroan di setiap tahapan proyek. Melalui berbagai inovasi dan inisiasi yang telah dilakukan, PT PII berharap keseluruhan proses penjaminan, utamanya di sisi *internal* Perseroan, dapat terintegrasi dengan baik.

3. Pengusahaan Screening Form dan Proyek Quickwin Infrastruktur Sosial

Kegiatan ini berfokus pada filterisasi dan asistensi proyek KPBU potensial yang menjadi pilihan untuk akselerasi pada tahun 2019. Beberapa fokus utama sektor yang disasar oleh Divisi PB antara lain, namun tidak terbatas pada sektor Transportasi, Pendidikan, Kesehatan, Persampahan, Kawasan, dan Fasilitas Perkotaan. Pada tahun ini pengusahaan proyek sektor sosial menjadi prioritas divisi dengan mempertimbangkan arahan dari Pemerintah khususnya terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Informasi Keuangan Material Lainnya

Pangsa Pasar 2019



Strategi *Pipeline* KBPU pada pangsa pasar tahun 2019, meliputi *Project Lead* dan *Scanning Potensi* proyek-proyek KPBU dari berbagai sumber yang berasal dari *Short list & Long list Projects* serta *Screening Project* dengan fokus pada proyek di sektor-sektor baru, infrastruktur sosial, PJKP Pemerintah Daerah dan di wilayah Indonesia Timur. Target pangsa pasar ini terdiri dari:

1. Kementerian Pusat yang belum pernah melakukan proyek infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU;
2. Kementerian Pusat yang telah melakukan proyek KPBU namun masih banyak proyek lainnya yang dapat menjadi potensi penjaminan;
3. Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang belum pernah melakukan proyek infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU; dan
4. Pemerintah Daerah yang telah menggunakan skema KPBU dan masih banyak proyek lainnya yang akan menggunakan KPBU.

Pelaksanaan Kegiatan 2019

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah merealisasikan kegiatan pemasaran, baik dalam bentuk *above the line* maupun *below the line*. Untuk kegiatan *above the line*, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan

engagement menggunakan media promosi umum berkoordinasi dengan divisi terkait, yaitu Divisi Corporate Secretary and Communication. Kegiatan yang direalisasikan di antaranya pembuatan *media promotion* melalui *Private Public Partnership* (PPP) *event* dan media *placement* terkait perkembangan proyek dan peran fasilitasi PT PII.

Sedangkan untuk kegiatan *below the line*, Perseroan melakukan sosialisasi dan *engagement* untuk seluruh *stakeholder* dengan beragam tujuan yang dapat dibedakan berdasarkan tipe maupun jenis targetnya. Wujud realisasi kegiatan tersebut antara lain sosialisasi KPBU beserta penjaminan, pelaksanaan program *capacity building*, *focus group discussion* dan *workshop*.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Pembagian Dividen

Keputusan tentang jumlah dividen yang dibagikan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan besarnya atau *payout ratio* yang dikeluarkan adalah sebesar 20% dari laba bersih pada tahun buku.

Realisasi Pembayaran

Realisasi pembayaran dividen kepada pemegang saham dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Pembayaran Dividen

Uraian	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Total Dividen Dibagikan	Rp155.456.000	Rp101.151.000
Tanggal Pengumuman	23 Mei 2019	23 Mei 2018
Tanggal Pembayaran	20 Juni 2019	22 Juni 2018

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak mencatatkan saham dan obligasi di bursa efek manapun untuk mendapatkan dana penawaran umum. Sehingga, Perseroan tidak memiliki informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU PEGAWAI

Hingga saat ini, seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perseroan tidak memberlakukan kebijakan tentang kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2019, Perseroan tidak mencatatkan transaksi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, serta restrukturisasi utang/modal.

TRANSAKSI AFILIASI/PIHAK BERELASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak mencatatkan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Sedangkan untuk transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi terdapat beberapa transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi yang dimaksud, antara lain:

1. Perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
2. Perusahaan asosiasi;
3. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
4. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang memiliki hak suara
5. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan
6. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Sifat Hubungan Berelasi

1. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
2. Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
3. Bank dan Badan Usaha Milik Negara merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.



Informasi Keuangan Material Lainnya

Nilai Transaksi dan Saldo dari Transaksi dengan Pihak Berelasi

PT PII menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Saldo dari Transaksi dengan Pihak Berelasi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	2019	2018
Kas dan Setara Kas	23.682.615	968.485.000
Investasi	6.745.956.127	4.616.898.175
Piutang Usaha	65.527.880	65.533.091
Pinjaman Penerusan	55.126.686	55.126.686
Total	6.890.293.308	5.706.042.952
Persentase terhadap Jumlah Aset	62,01%	53,72%

Pendapatan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	2019	2018
Pemerintah Republik Indonesia	129.366.851	176.760.668
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	103.018.330	3.802.016
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	89.868.965	58.181.702
PT Bank Mandiri Taspen Pos	45.861.434	25.311.064
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	36.208.193	58.647.559
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	23.760.736	14.695.194
PT Pegadaian (Persero)	18.037.000	15.234.078
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17.108.887	18.582.109
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	13.920.938	7.122.500
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12.963.644	114.526.031
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	12.806.708	12.115.056
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.750.000	18.179.869
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	12.057.666	7.537.361
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	9.157.457	9.184.388
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	8.556.939	5.617.865
PT Pupuk Indonesia (Persero)	7.600.000	7.506.250
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5.565.000	-
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3.719.051	3.802.211
PT Angkasa Pura (Persero)	2.413.475	2.150.000
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.092.389	1.840.625
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1.665.000	1.665.000
PT Marga Lingkar Jakarta	1.490.000	1.469.306
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.218.907	1.886.352
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1.004.383	5.000.000
PT Aneka Tambang	469.797	475.086
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	6.710.338
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	-	3.196.202
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	1.906.787
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	-	1.863.356
PT Utama Karya (Persero)	-	1.754.783
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	1.188.368
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	1.159.167

Pendapatan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	2019	2018
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	1.133.622
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	-	607.066
Total	572.681.750	590.811.979
Persentase terhadap Jumlah Pendapatan	56,81%	70,82%

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Mekanisme Review dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

PERUBAHAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat perubahan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019:

Secara umum, implementasi dari standar-standar tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi pada Perusahaan, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

KETAATAN MEMBAYAR PAJAK

PT PII senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku sebagai wujud komitmen Perseroan untuk turut serta membangun negara melalui penerimaan Pajak oleh Negara. Pajak yang dibayarkan kepada Negara di tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	2019	2018
Pajak Penghasilan Badan	Nihil	Nihil
Pajak Penghasilan Karyawan	Rp21.479.574.100	Rp17.254.687.600



Informasi Kelangsungan Usaha

Hingga laporan tahunan 2019 ini diterbitkan, PT PII tidak mendapatkan temuan atas ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.



Ekuitas Perseroan

4,69%

Pada tahun 2019, posisi ekuitas Perseroan mencapai Rp10.971,78 miliar, tumbuh 4,69% atau sebesar Rp491,11 miliar dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp10.480,67 miliar.

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019, PT PII tidak mendapatkan hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha serta pada masa mendatang berdasarkan analisis perkembangan makroekonomi dan kinerja internal terkini. Meski demikian, PT PII tetap mewaspadai tantangan eksternal yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja Perseroan. Mengantisipasi hal ini, PT PII tetap berkomitmen untuk tetap tumbuh dengan lebih selektif melakukan pengembangan usaha yang dibutuhkan sehingga kinerja Perseroan tetap terjaga.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Secara berkala, dalam penyusunan rencana strategis, PT PII melakukan evaluasi dan penilaian atas kemampuan Perseroan dalam mencapai target dan terus melanjutkan kelangsungan usaha. PT PII telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usaha.



Manajemen yakin bahwa pada PT PII tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha. PT PII senantiasa melakukan *assessment* terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terus melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan yang maksimal apabila ditemukan hal-hal yang dinilai berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

Hingga laporan tahunan 2019 ini diterbitkan, PT PII tidak mendapatkan temuan atas ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Berbagai upaya telah dilakukan PT PII dalam mengelola potensi yang berpengaruh signifikan dalam kelangsungan usaha dengan menyusun dan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan terkini dan berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian kinerja selama tahun 2019

dan histori Perseroan, Manajemen menilai bahwa kelangsungan usaha PT PII masih sesuai target dan arah strategis Perseroan. Hal ini juga didasarkan pada rasio-rasio keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan yang berada dalam kondisi baik dan mampu mendukung kelangsungan usaha di masa yang akan datang.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

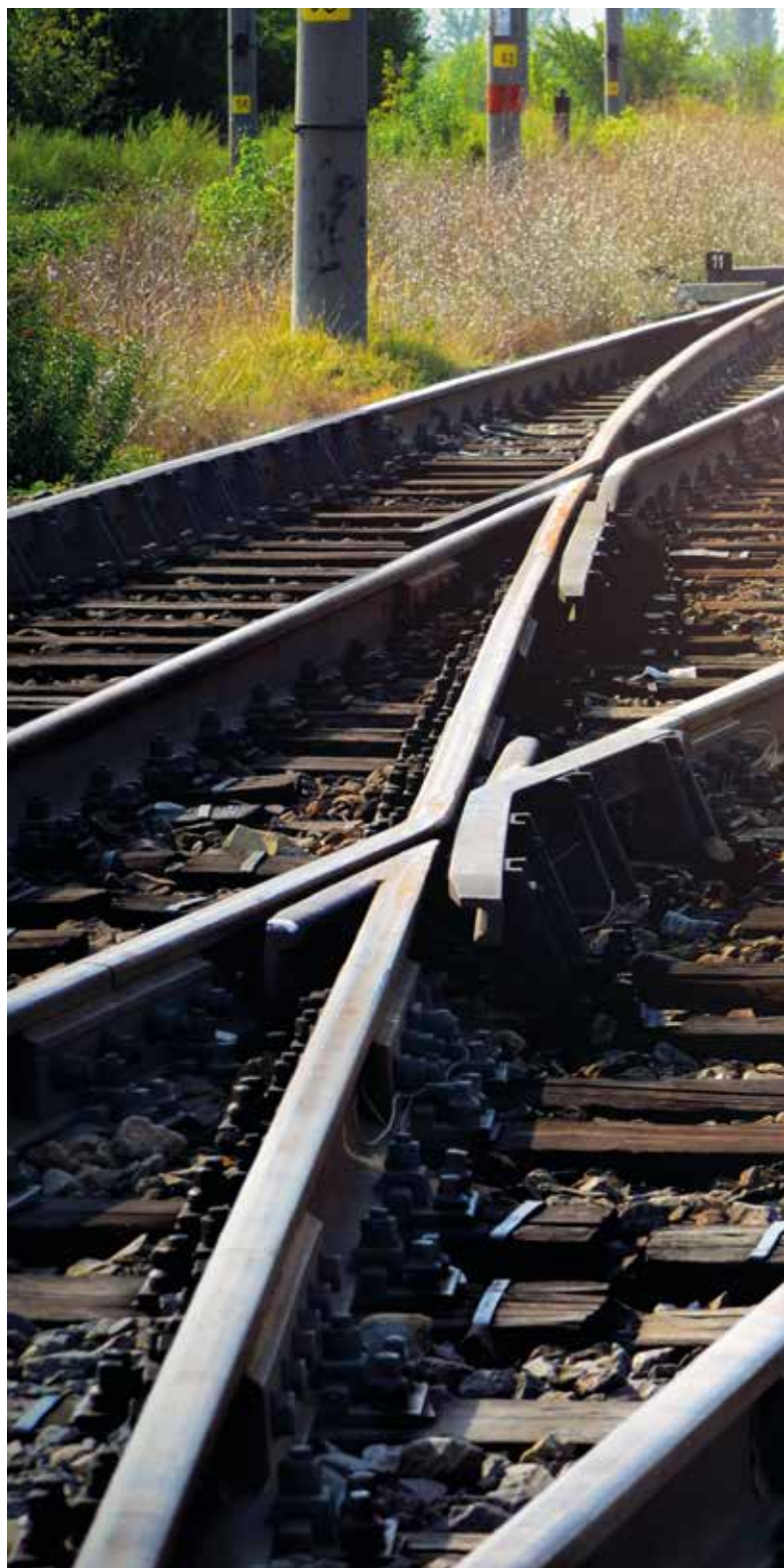
Manajemen PT PII telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam melakukan *assessment* terhadap kelangsungan usaha Perseroan meliputi kondisi makroekonomi, kinerja segmen usaha, kinerja keuangan, serta informasi material lainnya yang berkaitan dengan permodalan, solvabilitas, dan asumsi terkait lainnya.



06



Tata Kelola Perusahaan



182	Pendahuluan
190	Rapat Umum Pemegang Saham
195	Dewan Komisaris
202	Komisaris Independen
203	Direksi
211	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
213	Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
214	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
218	Hubungan Afiliasi
219	Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
220	Kebijakan Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi



222	Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris
238	Audit Internal
242	Unit Manajemen Risiko
247	Sekretaris Perusahaan
249	Akuntan Publik
250	Manajemen Risiko
260	Sistem Pengendalian Internal
264	Perkara Penting
264	Sanksi Administratif
264	Akses Informasi dan Data Perusahaan
265	Benturan Kepentingan
265	Kode Etik Perusahaan

267	Pengungkapan Budaya Perusahaan
268	Kebijakan Anti Gratifikasi
270	Kebijakan Anti Korupsi
271	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
272	Sistem Pelaporan Pelanggaran
276	Pemenuhan Penyampaian Laporan Keberlanjutan 2019
276	Praktik <i>Bad Corporate Governance</i>
277	Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>



Pendahuluan

PT PII berkomitmen menjadikan penerapan GCG sebagai salah satu indikator kerja, serta berupaya secara konsisten untuk menumbuhkan penerapan kode etik dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai nilai dan budaya Perusahaan yang melekat pada seluruh karyawan.

Skor GCG tahun 2019

89,082

Sangat Baik



Perseroan melakukan *assessment* penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Pada tahun 2019, hasil *assessment* penerapan GCG di PT PII sebesar 89,082 (sangat baik)

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Bagi PT PII, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Tata Kelola Perusahaan yang baik yang berpedoman pada prinsip-prinsip Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran merupakan pilar penting bagi keunggulan daya saing berkelanjutan.

Peningkatan kualitas penerapan GCG yang efektif secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar setiap langkah dalam pencapaian tujuan bisnis Perusahaan selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, PT PII senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik (*best practices*) baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional yang relevan dengan kebutuhan Perusahaan.



IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance

Konsep penerapan prinsip-prinsip GCG di PT PII berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan Perusahaan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. PT PII melandasi pelaksanaan implementasi GCG pada ketentuan dan standar yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Sebagai salah satu *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan, PT PII juga mendasarkan penerapan GCG pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan

Menteri Keuangan. Penerapan GCG tersebut dimaksudkan untuk menjadikan GCG sebagai dasar operasional Perseroan, seperti yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, dan tanggung jawab.

PT PII yakin pengembangan dan penerapan GCG yang selaras dengan *best-practice standard* di lingkungan kerja PT PII akan menciptakan peningkatan nilai lebih bagi Perusahaan serta menjaga kelangsungan bisnis Perusahaan. Lebih dari itu, implementasi GCG juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara maksimal pada peningkatan pelayanan penjaminan yang dikelola serta meningkatkan dan menjaga citra Perusahaan.



Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi Tata Kelola secara berkelanjutan, PT PII telah menyusun dan menerapkan Pedoman GCG (*Code of GCG*) sebagai panduan implementasi yang komprehensif atas penerapan GCG Perseroan, antara lain:

Pedoman	Dasar Penetapan	Isi
Pedoman Tata kelola Perusahaan	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005; e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2015; i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2016; j. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Kebijakan dan prosedur sebagai landasan operasional penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) oleh segenap Organ Perusahaan dan Insan Perusahaan, meliputi: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Organ Perusahaan • BAB III: Manajemen Risiko • BAB IV: Tata Kelola Pengendalian Internal • BAB V: Tata Kelola Informasi • BAB VI: Tata Kelola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Perusahaan • BAB VII: Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan • BAB VIII: Pengukuran dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik • BAB IX: Penutup
Pedoman Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>)	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.06/2013; g. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Tata laksana kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur mengenai pelaksanaan hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi beserta organ di bawahnya masing-masing, meliputi: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Dewan Komisaris • BAB III: Direksi • BAB IV: Tata Hubungan Kerja Antar Organ Perusahaan • BAB V: Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Pedoman Kode Etik	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015; b. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); c. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Tata aturan hubungan internal Perusahaan (organ perusahaan dan pegawai) dan hubungan dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dalam menjalankan bisnis di Perusahaan. Adapun isinya meliputi: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Pernyataan Nilai Perusahaan • BAB III: Pedoman Perilaku Dan Etika Bisnis Perusahaan • BAB IV: Petunjuk Pelaksanaan • BAB V: Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran • BAB VI: Penutup

Pedoman	Dasar Penetapan	Isi
Piagam Komite Audit	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 88/PMK.06/2015 f. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit PT PII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang • BAB III: Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan • BAB IV: Tata Kerja dan Prosedur Kerja • BAB V: Penganggaran dan Pembiayaan • BAB VI: Penutup
Piagam Komite Pemantau Risiko	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015; f. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Acuan dan pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko PT PII dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang meliputi: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang • BAB III: Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan • BAB IV: Tata Kerja dan Prosedur Kerja • BAB V: Penganggaran dan Pembiayaan • BAB VI: Penutup
Piagam Audit Internal	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009; b. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); c. Surat Keputusan Direksi Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor SK-002/DIR/GEN/08/2010 tentang Operating Manual PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Prosedur operasi Audit Internal dalam menjalankan fungsinya melakukan penelaahan dan pengujian operasional PT PII sebagai organisasi bisnis, yang secara garis besar mencakup: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Struktur, Persyaratan, dan Independensi Auditor Internal • BAB III: Cakupan, Kewenangan, Tanggung Jawab Auditor • Bab IV: Proses Penugasan Audit Internal • Bab V: Penutup
Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016; e. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2008; f. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); g. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Merupakan pedoman yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran yang disampaikan terhadap PT PII. Isi dari Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai berikut: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Pelaporan Pelanggaran • BAB II: Penanganan Pelaporan Pelanggaran • BAB IV: Perlindungan Pelapor • BAB V: Sosialisasi dan Penegakan

Pendahuluan

Pedoman	Dasar Penetapan	Isi
Pedoman Gratifikasi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002; c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007; d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2016; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017; f. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); g. Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); h. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); i. Pedoman Kode Etik PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Pedoman ini terkait dengan penerimaan dan pemberian segala bentuk gratifikasi, batasan, serta pelaporan penerimaan dan pemberian yang berlaku bagi Insan Perusahaan dan seluruh <i>stakeholders</i> . Isi dari pedoman sebagai berikut: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Ketentuan Umum Gratifikasi • BAB III: Penutup
Pedoman Sistem Pengendalian Internal	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.06/2015; b. COSO Internal Control – Integrated Framework (2013); c. Anggaran Dasar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); d. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Pedoman GCG) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).	Pedoman pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan di lingkungan Perusahaan, meliputi: • BAB I: Pendahuluan • BAB II: Implementasi Sistem Pengendalian Internal • BAB III: Tugas dan Tanggung Jawab

Komitmen Penerapan *Good Corporate Governance*

PT PII berkomitmen menjadikan penerapan GCG sebagai salah satu indikator kinerja, serta berupaya secara konsisten untuk menumbuhkan penerapan kode etik dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai nilai dan budaya Perusahaan yang melekat pada seluruh karyawan. Komitmen untuk membangun dan menerapkan GCG di lingkungan Perusahaan, diawali oleh kesadaran untuk menciptakan tata kelola Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat.

Bagi PT PII, komitmen terhadap penerapan GCG tidak hanya menjalankan kewajiban untuk sekadar menunaikan kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga diyakini sebagai kunci sukses dalam upaya pencapaian kinerja bisnis PT PII yang profesional, transparan, efektif, efisien, serta berkelanjutan. PT PII terus mendorong peningkatan implementasi GCG dan berupaya menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Dengan berpegang pada komitmen tersebut, PT PII senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku sesuai dengan kebutuhan

bisnis, serta mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Perusahaan yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi salah satu langkah penting bagi PT PII untuk memperoleh sistem pengendalian dan manajemen risiko yang dapat menjamin akuntabilitas yang sepadan dengan risiko usaha yang dihadapi.

Langkah implementasi kebijakan penerapan GCG, adalah dengan menjalankan budaya Perseroan yang tercermin pada sikap dan tingkah laku sehari-hari di seluruh jajaran manajemen dan karyawan. PT PII telah menetapkan strategi dan meningkatkan cakupan implementasi GCG yang melibatkan seluruh karyawan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi. Optimalisasi penerapan GCG terus dilakukan melalui penguatan infrastruktur serta penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

PT PII juga melakukan komunikasi dan sosialisasi, pelatihan, serta memetakan akuntabilitas dan tanggung jawab sesuai perubahan bisnis dan organisasi dalam Perseroan. Selain itu, Perseroan juga senantiasa mematuhi peraturan dan menjunjung tinggi kebijakan serta nilai-nilai yang terkandung dalam praktik Tata Kelola Perusahaan.

Komitmen lainnya atas implementasi GCG di antaranya terlihat dari tanggung jawab Perusahaan atas pelaksanaan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang memadai sehingga memastikan keandalan pelaporan keuangan Perseroan dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan PSAK. Di samping itu, Manajemen bertanggung jawab terhadap pembuatan, pemeliharaan, evaluasi, dan kesesuaian atas informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan. Komitmen tersebut didukung dengan adanya:

1. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perseroan yang jelas dan realistis yang dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Pedoman GCG Perseroan;
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite;
4. Penerapan kode etik yang dilaksanakan secara konsisten dan membudaya;
5. Sistem Pengendalian Internal yang kuat;
6. Implementasi mekanisme *check and balances* yang proporsional;
7. Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran;
8. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Bagi PT PII, tujuan akhir atas implementasi GCG bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, namun suatu keniscayaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Perseroan kepada Pemegang Saham khususnya dan publik pada umumnya. Pengembangan GCG selaras dengan *best practices* secara berkesinambungan dan implementasi GCG secara konsisten dapat mendorong Perusahaan untuk mencapai sejumlah tujuan penting, yakni:

1. Mendorong agar organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan perusahaan yang memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan pendirian Perseroan, peningkatan nilai bagi Pemegang Saham, pegawai dan Pemangku Kepentingan;

3. Meningkatkan legitimasi Perseroan yang dikelola secara terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Mengakui dan melindungi hak para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan;
5. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional;
6. Meningkatkan Tata Kelola terhadap Perseroan dalam mewujudkan mandat yang diberikan Pemerintah.

Fokus Penerapan Good Corporate Governance 2019

Fokus penerapan GCG di lingkungan Perseroan pada tahun 2019 adalah penguatan penerapan GCG Perseroan melalui:

1. Evaluasi atas *soft structure* GCG sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis Perseroan.
2. Pembaharuan pedoman dan kebijakan internal terkait penerapan GCG.
3. Membangun kesadaran dan meningkatkan pemahaman terhadap praktik *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Insan Perusahaan melalui GRC Forum 2019 yang mengusung tema “Catatan Akhir Tahun 2019 Praktik *Governance* di Indonesia – *Lessons to Learn*”.

Peningkatan Kualitas Penerapan Good Corporate Governance

1. Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perusahaan dilakukan dengan menerapkan beberapa hal sebagai berikut: Melakukan evaluasi dan *self assessment* terhadap penerapan GCG sesuai dengan *best practice* dan peraturan yang berlaku.
2. Membuat rencana tindak lanjut serta pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi atas *assessment* penerapan GCG yang dilaksanakan setiap tahun.
3. Senantiasa melakukan pembaharuan dan melengkapi perangkat pendukung GCG.
4. Menerapkan sistem pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang memadai untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan PT PII dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan standar akuntansi yang berlaku. Sejauh ini, Perseroan telah berkomitmen untuk melakukan kajian dan audit menyeluruh untuk menjamin rancangan dan implementasi Konvergensi IFRS yang efektif dan terintegrasi dalam laporan keuangan Perseroan.



Pendahuluan

5. Melakukan pemeliharaan dan evaluasi terhadap efektivitas prosedur dan pengendalian pengungkapan untuk memastikan kesesuaian informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan dan telah dicatat, diproses, dirangkum, dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia untuk kemudian diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada Direksi Perseroan, untuk kepentingan pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan.

Di samping itu, PT PII juga melakukan *assessment* terhadap penerapan GCG bekerja sama dengan pihak independen, yang dibahas pada bab berikut.

Penghargaan di Bidang *Good Corporate Governance*

Peningkatan kualitas berkelanjutan atas implementasi GCG terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja PT PII. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pencapaian PT PII sepanjang tahun 2019 yang membuahkan hasil memuaskan baik dari sisi kinerja keuangan, operasional maupun penghargaan yang diraih. Peningkatan implementasi GCG dapat disimpulkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

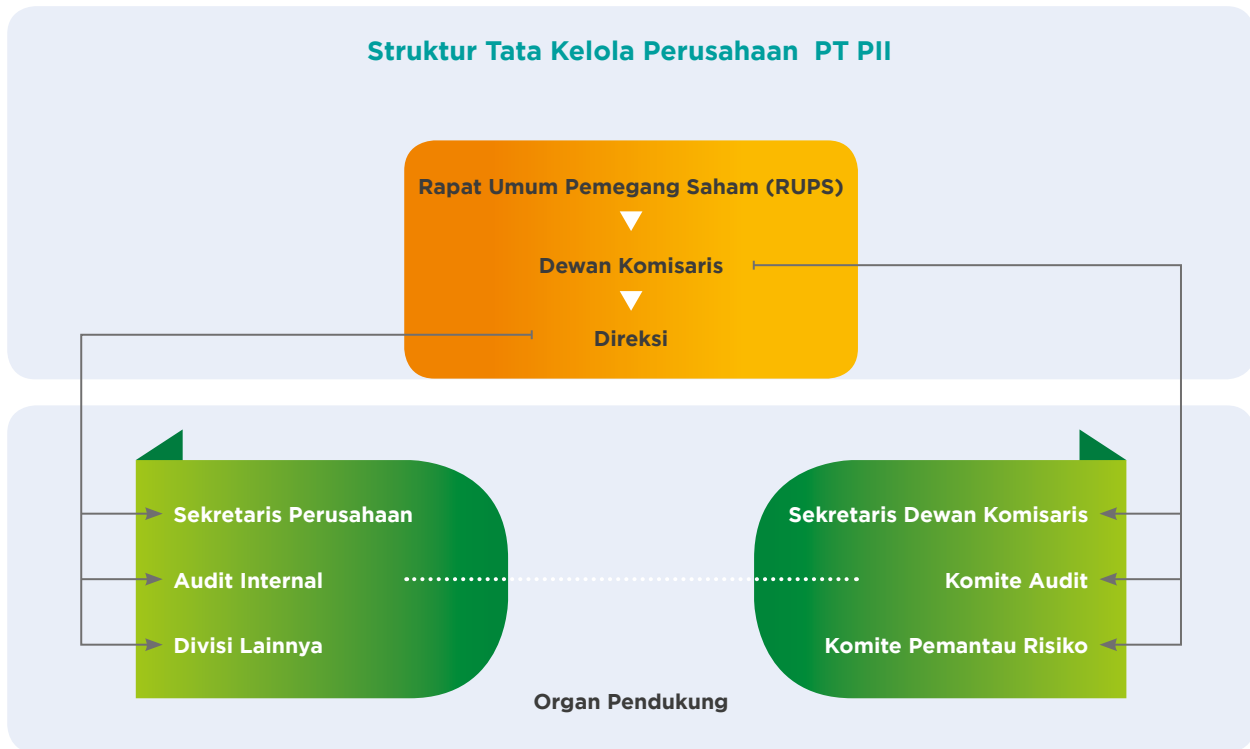
Pada tahun 2019, PT PII memperoleh beberapa penghargaan di bidang GCG di antaranya penghargaan TOP *Governance, Risk & Compliance* (GRC) 2019, dimana Direktur Utama PT PII juga mendapatkan penghargaan sebagai *The Most Committed Leader 2019*. Selain itu PT PII juga berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 3 Laporan Keuangan Terbaik 2018 untuk kategori BUMN Keuangan Non-Listed dalam ajang *Annual Report Award* (ARA) 2018 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada ajang internasional, PT PII mendapatkan 3 (tiga) penghargaan dalam ajang ASEAN Risk Award 2019 yang diselenggarakan oleh Enterprise Risk Management Academy (ERMA). PT PII bersaing dengan berbagai perusahaan di kawasan Asia Tenggara dalam penerapan manajemen risiko dan berhasil menjadi pemenang untuk 3 (tiga) kategori yaitu *Public Initiative*, *Risk Educator* dan *Public Risk*.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

PT PII melaksanakan Tata Kelola yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan bisnis Perusahaan. PT PII juga memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha dengan standar etika bisnis serta memastikan mekanisme *check and balance* dapat bekerja secara efektif. Struktur Tata Kelola di lingkungan Perseroan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Perseroan juga memiliki organ dan fungsi pendukung lainnya, seperti Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Sistem Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko, yang dibentuk berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT PII



Efektivitas penerapan GCG dapat terlihat dari keselarasan dari 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. *Governance Structure* terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Hasilnya, *Governance Outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*.

PT PII telah menjalankan ketiga aspek *governance system* tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam setiap proses perencanaan, pengembangan, dan operasional bisnis Perusahaan. Perseroan akan terus mengembangkan struktur dan mekanisme Tata Kelola sesuai peraturan perundang-undangan serta *best practices* yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.



Rapat Umum Pemegang Saham

PT PII berkomitmen menjadikan penerapan GCG sebagai salah satu indikator kerja, serta berupaya secara konsisten untuk menumbuhkan penerapan kode etik dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai nilai dan budaya Perusahaan yang melekat pada seluruh karyawan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui RUPS, pemegang saham mengambil keputusan yang didasarkan pada kepentingan Perusahaan, serta dilakukan secara wajar dan transparan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Baik RUPST maupun RUPSLB memiliki kewenangan tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan.

Kewenangan RUPS

1. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Direksi setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris.
5. Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan fasilitas lain bagi Direksi.
6. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
7. Menyetujui atau menolak transaksi-transaksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan kekayaan Perusahaan sebagai jaminan utang yang bernilai sebesar sama dan/atau lebih dari 50% jumlah ekuitas atau kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan



satu sama lain maupun tidak, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, seperti:

- a. Mengagunkan atau menjaminkan aktiva tetap Perusahaan untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang.
 - b. Penyertaan dan/atau pelepasan penyertaan modal pada perusahaan lain, Perusahaan anak, Perusahaan patungan.
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan/atau pembubaran Perusahaan anak/patungan.
8. Menyetujui atau menolak tindakan kerja sama Perusahaan dengan Badan Usaha atau entitas/pihak lain berupa penjaminan, kontrak penjaminan, kontrak manajemen, kerja sama lisensi, penyewaan aset atau kerja sama lainnya yang bernilai sama atau melebihi 50% dari nilai ekuitas Perusahaan.
 9. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

10. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

11. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Penerbitan Publikasi RUPS

Perseroan melakukan publikasi informasi mengenai pelaksanaan RUPS pada *website* Perseroan.

Jenis RUPS di Perusahaan

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan tiap tahun, meliputi:

1. RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan.
RUPS tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham

- b. Usulan penggunaan laba bersih Perusahaan.
 - c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.
2. RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- RUPS tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan), dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk Proyeksi Laporan Keuangan.
 - b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja.

Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal Panggilan RUPS tahunan.

RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa)

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.

Tempat RUPS

Ruang Rapat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 10 Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta

Pemanggilan & Pengumuman RUPS

PT PII melakukan pemanggilan RUPS yang dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.

Tata Tertib

Tata tertib pelaksanaan RUPS PT PII mengacu pada Akta Pendirian PT PII Nomor 29 tahun 2009. Ketentuan yang tertuang dalam akta tersebut adalah:

Tata Tertib Umum

1. RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir.
2. Seluruh risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

3. Risalah RUPS yang dibuat dengan Akta Notaris, tanda tangan dimaksud tidak diperlukan.

Tata Tertib Pengambilan Keputusan

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
3. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
4. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Ketentuan Kuorum

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan lain.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

6. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri
7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		Ya	Tidak
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	√	-
Mariatul Aini	Komisaris	√	-
M. Rahman Ritza	Komisaris	√	-
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	√	-
Salusra Satria	Direktur	√	-

Pelaksanaan RUPS Tahun 2019 dan Realisasinya

Pada tahun 2019, PT PII menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu:

RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

No.	Agenda dan Keputusan RUPS	Tanggal RUPS	Realisasi Keputusan
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2018: - Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku Tahun 2018; dan - Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018 - Penetapan keputusan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018; dan - Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 serta pembayaran Tantiem Tahun Buku 2018	23 Mei 2019	Telah terealisasi

RUPS Tahunan RKAP 2020

No.	Agenda dan Keputusan RUPS	Tanggal RUPS	Realisasi Keputusan
1	Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2020; Persetujuan Kontrak Kinerja Manajemen PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2020; Persetujuan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2020.	17 Desember 2019	Telah terealisasi



Rapat Umum Pemegang Saham

Pelaksanaan RUPS Tahun 2018 dan Realisasinya

Pada tahun 2018, PT PII menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa, yaitu: RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017

No.	Agenda dan Keputusan RUPS	Tanggal RUPS	Realisasi Keputusan
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang mencakup: - Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 - Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 - Pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016	23 Mei 2018	Telah terealisasi
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017		Telah terealisasi
3.	Penetapan keputusan gaji/honorarium dan tunjangan/fasilitas Dewan Komisaris/Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta pembayaran tantiem berdasarkan kinerja tahun 2017		Telah terealisasi

RUPS Tahunan RKAP 2019

No.	Agenda dan Keputusan RUPS	Tanggal RUPS	Realisasi Keputusan
1.	Pembahasan dan Persetujuan/Pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2019 serta Pembahasan dan Persetujuan/Pengesahan Kontrak Kinerja Direksi dan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun Buku 2019	20 Desember 2018	Telah terealisasi

RUPS Luar Biasa Perubahan RKAP 2019

No.	Agenda dan Keputusan RUPS	Tanggal RUPS	Realisasi Keputusan
1.	Persetujuan dan pengesahan atas perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Tahun Buku 2018	23 Mei 2018	Telah terealisasi

Pelaksanaan Hasil Keputusan RUPS

Seluruh hasil keputusan RUPS telah dijalankan sepenuhnya oleh PT PII. Tidak terdapat Keputusan RUPS yang belum dilaksanakan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Tata Kelola Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memastikan PT PII menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa PT PII melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan. Setiap tahun, Dewan Komisaris menunjuk penilai independen untuk melakukan penilaian atas penerapan GCG pada Perseroan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai suatu *board* memiliki kompetensi inti yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitas Dewan Komisaris. Kompetensi tersebut meliputi bidang akuntansi, keuangan, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman dan kedalaman manajerial, pengetahuan industri, pemahaman regulasi serta manajemen dan pengendalian risiko.

Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Anggota Dewan Komisaris juga wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan hubungan keuangan dan keluarganya dengan Komisaris lain anggota Direksi dan Pemegang Saham, serta dilarang mengambil keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan oleh RUPS.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajemen perusahaan, Dewan Komisaris PT PII dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Fungsi pengawasan dan penasihat ini dilaksanakan melalui pertemuan

rutin yang diadakan dengan Direksi serta melalui pendelegasian tugas dan kewenangan kepada masing-masing Komite terkait.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam menelaah laporan keuangan perusahaan sebelum dilaporkan ke Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya serta melakukan pengkajian atas laporan penilaian internal Perseroan.

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan *monitoring* pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan GCG pada Perseroan. Komite Pemantau Risiko juga menelaah kecukupan, kelengkapan dan efektivitas pelaksanaan prosedur manajemen risiko Perseroan serta merekomendasikan arah kebijakan jika diperlukan.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki uraian pekerjaan yang dituangkan dalam Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang terakhir kali diperbarui pada Desember 2019 serta Pedoman Dewan Komisaris yang terakhir kali diperbarui pada bulan Desember 2017. Dokumen-dokumen tersebut merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan menjelaskan hubungan, komunikasi, dan aktivitas antara organ Perusahaan tersebut secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

Dewan Komisaris

Isi *Board Manual* yang berhubungan dengan Dewan Komisaris adalah:

1. Organisasi
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
3. Pedoman Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
4. Pedoman Kebijakan Pengawasan Dewan Komisaris
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Pedoman Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
7. Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
8. Organ Pendukung Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, dan Pengangkatan Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Jumlah, komposisi dan pengangkatan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Nomor Keputusan Menteri Keuangan
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	Jakarta	KMK Nomor 402/KMK.06/2017
Mariatul Aini	Komisaris	Jakarta	KMK Nomor 861/KMK.06/2018 dan diangkat kembali berdasarkan KMK Nomor 720/KMK.06/2019
M. Rahman Ritza	Komisaris	Jakarta	KMK Nomor 402/KMK.06/2017

Kriteria Pengangkatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS, dan waktunya tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan Perseroan.

Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.



Berikut ini rincian tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana di atur dalam *Board Manual* Perseroan.

Tugas	1. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis. 5. Memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak pada Perusahaan secara tepat waktu dan efisien. 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan/atau hasil pemeriksaan tertentu oleh lembaga pemeriksa lainnya. 7. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada RUPS secara triwulanan dan/atau sewaktu waktu apabila diminta oleh RUPS. 8. Melaporkan kepada RUPS setiap perkembangan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada Perusahaan. 9. Menyusun pedoman pengambilan keputusan, kebijakan pengawasan, penilaian kinerja, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta melaksanakannya. 10. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 11. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan. 12. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 13. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Wewenang	1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan. 2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan. 3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan. 4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi. 5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu. 7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. 9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu. 10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pembagian tugas Dewan Komisaris PT PII sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-11/KOM/PII/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Uraian Tugas
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	1. Mengkoordinasikan seluruh tugas Dewan Komisaris. 2. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.
Mariatul Aini	Komisaris	1. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko; 2. Bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Direktur Eksekutif Bisnis; 3. Bidang Risk Management dan Inisiasi bisnis; dan 4. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.
M. Rahman Ritza	Komisaris	1. Sebagai Ketua Komite Audit; 2. Bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek; 3. Bidang Audit Internal, Legal and Compliance, Corporate Secretary and Communication, dan IIGF Institute; dan 4. Melaksanakan tugas terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.



Dewan Komisaris

Program Pengenalan/Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program pengenalan diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2019

Rencana kerja dan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Penyusunan dan penetapan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2020	Agustus s.d. Oktober 2019	RKA Dewan Komisaris Tahun 2020
2	Penyusunan dan penetapan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2020	Agustus s.d. Oktober 2019	Usulan IKU Dewan Komisaris Tahun 2020 kepada RUPS
3	Penelaahan dan persetujuan atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) PT PII Tahun 2020	September s.d. Oktober 2019	Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP Tahun 2020
4	Pemberian tanggapan/persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi/RUPS	Tahun 2019	1. Persetujuan Dewan Komisaris atas Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Divisi Internal Audit 2. Tindak Lanjut pengesahan RKAP PT PII Tahun 2019 3. Tanggapan Dewan Komisaris atas rencana kerja Audit Internal Tahun 2019 4. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Penambahan PMN 5. Tanggapan Dewan Komisaris atas tindak lanjut usulan perubahan Logo Perseroan 6. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Anggota Direksi Perseroan 7. Tanggapan atas permohonan persetujuan IKU Individu Direksi Tahun 2019 8. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kajian KPBU-KSPI 9. Pengadaan KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan PT PII Tahun Buku 2019 10. Penetapan IKU Direksi Perseroan Tahun 2019. 11. Permintaan Laporan IKU Individual Direksi 12. Tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian GCG Tahun 2018 13. Permohonan Penugasan Pejabat Pegawai Itjen sebagai Komite Audit PII 14. Penyampaian rancangan RKA dan usulan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2020 15. Tanggapan Dewan Komisaris atas rancangan RKAP Tahun 2020 16. Usulan Penunjukan KAP (PwC) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan PT PII Tahun Buku 2019 17. Permintaan pengadaan penilai independen untuk melakukan penilaian penerapan GCG pada PT PII Tahun 2019 18. Permintaan Laporan Realisasi IKU Individu Direksi dan Pemutakhiran IKU Direktur Utama 19. Surat Penunjukan Plt. Direktur Bisnis 20. Penetapan IKU Direktur Utama 21. Penyampaian Realisasi capaian IKU Dewan Komisaris Tahun 2019 22. Penyampaian Laporan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2019 23. Penyampaian Laporan Pengawasan RKAP Tahun 2018 & 2019 24. Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Penetapan Pedoman-Pedoman Perseroan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output
5	Pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Komisaris	Tahun 2019	Administrasi kelengkapan Rapat Dewan Komisaris
6	Pemberian arahan/nasihat kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris		1. Pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga 2. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal 3. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan SDM dan pelaksanaannya 4. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya 5. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan TI dan pelaksanaannya 6. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya 7. Pengawasan atas efektivitas audit eksternal dan internal serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait Perseroan 8. Pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya 9. Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya 10. Pengawasan atas gejala penurunan kinerja 11. Pengawasan atas kegiatan IIGF Institute 12. Pemantauan pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris 13. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
7.	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP	Tahun 2019 (Semesteran)	Laporan Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2019
8.	Penelaahan dan pengusulan remunerasi Direksi & Dewan Komisaris	Mei 2019	Usulan atas perhitungan tantiem tahun 2018 dan penyesuaian remunerasi tahun 2019
9.	Monitoring atas proyek yang telah dijamin (<i>site visit</i>)	Tahun 2019	<i>Monitoring</i> lapangan proyek jalan tol Pandaan-Malang
10.	Penyampaian laporan-laporan Dewan Komisaris kepada RUPS.	Tahun 2019 (Triwulanan dan Semesteran)	1. Laporan Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2019 2. Laporan Realisasi Capaian IKU Dewan Komisaris Tahun 2019 3. Laporan Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2019
11.	Pemantauan atas penerapan <i>area of improvement (AOI)</i> hasil penilaian GCG tahun 2018	Tahun 2019	Hasil pemantauan atas penerapan AOI GCG dilakukan secara berkala per semester
12.	Penilaian atas pelaksanaan penerapan GCG Tahun 2019 oleh Penilaian Independen	Januari s.d. Februari 2020	Hasil penilaian BPKP atas penerapan GCG pada Perseroan Tahun 2019
13.	Pengadaan KAP Untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2019	Juli s.d. September 2019	Usulan penetapan KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2019 kepada RUPS
14.	Peningkatan kompetensi Anggota Dewan Komisaris	Tahun 2019	Pelatihan dan Seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris baik di dalam maupun luar negeri

Tanggapan dan Arahan Dewan Komisaris 2019

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan dan arahan yang dibutuhkan bagi Direksi dalam pengelolaan dan pengurusan PT PII. Sesuai ketentuan PMK No. 88 Tahun 2015, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/arahan kepada Direksi atas operasionalisasi Perseroan. Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi dapat diberikan dalam rapat bersama Dewan Komisaris bersama Direksi maupun melalui surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Hingga akhir tahun 2019, sebagian besar arahan/nasihat Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi, sehingga target IKU Dewan Komisaris untuk persentase arahan Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti Direksi dapat terealisasi 99%.



Dewan Komisaris

Adapun rincian nasihat/arahan Dewan Komisaris yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nasihat/Arahan Dewan Komisaris	Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut
1.	Direksi agar melakukan evaluasi secara triwulanan terhadap tindak lanjut AOI penerapan GCG Tahun 2018 dari BPKP dan akan melakukan sosialisasi GCG kepada karyawan.	Evaluasi atas tindak lanjut AOI GCG dilaksanakan setiap triwulanan. Sosialisasi GCG kepada karyawan telah dilaksanakan pada 18 Juli 2019.	100%
2.	Melaksanakan <i>knowledge management</i> untuk proses penjaminan yang telah dilakukan di semua sektor hingga dapat digunakan untuk mengefisienkan pemrosesan proyek berikutnya.	Masing-masing divisi terkait proyek telah secara rutin melakukan <i>compliance checklist</i> yang akan didokumentasikan sebagai <i>knowledge</i> bagi Perseroan.	100%
3.	Direksi agar menyampaikan Laporan Realisasi Capaian IKU Individu Direksi Tahun 2018	Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat Direksi nomor 185/PII/DRU/0319 tanggal 1 Maret 2019.	100%
4.	Direksi agar menyampaikan usulan IKU Individu Direksi Tahun 2019.	Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat nomor 226/PII/DRU/0319 tanggal 19 Maret 2019.	100%
5.	Direksi agar menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing divisi/unit organisasi yang merupakan rincian dari RKAP Perseroan Tahun 2019.	Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat nomor 233/PII/DRU/0319 tanggal 25 Maret 2019.	100%
6.	Direksi agar menyampaikan manual IKU Kontrak Kinerja Perseroan Tahun 2019.	Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat nomor 233/PII/DRU/0319 tanggal 25 Maret 2019.	100%
7.	Direksi agar menyelesaikan penyusunan kajian integrasi penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).	- Telah disampaikan kajian internal kepada Dewan Komisaris melalui surat nomor 263/PII/DRU/0319 tanggal 29 Maret 2019. - Dewan Komisaris telah menyampaikan tanggapan melalui S-15/PII/DK/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang baru masih dalam proses tindak lanjut manajemen.	90%
8.	Direksi agar menyusun kajian kenaikan gaji dan tunjangan tahun 2019.	Telah disusun rencana dan kajian penambahan pegawai, kenaikan gaji, dan tunjangan, yang telah dibahas bersama dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Rencana tersebut telah disahkan dalam RKAP Tahun 2020 oleh Pemegang saham.	100%
9.	Direksi agar menyusun kajian penambahan pegawai dan struktur organisasi baru.	Telah disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat nomor 169/PII/DRU/0219 tanggal 25 Februari 2019.	100%
10.	IKU Individu Direksi agar disusun dengan prinsip keseimbangan, <i>fairness</i> , dan kesesuaian dengan tanggung jawab tugas masing-masing Direksi.	Direksi telah menyampaikan usulan IKU Individu Direksi Tahun 2019 dengan memperhatikan arahan Dewan Komisaris melalui surat nomor 518/PII/DRU/0519 tanggal 10 Mei 2019.	100%
11.	Pembayaran dividen sesuai keputusan RUPS Laporan Tahunan 2018 agar tidak terlambat sesuai ketentuan perundang-undangan.	PT PII telah melakukan pembayaran dividen sebesar Rp155 miliar ke rekening kas negara pada tanggal 20 Juni 2019 (kurang dari 30 hari sejak pelaksanaan RUPS Tahunan).	100%
12.	Perubahan logo agar menyesuaikan dengan regulasi yang diatur dalam AD/ART & KUMHAM, dan sebelumnya melalui prosedur persetujuan RUPS terlebih dahulu.	Direksi telah menyampaikan usulan perubahan logo kepada RUPS melalui surat nomor 410/PII/DRU/0419 tanggal 23 April 2019.	100%
13.	Mendorong implementasi budaya perusahaan melalui pemilihan agen budaya yang dapat menjadi <i>role model</i> pegawai dari sisi <i>attitude</i> , <i>skill</i> , dan <i>knowledge</i> .	Sebagai implementasi program budaya, pada 9 Juli 2019 dilaksanakan presentasi dari <i>change agent</i> terpilih untuk menyampaikan strategi implementasi InTIME di setiap Direktorat.	100%
14.	Menyusun laporan realisasi RKAP berdasarkan realisasi anggaran serta capaian <i>output</i> (capaian <i>milestone</i>).	Direksi telah menyampaikan Laporan manajemen triwulan II Tahun 2019 PT PII kepada DJKN melalui surat nomor 669/PII/DRU/0719 tanggal 15 Juli 2019.	100%

No.	Nasihat/Arahan Dewan Komisaris	Tindak Lanjut	% Tindak Lanjut
15.	Mempersiapkan penyusunan RKAP 2020 dengan berpedoman pada Arahan RUPS.	- Telah dilaksanakan BOD-BOC <i>meeting</i> pada tanggal 28 Oktober 2019 untuk mengakomodasi masukan RUPS dalam rancangan RKAP. - Rancangan RKAP yang telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS melalui surat 907/PII/DRU/1019 tanggal 28 Oktober 2019.	100%
16.	Meningkatkan transparansi prosedur pengelolaan SDM melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan di bidang SDM kepada pegawai.	Divisi Human Capital PT PII telah mengadakan Sosialisasi Peraturan Perusahaan 2018-2020 kepada semua karyawan PT PII pada tanggal 24 Oktober 2019 dan 4 November 2019.	100%
17.	Seegera menindaklanjuti rekomendasi <i>area of improvement</i> (AOI) hasil penilaian GCG oleh BPKP sehingga hasil penilaian GCG tahun 2019 dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.	Telah dilaksanakan rapat konsinyering antara Organ Dewan Komisaris dengan manajemen PT PII perihal Evaluasi GCG Semester I Tahun 2019 & Reviu berkala <i>Board Manual</i> pada tanggal 26-27 Juli 2019.	100%
18.	Mendalami skema KPBU dan penjaminan syariah sebagai langkah antisipasi perluasan lini bisnis penjaminan di masa mendatang.	- Telah dilaksanakan FGD Penjaminan Syariah Bersama KNKS dan <i>Stakeholders</i> Proyek RS Zainoel Abidin pada 18 September 2019 - Telah dilaksanakan Rapat Proyek RS Zainoel Abidin dengan DSN terkait Pembahasan Proses Pengajuan Kesesuaian Syariah untuk penjaminan dari PII pada 26 September 2019	100%
19.	Menyampaikan laporan realisasi IKU masing-masing Direksi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	Direksi telah menyampaikan laporan realisasi IKU masing-masing Direksi kepada Dewan Komisaris melalui 681/PII/DRU/0719 tanggal 19 Juli 2019 perihal Penyampaian Indikator Pencapaian Kinerja (IKU) Individual Direksi Triwulan II Tahun 2019.	100%
20.	Menyampaikan informasi terkait hasil <i>assessment</i> dan penilaian kinerja pegawai level <i>Senior Vice President</i> (SVP) dan <i>Executive Vice President</i> (EVP) (SR-05/PII/DK/0919)	Direksi telah menyampaikan informasi mengenai hasil <i>assessment</i> dan penilaian kinerja pegawai pada level SVP dan EVP melalui surat nomor 810/PII/DRU/0919 pada tanggal 10 September 2019.	100%
21.	Menjajaki dan melakukan seleksi atas calon <i>assessor</i> dalam proses <i>assessment</i> bakal calon direksi (SR-06/PII/DK/0919)	Direksi telah melakukan seleksi awal atas lembaga independen selaku <i>assessor</i> dimana laporan tersebut sudah disampaikan ke Dewan Komisaris pada tanggal 4 Oktober 2019.	100%

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Pada tahun 2019, Dewan Komisaris menilai kinerja kedua Komite tersebut sangat baik. Dasar penilaian Dewan Komisaris atas kinerja komite-komite tersebut, di antaranya terlihat dari seluruh anggota komite yang selalu terlibat aktif untuk membantu dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dari hasil reviu/telaahan sesuai bidang tugasnya. Komite secara aktif menjalin komunikasi dengan organ Direksi untuk melakukan pembahasan level teknis terkait seluruh aspek kegiatan Perseroan.

Pada setiap rapat rutin bulanan, Komite selalu aktif memberikan masukan bahan kepada Dewan Komisaris berupa bahan-bahan yang perlu dibahas atau diberikan arahan kepada Direksi. Demikian pula dalam setiap rapat yang diagendakan secara khusus dan permohonan persetujuan tertulis dari Direksi kepada Dewan Komisaris, Komite-komite aktif memberikan hasil telaahan dan masukan kepada Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat memutuskan dengan tepat atas permohonan yang diajukan oleh Direksi.

Dewan Komisaris juga memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang telah menjalankan fungsinya dengan baik. Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris telah memastikan penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris terdokumentasi dengan baik serta melaksanakan tugas-tugas lainnya dari Dewan Komisaris.



Komisaris Independen

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PII tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham. Pada dasarnya semua Anggota Dewan Komisaris PT PII bersifat independen, dalam pengertian mereka mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan Perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan. Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip GCG di lingkungan perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Hingga akhir tahun 2019, Pemegang Saham PT PII belum mensyaratkan adanya Komisaris Independen.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Dikarenakan belum terdapat Komisaris Independen, maka PT PII belum dapat menampilkan Pernyataan Independensi Komisaris Independen.

Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh secara kolegal dalam mengelola kepengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yakni memaksimalkan nilai perusahaan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham. Proses pemilihan dan pengangkatan Direksi didahului dengan proses *fit and proper test*.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Direksi PT PII senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Perseroan, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

PEDOMAN KERJA DIREKSI (*BOARD MANUAL*)

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja atau Piagam Direksi yang secara berkala dilakukan evaluasi dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman Kerja tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Nomor SK002/BOD/CSC/1219 dan Nomor KEP-10/KOM/PII/12/2019 antara Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengesahan Tata Laksana Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Board Manual merupakan panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien. *Board Manual* disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah:

1. Terciptanya satu pola hubungan kerja yang harmonis antar Organ Persero dalam mengelola Perusahaan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
2. Memudahkan organ-organ Direksi dan organ-organ Dewan Komisaris untuk memahami tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris maupun hubungan tugas antara organ-organ tersebut.

Isi *Board Manual* Direksi tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- Ketentuan Umum
- Pembagian Tugas Direksi
- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
- Rapat dan Pengambilan Keputusan Direksi
- Benturan kepentingan
- Kekosongan jabatan dan pelimpahan wewenang
- Pemberhentian sementara dan pengunduran diri Direksi
- Organ Pendukung Direksi
- Pelaporan
- Penilaian Kinerja

Pelaksanaan *Board Manual* merupakan salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, dengan harapan akan tercipta suatu pola hubungan kerja yang harmonis dalam upaya mencapai Visi dan Misi PT PII.



Direksi

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Hingga saat ini, jumlah anggota Direksi PT PII tercatat sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur utama dan 1 (satu) Direktur. Seluruh anggota Direksi PT PII telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan. Seluruh anggota Direksi PT PII berdomisili di Indonesia. Masa jabatan anggota Direksi dalam 1 periode adalah 5 (lima) tahun.

Komposisi Direksi PT PII per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Nomor SK
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	Jakarta	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 809/KMK.06/2019
Salusra Satria	Direktur	Jakarta	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.06/2017

INDEPENDENSI DIREKSI

Direksi menjalankan tugasnya secara independen dan tidak terdapat campur tangan pihak-pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kepengurusan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Dengan demikian seluruh anggota Direksi adalah independen. Direksi juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.

BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Selama tahun 2019, PT PII memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Board Manual* bahwa seluruh anggota Direksi harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat intern maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perseroan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan

patungan Perusahaan yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

4. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dan tujuan dalam Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;

7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewajiban Direksi

Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi wajib mengungkapkan:

1. Kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri beserta perubahannya; dan/atau
2. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Masing-masing Direksi

Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab
Direktur Utama	Fokus Utama adalah pencapaian tujuan Organisasi: 1. Memastikan kelangsungan bisnis (proyek-proyek PDF) dalam jangka waktu panjang dan memastikan dukungan dalam hal transaksional yang optimal 2. Mengembangkan program <i>Capacity Building</i> untuk pihak eksternal dalam mendukung terciptanya proyek-proyek penjaminan 3. Menjamin terciptanya kepatuhan Hukum atas proyek-proyek yang dijaminan Perusahaan Fokus kerja lainnya: 1. Memimpin terciptanya sinergi internal dan eksternal 2. Memimpin pencapaian Visi dan Misi Organisasi 3. Menciptakan tujuan-tujuan strategis

Direksi

Jabatan	Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab
Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek	Fokus Utama adalah optimalisasi penilaian proyek, manajemen klaim dan Tata Kelola keuangan. Fokus kerja lainnya: 1. Mengembangkan sistem dan metodologi dalam hal penilaian dan pengawasan proyek 2. Memimpin pencapaian target-target, kepatuhan dan pencatatan Keuangan yang disiplin 3. Menciptakan unit kerja pendukung yang optimal dalam mendorong pencapaian target-target organisasi 4. Memastikan terciptanya budaya kerja dan kualitas SDM yang positif dan kompetitif
Direktur Eksekutif Bisnis	Fokus Utama adalah penyusunan <i>pipeline</i> yang <i>sustainable</i> Fokus kerja lainnya: 1. Mengembangkan dan memimpin perencanaan dan implementasi program kerja pada tahapan awal persiapan dan skema penjaminan proyek 2. Mengembangkan dan memimpin kerja sama <i>financial</i> dengan <i>stakeholder</i> 3. Memimpin proses integrasi organisasi terkait teknologi informasi dan <i>Knowledge Management</i>

Program Pengenalan bagi Anggota Direksi Baru

Program pengenalan diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan yang meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

Sepanjang tahun 2019, terdapat perubahan komposisi Direksi namun tidak terdapat penambahan anggota Direksi baru sehingga tidak ada pelaksanaan program pengenalan Persero pada anggota Direksi baru.

Pelaksanaan Tugas Direksi 2019

Selain pelaksanaan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2019, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Strategis	Output
Optimalisasi nilai pemegang saham/ <i>shareholder value</i>	• Pencapaian nilai eksposur penjaminan dibandingkan dengan ekuitas (<i>gearing ratio</i>) • Pencapaian margin laba bersih • Pencapaian BOPO
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi yang efektif	• Pencapaian <i>Final Business Case</i> yang didampingi penyiapannya • Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani dan didampingi penyiapannya • Proyek yang didampingi penyiapannya yang mencapai <i>financial close</i>
Penjaminan yang berkelanjutan	• Pencapaian jumlah proyek KPBU yang dijamin • Pencapaian jumlah proyek non-KPBU yang dijamin
Edukasi pemangku kepentingan yang efektif	• Pencapaian tingkat pemahaman PJPK yang baik • Pencapaian jumlah kajian pendahuluan sektor • Implementasi <i>E-learning</i> - IIGF Institute
Penjaminan yang efektif	• Pencapaian jumlah proyek yang dilakukan <i>appraisal</i> • Pencapaian jumlah pernyataan ketersediaan penjaminan
Pengelolaan risiko penjaminan yang efektif	Tingkat pengendalian risiko klaim atas proyek masuk dalam kategori aman
Reputasi dan tingkat kepercayaan pasar tinggi	Pencapaian <i>Rating</i> Perusahaan <i>Sovereign</i>
Pelaksanaan Tata Kelola penjaminan yang sehat	• Penetapan SOP/Pedoman Penjaminan Non KPBU • Penetapan SOP Penjaminan Bersama

Kegiatan/Sasaran Strategis	Output
Enterprise Risk Management yang kuat	Pencapaian jumlah risiko yang menurun
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Peningkatan skor Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Score)
Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berintegritas	- Peningkatan kepuasan pegawai - Pencapaian persentase hari pelatihan karyawan terhadap hari kerja
Teknologi informasi yang andal	Pengembangan <i>integrated IT Platform</i>

PENILAIAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelaksanaan Penilaian GCG

Pada tahun 2019, PT PII terus membangun kesadaran dan meningkatkan pemahaman terhadap praktik GRC kepada seluruh Insan Perusahaan melalui pelaksanaan GRC Forum 2019. Di tahun 2019, acara tersebut membawa semangat akhir tahun 2019 *Lessons to Learn* untuk mempraktikkan penerapan prinsip *Governance, Risk* dan *Compliance* di Indonesia. PT PII juga melaksanakan Evaluasi atas *soft structure* GCG serta pembaharuan pedoman dan kebijakan internal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis Perseroan.

Di samping itu, PT PII kembali melaksanakan penandatanganan komitmen Kode Etik yang dilaksanakan setiap tahun beserta pelaksanaan sosialisasi GCG kepada seluruh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris. Seluruh rencana yang ditargetkan tersebut telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, pedoman pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan semakin kuat serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada serta praktik bisnis terbaik Perseroan.

Perseroan melaksanakan pengukuran implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkala setiap tahun. Selain memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, pelaksanaan pengukuran tersebut

bertujuan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.
4. Mendorong pengelolaan Perseroan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Assessment GCG tahun 2019 dilaksanakan oleh penilai independen, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kriteria yang Digunakan dan Skor Assessment GCG Tahun 2019

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 PMK 88/PMK.06/2015, Perseroan harus melakukan *assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Pada tahun 2019, hasil *assessment* penerapan GCG di PT PII, adalah sebagai berikut:

Aspek Pengujian/Indikator	Bobot	Capaian Tahun 2019		Klasifikasi
		Skor	% Capaian	
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,000	6,329	90,414	Sangat Baik
Pemegang Saham	9,000	8,301	92,233	Sangat Baik
Dewan Komisaris	35,000	32,733	93,523	Sangat Baik

Direksi

Aspek Pengujian/Indikator	Bobot	Capaian Tahun 2019		Klasifikasi
		Skor	% Capaian	
Direksi	35,000	32,736	93,531	Sangat Baik
Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,358	92,867	Sangat Baik
Aspek Lainnya	5,000	0,625	12,500	
		89,082		Sangat Baik

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Adapun rekomendasi yang didapatkan atas *assessment* GCG tahun buku 2019 sebagai berikut:

No	Usulan Rekomendasi	Pihak Terkait Tindak Lanjut		
		RUPS	Dewan Komisaris	Direksi
Aspek Komitmen				
1	Perusahaan segera membuat program untuk penguatan untuk penerapan COC			✓
2	Menetapkan kebijakan mengenai pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			✓
3	Membuat ketentuan untuk melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung gratifikasi			✓
4	Memuat publikasi berita terkait kebijakan tentang WBS di majalah			✓
5	Membuat evaluasi/pembahasan atas pelaksanaan WBS			✓
6	Membuat pelaporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>) secara berkala.			✓
Aspek Pemegang Saham				
1	Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan	✓		
2	Jumlah Direksi agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan	✓		
3	Agar terdapat Direksi yang memiliki latar belakang pendidikan/pengetahuan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jenis usaha penjaminan	✓		
4	Seluruh anggota Direksi agar memiliki pengalaman yang sesuai dengan pembedangan tugas anggota Direksi	✓		
5	Keputusan RUPS/Pemilik Modal memuat alasan pemberhentian	✓		
6	Penilaian agar mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan di bidang BUMN	✓		
7	Proses penilaian calon Dewan Komisaris agar didukung dengan Berita Acara penilaian	✓		
8	Menetapkan jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi	✓		
9	Anggota Komisaris independen dinyatakan secara eksplisit dalam SK pengangkatan sebanyak 20% dari jumlah seluruh Komisaris	✓		
10	Kontrak Manajemen agar memuat target kinerja individu, yang disahkan/ disetujui Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal	✓		
11	RUPS/Pemilik Modal agar memberikan Kinerja anggota Direksi (Individu) berdasarkan laporan kinerja Direksi dan mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.	✓		
12	Penilaian kinerja individu dituangkan dalam Risalah RUPS/keputusan Menteri	✓		



No	Usulan Rekomendasi	Pihak Terkait Tindak Lanjut		
		RUPS	Dewan Komisaris	Direksi
Aspek Dewan Komisaris				
1	Membuat laporan atas pelatihan yang diikutinya		✓	
2	Menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan atau pemberian persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi		✓	
3	Melakukan telaah visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis		✓	
4	Membuat telaahan yang mencakup pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian yang berlaku dengan pihak ketiga agar membuat telaahan yang mencakup pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian yang berlaku dengan pihak ketiga		✓	
5	Menandatangani laporan manajemen triwulanan maupun semesteran		✓	
6	Melakukan telaah terhadap transaksi atau tindakan Direksi melalui proses pembahasan internal Dewan Komisaris dengan Direksi, yang keduanya dituangkan dalam risalah rapat internal Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi		✓	
7	Dalam proses otorisasi Dewan Komisaris memastikan tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung dengan analisis risiko yang memadai		✓	
8	Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris		✓	
9	Rencana Kerja memuat anggaran biaya audit eksternal untuk calon auditor		✓	
10	Mencantumkan besar anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris		✓	
11	Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal		✓	
12	Melakukan telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI		✓	
13	Membuat penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing- masing		✓	
14	Pakta Integritas agar dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/ Pemilik Modal		✓	
15	Menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam setiap usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS		✓	
16	Laporan GCG agar diungkapkan dalam laporan tahunan		✓	
17	Menambahkan muatan kebijakan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi		✓	
18	Memasukkan dalam program kerja komite dan membuat <i>self assessment</i> kinerja komite		✓	
19	Memuat rekomendasi dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Dewan Komisaris		✓	



Direksi

No	Usulan Rekomendasi	Pihak Terkait Tindak Lanjut		
		RUPS	Dewan Komisaris	Direksi
Aspek Direksi				
1	Rencana kerja dan anggaran untuk pelatihan bagi anggota Direksi dipisahkan dari anggaran untuk pelatihan bagi karyawan			✓
2	Membuat laporan hasil pelatihan anggota Direksi untuk tiap kegiatan dan mencantumkan uraian kegiatan, biaya kegiatan, manfaat program pelatihan membuat laporan hasil pelatihan anggota Direksi untuk tiap kegiatan dan mencantumkan uraian kegiatan, biaya kegiatan, manfaat program pelatihan			✓
3	Membuat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani			✓
4	Menetapkan pedoman tentang pola karir pegawai dan segera mengisi jabatan kosong dalam level jabatan dalam struktur organisasi			✓
5	Menggunakan aplikasi komputer untuk mendukung sistem pengukuran kinerja			✓
6	Tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi secara individu direalisasikan			✓
7	Melakukan sertifikasi atas kebijakan mutu			✓
8	Sistem mutu dievaluasi dan diaudit secara berkala			✓
9	Membuat <i>job tender</i> untuk 1 level di bawah Direksi			✓
10	Membuat SOP <i>job placement</i>			✓
11	Menyertakan Pakta Integritas dalam Laporan Auditor Independen			✓
12	Menandatangani Pakta Integritas dalam Usulan Tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris/Pemegang Saham dan melampirkan Pakta Integritas dalam usulan tersebut			✓
13	Rencana rapat agar masuk dalam RKAT			✓
14	Membuat SK pengangkatan Kepala SPI			✓
15	SPI/Fungsi Audit Internal melakukan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal melakukan penilaian/reviu (<i>assessment</i>) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan			✓
16	Membuat laporan <i>assessment</i> atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan intern			✓
17	Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan melalui persetujuan Dewan Komisaris			✓
Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi				
1	Laporan CSR agar dipublikasikan di <i>website</i>			✓
2	Agar mencantumkan masa berlaku penghargaan dan sertifikasi yang diterima Perusahaan dalam Laporan Tahunan Perusahaan			✓
3	Menyampaikan uraian mengenai Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen, Mitra Usaha Binaan Perusahaan dan Sertifikasi Lingkungan dalam Laporan Tahunan			✓
4	Mengikuti CSR <i>award</i>			✓

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memantau penerapan strategi dan pencapaian kinerja Perusahaan setiap tahunnya, PT PII melakukan penilaian terhadap kinerja individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan setiap tahun oleh RUPS berdasarkan kontrak kinerja yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP Perseroan. Kontrak kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara garis besar merupakan penjabaran target-target yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan, serta melakukan *monitoring* untuk tercipta dan berkembangnya *Good Corporate Governance* di PT PII dengan terlebih dahulu:

1. Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) kepada RUPS untuk ditetapkan
2. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada Pemegang Saham.
4. Realisasi Indikator Pencapaian Kinerja tahunan Dewan Komisaris dan Direksi di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan kepada Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG pada DEWAN KOMISARIS

Penjelasan penerapan yang telah diimplementasikan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Prinsip-prinsip GCG	Pelaksanaan pada Dewan Komisaris
Akuntabilitas	1. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 2. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJP, RKAP, Laporan Tahunan, dan Laporan Manajemen yang disampaikan oleh Direksi. 3. Dewan Komisaris memberikan arahan dan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. 4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Direksi.
Pertanggungjawaban	1. Dewan Komisaris mempunyai komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya. 2. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Dewan Komisaris turut bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemegang Saham. 4. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dan pembelajaran secara berkelanjutan.
Kemandirian	1. Dewan Komisaris memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan. 2. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.
Kewajaran	Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolektif) dan mengusulkan tantien/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG pada DIREKSI

Penerapan Prinsip-prinsip GCG pada Direksi adalah sebagai berikut:

Prinsip-prinsip GCG	Pelaksanaan pada Dewan Komisaris
Transparansi	1. Direksi menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di lembaga lainnya, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dalam Laporan Tahunan. 2. Direksi wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. 3. Direksi menyediakan bagi <i>stakeholders</i> akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.
Akuntabilitas	1. Direksi wajib membuat RJP, RKAP, Laporan Tahunan Dokumen Keuangan Perusahaan dan Laporan Manajemen, serta menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 2. Direksi wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi. 3. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan serta menyampaikan laporan Tata Kelola Teknologi Informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris. 4. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan investasi dan aset Perusahaan. 5. Direksi harus memastikan bahwa SPI, Auditor Eksternal, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang dan informasi mengenai Perusahaan sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. 6. Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
Pertanggungjawaban	1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern dan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. 4. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemandirian	Direksi tidak melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan perusahaan selain penghasilan yang sah.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

PT PII menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. PT PII berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada individu yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Di tahun 2019, jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

dalam ribuan Rupiah

Keterangan	Nominal
Dewan Komisaris	5.027.935
Direksi	11.622.613
Jumlah	16.650.548



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat internal dan rapat koordinasi dengan Direksi yang disebut dengan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas kinerja PT PII secara menyeluruh. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan

Komisaris telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan melalui rapat formal. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 13 kali rapat. Adapun informasi mengenai tanggal, agenda, dan peserta rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris		
		AS	MA	RR
10 Januari 2019	1. Tindak Lanjut arahan Pemegang Saham dalam RUPS RKAP tahun 2019 2. <i>Timeline</i> Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2019 3. Prognosa IKU Dewan Komisaris tahun 2019 4. Pisah Sambut Dewan Komisaris PII 2018	Hadir	Hadir	Hadir
22 Februari 2019	1. Laporan IKU 2. Usulan PMN 3. Rapat Kerja 4. Laporan Manajemen Q4/Tahunan	Hadir	Hadir	Hadir
28 Maret 2019	1. Usulan Perubahan Logo 2. Usulan Perubahan PMN 3. Usulan perubahan AD terkait Aset Tetap 4. Usulan IKU Individual Direksi tahun 2019	Hadir	Hadir	Hadir
24 April 2019	1. Laporan Manajemen bulan Maret 2019 2. Persiapan RUPS 3. <i>Pending Matters</i>	Hadir	Hadir	Hadir
24 Mei 2019	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen 2. Laporan Q1 Dewan Komisaris	Hadir	Hadir	Hadir
19 Juni 2019	1. Laporan Hasil Rapat Pembahasan Teknis 2. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen Mei 2019	Hadir	Hadir	Tidak Hadir
18 Juli 2019	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen Juni 2019 2. Laporan Hasil Rapat Teknis Organ Dewan Komisaris tanggal 6 Juli 2019/ <i>pending matters</i>	Hadir	Hadir	Hadir
19 Agustus 2019	1. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen Juli 2019 2. Persiapan RKA 2020	Hadir	Hadir	Hadir
23 Agustus 2019	Reviu Laporan pengawasan RKAP 2019 Dewan Komisaris & Laporan PTT Dewan Komisaris Triwulan II	Hadir	Hadir	Hadir
27 Agustus 2019	Pembahasan Keputusan Dewan Komisaris tentang penunjukan Plt. Direktur Utama PT PII	Hadir	Hadir	Hadir
27 September 2019	<i>Highlight</i> Laporan Manajemen Agustus 2019	Hadir	Hadir	Hadir
22 November 2019	1. Tindak lanjut hasil rapat teknis organ Dewan Komisaris tanggal 16 November 2019; 2. IKU Dewan Komisaris; 3. <i>Highlight</i> Laporan Manajemen Oktober 2019.	Hadir	Hadir	Hadir

Tanggal	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris		
		AS	MA	RR
12 Desember 2019	Persiapan RUPS - (tanggapan Dewan Komisaris untuk RKAP 2020)	Hadir	Hadir	Hadir
Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris		100%	100%	92%

Keterangan:

AS : Ayu Sukorini

MA : Mariatul Aini

RR : M. Rahman Ritza

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi telah diatur di dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yaitu paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan 22 (dua puluh dua) kali Rapat Direksi.

Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran		
		ARH	SS	MWS
3 Januari 2019	1. <i>Update</i> mengenai transaksi Penjaminan Pinjaman Proyek KEK Mandalika; 2. Penyampaian Rencana Penjaminan Pinjaman (RPP) Proyek <i>Hydropower Programme</i> PT Perusahaan Listrik Negara (Persero); 3. Pembahasan <i>draft</i> awal Evaluasi Kelayakan Penjaminan Proyek <i>Hydropower Programme</i> PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).	Hadir	Hadir	Dinas Luar Kota
4 Februari 2019	Mekanisme Pembayaran Denda Regres Proyek KPBU KA Makassar - Parepare	Hadir	Hadir	Hadir
25 Februari 2019	Laporan Manajemen Januari 2019	Hadir	Hadir	Dinas Luar Kota
28 Februari 2019	SPAM Regional Jatiluhur 1	Hadir	Hadir	Hadir
15 Maret 2019	1. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah; 1.1. Penerbitan In-Principal Approval (IPA), Rancangan Final GA dan Penentuan Imbal Jasa Penjaminan; 1.2. Penyampaian Hasil <i>Re-Appraisal</i> atas Revisi Usulan Penjaminan. 2. <i>Update</i> Proyek SPAM Jatiluhur Regional 1; 3. <i>Update</i> Proyek SPAM Semarang-Barat.	Hadir	Hadir	Hadir
19 Maret 2019	1. <i>Appraisal</i> Proyek Jalan Nasional Non-Tol Ruas Sumatera Selatan; 2. Laporan Manajemen Februari 2019	Hadir	Hadir	Hadir
1 April 2019	Pembahasan Hasil <i>Appraisal</i> Penjaminan Proyek KPBU RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo	Dinas LN	Hadir	Hadir
9 April 2019	1. Regres Proyek KPBU PT PII; 2. Proyek RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.	Hadir	Hadir	Hadir
23 April 2019	1. Indikasi Cakupan Penjaminan Proyek dan Tenor Penjaminan Proyek KPBU Jalan Nasional Non-Tol Ruas Sumatera Selatan; 2. <i>Update</i> Proyek SPAM Semarang Barat	Hadir	Hadir	Hadir
29 April 2019	1. <i>Signing</i> Satelit Multifungsi; 2. Mekanisme Perpajakan pada Pembayaran Klaim Penjaminan	Hadir	Hadir	Hadir
2 Mei 2019	Penyampaian Hasil <i>Appraisal</i> Penjaminan Proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo	Hadir	Hadir	Hadir
20 Mei 2019	<i>Update</i> FBC Proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo	Hadir	Hadir	Hadir



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggal	Agenda	Kehadiran		
		ARH	SS	MWS
27 Mei 2019	1. Cakupan Penjaminan dan Imbal Jasa Proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo; 2. Perhitungan WACC terkait Perubahan DER	Hadir	Hadir	Hadir
19 Juli 2019	Pembahasan Materi Paparan untuk meeting Sinergi SMV Percepatan Pengembangan PLTP dengan PRKN	Hadir	Hadir	Hadir
9 Agustus 2019	Finalisasi Struktur Imbal Jasa Penjaminan Proyek Bandar Udara Labuan Bajo;	Hadir	Hadir	Hadir
15 Agustus 2019	1. Indikasi Tenor, Eksposur Dan Imbal Jasa Penjaminan Proyek Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan; 2. Perkembangan Dalam Rancangan PKS Setelah RFP Akhir.	Hadir	Hadir	Hadir
4 September 2019	Persiapan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Hydropower Loan KfW	*	Hadir	Hadir
12 September 2019	Pembahasan Proyek PJU Surakarta	*	Hadir	Hadir
18 September 2019	Persiapan Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Proyek Jalan Tol Semarang-Demak	*	Hadir	Hadir
21 Oktober 2019	Pembahasan Kisaran Biaya Penjaminan Bersama PT PII atas Pinjaman BUMN	*	Hadir	Hadir
29 Oktober 2019	Pembahasan Hasil <i>Appraisal</i> Penjaminan Proyek KPBU Bandar Udara Hang Nadim Batam	*	Hadir	Hadir
12 November 2019	1. <i>Update</i> Proses Penjaminan Proyek KPBU Bandar Udara Labuan Bajo; 2. <i>Update Appraisal</i> Penjaminan Proyek KPBU Bandar Udara Labuan Bajo;	*	Hadir	Hadir
14 November 2019	Penerbitan IPA Proyek KPBU Bandar Udara Labuan Bajo	*	Hadir	Hadir
Tingkat Kehadiran Direksi		94%	100%	91%
Keterangan:				
ARH : Armand Hermawan (menjabat hingga 26 Agustus 2019)*				
SS : Salusra Satria				
MWS : M. Wahid Sutopo				

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Informasi mengenai tanggal, agenda, dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019 sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris			Kehadiran Direksi		
		AS	MA	RR	ARH	SS	MWS
21 Januari 2019	1. Pembahasan Laporan Manajemen bulan Desember 2018; 2. Evaluasi realisasi RKAP 2018; 3. Rencana kerja strategis tahun 2019 4. Penambahan PMN 2020	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
25 Februari 2019	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Januari 2019 3. Agenda lain: Rencana korporasi	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Dinas LN
29 maret 2019	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Februari 2019	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Sakit
7 Mei 2019	1. Laporan Manajemen Maret 2019 2. <i>Pending Matters</i>	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

Tanggal	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris			Kehadiran Direksi		
		AS	MA	RR	ARH	SS	MWS
28 Mei 2019	1. Pembahasan Laporan Manajemen April 2019 2. Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris 3. <i>Pending Matters</i>	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
21 Juni 2019	1. Laporan Manajemen periode Mei 2019 2. Agenda lainnya	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
30 Juli 2019	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris dalam rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen Juni 2019 3. Pokok-pokok arah kebijakan strategis RKAP 2020	Tidak Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
30 Agustus 2019	Pembahasan Laporan Manajemen Juli 2019	Hadir	Hadir	Hadir	*	Hadir	Hadir
27 September 2019	Pembahasan Laporan Manajemen Agustus 2019	Hadir	Hadir	Hadir	*	Hadir	Hadir
4 Oktober 2019	Pembahasan RKAP	Hadir	Hadir	Hadir	*	Hadir	Hadir
28 Oktober 2019	1. <i>Update</i> rancangan RKAP 2020 2. Pembahasan Laporan Manajemen September 2019	Hadir	Hadir	Hadir	*	Hadir	Hadir
27 November 2019	1. Pembahasan revisi <i>Board Manual</i> 2. Realisasi CSR 2019 & rencana kerja CSR 2020 3. Laporan Manajemen	Hadir	Hadir	Hadir	*	Hadir	Hadir
13 Desember 2019	1. Persiapan RUPS 2. Pembahasan Laporan Manajemen	Hadir	Hadir	Hadir	*	Hadir	Hadir
Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi		92%	100%	92%	100%	100%	85%

Keterangan:

AS : Ayu Sukorini

MA : Mariatul Aini

RR : M. Rahman Ritza

ARH : Armand Hermawan (menjabat hingga 26 Agustus 2019)*

SS : Salusra Satria

MWS : M. Wahid Sutopo

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang saham utama dan pengendali PT PII adalah Negara Republik Indonesia yang memegang 100% saham dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwakilkan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan selaku RUPS dapat memberikan kuasa kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan untuk bertindak selaku RUPS atau Pemegang Saham.



Hubungan Afiliasi

Anggota Dewan Komisaris, masing-masing tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun horizontal terhadap sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, maupun Pemegang Saham.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Mariatul Aini	Komisaris	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
M. Rahman Ritza	Komisaris	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Salusra Satria	Direktur	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan pejabat di Kementerian Keuangan, namun hal ini tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar terkait rangkap jabatan yang ada di Perseroan. Adapun informasi mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris PT PII pada perusahaan atau instansi lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	x	x
Mariatul Aini	Komisaris	x	x
M. Rahman Ritza	Komisaris	x	x

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah.
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pada tahun 2019, informasi rangkap jabatan Direksi PT PII dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	x	x
Salusra Satria	Direktur	x	x



Kebijakan Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, PT PII telah mengikuti persyaratan dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan pemahaman bisnis Perseroan, integritas, dan dedikasi setiap individu. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PII yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Perseroan untuk terus bertumbuh dan berkembang.

PT PII telah memiliki Kebijakan Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur sebagai berikut:

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan PT PII dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, dalam penetapan komposisi Dewan Komisaris telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas bisnis PT PII termasuk memperhatikan unsur keberagaman. Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Keahlian
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	52	Perempuan	Master di Bidang Ekonomi	Ilmu Ekonomi dan Fiskal
Mariatul Aini	Komisaris	56	Perempuan	Master di Bidang Administrasi Bisnis	Regulasi, Pengembangan SDM, Remunerasi dan Keuangan
M. Rahman Ritza	Komisaris	60	Laki	Master di Bidang Administrasi Bisnis	Akuntansi dan Audit

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang semakin kompleks dihadapi Perseroan. Keberagaman tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan terbaik setelah mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan. PT PII tidak menentukan secara spesifik target yang harus dicapai dalam keragaman gender di dalam struktur keanggotaan Direksi.

Perseroan meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan tugas pengelolaan Perseroan bagi Direksi serta tidak mengenal perbedaan *gender*. Berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, penetapan komposisi Direksi telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis PT PII termasuk memperhatikan unsur keberagaman sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan	Keahlian
Muhammad Wahid Sutopo	Direktur Utama	50	Laki	Magister di Bidang Manajemen	Teknik dan Manajemen Bisnis
Salusra Satria	Direktur	54	Laki	Magister di Bidang Keuangan	Manajemen dan Strategi Bisnis



Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka memaksimalkan fungsi, tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu oleh Staf Sekretaris Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam hal administratif dan kesekretariatan. Sekretaris Dewan Komisaris PT PII diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/KOM/PII/08/2019 yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan dukungan administratif dan kesekretariatan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam kaitannya dengan pengelolaan Perseroan.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



M. Nahdi

Sekretaris Dewan Komisaris

44 tahun, Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia lahir di Bandung tanggal 20 Maret 1975, berusia 44 tahun dan berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 15 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/KOM/PII/08/2019. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai sebagai Anggota Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) (2017-sekarang).

Meraih gelar Pasca Sarjana *Master of Commerce (Advanced) Program majoring Applied Finance* di *Business, Economics and Law (BEL) Faculty, The University of Queensland, Brisbane, Australia.*

Pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penilaian Usaha II/Kepala Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II di Direktorat Penilaian Kekayaan Negara/Direktorat Penilaian, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007-2012), Kepala Bidang Penilaian di Kantor Wilayah DJKN Riau-Sumatera Barat-Kepulauan Riau, DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kepala Sub Direktorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam di Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris, meliputi:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefingsheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;

7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
8. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
9. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain;
10. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan;
11. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris 2019

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Penyusunan Rencana Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020	Agustus 2019	Rencana Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2020
2	Penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta IKU Dewan Komisaris Tahun 2020	Agustus-September 2019	Rancangan RKA dan IKU Dewan Komisaris Tahun 2020
3	Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2020	Oktober 2019	Hasil penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2020
4	Pelaksanaan BOC Meeting	2019	Dokumentasi kelengkapan rapat Dewan Komisaris
5	Pelaksanaan BOC-BOD Meeting	2019	Dokumentasi kelengkapan rapat Dewan Komisaris
6	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP	Tahun 2019 (Semesteran)	Hasil evaluasi atas pelaksanaan RKAP
7	Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS	2019	Memo hasil penelaahan atas usulan transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS
8	Penyusunan laporan-laporan Dewan Komisaris	Tahun 2019 (Triwulanan)	1. Konsep Laporan Pengawasan atas Pelaksanaan RKAP Tahun 2019 2. Konsep Laporan Realisasi Capaian IKU Dewan Komisaris Tahun 2019 3. Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2019
9	Penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris	Tahun 2019 (Triwulanan)	Laporan Kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris
10	Penyampaian tanggapan atas Laporan Tahunan 2018	April 2019	Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018



Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan Organ Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab pengawasan secara efektif dan independen di bidang pelaksanaan dan pelaporan pencatatan keuangan, kecukupan pengelolaan risiko, pengendalian internal secara efektif dan independen, dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Komite Audit juga bekerja secara independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit. Piagam yang disahkan pada tahun 2018 adalah edisi kedua, yang merupakan pembaruan dari edisi pertama tahun 2017.

Isi Piagam Komite Audit mencakup:

1. Pendahuluan: Latar Belakang, Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit, Maksud dan Tujuan Penetapan Piagam Komite Audit;
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang;
3. Pola Hubungan Kerja, Keanggotaan dan Masa Jabatan;
4. Tata Kerja dan Prosedur Kerja;
5. Penganggaran dan Pembiayaan;
6. Penutup.

Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit PT PII beranggotakan 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan seorang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Per 31 Desember 2019, komposisi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Penunjukan
M. Rahman Ritza	Ketua Komite Audit	Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-09/KOM/PII/09/2017
Ahmad Ghufroon	Anggota	Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-06/KOM/PII/09/2019

Profil Komite Audit



M. Rahman Ritza
Ketua Komite Audit

Profil lengkap disajikan pada bagian Profil Perusahaan.



Ahmad Ghufroon
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun dan berdomisil di Jakarta.

Menjabat sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2017, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-09/KOM/PII/09/2017. Beliau lahir di Pekalongan tanggal 15 April 1971. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan manajemen dan memperoleh gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2006 beliau mendapat sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dan pada tahun 2017 Beliau memperoleh sertifikasi Certified Risk Management Professional (CRMP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko.

Sepanjang karirnya, selain bidang audit internal beliau berpengalaman untuk bidang penerapan *risk management*, *internal control*, *governance*, manajemen kinerja, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen perubahan. Dalam bidang akademis, beliau juga tercatat sebagai dosen paruh waktu di Politeknik Keuangan Negara STAN untuk bidang audit internal dan bidang audit investigasi dan akuntansi forensik.

Periode Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Nama	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
M. Rahman Ritza	Anggota Dewan Komisaris	x	X	x	x	x
Ahmad Ghufroon	x	x	X	x	x	x

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Persyaratan Independensi

1. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam pekerjaan atau penugasan yang memberikan jasa audit, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi lainnya kepada perusahaan;
2. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris tidak pernah terikat dalam kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan;
4. Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham;
6. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris/Staf Sekretaris Dewan Komisaris pada BUMN/Perusahaan lain;
7. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit, anggota Komite Lain pada perusahaan dan/atau anggota Komite pada BUMN/perusahaan lain.

Persyaratan Kompetensi

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
3. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis perusahaan dan pengetahuan yang cukup di bidang sistem dan teknologi informasi;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut BUMN dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan;
5. Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit PT PII sebagai berikut:

A. Tugas

1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal dan editor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur penelaahan yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.



6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas Komisaris berupa namun tidak terbatas pada:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan tahunan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
 - b. Melakukan penelaahan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
 - c. Melakukan penelaahan atas Ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
 - d. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
 - e. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan eksternal auditor yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan honorarium untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Melakukan pengawasan atas proses audit yang dilakukan auditor eksternal mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.
 - d. Menilai kinerja dan kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal.
 - e. Memantau pelaksanaan tindak lanjut temuan dan rekomendasi auditor eksternal yang dilakukan oleh Direksi.
 - f. Mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor eksternal dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor eksternal tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

B. Tugas terkait dengan Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Pelaporan Keuangan

1. Terkait dengan auditor internal, Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Melakukan penelaahan dan memberikan masukan atas rencana audit tahunan yang disusun oleh auditor internal sebelum di mulainya tahun anggaran.
 - b. Menelaah dan merekomendasikan prosedur pemeriksaan internal dan menelaah Piagam Auditor Internal.
 - c. Melakukan penelaahan atas laporan hasil audit dari auditor internal.
 - d. Membahas temuan auditor internal dan/ atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi keuangan.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan audit oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
2. Terkait dengan auditor eksternal, Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Menyusun kerangka acuan kerja (*term of reference*) yang selanjutnya menjadi dasar panitia pengadaan auditor eksternal dalam melakukan proses pengadaan auditor eksternal.
 3. Terkait dengan pelaporan keuangan, Komite Audit bertugas untuk:
 - a. Menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang digunakan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
 - b. Melakukan penelaahan atas proses penyusunan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan, standar dan sistem akuntansi yang berlaku.
 - c. Meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah menyajikan secara wajar tentang kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
 - d. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan kesesuaiannya dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta rencana jangka panjang perusahaan.
 - e. Melakukan penelaahan dan penilaian atas laporan keuangan interim dan tahunan.
 - f. Melakukan penelaahan dan penilaian atas laporan manajemen periodik.



Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

C. Tanggung Jawab

1. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Melaksanakan tugas Komite Audit secara jujur, amanah dan profesional.
3. Menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya.

D. Wewenang

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, aset, hutang, modal, dana dan sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Meminta keterangan dari pejabat dan pegawai Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan komunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan audit eksternal serta manajemen risiko.
4. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2019

Program Kerja Komite Audit untuk tahun 2019 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2020	Agustus 2019	Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2020
2	Penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta IKU Dewan Komisaris Tahun 2020	Agustus-September 2019	Rancangan RKA dan IKU Dewan Komisaris Tahun 2020
3	Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2020	Oktober 2019	Memo Hasil penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2020
4	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP Tahun 2020 yang disusun oleh Direksi	Oktober-November 2019	Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Rancangan RKAP Tahun 2020
5	Penelaahan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Audit Internal	Desember 2019	Memo Hasil penelaahan atas PKAT Audit Internal
6	Reviu atas laporan hasil Audit Internal	Tahun 2019 (Triwulanan)	Memo Hasil Reviu atas laporan Audit Internal
7	Pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal	Tahun 2019 (Triwulanan)	Memo hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit internal dan eksternal

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output
8	Penelaahan level teknis atas kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja Dewan Komisaris	2019	1. Hasil penelaahan atas pengaduan terkait perusahaan. 2. Hasil penelaahan atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta pelaksanaannya 3. Penelaahan atas kepatuhan Direksi terhadap Peraturan Per-UU-an dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga 4. Hasil Evaluasi atas kegiatan CSR 5. Penelaahan atas kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal 6. Penelaahan atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya 7. Penelaahan atas gejala penurunan kinerja 8. Evaluasi atas pelaksanaan RKAP 9. Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS 10. <i>Monitoring</i> atas proyek yang telah dijamin 11. Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute
9	Evaluasi atas pelaksanaan RKAP	Tahun 2019 (Triwulanan)	Hasil evaluasi atas pelaksanaan RKAP
10	Penelaahan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS	2019	Memo hasil Penelaahan atas usulan transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS
11	Penelaahan atas laporan Bulanan Manajemen ke Dewan Komisaris/Pemantauan Kinerja Direksi	Tahun 2019 (Bulanan)	Laporan Bulanan Komite Audit
12	Penelaahan atas laporan manajemen Triwulanan ke RUPS	Tahun 2019 (Triwulanan)	Laporan Komite Audit
13	Penyampaian tanggapan atas laporan Tahunan 2018	April 2019	Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018
14	Pemantauan atas penerapan <i>Area of Improvement</i> (AOI) hasil penilaian GCG Tahun 2018	Tahun 2019 (Semesteran)	Hasil penelaahan atas penerapan Area of Improvement (AOI) GCG Tahun 2018
15	Pemantauan atas pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2019 oleh BPKP	Desember 2018-Februari 2019	<i>Scoring</i> penilaian GCG Tahun 2018
16	Pemantauan atas kemajuan pelaksanaan LK Tahun 2018 oleh KAP	Desember 2018-Februari 2019	Rapat/Audiensi dengan KAP
17	Penelaahan atas laporan hasil audit LK Tahun 2018 dari KAP	Februari 2019	<i>Clearence Meeting</i> dengan KAP
18	Pengadaan KAP Untuk Audit LK Tahun 2019	Juli-Agustus 2019	Memo laporan hasil Pengadaan KAP Untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2019
19	Pengusulan penetapan KAP untuk audit LK Tahun 2019 kepada RUPS	Agustus 2019	Konsep Surat Dewan Komisaris kepada RUPS untuk penetapan KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2019
20	Penelaahan rencana audit LK Tahun 2019 oleh KAP	Desember 2019	<i>Kick Off Meeting</i> dengan KAP
21	Peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit	Juli 2019 Agustus 2019 November 2019	• 2019 IIA Indonesia National Conference • International Workshop and On-Site Learning Program: Best Practices in Implementing GRC in Era Revolution Industry 4.0 - The Role of Assurance and Oversight Functions • Forum GRC



Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan yang dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit. Selama tahun 2019, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Dalam setiap rapat Komite Audit, dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Frekuensi Rapat Anggota Komite Audit dan tingkat kehadiran Anggota Komite Audit selama tahun 2019 sebagai berikut:

Tanggal	Tempat Rapat	Agenda	Kehadiran Komite Audit		
			RR	AG	FI
3 Januari 2019	UNT-4 Meeting Room Lt.7	Entry Meeting BPKP untuk assesment GCG PT PII tahun 2018	Tidak Hadir	Hadir	Hadir
18 Januari 2019	Djuanda lantai 5 kemenkeu	Reviu atas aspek keuangan RKAP 2018	Hadir	Hadir	Hadir
25-26 Januari 2019	Hotel Santika, Bogor	Assessment GCG PT PII tahun 2018 oleh BPKP	Tidak Hadir	Hadir	Hadir
22 Februari 2019	Gedung Djuanda II Lt.6 Kementerian Keuangan	- Penyampaian Laporan Audit Internal atas <i>Procurement</i> dan Semarang Barat - Update status tindak lanjut rekomendasi audit internal - Update status tindak lanjut temuan audit eksternal - Persiapan Pelaksanaan Audit 2019	Hadir	Hadir	Hadir
26 Februari 2019	Board Room, Lt.8 PII	Clearance Meeting dengan PwC	Hadir	Hadir	Hadir
22 Maret 2019	Gedung Djuanda II Lt.5 Kementerian Keuangan	- Reviu laporan bulanan manajemen, - Reviu atas Hasil Audit KAP terhadap Laporan Keuangan dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - Reviu atas Penyelesaian Laporan Tahunan PT PII, Logo Perusahaan, dan Penghapusan Aset, dan IKU Direksi	Hadir	Hadir	Hadir
24 April 2019	Gedung Djuanda II Lt.5 Kementerian Keuangan	Laporan <i>monitoring</i> tindak lanjut rekomendasi audit internal triwulan 1 tahun 2019	Hadir	Hadir	Hadir
26 April 2019	Gedung Djuanda II Lt.5 Kementerian Keuangan	- Reviu Laporan Manajemen - Reviu atas Konsep Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2018	Hadir	Hadir	Hadir
27 Juni 2019	Ruang Rapat Infra 1, Lt.8 PT PII	- Pengadaan KAP (reviu kebijakan pengadaan terkait Perpres pengadaan yg baru) - Pendapatan PDF	Tidak Hadir	Hadir	Hadir
1 Agustus 2019	Ruang Rapat Inspektur Investigasi, Gedung Djuanda II Lt.6 Kementerian Keuangan	Reviu Tindak Lanjut rekomendasi Audit Internal triwulan II/Semester I	Hadir	Hadir	Hadir
27 Agustus 2019	Gedung Djuanda II Lt.5 Kementerian Keuangan	- Penyusunan RKA KA tahun 2020 - Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris tahun 2020 - Penyiapan Usulan IKU Dewan Komisaris tahun 2020 - Penelaahan atas laporan manajemen triwulan ke RUPS	Hadir	Hadir	Hadir
22 Oktober 2019	Gedung Djuanda II Lt.5 Kementerian Keuangan	Rapat KA- Tindak lanjut rekomendasi IA Triwulan III	Hadir	Hadir	Hadir

Tanggal	Tempat Rapat	Agenda	Kehadiran Komite Audit		
			RR	AG	FI
30 Oktober 2019	Gedung Djuanda II Lt.5 Kementerian Keuangan	Realisasi 2019 & Program Kerja CSR 2020	Hadir	Hadir	Hadir
10 Desember 2019	Board Room, Lt.8 PII	<i>Kick off meeting</i> terkait audit laporan keuangan tahun buku 2019 dengan PwC	Hadir	Hadir	*
Presentase Kehadiran			79%	100%	100%

Keterangan:

RR : M. Rahman Ritza

AG : Ahmad Ghufon

FI : Ferry Irawan (menjabat hingga 30 November 2019)*

Selain itu, Komite Audit juga mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris, baik yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sendiri atau gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. Rapat-rapat tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris		
		RR	AG	FI
21 Januari 2019	1. Pembahasan Laporan Manajemen Desember 2018 2. Evaluasi realisasi RKAP 2018 3. Rencana kerja strategis tahun 2019 4. Penambahan PMN 2020	Hadir	Hadir	Hadir
25 Februari 2019	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Januari 2019 3. Agenda lain: Rencana korporasi & Timeline	Hadir	Hadir	Hadir
29 Maret 2019	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris 2. Laporan Manajemen Februari 2019	Hadir	Hadir	Hadir
7 Mei 2019	1. Laporan Manajemen Maret 2019 2. <i>Pending Matters</i>	Hadir	Hadir	Hadir
28 Mei 2019	1. Pembahasan Laporan Manajemen April 2019 2. Tindak lanjut arahan Dewan Komisaris 3. <i>Pending Matters</i>	Tidak Hadir	Hadir	Hadir
21 Juni 2019	1. Laporan Manajemen Mei 2019 2. Agenda lainnya	Hadir	Hadir	Hadir
30 Juli 2019	1. Tindak Lanjut arahan Dewan Komisaris dalam rapat sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen Juli 2019 3. Pokok-pokok arah kebijakan strategis RKAP 2020	Hadir	Hadir	Hadir
30 Agustus 2019	Pembahasan Laporan Manajemen Juli 2019	Hadir	Hadir	Hadir
27 September 2019	Pembahasan Laporan Manajemen Agustus 2019	Hadir	Hadir	Hadir
4 Oktober 2019	Pembahasan RKAP	Hadir	Hadir	Hadir
28 Oktober 2019	1. <i>Update</i> rancangan RKAP 2020 2. Pembahasan Laporan Manajemen periode September 2019	Hadir	Hadir	Hadir
27 November 2019	1. Pembahasan revisi <i>Board Manual</i> 2. Realisasi CSR 2019 & rencana kerja CSR 2020 3. Laporan Manajemen	Hadir	Hadir	Hadir
13 Desember 2019	1. Persiapan RUPS 2. Pembahasan Laporan Manajemen	Hadir	Hadir	*
Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi		92%	100%	100%

Keterangan:

RR : M. Rahman Ritza

AG : Ahmad Ghufon

FI : Ferry Irawan (menjabat hingga 30 November 2019)*



Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

PT PII tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun demikian, fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

PT PII menyadari bahwa estafet kepemimpinan dalam organisasi perlu dibangun untuk memastikan keberlanjutan Perseroan. Untuk itu, diperlukan suksesi Direksi yang dapat terus melanjutkan kepemimpinan perusahaan. PT PII memberikan kesempatan kepada pejabat satu level di bawah Direksi untuk mengikuti proses *fit and proper test* yang dilaksanakan dengan keputusan akhir berada di Pemegang Saham/RUPS.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan untuk pertama kali pada tanggal 15 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/PII/KOM/03/2018 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko PT PII yang antara lain memuat latar belakang dan dasar pembentukan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, struktur dan persyaratan keanggotaan, rapat, pola kerja, rapat, pelaporan, serta masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko.

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-01/KOM/PII/01/2018 tanggal 27 Januari 2018. Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan 2 (dua) orang pihak independen.

Hingga akhir tahun 2019, komposisi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Hukum Pengangkatan
Mariatul Aini	Ketua	KEP-11/KOM/PII/12/2018
Iqbal Islami	Anggota	KEP-01/KOM/PII/01/2018
Ferry Irawan	Anggota	KEP-08/KOM/PII/11/2019

Profil Komite Pemantau Risiko



Mariatul Aini

Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil lengkap disajikan pada bagian Profil Perseroan



Iqbal Islami

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun dan berdomisil di Jakarta.

Iqbal Islami mulai bertugas sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018. Selain itu, saat ini Beliau juga menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, Beliau pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit di PT PII selama lima tahun sejak 1 November 2012 sampai dengan 30 Oktober 2017. Sebelum bertugas sebagai anggota Komite Audit di PT PII, beliau juga telah pernah bertugas sebagai anggota Komite Audit pada dua BUMN dan satu Perseroan terbuka. Dalam bidang akademis, beliau juga tercatat sebagai dosen Politeknik Keuangan Negara STAN sejak tahun 1991.

Manajemen stratejik, *finance*, *corporate governance*, manajemen risiko dan keuangan negara adalah bidang-bidang yang menjadi keahliannya. Beliau memperoleh gelar akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan gelar Master of Business Administration dalam bidang *finance* dari Case Western Reserve University, Ohio, USA.

Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris



Ferry Irawan

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun dan berdomisil di Depok.

Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko sejak 1 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-08/KOM/PII/2019. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT PII sejak tanggal 1 Desember 2017. Beliau lahir di Depok pada tanggal 2 Februari 1975, dan saat ini bertugas sebagai Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya bertugas di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan menangani beberapa isu antara lain Analisis Fiskal, Analisis Moneter dan Lembaga Keuangan/Neraca Pembayaran juga pernah bertugas pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal yang menangani isu-isu risiko fiskal serta pengelolaannya.

Beliau menyelesaikan Program S-1 pada Jurusan Manajemen Keuangan, S-2 dan Doktoralnya di dalam bidang Ekonomi Moneter pada tahun 2006, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau juga menjadi salah satu pengajar di Program Pasca Sarjana/Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Periode Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya hanya kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham.

Nama	Hubungan Keuangan dengan			Hubungan Keluarga dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Mariatul Aini	Anggota Dewan Komisaris	x	x	x	x	x
Iqbal Islami	x	x	x	x	x	x
Ferry Irawan	x	x	x	x	x	x

Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas yang baik, kompetensi, dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pemantauan manajemen risiko.
 2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan pelaksanaan manajemen risiko dan laporan keuangan.
 3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
 4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Perseroan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
 6. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Perseroan dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan manajemen risiko Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 8. Tidak mempunyai kepentingan dan hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Melakukan reviu dan evaluasi atas laporan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat oleh Perseroan.
 4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Perseroan.
 5. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan manajemen risiko.
 6. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

B. Tanggung Jawab:

1. Melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dengan menjunjung tinggi integritas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
3. Menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya.

C Wewenang:

1. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari dalam Perseroan atau pihak lainnya.
2. Meminta keterangan dan melakukan komunikasi dengan para pejabat dan pegawai Perseroan.
3. Mendapatkan masukan dan/atau saran pihak independen dari luar Perseroan, jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Pemantau Risiko PT PII diatur sebagai berikut:

A. Tugas:

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris untuk memantau dan mengevaluasi penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik khususnya yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko serta memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas unit kerja Perseroan yang membidangi manajemen risiko.



Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Penyusunan RKA KPR Tahun 2020	Juli-Agustus 2019	Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2020
2	Penyiapan bahan RKA Dewan Komisaris Tahun 2020	Agustus-September 2019	Rancangan RKA dan IKU Dewan Komisaris Tahun 2020
3	Penyiapan bahan usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2020	Agustus-September 2019	Memo usulan Kontrak Kinerja (IKU) Dewan Komisaris Tahun 2020
4	Penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2020	September-Oktober 2019	Memo Hasil penelaahan atas usulan RKAP PT PII Tahun 2020
5	Penyiapan bahan tanggapan Dewan Komisaris kepada RUPS atas rancangan RKAP Tahun 2020	Oktober 2019	Konsep Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Rancangan RKAP Tahun 2020
6	Pelaksanaan Rapat Bulanan KPR	Tahun 2019 (Bulanan)	1. Hasil penelaahan atas kebijakan Manajemen Risiko 2. Hasil Evaluasi atas kegiatan CSR 3. Penelaahan atas kebijakan IT 4. Evaluasi atas pelaksanaan RKAP 5. <i>Monitoring</i> atas proyek yang telah dijamin 6. Pemantauan atas kegiatan IIGF Institute 7. <i>Monitoring</i> terhadap performansi perusahaan 8. Pembahasan gejala penurunan kinerja 9. Rapat dengan Divisi-Divisi Terkait Aspek Risiko dari masing-masing Divisi
7	Pengawasan/pemberian nasihat atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya	Tahun 2019 (Triwulanan)	Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulanan
8	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP untuk aspek pengelolaan risiko	Tahun 2019 (Triwulanan)	Hasil evaluasi atas pelaksanaan RKAP
9	Pembahasan terkait transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS	2019	Memo hasil Penelaahan atas usulan transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/RUPS
10	Mereview laporan manajemen bulanan dengan fokus pada aspek manajemen risiko	Tahun 2019 (Bulanan)	Risalah Rapat Bulanan Komite Pemantau Risiko & Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulanan
11	<i>Monitoring</i> atas proyek yang telah dijamin		Laporan Komite Pemantau Risiko dan masukan kepada Dewan Komisaris
12	Penelaahan aspek risiko atas pemberian tanggapan (<i>response</i>) kepada Direksi/RUPS	Tahun 2019 (Semesteran)	Memo Hasil penelaahan aspek risiko atas pemberian tanggapan (<i>response</i>) kepada Direksi/RUPS
13	Evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun dan dilaksanakan oleh Perusahaan	Tahun 2019 (Triwulanan)	Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulanan
14	Penelaahan kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dengan fokus pada aspek manajemen risiko	Tahun 2019	Memo hasil penelaahan kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha
15	Penelaahan rencana kerja Divisi Manajemen Risiko Tahun 2020	Desember 2019	Risalah Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko Triwulanan & Laporan Komite Pemantau Risiko Triwulanan
16	Pembahasan dengan Divisi Manajemen Risiko	Tahun 2019 (Triwulanan)	Risalah Rapat dengan Divisi Manajemen risiko
17	Penelaahan atas Laporan Manajemen Risiko	Tahun 2019 (Triwulanan)	Memo hasil penelaahan Laporan Manajemen Risiko

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Output
18	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2018	Tahun 2019 (semesteran)	Risalah Rapat Hasil Penelaahan Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2018
19	Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2019 oleh BPKP	Januari s.d Februari 2020	Scoring penilaian GCG Tahun 2019
20	Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan AOI GCG rekomendasi BPKP Tahun 2019	Februari s.d Desember Tahun 2020	Scoring penilaian GCG Tahun 2019 & Penelaahan Pemantauan tindak lanjut atas AOI GCG rekomendasi BPKP

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali, baik bersama Organ Komisaris lain maupun dengan divisi-divisi Perseroan dengan agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Tempat Rapat	Agenda	Kehadiran Rapat			
				MA	II	IW	FI
1	30 Januari 2019	Gedung Djuanda II lantai 5 Kemenkeu	Kebijakan Regress	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Hadir	**
2	25 Februari 2019	PT PII Lt 8	Progres penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek: 1. Infrastruktur Perkeretaapian Makassar-Parepare 2. Jalintim di Riau dan Sumatera Selatan 3. RSKD	Hadir	Hadir	Tidak Hadir	**
3	29 Maret 2019	PT PII Lt 8	Risk Management di Procurement	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	**
4	30 April 2019	Gedung DJA Lt.11	Mapping Risiko PT PII	Hadir	Hadir	Hadir	**
5	16 Mei 2019	Ruang meeting 1, Lt.8 PT PII	Monitoring pengelolaan investasi dana	Hadir	Hadir	Hadir	**
6	17 Juni 2019	Gedung DJA Lt.11	Monitoring IIGF Institute	Hadir	Hadir	Hadir	**
7	30 Juli 2019	Gedung DJA Lt.11	Reviu manajemen risiko PT PII Triwulan II/ Semester I	Hadir	Hadir	Hadir	**
8	30 Agustus 2019	Gedung DJA Lt.11	Update Proyek Perkeretaapian Makassar - Parepare	Hadir	Hadir	Hadir	**
9	30 September 2019	Gedung DJA Lt.11	Kebijakan IT dan Evaluasi pelaksanaan Program IT 2019	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	**
10	25 Oktober 2019	Ruang Rapat Infra 2 PT PII Lt. 8	Membahas laporan pengelolaan risiko dan laporan pengendalian kewajiban kontingensi Triwulan III	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	**
11	25 November 2019	Gedung DJA Lt.11	Monitoring Proyek yang sudah aktif penjaminannya	Hadir	Hadir	Hadir	**
12	13 Desember 2019	PT PII Lt 8	Reviu berkala dengan komite risiko	Hadir	Hadir	*	Hadir
Presentase kehadiran				92%	67%	91%	100%

Keterangan:

MA : Mariatul Aini

II : Iqbal Islami

IW : Imam Wahyudi (menjabat sampai 30 November 2019)*

FI : Ferry Irawan (menjabat mulai 1 Desember 2019)**

Audit Internal

Audit Internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *internal control*, *risk management* dan *governance process*. Audit Internal juga memastikan proses pengelolaan dan operasional Perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mendukung tujuan Perseroan. Audit Internal bertanggung jawab memastikan kecukupan dan proses pengendalian internal telah berjalan sebagaimana mestinya.

Visi Audit Internal adalah menjadi mitra strategis yang profesional, independen, obyektif, bertanggung jawab sehingga ke depan dapat menjadi penasihat yang terpercaya (*trusted advisor*) bagi Direksi dan jajaran manajemen dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Misi Audit Internal adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan layanan asurans dan konsultasi berbasis risiko yang dilaksanakan secara sistematis, objektif dan independen.

Audit Internal PT PII terus melakukan inovasi yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam penggunaan metodologi yang dapat meningkatkan proses audit agar lebih efektif dan efisien.

PROFIL KEPALA AUDIT INTERNAL



Catur Priyoni

Kepala Audit Internal

Pria kelahiran 47 tahun yang lalu ini telah bergabung dengan PT PII sejak 1 Februari 2019. Berdomisili di Jakarta.

Ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal sejak 1 Februari 2019 berdasarkan Surat Dewan Komisaris, S-01/PII/DK/0119.

Sebelum bergabung dengan PT PII, beliau telah menjalani profesi sebagai Auditor Internal dan Auditor Eksternal selama lebih dari 20 tahun. Karir sebagai Auditor Internal di beberapa perusahaan asuransi *joint venture* internasional telah ditempuhnya selama 8 tahun dan di sebuah anak perusahaan Bank BUMN selama 4 tahun sebagai Auditor Internal dan Manajer Akuntansi. Sebelum berkarir sebagai Auditor Internal, beliau berkarir di beberapa Kantor Akuntan Publik berafiliasi internasional selama kurang lebih 9,5 tahun termasuk di beberapa *Big Four Accounting Firms*.

Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1997 dan telah memperoleh Sertifikat Praktisi Akuntan dari CPA Australia pada tahun 2019, Sertifikat Praktik Komite Audit (*Certification of Audit Committee Practices*) pada tahun 2018, serta Sertifikat Manajemen Risiko (*Certification in Risk Management Assurance/CRMA*) pada tahun 2013 dari *The Institute of Internal Auditors*. Selain itu, beliau terdaftar sebagai *Indonesian Chartered Accountant (CA)* di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak tahun 2013.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA AUDIT INTERNAL

Kepala Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Adapun informasi mengenai jumlah pegawai/Auditor Internal dan sertifikasi yang dimiliki sebagai berikut:

Jumlah Auditor Internal per 31 Desember 2019

Jabatan	Jumlah
Senior Vice President Audit Internal	1
Assistant Vice President Audit Internal	1
Staf Audit Internal	2

Jumlah Auditor Internal yang telah bersertifikasi per Desember 2019

Jenis Sertifikasi	Jumlah	Penyelenggara
Certified Practicing Accountant (CPA)	1	CPA Australia
Chartered Accountant (CA)	1	<i>Institute of Indonesia Chartered Accountants</i> / Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
<i>Certification in Risk Management Assurance (CRMA)</i>	1	<i>The Institute of Internal Auditors (IIA)</i>
<i>Certification in Audit Committee Practices (CACP)</i>	1	<i>The Indonesian Institute of Audit Committee</i> (Ikatan Komite Audit Indonesia / IKAI)

PEDOMAN ATAU PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sejak 16 Agustus 2011, yang kemudian diperbaharui pertama kalinya pada 14 Agustus 2017. Kemudian terakhir diperbaharui untuk kedua kalinya pada 31 Desember 2019.

Piagam Audit Internal disusun untuk menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh fungsi Audit Internal Perseroan yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa fungsi Audit Internal dapat menjalankan tugas-tugasnya secara memadai dan efektif.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsionalnya, Kepala Divisi Audit Internal mendapatkan masukan dan petunjuk dari Komite Audit. Auditor yang duduk dalam Divisi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.



Audit Internal

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL

Berdasarkan *Internal Audit Charter*, tugas dan tanggung jawab Audit Internal adalah:

1. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Auditor Internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang Auditor Internal yang cukup hati-hati (*reasonably prudent*) dan kompeten. Namun demikian, cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi kekeliruan.
2. Untuk menerapkan kecermatan profesionalnya, Auditor Internal harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Luasnya cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
 - b. Kompleksitas, materialitas, atau signifikansi relatif terhadap permasalahan yang dijadikan objek penerapan prosedur penugasan asurans.
 - c. Kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian.
 - d. Peluang terjadinya kesalahan, kecurangan atau ketidakpatuhan signifikan.
 - e. Sumber daya, teknik analisis dan penggunaan teknologi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
 - f. Biaya penugasan asurans dalam kaitannya dengan potensi manfaat yang dapat dihasilkan dari penugasan.
3. Untuk menerapkan kecermatan profesionalnya, Auditor Internal juga harus waspada terhadap risiko signifikan yang dapat mempengaruhi tujuan, operasi, atau sumber daya. Namun, prosedur asurans saja, sekalipun telah dilaksanakan dengan menggunakan kecermatan profesional, tidak menjamin bahwa seluruh risiko signifikan dapat teridentifikasi.
4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Audit Internal dengan penekanan pada bidang/kegiatan yang mempunyai risiko tinggi serta menguji sistem pengendalian yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan Perusahaan dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
5. Mendukung Auditor Eksternal dalam penyediaan informasi, dokumen, dan data dalam pelaksanaan audit atas izin Direktur Utama.
6. Auditor Internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

METODE AUDIT INTERNAL

Pelaksanaan Audit Internal dikembangkan dengan metode dan pendekatan audit berbasis risiko. Dengan audit berbasis risiko, Auditor Internal menentukan hakikat, luas cakupan dan prioritas audit berdasarkan hasil penilaian risiko pada seluruh area dan proses bisnis yang ada di dalam organisasi (*audit universe*). Dengan metode dan pendekatan ini, diharapkan hasil dari aktivitas Audit Internal dapat membantu manajemen dalam menentukan area-area yang memerlukan perbaikan, yang secara umum selaras dengan prioritas dan tujuan operasi perusahaan. Pelaksanaan audit berbasis risiko bersama dengan proses audit lainnya akan membantu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kerja secara menyeluruh untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIKUTI OLEH KETUA AUDIT INTERNAL

Rincian tentang pelaksanaan program pengembangan kompetensi disampaikan pada bab Profil Perusahaan yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERNAL 2019

Pada periode tahun 2019, Audit Internal telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan audit yang telah diselesaikan dan 1 (satu) kegiatan audit yang masih berjalan (*on going*) sesuai dengan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan. Rincian kegiatan Audit pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas pengelolaan fungsi *Project Monitoring and Claim Management* (PMCM).
2. Pemeriksaan atas pengelolaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Pemeriksaan atas proses penjaminan Proyek KPBK Kereta Api Makassar-Parepare.
4. Pemeriksaan atas proses penyiapan proyek dan pendampingan transaksi KPBK.
5. Pemeriksaan atas proses penjaminan Proyek KPBK Satelit Multifungsi Pemerintah.
6. Pemeriksaan atas pengelolaan fungsi Penjaminan Non-KPBK (PNK) yang masih berjalan.

Selain tugas di atas, sepanjang tahun 2019 Audit Internal juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas tahun 2019.
2. Pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan pemantauan penyelesaian kerugian negara Tahun 2019 dan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2018.
3. Pendampingan dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT PII tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik.
4. Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal maupun eksternal.
5. Berperan aktif mendukung tim Sekretaris Perusahaan dalam meyakinkan kelancaran pelaksanaan evaluasi dan penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
6. Penyelenggaraan *Governance, Risk, and Compliance Forum* Tahun 2019 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Center for Risk Management Studies* (CRMS).
7. Pemuktahiran kedua terhadap Piagam Audit Internal Tahun 2019 atas Piagam Audit Internal Tahun 2017.

PELAKSANAAN AUDIT 2018 DAN 2019

Realisasi Pelaksanaan Audit tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Uraian	Tahun					
	2018			2019		
	PKPT	REAL	%	PKPT	REAL	%
Laporan hasil penugasan audit	6	6	100	6	5	83%

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

Hingga periode 31 Desember 2019, Audit Internal telah menyelesaikan 5 kegiatan audit dan 1 kegiatan audit yang masih dalam proses. Jumlah rekomendasi sepanjang tahun 2019 adalah sebanyak 36 rekomendasi yang mana sebanyak 31 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti (86%) dan sisanya merupakan rekomendasi yang ditargetkan untuk diselesaikan di tahun 2020.



Unit Manajemen Risiko

Dalam fungsi pengelolaan risiko korporat, PT PII membentuk Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab menyusun kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan proses manajemen risiko, mengembangkan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi pengelolaan risiko di lingkungan Perusahaan berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pendirian Perusahaan.

Kedudukan Divisi Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Utama. Kepala Divisi Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala Divisi Manajemen Risiko dibantu dengan 2 (dua) orang anggota Divisi Manajemen Risiko. Kepala Divisi Manajemen Risiko wajib menyampaikan laporan manajemen risiko kepada Direktur Utama dan Komite Pemantau Risiko secara berkala setidaknya setiap triwulan.

Secara khusus, Divisi Manajemen Risiko melakukan tinjauan independen pada cakupan dan limit tertentu - baik dari perspektif manajemen risiko maupun kepatuhan - terhadap proses penjaminan, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan dokumen proses bisnis perusahaan sebelum persetujuan diberikan oleh Direksi.

Proses manajemen risiko Perseroan menganut konsep three lines of defense dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direksi, Audit Internal, fungsi Risk Management, serta para karyawan yang berada di divisi masing-masing.

Dalam melaksanakan identifikasi, analisis, pemantauan dan penanganan risiko korporat, Divisi Manajemen Risiko bekerja sama dengan divisi-divisi terkait, dengan fokus pada risiko-risiko yang menjadi prioritas utama Direksi dan Komisaris Perusahaan. Dalam pemantauan manajemen risiko korporat, Komisaris Perusahaan dibantu oleh Komite Pemantau Risiko yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang manajemen risiko.

PROFIL KEPALA DIVISI MANAJEMEN RISIKO



Catur Priyoni

Kepala Divisi Manajemen Risiko

Ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Manajemen Risiko sejak 19 Juni 2019. Profil telah ditampilkan pada pembahasan Profil Kepala Audit Internal.



JUMLAH PEGAWAI DAN SERTIFIKASI SEBAGAI PROFESI MANAJEMEN RISIKO

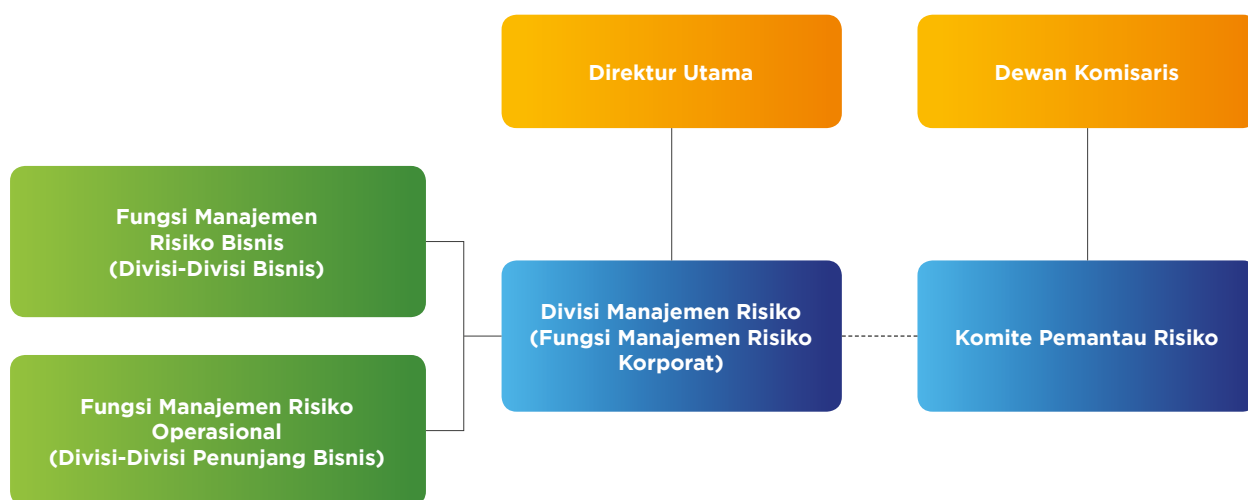
Jumlah pegawai Divisi Manajemen Risiko sebanyak 3 orang. Adapun yang telah bersertifikasi secara aktif per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi	Jumlah	Penyelenggara
Certification in Risk Management Assurance (CRMA)	1	The Institute of Internal Auditors (IIA)
Chartered Accountant (CA)	1	The Institute of Indonesia Chartered Accountant (Ikatan Akuntan Indonesia / IAI)
Certified Practicing Accountant (CPA)	1	CPA Australia
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	1	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)

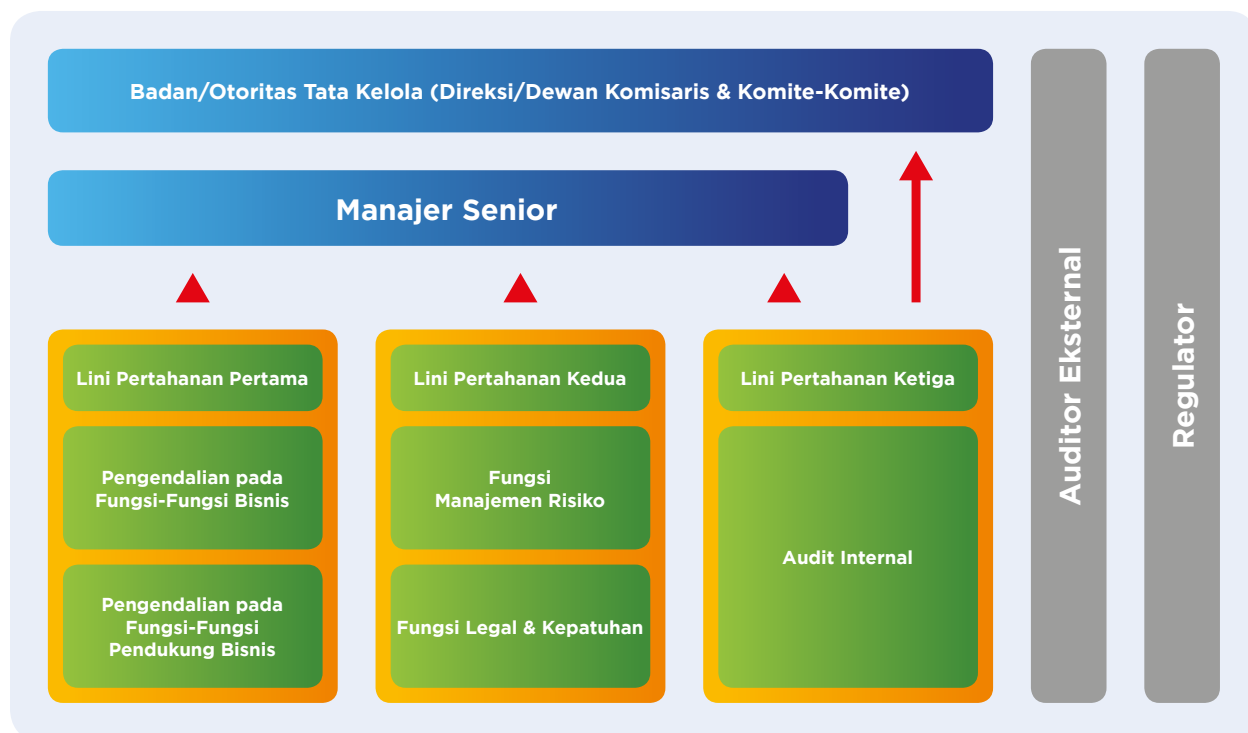
Unit Manajemen Risiko

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO

Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Manajemen Risiko telah mengembangkan suatu Kerangka Pengelolaan Risiko PT PII (*Enterprise Risk Management/ERM Framework*) menggunakan acuan utama ISO 31000:2009 dan COSO ERM 2014. Struktur Divisi Manajemen Risiko dapat dilihat berikut:



Proses manajemen risiko Perseroan menganut konsep *three lines of defense* dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direksi, Audit Internal, fungsi Manajemen Risiko, serta para karyawan yang berada di divisi masing-masing. Tujuan keterlibatan semua pihak ini adalah timbulnya pemahaman dan kepemilikan (*ownership*) atas risiko yang dihadapi Perseroan serta sebagai bentuk dari tahapan implementasi manajemen risiko.



UNIT KERJA TERKAIT PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KORPORAT

Dalam penerapan Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management/ERM*), unit kerja yang terkait di antaranya adalah:

1. Direksi

Peran dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan ERM adalah:

- a. Mengelola dan mengendalikan semua risiko Perusahaan;
- b. Menentukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- c. Memantau dan mengarahkan manajemen dalam implementasi Manajemen Risiko dan juga menjamin kecukupan alat, sistem, dan sumber daya untuk mendukung implementasi Manajemen Risiko;
- d. Meninjau dan menyetujui tujuan, strategi, kerangka kerja, visi dan misi, struktur organisasi, selera risiko, toleransi risiko, budaya risiko, dan alokasi sumber daya untuk Manajemen Risiko secara berkala;
- e. Memantau dan mengevaluasi implementasi Manajemen Risiko;
- f. Memberikan persetujuan pada proses mitigasi risiko;
- g. Memberikan arahan dalam penerapan kebijakan manajemen risiko; dan
- h. Memastikan penelaahan independen yang komprehensif tentang pelaksanaan Manajemen Risiko dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Audit Internal

Direksi menetapkan fungsi Audit Internal (IA) yang bertugas memastikan penerapan ERM berjalan dengan efektif dan sesuai dengan dokumen proses bisnis perusahaan (Manual Operasi, Pedoman, Standar Prosedur Operasional dan Instruksi Kerja). IA bertindak sebagai *independent assurance function*. Peran dan tanggung jawab Audit Internal dalam implementasi manajemen risiko korporat antara lain adalah:

- a. Bekerja sama dengan manajemen senior dan/atau Dewan dalam meninjau kinerja dan implementasi Manajemen Risiko;
- b. Memberikan masukan perbaikan pada pengelolaan manajemen risiko kepada lini pertahanan pertama dan kedua, terutama terkait dengan rancangan dan implementasi sistem pengendalian internal.

- c. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebijakan dan sasaran Perusahaan.

- d. Menelaah dan memanfaatkan hasil proses Manajemen risiko dalam menjalankan audit yang berbasis risiko secara luas.

3. Fungsi *Risk Management*

Fungsi Manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management*) berada di bawah Divisi Risk Management yang mempunyai peran khusus di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kerangka kerja dan pedoman yang komprehensif;
- b. Meninjau dan memberikan masukan kepada Direksi terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- c. Mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang proses Manajemen Risiko untuk menjamin kegiatan bisnis Perusahaan yang selaras dengan strategi Manajemen Risiko melalui pelatihan dan sesi komunikasi yang memadai;
- d. Memastikan bahwa semua divisi yang terkait secara aktif terlibat dan didukung dengan implementasi Manajemen Risiko, selaras dengan kerangka kerja dan kebijakan yang ditetapkan dengan mengoordinasikan dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko di semua divisi;
- e. Memfasilitasi dan memantau proses pelaporan Manajemen Risiko dari semua divisi/fungsi;
- f. Membangun budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan dalam Perusahaan, termasuk menjalankan komunikasi yang memadai tentang kerangka kerja Manajemen Risiko;
- g. Memfasilitasi proses Manajemen Risiko secara keseluruhan;
- h. Memantau dan menyusun profil risiko yang terintegrasi dengan strategi Perusahaan
- i. Memastikan Manajemen mengembangkan rencana mitigasi risiko yang memadai; dan
- j. Menilai risiko pada proyek ketika dibutuhkan.



Unit Manajemen Risiko

4. Pengendalian pada Fungsi Bisnis dan Penunjang Bisnis

Pengendalian pada Fungsi Bisnis dan Penunjang Bisnis, dirancang dan diimplementasikan pada setiap kegiatan di seluruh organisasi sebagai tanggapan atau mitigasi terhadap risiko-risiko yang timbul. Sebagai pemilik utama dari risiko, fungsi bisnis dan penunjang bisnis bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari dari risiko yang timbul dari kegiatan mereka dengan tujuan antara lain:

- a. Memastikan implementasi kerangka kerja ERM dalam fungsinya masing-masing berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- b. Menyelaraskan rencana bisnis dan strategi untuk kerangka kerja ERM secara keseluruhan;
- c. Menciptakan kesadaran risiko dan pengendalian di unit kerja masing-masing;
- d. Memastikan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian;
- e. Mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- f. Memutakhirkan dan menyampaikan laporan registrasi risiko kepada Divisi Risk Management untuk mengidentifikasi dan memantau setiap perubahan pada lingkungan bisnis, proses atau kontrol yang mungkin berdampak terhadap eksposur risiko;
- g. Memastikan kesesuaian terhadap kerangka kerja ERM serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO 2019

Sepanjang tahun 2019, Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terimplementasi dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut telah tertuang pada Tinjauan Tahun 2019 dalam pembahasan Manajemen Risiko di bab Laporan Tata Kelola ini.

Sekretaris Perusahaan

PT PII membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



Pratomo Ismujatmika
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun bergabung dengan PT PII pada tahun 2013. Berdomisili di Jakarta.

Ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Mei 2019 berdasarkan SK Direksi Nomor 016/DRK/HC/0519. Sebelum menjabat sebagai EVP Corporate Secretary and Communication, beliau merupakan SVP Business Development and Communication serta pernah menjabat sebagai SVP Underwriting Penjaminan. Beliau juga berkarir di beberapa perusahaan di antaranya menjabat sebagai Deputy Corporate Secretary AVP MNC Bank (2011–2013), AVP-CEO Officer – Corporate Secretary MNC Bank (2011), Manager-Board Advisory-Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Tbk (2009–2011), serta Credit Analyst-Corporate Banking Group PT Bank Negara Indonesia Tbk (2006–2009).

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Surabaya pada tahun 1999, meraih gelar Master of Management dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Beliau juga pernah mengikuti Exchange Program, University of Kentucky Gatton College of Business, Lexington, KY, USA pada tahun 2003, dan meraih gelar Master of Business Administration dari Sullivan University, Lexington, Amerika Serikat pada tahun 2005.

KEDUDUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Direksi mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kesekretariatan Perusahaan. Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemangku Kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- Sebagai penghubung antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan *Stakeholders* yang berkaitan dengan Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan

- d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
- e. Mengadakan program pengenalan mengenai Perseroan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya. Program pengenalan yang dimaksud meliputi:
 - Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola oleh Perusahaan;
 - Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
 - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2019

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas yang rinciannya disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Fungsi	Pelaksanaan Tugas
Corporate Governance	Mengagendakan dan mengikuti rapat-rapat Dewan Komisaris, Direksi serta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang antara lain membahas: • Laporan <i>monitoring</i> proyek • Laporan manajemen bulanan • Pembahasan RKAP • Pembahasan agenda lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan Penanggung jawab penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan RUPS Persetujuan RKAP Tahun Buku 2020. • Penanggung jawab pelaksanaan penilaian penerapan GCG tahun buku 2019 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) • Melakukan evaluasi dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG tahun buku 2018. • Penghubung informasi antara Organ Perusahaan • Penyampaian laporan dan informasi kegiatan Perusahaan kepada Pemegang Saham • Memperbaharui Pedoman Tata Laksana Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi • Memperbaharui dokumen-dokumen pendukung GCG seperti Pakta Integritas Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai • Melaksanakan Program Pengenalan Persero terhadap Sekretaris Dewan Komisaris yang baru diangkat • Melakukan sosialisasi terkait penerapan <i>governance, risk and compliance</i> • Melakukan <i>advisory</i> bagi Direksi untuk kegiatan Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku • Melakukan kajian terhadap perubahan peraturan yang berdampak bagi Perusahaan • <i>Monitoring</i> terhadap pengendalian graftifikasi • Pengelolaan informasi pengaduan/pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>)
Biro Direksi	• Melakukan dokumentasi dan administrasi seluruh dokumen Perusahaan • Pelaksanaan dukungan terhadap kegiatan Direksi
Komunikasi untuk mendukung citra/reputasi positif Perusahaan dan menunjang relasi dengan <i>stakeholders</i>	• Perumusan Strategi Komunikasi Perusahaan • Pelaksanaan publikasi Perusahaan melalui media massa dan media sosial • Penguatan relasi dengan <i>stakeholder</i> dan mitra humas Kementerian/Lembaga/PJPK yang menunjang bisnis Perusahaan • Pengelolaan kegiatan korporasi yang mendukung penguatan citra/reputasi positif Perusahaan • Melakukan survei terhadap tingkat pemahaman <i>stakeholder</i> terhadap kegiatan usaha Perusahaan serta melakukan tindak lanjut atas hasil survei tersebut • Edukasi <i>stakeholders</i> untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap bisnis Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	• Program CSR Pembangunan Surau Al Quran Rumah Anak, Padang • Program CSR Dukungan Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren • Program CSR Pembagian Paket Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu • Program CSR Kegiatan Edukasi Jarak Jauh (Teleteaching) menghubungkan 3 Kota, Jakarta-Natuna-Papua • Kegiatan Berbagi Kebahagiaan Bulan Suci Ramadhan 1440 H/2019 M • Donasi Donasi Hewan Qurban SMV Kementerian Keuangan, Idul Adha 1440 H • Program CSR Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Terkait Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika • Program CSR Pengembangan Kualitas Pendidik Tingkat SD-SMP Terkait Proyek KPBU Tol Jakarta-Cikampek II Selatan • Program CSR Pendidikan - Sinergi SMV & Kemenkeu dalam Program Kemenkeu Mengajar • Program CSR Kesehatan - Operasi Bibir Sumbing pada Masyarakat Tidak Mampu • Kegiatan Program CSR Lingkungan - Membuat <i>Eco Brick</i>

Akuntan Publik

Audit atas Laporan Keuangan PT PII untuk tahun buku 2019 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan PT PII adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - *A member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*.

Penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berdasarkan Keputusan Sirkuler RUPS PT PII Nomor: KMK-263/KM.6/2019 tanggal 30 September 2019 dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

Penetapan Akuntan Publik

Dewan Komisaris menugaskan Direksi bersama-sama Komite Audit untuk melakukan proses pengadaan KAP menindaklanjuti pelimpahan wewenang dari RUPS kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan KAP yang akan ditunjuk untuk melakukan audit umum atas laporan keuangan PT PII tahun buku 2019 dan sesuai juga dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 1 dan 2 PMK Nomor 88 Tahun 2016.

Direksi dan Komite Audit telah melaksanakan proses pengadaan dan menetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT PII tahun buku 2019.

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) ditetapkan melalui Keputusan Sirkuler Nomor: KMK-263/KM.6/2019 tanggal 30 September 2019 Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Tahun 2019.

Periode Laporan Keuangan yang Diaudit

Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - *A member of the PricewaterhouseCoopers network of firms* dengan pendapat Tanpa Modifikasi. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - *A member of the PricewaterhouseCoopers network of firms* melakukan audit laporan keuangan tahunan Perusahaan sebanyak 10 periode. Tabel di bawah menginformasikan Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang memberikan Audit Keuangan untuk Perusahaan selama lima tahun serta biaya audit yang dikeluarkan:

Tahun	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner Penanggung jawab)	Fee (sebelum PPN)
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	864.000.000
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	800.000.000
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	674.960.000
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	649.000.000
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	570.000.000

Jasa Lain yang Diberikan KAP selain Jasa Audit Keuangan

Pada tahun 2019, selain memberikan Jasa Audit atas Laporan Keuangan kepada PT PII, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) juga memberikan jasa Audit kepatuhan yang sesuai dengan peraturan dan *internal control* (PSA 62) serta jasa Perikatan Asurans atas Indikator Kinerja Utama ("IKU") Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris.

Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko di PT PII dilakukan secara terintegrasi dengan strategi bisnis. Penerapan manajemen risiko bersifat proaktif dan memandang ke depan dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, serta memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

Pengelolaan risiko sangat penting bagi kelangsungan kegiatan usaha PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dalam menjalankan fungsi sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur, dan keberhasilan proyek tersebut. Seiring dengan berkembangnya usaha Perseroan, yaitu tidak terbatas pada penjaminan, melainkan juga pendampingan proyek yang dilaksanakan melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pengelolaan risiko sangat diperlukan sebagai upaya mitigasi. Dalam menstruktur proyek infrastruktur dengan skema KPBU, penyusunan Acuan Alokasi Risiko sangat penting. Hal itu dapat menjadi acuan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dalam menyusun rencana mitigasi risiko dalam rangka penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DASAR KEBIJAKAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) telah memiliki standar acuan dalam penerapan manajemen risiko. Kebijakan Perseroan terkait manajemen risiko dimaksud mengacu kepada:

- *Operation Manual* PT PII;
- *Enterprise Risk Management Framework* PT PII;
- *Standard Operating Procedure (SOP) Risk Management Exercise*;
- *Internasional Organization for Standardization (ISO) 31000:2009*;
- *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*.

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diadopsi oleh Perseroan dapat digambarkan melalui penjelasan sebagai berikut:

- Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari semua proses organisasi, yang harus tertanam dalam semua aktivitas, proses dan sistem, dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan;
- Manajemen Risiko adalah dinamis, berulang, responsif terhadap perubahan, dan disesuaikan sejalan dengan pencapaian tujuan Perusahaan;
- Manajemen Risiko adalah proses yang digerakkan manusia yang menciptakan tanggung jawab bersama dari seluruh personel; dan
- Manajemen Risiko adalah penggerak untuk menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dan berkelanjutan.

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko PT PII dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, di antaranya memasukkan aspek Manajemen Risiko dalam *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi, audit Manajemen Risiko, *review* implementasi dan pemantauan dan pelaporan kepada pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, Divisi Risk Management secara berkala melakukan evaluasi efektivitas sistem Manajemen Risiko korporat dengan memantau pergerakan tingkat risiko dalam profil risiko Perseroan. Hasil pemantauan tersebut akan dilihat lebih dalam lagi dengan menganalisis efektivitas rencana pengelolaan risiko yang sudah diformulasikan dan diterapkan. Hasil laporan profil risiko ini disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara berkala. KPI yang telah ditetapkan oleh Manajemen terkait dengan Manajemen Risiko, memiliki target penurunan risiko sejumlah 10% (sepuluh persen) di tahun 2019.

Pada tahun 2019 penurunan jumlah risiko telah mencapai target tersebut. Beberapa risiko mengalami penurunan tingkat risiko dikarenakan telah adanya kemajuan dari status pelaksanaan mitigasi risiko. Pemantauan kegiatan mitigasi risiko yang telah dilakukan akan terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa tingkat risikonya tidak meningkat atau membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

PENGAWASAN AKTIF DARI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Terkait dengan penerapan manajemen risiko, di setiap semester, Divisi Risk Management memberikan Laporan Manajemen Risiko dan Pemantauan atas perkembangan mitigasi risiko kepada Direktur Utama selaku Direksi yang membawahi Divisi Risk Management. Secara periodik PT PII menyampaikan Laporan Manajemen kepada Dewan Komisaris yang salah satu bagiannya memuat tentang manajemen risiko.

Pada bagian tersebut disampaikan progres dari kegiatan manajemen risiko, terutama terkait dengan status tindak lanjut pelaksanaan mitigasi. Dengan demikian, didapatkan gambaran komitmen dari PT PII untuk menurunkan tingkat risiko Perusahaan. Dewan Komisaris juga telah membentuk komite di bawahnya yaitu Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau penerapan manajemen risiko di Perusahaan serta memberikan masukan terhadap proses manajemen risiko. Divisi Risk Management secara berkala melakukan rapat dan diskusi bersama dengan Komite Pemantau Risiko untuk membahas penerapan dan program kerja terkait manajemen risiko dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan.

TUJUAN DAN KERANGKA KERJA PENERAPAN ERM

Tujuan

Penerapan ERM bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengembangkan PT PII menjadi organisasi yang tangguh menghadapi risiko dalam mencapai visi dan misi korporasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap risiko yang melekat dalam semua aktivitas bisnis PT PII;
- Untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh manajemen dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan profil risiko/pengembalian (*risk/return*) yang ditetapkan;
- Untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan menciptakan strategi dan proses yang bijaksana; dan
- Untuk meningkatkan reputasi PT PII di mata pemegang saham.

Pernyataan misi Manajemen Risiko menetapkan “*tone at the top*” yang membimbing kegiatan Manajemen Risiko di seluruh organisasi. Pernyataan misi berfungsi untuk mengomunikasikan visi, prinsip-prinsip dan mandat PT PII.

Misi dalam penerapan ERM adalah “Untuk memahami risiko utama yang dihadapi organisasi dan untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko dengan menyediakan alat dan metodologi yang tepat dalam mengelola risiko secara eksplisit. Hal ini akan mencapai pendekatan yang konsisten dalam pengelolaan risiko dalam organisasi.

Untuk mendukung pernyataan misi manajemen risiko, ERM harus mewujudkan organisasi sadar risiko melalui:

1. Pembentukan sistem manajemen berbasis risiko, yang mengelola semua risiko utama melalui praktik Manajemen Risiko yang terpasang dan melekat dalam semua kegiatan bisnis dan pengambilan keputusan;
2. Pengelolaan risiko di semua tingkat dalam organisasi;

Manajemen Risiko

3. Akuntabilitas yang jelas dan independensi dalam menjalankan tinjauan kepatuhan dan pemantauan seluruh kegiatan (semua pemilik proses bisnis); dan
4. Adopsi standar internasional yang diterima secara luas.

Kerangka

Kebijakan Perusahaan terkait manajemen risiko mengacu kepada Kerangka Manajemen Risiko dengan referensi utama yaitu ISO 31000:2009. Dokumen tersebut mendefinisikan kerangka Manajemen Risiko Korporasi PT PII, yang meliputi:

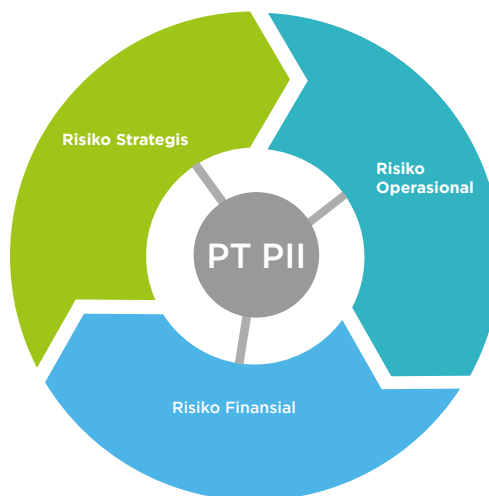
- Pembentukan prinsip dan standar umum bagi praktik Manajemen Risiko untuk memungkinkan pemahaman umum atas Manajemen Risiko ;

- Selera dan toleransi risiko (*risk appetite and tolerance*) yang disepakati oleh manajemen dalam menentukan ukuran tingkat risiko;
- Mengadopsi kerangka manajemen risiko yang mendefinisikan prasyarat bisnis umum untuk proses Manajemen Risiko; dan
- Akuntabilitas dan tanggung jawab dalam implementasi Manajemen Risiko.

Kategori Risiko

PT PII mengkategorikan risiko ke dalam kategori sebagai berikut:

- Risiko Strategis, mencakup semua risiko yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan strategi.
- Risiko Finansial, mencakup semua risiko yang terkait dengan risiko pasar dan risiko likuiditas.
- Risiko Operasional, mencakup semua risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis Perusahaan.



Taksonomi risiko (menunjukkan rincian dari sumber risiko yang mungkin terjadi) dan definisi risiko bertujuan untuk memberikan definisi risiko yang jelas dan yang tercakup dalam kerangka ERM ini adalah sebagai berikut:

1. Kategori Risiko Strategis

Risiko yang timbul dari ketidakakuratan penentuan dan pelaksanaan strategi bisnis PT PII, ketidakakuratan keputusan bisnis, atau ketidakmampuan menanggapi perubahan eksternal.

a. Strategi dan Perencanaan

Risiko yang timbul dari lemahnya konteks strategi dan isu perencanaan dari PT PII yang mungkin berdampak kepada nilai-nilai strategis PT PII dan performa sebagai sebuah organisasi.

2. Kategori Risiko Keuangan

Kategori ini mengklasifikasikan risiko yang biasanya timbul karena ketidakmampuan PT PII untuk mencapai target pendapatannya, kerugian dari penempatan dana investasi, dan ketidakmampuan PT PII untuk mendapatkan pendanaan baru, baik dari kreditur atau dari pemegang saham.

a. Pasar (e.g. tingkat bunga, kurs)

Poin ini menggabungkan risiko yang dihasilkan dari pergerakan yang merugikan dari faktor pasar yang meliputi suku bunga dan selisih kurs serta harga ekuitas.

b. Likuiditas dan Kredit

Risiko keuangan dalam kelompok ini berhubungan dengan isu likuiditas dan kredit yang terkait dengan aset dan pendapatan PT PII.

3. Kategori Risiko Operasional

Kategori ini umumnya timbul dari pelaksanaan fungsi bisnis PT PII. Risiko ini fokus pada risiko yang timbul dari orang, sistem dan proses di mana Perusahaan beroperasi (termasuk aktivitas penyediaan penjaminan sebagai bisnis utama PT PII)

a. Operasional Umum

Risiko operasional umum, umumnya terkait dengan ketidakmampuan PT PII untuk mengoperasikan fungsi bisnisnya secara efisien, yang menyebabkan kerugian operasional dari kegiatan di luar penyediaan penjaminan.

b. Penyediaan Penjaminan

Kelompok risiko ini mengklasifikasikan risiko operasional yang terkait dengan peran PT PII sebagai BUP.

c. Hukum dan Kepatuhan

Kelompok risiko ini terkait dengan ketidakpatuhan PT PII sebagai korporasi terhadap standar hukum atau regulasi yang dapat berdampak pada nilai-nilai strategis dan kinerja PT PII sebagai sebuah organisasi.

pencapaian tujuan Perusahaan. Identifikasi Risiko dari risiko pada tingkat korporasi harus dilakukan setidaknya setiap tahun atau setiap kali ada perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis PT PII dan perubahan mandat.

2. Evaluasi Risiko

Tahap selanjutnya adalah untuk mengevaluasi risiko yang telah teridentifikasi untuk mengetahui tingkat risiko dalam hal konsekuensi, kemungkinan terjadinya risiko, kecukupan pengendalian dan penyebab terjadinya risiko.

3. Penanganan Risiko

Tujuan dari penanganan risiko adalah untuk menentukan tindakan yang tepat yang dapat memberikan manfaat paling optimal bagi PT PII dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi.

4. Pemantauan Risiko

Tujuan pemantauan risiko adalah untuk memantau tingkat risiko terkini dari risiko yang teridentifikasi dan perkembangan terkini dalam pelaksanaan penanganan risiko. Pemantauan risiko harus dilakukan setidaknya setiap semester.

5. Pelaporan Risiko

Tujuan dari pelaporan risiko adalah untuk melaporkan hasil dari aktivitas Manajemen Risiko, profil serta penanganan atas risiko.

PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO YANG BERLAKU DI PERUSAHAAN

PT PII memiliki rangkaian prosedur atau proses Manajemen Risiko yang secara umum bisa dijelaskan seperti berikut ini:

1. Identifikasi Risiko

Proses Manajemen Risiko dimulai dengan identifikasi risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin berdampak terhadap

PENETAPAN TINGKAT RISIKO

Tingkat risiko sedang berarti bahwa risiko mungkin dapat diterima dengan beberapa pertimbangan tambahan mengenai manfaat yang akan diperoleh. Di bawah ini merupakan matriks tingkat risiko yang akan digunakan dalam evaluasi risiko.

Kemungkinan Risiko	Dampak Risiko dalam hal Materialisasi Risiko				
	Tidak Signifikan	Minor	Sedang	Mayor	Berbahaya
Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi



Manajemen Risiko

PEDOMAN PENANGANAN RISIKO

Penanganan Risiko merupakan kegiatan penting dalam manajemen risiko yang menentukan aktivitas selanjutnya dalam menghadapi risiko. Penentuan penanganan risiko harus dilakukan sejalan dengan selera risiko yang diterjemahkan dalam matriks tingkat risiko. Di bawah ini merupakan pedoman penanganan risiko untuk setiap tingkat risiko yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menentukan tanggapan terhadap risiko yang teridentifikasi.

Tingkat Risiko	Penanganan Risiko
Rendah	• Menerima risiko dengan pemantauan yang konstan • Minimal, kontrol detektif dapat ditentukan untuk risiko tersebut • Penanganan risiko dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, bila memungkinkan
Sedang	• Mengurangi tingkat risiko, bila dimungkinkan • Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut • Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut • Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, bila memungkinkan
Tinggi	• Mengurangi tingkat risiko, bila memungkinkan • Jika biaya dari penanganan risiko lebih dari manfaatnya, maka terima risiko tersebut • Kontrol pencegahan dapat ditentukan untuk risiko tersebut • Penanganan risiko sepenuhnya dilaksanakan secepatnya, bila memungkinkan • Mensyaratkan pemantauan risiko secara bulanan

RISIKO YANG DIHADAPI DAN UPAYA MITIGASI RISIKO

Risiko Keuangan (Pasar)

Risiko keuangan timbul sebagai akibat ketidakmampuan PT PII untuk mencapai sasaran pendapatan yang telah ditetapkan dikarenakan adanya faktor pasar. Pada tahun 2019 terjadi tren penurunan suku bunga dari 6% pada awal tahun sampai dengan 5% di akhir tahun. Tren penurunan ini berdampak kepada pendapatan investasi PT PII dikarenakan sebagian besar pendapatan berasal dari pengelolaan dana. Mitigasi atas risiko tersebut diupayakan dengan:

1. Melakukan *monitoring* atas pergerakan suku bunga secara berkala sehingga dapat dilihat tren di pasar dan mengantisipasi lebih awal.
2. Melakukan pemilihan instrument investasi dan komposisi portofolio yang memberikan *return* optimal.
3. Penempatan dana investasi secara berhati-hati dengan mengacu kepada ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Risiko Tertunda/Tidak berlanjutnya proyek KPBU

Proses bisnis dan proyek PT PII melibatkan berbagai macam stakeholders eksternal dari mulai Kementerian, Lembaga ataupun BUMN/BUMD sehingga ketergantungan PT PII terhadap pihak

eksternal dalam memproses sebuah proyek sangat tinggi. Risiko ini dapat dipicu oleh beberapa hal di antaranya Usulan Penjaminan yang disampaikan belum sesuai standar, lama disampaikan maupun adanya pergantian pejabat sektor kunci pada suatu proyek.

Mitigasi atas risiko tersebut diupayakan dengan:

1. Melakukan pendampingan serta *capacity building* untuk memberikan pemahaman dan mendapatkan komitmen dari *stakeholders* terkait
2. Memastikan dokumentasi terkait proyek (OBC, FBC, dokumen lelang dsb) telah disusun secara benar, lengkap dan berdasarkan asumsi yang memadai
3. Melakukan komunikasi intensif dengan Pejabat yang baru sehingga dapat segera mendapatkan *buy-in* terkait dengan proyek

Risiko Kapasitas dan Kecukupan Modal

Risiko di mana PT PII tidak memiliki cadangan modal yang cukup untuk mengoperasikan bisnisnya atau untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari klaim penjaminan atau risiko operasional.

Mitigasi atas risiko tersebut diupayakan dengan:

1. Memperkuat kerja sama dan hubungan dengan Kementerian Keuangan terkait dengan potensi untuk melakukan penjaminan bersama.

2. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga multilateral sebagai mitra dalam meningkatkan kapasitas penjaminan.
3. Melakukan pemantauan status proyek secara berkala dan simulasi klaim untuk memastikan kesiapan PT PII jika terdapat klaim penjaminan

PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko dilakukan terhadap keseluruhan risiko PT PII yang telah teridentifikasi sebelumnya sebagai bagian dari pengelolaan risiko. Penjaminan infrastruktur oleh PT PII menjamin kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam suatu perjanjian KPBU, di mana kewajiban ini timbul akibat risiko yang disebabkan oleh peristiwa penyebab (*triggering events*) berikut:

1. Tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal yang menurut hukum atau peraturan perundangan PJPK atau Pemerintah selain PJPK memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut;
2. Kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK;
3. Keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK; dan
4. Ketidakmampuan PJPK dalam melaksanakan satu kewajiban yang ditentukan kepadanya oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Kerja sama (*breach of contract*).

Sesuai struktur organisasi PT PII, Divisi Risk Management adalah divisi yang salah satu tugasnya memonitor pelaksanaan ERM Perusahaan. Sebagai pemilik kerangka pengelolaan risiko di PT PII, terhadap risiko penjaminan proyek, Divisi Risk Management memberikan masukan dari sudut pandang yang independen terhadap dampak dari risiko proyek dan potensi klaim penjaminan terhadap Perusahaan sebagai perusahaan.

Secara khusus, Divisi Risk Management akan melakukan tinjauan independen terhadap kepatuhan proses penilaian dan memberikan komentar independen dari perspektif risiko institusi (baik batas-batas tertentu dilampaui, atau jika ada masalah

institusi yang tidak ditangani, dan sebagainya) yang berasal dari tahap evaluasi proyek (*appraisal*) dan tahap penstrukturan penjaminan (*structuring*).

Mekanisme pemantauan penjaminan proyek harus dijalankan untuk mengidentifikasi seluruh eksposur risiko, jika ada sebelum mereka berubah menjadi klaim. Dalam hal ini, PT PII melalui Divisi Project Monitoring and Claim Management (PMCM) akan memantau profil eksposur penjaminan secara periodik melalui pemantauan terhadap upaya Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melakukan mitigasi risiko dalam implementasi proyek. Dengan demikian, mekanisme pemantauan akan membantu PT PII untuk mengambil tindakan perbaikan dan membatasi terjadinya klaim.

PT PII sebagai sebuah institusi perlu memantau eksposur peristiwa risiko operasional, antara lain:

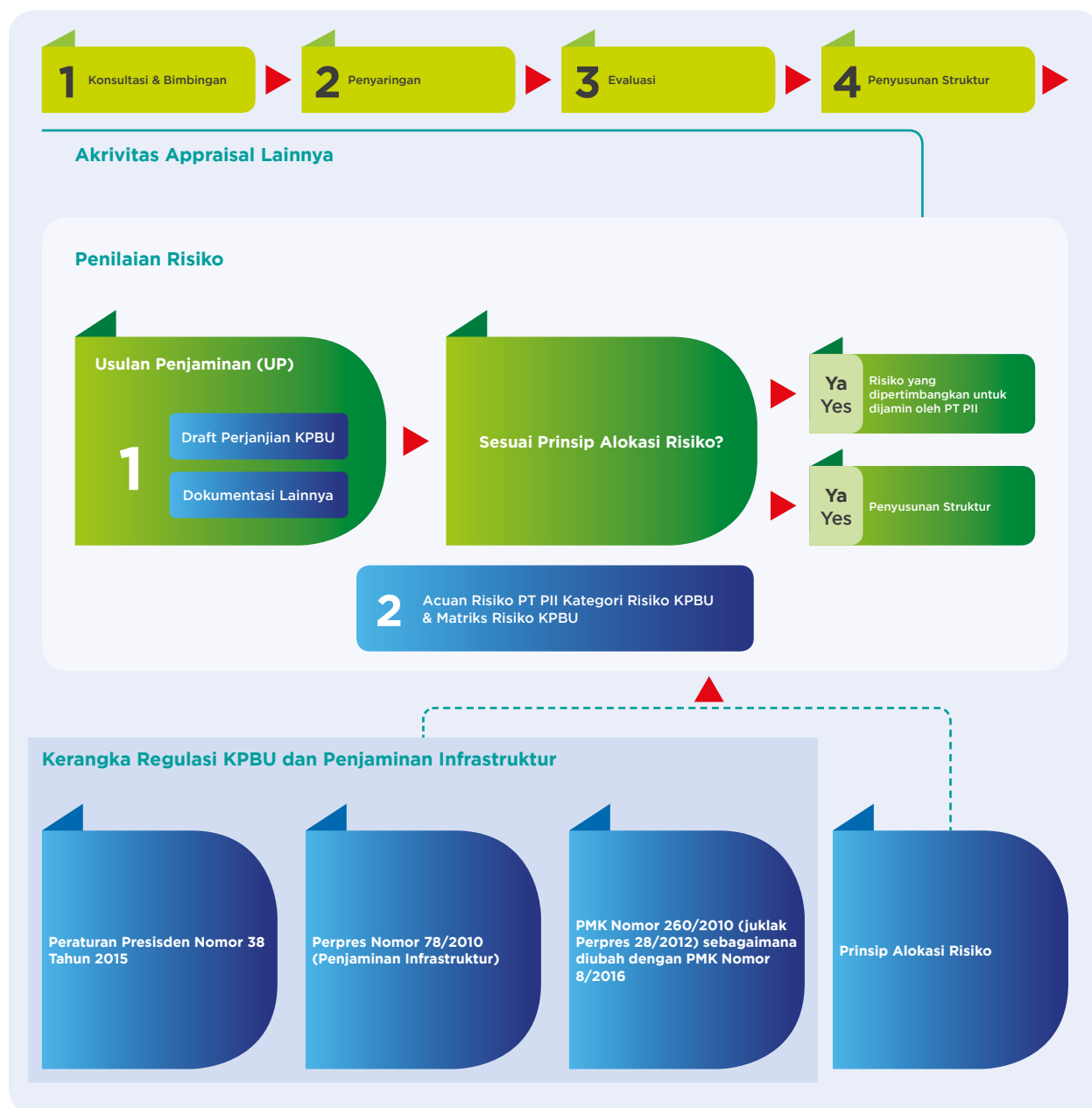
1. Risiko personil utama;
2. Risiko regulasi;
3. Kecurangan internal/eksternal;
4. Risiko proyek pipeline;
5. Risiko pengadaan;
6. Gangguan usaha;
7. Pengelolaan eksekusi, penyelesaian dan proses; dan
8. Keselamatan kerja

Terhadap risiko keuangan Perusahaan yang terkait dengan ketidakpastian pasar, PT PII melalui Divisi Treasury and Investment menerapkan kebijakan investasi yang bijaksana untuk pengelolaan dana dan untuk mencapai hasil optimal. Investasi dana yang belum dicadangkan untuk penjaminan proyek akan mengikuti norma-norma yang diatur dalam kebijakan internal Perusahaan. Norma-norma tersebut dirumuskan untuk memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mengoptimalkan pengembalian investasi tanpa mengambil risiko yang berlebihan.

Manajemen Risiko

PENILAIAN RISIKO UNTUK PENJAMINAN

Keputusan PT PII dalam penyediaan penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPBU dibuat setelah mengevaluasi, antara lain, kesesuaian *draft* perjanjian KPBU dengan prinsip alokasi risiko, seperti digambarkan dalam diagram berikut:



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan Manajemen Risiko menggunakan aplikasi komputer berbasis web yang disebut i-RISK. Aplikasi ini digunakan untuk mengotomatisasi keseluruhan proses manajemen risiko serta menampilkan *dashboard* untuk keperluan analisis dan *monitoring* risiko. Seluruh karyawan dapat memberikan input risiko pada aplikasi ini sehingga dapat mempermudah identifikasi risiko dan formulasi rencana pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Divisi serta Perusahaan.

FUNGSI KEPATUHAN PROSEDUR

Selain fungsi Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko PT PII juga mengelola Fungsi Kepatuhan Prosedur sebagai bagian dari implementasi GCG dan internal kontrol.



Standar operasional prosedur yang berbasis risiko dibangun untuk mengelola risiko dalam operasional PT PII. Kajian atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal dilakukan untuk mengawasi dan mengelola aspek kepatuhan dalam organisasi, serta memastikan bahwa Perusahaan dan karyawannya mematuhi kebijakan dan prosedur internal yang ada. Kajian ini dilakukan secara independen untuk memastikan bahwa aspek kepatuhan dalam organisasi dievaluasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

Berbeda dengan fungsi audit internal yang ditempatkan setelah transaksi, kajian atas kepatuhan (*compliance review*) dirancang sebagai salah satu alat pengelolaan risiko sebelum transaksi dilakukan. Fungsi *compliance* akan memastikan terpenuhinya prasyarat terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta proses penjaminan di dalam proyek.

Fungsi kepatuhan memberikan peringatan lebih awal kepada manajemen dalam pengawasan aspek kepatuhan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

TINJAUAN TAHUN 2019

Di tahun 2019, Divisi Manajemen Risiko telah menjalankan beberapa program kerja dalam rangka membangun PT PII menjadi organisasi yang mampu mengelola risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh Manajemen.

Divisi Manajemen Risiko memfokuskan kegiatannya di tahun 2019 untuk memberikan dukungan kepada para pemilik risiko (*Risk Owners*) dalam melaksanakan



Manajemen Risiko

kegiatan pengelolaan risiko dengan tujuan menurunkan tingkat risiko serta memastikan tingkat risiko tidak bergerak menuju tingkat yang berbahaya. Hal ini berbuah hasil dengan semakin terlihatnya pergerakan tingkat risiko ke arah yang lebih rendah yang menunjukkan kinerja pengelolaan risiko yang lebih baik, terintegrasi dan komitmen berbagai pihak di Perusahaan.

Pada tahun 2019 beberapa aktivitas utama manajemen risiko yang telah dilaksanakan yaitu:

- Melakukan pengembangan dan penyempurnaan atas Kerangka Manajemen Risiko (ERM Framework) Perusahaan dengan mengacu pada ERM Framework terkini yaitu ISO 31000:2018 dan COSO 2017 - *Integrating with Strategy and Performance*, serta mengakomodir adanya perluasan mandat;
- Melakukan tinjauan dan kajian atas perhitungan kapasitas penjaminan PT PII (*Gearing Ratio*) berkoordinasi dengan Divisi terkait serta dari Pihak Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko;
- Melakukan penyusunan *Risk Impact Analysis* sebagai bagian dari proses penerbitan *In-Principle Approval* (IPA) Proyek KPBU yang akan dijaminan;
- Melakukan proses identifikasi, penanganan, pemantauan dan pelaporan risiko perusahaan secara berkelanjutan dengan melibatkan Divisi dan karyawan;
- Memastikan proses penempatan dana investasi telah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PMK Nomor 95/PMK.08/2017 dan prosedur internal;
- Membantu melakukan pembuatan dan pengembangan Pedoman dan Prosedur terkait dengan Rencana Kontinuitas Bisnis dan Pemulihan Bencana (BCP&DRP);
- Memberikan rekomendasi terhadap penerbitan kebijakan/prosedur dari sudut pandang manajemen risiko;
- Melakukan kegiatan untuk meningkatkan awareness manajemen risiko secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan dengan menyelenggarakan Forum *Governance Risk and Compliance* (GRC) bekerjasama dengan Divisi Internal Audit.

Salah satu aktivitas rutin dan utama adalah melakukan pengkinian atas Acuan Alokasi Risiko secara periodik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan. PT PII merupakan institusi yang menjadi pionir dalam membangun dan mengembangkan acuan alokasi tersebut. Dalam menyusun struktur proyek infrastruktur dengan skema KPBU, penyusunan Acuan Alokasi Risiko sangat penting untuk menentukan porsi risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak. Acuan ini digunakan sebagai pedoman dan panduan dalam melakukan alokasi atas risiko dalam Proyek Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sehingga diharapkan dapat menghilangkan keraguan dari pihak swasta/investor.

Pada tahun 2019, beberapa penyempurnaan terkait acuan alokasi risiko di antaranya penyempurnaan struktur, narasi, penyesuaian matriks risiko KPBU serta penjelasan singkat struktur dan risiko utama potensi proyek KPBU tahun 2019.

Selain kegiatan tersebut, PT PII secara rutin ikut serta dan berpartisipasi dalam ajang *ASEAN Risk Award* yang merupakan ajang penganugerahan yang diselenggarakan oleh *Enterprise Risk Management Academy* (ERMA) dari Singapura yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan di ASEAN yang menerapkan manajemen risiko dengan berbagai ukuran bisnis, jenis industri, maupun negara asal, serta mempunyai semangat yang sama dalam meningkatkan model pengelolaan risiko yang terbaik.

Pada kesempatan tahun ini PT PII mengikuti beberapa kategori yang dikonteskan. Dari sekitar 100 perusahaan dan institusi di kawasan ASEAN, PT PII berhasil dinominasikan untuk 5 kategori yakni *GRC Award*, *Risk Champion*, *Public Initiative*, *Public Risk*, dan *Risk Educator* serta mendapatkan Juara ke-1 dari untuk tiga kategori yakni *Public Risk*, *Public Initiative & Risk Educator*.

Pencapaian tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC) di dalam Perusahaan yang telah berjalan dan ditingkatkan secara berkesinambungan. Hal tersebut juga menunjukkan peran PT PII sebagai pihak penjamin risiko yang turut serta dalam

pengembangan tata kelola dan transparansi di dalam ekosistem proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). PT PII juga berperan dalam upaya pengembangan kapasitas *stakeholders* terkait skema alternatif proyek infrastruktur dan cara mengelola risiko secara lebih efektif.

Partisipasi dalam ASEAN Risk Awards dimaksudkan untuk selalu menumbuhkan kepercayaan *stakeholders* bahwa PT PII senantiasa mengelola risiko dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan model pengelolaan risiko secara berkesinambungan serta mendorong peningkatan pengelolaan risiko sektor publik utamanya untuk pengembangan infrastruktur pemerintah.

UPAYA YANG DILAKUKAN

Sepanjang tahun 2019, sejumlah potensi risiko dihadapi oleh PT PII. Dari risiko perencanaan strategis dan anggaran, regulasi, *stakeholders*, reputasi, maupun proyek *pipeline*. Untuk mengelola tersebut, beberapa hal telah dilakukan untuk menurunkan tingkat risikonya di antaranya:

1. Konsultasi secara intensif dengan pemegang saham dan *stakeholder* terkait untuk membangun rencana strategis yang jelas, khususnya yang terkait dengan perluasan mandat;
2. Membangun rencana kapasitas penjaminan dan likuiditas yang kuat untuk memenuhi kebutuhan penjaminan di masa depan, memperluas penjaminan bersama, menetapkan strategi ekspansi modal, meninjau kebutuhan akan penanaman modal negara;
3. Terus meningkatkan kesadaran stakeholder akan model bisnis PT PII dan KPBU dan membangun hubungan yang baik dengan menyelenggarakan *capacity building*, *workshop* atau aktivitas sosialisasi lainnya;

4. Menyediakan laporan atas status kemajuan proyek serta potensi klaim secara berkala sebagai alat PT PII untuk memantau potensi risiko yang mungkin muncul di proyek secara berkala;
5. Menjalankan strategi komunikasi yang telah direncanakan dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang intensif.

RENCANA STRATEGIS 2020

Selain beberapa kegiatan rutin yang akan dilakukan seperti melakukan pengkinian atas acuan alokasi risiko, pemantauan atas risiko perusahaan, penyusunan *risk impact analysis*, berpartisipasi dalam kompetisi praktik manajemen risiko di tingkat nasional dan regional (ASEAN), melakukan *risk management awareness program* secara berkelanjutan; pada tahun 2020 Divisi Risk Management melakukan beberapa inisiatif strategis antara lain: Menyusun program penilaian atas tingkat kematangan (maturitas) penerapan Manajemen Risiko untuk mendapatkan gambaran kondisi penerapan di PT PII serta pengembangan yang diperlukan sesuai dengan sasaran jangka panjang Perusahaan:

1. Menyusun program penilaian atas tingkat kematangan (maturitas) penerapan Manajemen Risiko;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk mengakomodir pengembangan pada Kerangka Manajemen Risiko (*ERM Framework*);
3. Melakukan pengembangan dokumentasi Acuan Alokasi Risiko berbasis digital (digitalisasi) pada *website* PT PII sehingga memudahkan para *stakeholders* terkait untuk mendapatkan informasi mengenai skema bisnis dan risiko proyek yang dibutuhkan;
4. Mengkaji dan memperbaharui pedoman dan prosedur pengelolaan manajemen risiko korporat berdasarkan Kerangka Manajemen Risiko yang telah diperbaharui;
5. Pengembangan sistem manajemen anti penyuapan yang diadopsi dari ISO 37001.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan secara berkesinambungan yang dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan karyawan di setiap jenjang organisasi Perseroan. Sistem pengendalian internal di PT PII dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai efektivitas dan efisiensi operasional; keandalan pelaporan; dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan utama sistem pengendalian internal selain pada upaya mendukung tercapainya visi dan misi Perusahaan, melainkan juga untuk meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian serta menjaga kepatuhan Perseroan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. PT PII menerapkan sistem pengendalian internal sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perusahaan dan menjadi acuan kegiatan operasional Perusahaan yang sehat dan terkendali.

KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia telah memiliki Pedoman Sistem Pengendalian Internal yang di dalamnya mengatur secara rinci mengenai 5 (lima) komponen sistem pengendalian Internal Perusahaan yakni: Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Aktivitas Pengendalian (*Control Activity*), Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*), Pemantauan (*Monitoring*). Secara umum, tujuan sistem pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan (*Compliance*)

Penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha Perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perusahaan.

b. Informasi

Penerapan sistem pengendalian internal dapat

membantu dalam menyediakan laporan atau informasi yang andal, lengkap, relevan dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Operasional

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya Perusahaan dalam proses pencapaian tujuan Perusahaan.

d. Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu dalam pencegahan terjadinya kecurangan *fraud* di Perusahaan.

Aktivitas pengendalian Perusahaan dilakukan melalui, antara lain:

- Review atas kinerja Perusahaan;
- Pembinaan sumber daya manusia;
- Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- Pengendalian fisik aset;
- Pemisahan fungsi;
- Pelaksanaan atau otorisasi atas kejadian dan transaksi;
- Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi;
- Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya yang dimiliki;
- Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam sistem pengendalian internal terletak pada kemampuannya menciptakan budaya organisasi yang sehat melalui kepemimpinan, arah dan tujuan organisasi serta penetapan standar perilaku etis yang harus diteladani oleh seluruh jajaran organisasi. Perilaku dimaksud hanya dapat efektif dan dicontoh oleh seluruh insan perusahaan apabila terdapat keteladanan (*role model*) yang jelas dari manajemen perusahaan.

Penyimpangan maupun inkonsistensi keteladanan yang dilakukan pada level Dewan Komisaris dan Direksi bukan saja akan mengganggu pelaksanaan

transaksi perusahaan namun juga dapat merusak seluruh sistem pengendalian internal baik di level *governance* maupun level operasional yang telah dibangun.

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Direksi berwenang menetapkan kebijakan dan prosedur operasional di Perusahaan berupa:

1. Rencana strategis dan operasional dalam mencapai tujuan dan target-target Perusahaan.
2. Kebijakan mengatur sumber daya Perusahaan, baik SDM, aset, keuangan maupun teknologi melalui penetapan standar-standar proses dan hasil kerja serta pendelegasian tanggung jawab serta kewenangan dan distribusi informasi yang mendukungnya.
3. Kebijakan menggerakkan sumber daya Perusahaan melalui penetapan target kinerja, pembentukan budaya organisasi dan pemberian instruksi operasional.

Kumpulan kebijakan manajemen Perusahaan merupakan dokumentasi atas strategi dan cara melaksanakan proses bisnis di Perusahaan yang paling baik, paling efektif, paling mudah, paling aman, paling cepat, paling efisien, paling murah maupun paling dapat diaplikasikan pada saat ini. Dalam kapasitas ini manajemen harus memastikan adanya mekanisme penyempurnaan yang berkesinambungan atas berbagai kebijakan dan prosedur yang berlaku di Perusahaan.

Direksi memiliki tugas utama mengelola, mengarahkan dan menggerakkan serta mengontrol seluruh sumber daya Perusahaan untuk melaksanakan seluruh proses bisnis yang ada di Perusahaan sebagai upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Perusahaan. Langkah ini dimulai dengan mengidentifikasi sasaran yang harus dilalui untuk mencapai tujuan Perusahaan, diikuti dengan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta mengatur dan menggerakkan seluruh sumber daya Perusahaan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun tersebut.

Dalam menjalankan seluruh mekanisme pengendalian Perusahaan tersebut, terdapat 4 (empat) fungsi utama yang melekat dalam pelaksanaan tugas Direksi, yaitu:

1. Merencanakan (*planning*) yaitu menetapkan rencana strategis dan rencana kerja perusahaan dalam mencapai tujuannya;
2. Mengorganisasikan (*organizing*) yaitu mengatur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Perusahaan;
3. Menggerakkan (*actuating*) yaitu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan rencana tindak yang telah ditetapkan; serta
4. Mengendalikan (*controlling*) yaitu memastikan kesesuaian pelaksanaan rencana tindak oleh seluruh jajaran di Perusahaan.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, seluruh sumber daya yang dimiliki saling berinteraksi menjalankan proses bisnis Perusahaan. Proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas yang saling berintegrasi satu sama lain untuk menghasilkan keluaran tertentu yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. Perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal Perusahaan serta deviasi dari asumsi yang digunakan dalam rencana kerja seringkali menimbulkan kebutuhan untuk mengubah kebijakan strategis, rencana kerja maupun prosedur kerja di Perusahaan. Melalui mekanisme pengelolaan risiko dan penyempurnaan kebijakan prosedur organisasi, perubahan ini terus dipantau dan diantisipasi dalam tindakan korektif berupa perubahan kebijakan, rencana kerja maupun prosedur kerja di Perusahaan.

SISTEM PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KEUANGAN

Pengendalian internal Perseroan diterapkan atas dua aspek yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian internal atas operasional dan pelaporan keuangan Perusahaan dijalankan dengan mengacu pada acuan internasional COSO – *Internal Control Integrated Framework*. Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen serta karyawan

Sistem Pengendalian Internal

dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Implementasi sistem pengendalian internal PT PII mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian internal yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

COSO - *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

Sepanjang tahun 2019, PT PII telah menerapkan sistem pengendalian internal yang mengacu pada COSO sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam perusahaan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Lingkungan pengendalian mempengaruhi kesadaran akan pentingnya pengendalian oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Manajemen wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat dalam lingkungan kerjanya, diwujudkan melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

7. Perwujudan peran aparat pengawasan internal perusahaan yang efektif.

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengenali, menelaah dan menilai pengelolaan risiko yang terkait dengan usaha dan bisnis Perusahaan. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan dampak dari risiko yang teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pengendalian yang diperlukan dalam meminimalkan risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Perusahaan yang jelas dan konsisten, mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar Perusahaan dan terakhir melakukan analisis untuk mengetahui dampak dari risiko serta pengendalian yang diperlukan.

Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang ketiga. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko.

Kebijakan dibuat untuk mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur. Prosedur adalah rangkaian urutan tindakan, dilakukan satu atau beberapa orang dengan peralatan dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kegiatan pengendalian diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, sifat dari tugas dan fungsi Perusahaan, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Diutamakan pada kegiatan pokok Perusahaan.
2. Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Perusahaan atau bisnis inti Perusahaan.
4. Seluruh kegiatan memiliki kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara tertulis.
5. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan.

Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan,

kegiatan pengendalian terdiri atas:

1. *Review* atas kinerja perusahaan.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
4. Pengendalian fisik aset.
5. Penetapan dan *review* atas indikator dan ukuran kinerja.
6. Pemisahan fungsi.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencapaian yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perusahaan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa internal serta eksternal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan perusahaan dan lainnya di seluruh perusahaan yang memerlukan dalam bentuk yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional.

Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) adalah proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal Perusahaan, termasuk fungsi Audit Internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, komparasi, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam

pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review*, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal dan dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup dan frekuensi evaluasi, metodologi, dan sumber daya.

HASIL REVIEW/EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai. Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Penilaian (evaluasi) terhadap sistem pengendalian internal tingkat entitas (*Entity Level Control*) Perusahaan dijalankan oleh Audit Internal mulai 6 September 2019 sampai dengan 14 November 2019, dengan ruang lingkup penilaian mencakup seluruh proses pengendalian tingkat entitas (*Entity Level Control*) yang terdapat di dalam lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selama periode tahun 2019.

Metodologi yang digunakan dalam melakukan penilaian (evaluasi) atas penerapan sistem pengendalian internal tingkat entitas adalah sebagai berikut:

- Penelaahan dokumen dan data;
- Observasi dan wawancara dengan manajemen dan karyawan;
- Survei penerapan dengan manajemen dan karyawan;

Berdasarkan hasil penilaian (evaluasi) tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Perusahaan mencapai predikat baik. Selain itu, berdasarkan audit yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019, tidak ditemukan adanya kelemahan signifikan dalam pengendalian internal entitas.



Perkara Penting

Hingga akhir tahun 2019, PT PII, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terlibat dalam perkara hukum apapun, baik berstatus sebagai pelapor maupun terlapor. Dengan demikian PT PII tidak memiliki risiko apapun dalam masalah hukum.

Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2019, PT PII, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima sanksi administratif apapun dari otoritas terkait.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT PII secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan agar mengetahui kondisi Perseroan secara jelas dan terbuka. PT PII menyediakan beberapa sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, melalui berbagai media seperti Laporan Tahunan Perusahaan, *website* Perusahaan, media cetak, siaran pers, dan sebagainya. Selain itu, informasi tentang Perseroan dapat diakses secara langsung melalui telepon, faksimili dan e-mail.

1. Laporan Tahunan

PT PII telah mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan termasuk juga pelaksanaan pencapaian dan kegiatan usaha Perseroan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Tahunan tersebut dapat diunduh pada *website* Perusahaan.

2. Website dan Alamat Kontak Perusahaan

Melalui *website* Perusahaan www.ptpii.co.id, pemangku kepentingan dan masyarakat umum juga dapat mengakses berbagai publikasi mengenai Perusahaan, termasuk Profil Perusahaan, Laporan Tahunan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Publik juga dapat mengakses informasi langsung melalui:

Telepon : 021-5795-0550

Faksimili : 021-5795-0040

E-mail : info@iigf.co.id

3. Media Cetak

PT PII juga menyiapkan informasi dalam bentuk media cetak yang disalurkan melalui beberapa media yaitu di antaranya melalui surat kabar nasional, *company profile* dan brosur.

Benturan Kepentingan

PT PII senantiasa melaksanakan kegiatan usaha dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel, serta berkomitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT PII telah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi membuat pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan yang diperbarui setiap tahun. Kebijakan mengenai benturan kepentingan dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul di Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan bisnis Perseroan.

Kode Etik Perusahaan

PT PII memiliki dan menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman perilaku seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Kode Etik tersebut menjadi dasar sikap dan tindakan karyawan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku.

Menyadari tanggung jawab kepada *stakeholders* merupakan hal yang sangat penting, sehingga Manajemen berupaya dengan optimal untuk dapat memenuhi harapan *stakeholders* dan berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan. PT PII telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis, salah satunya dengan pengembangan dan penyempurnaan Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*).

Pedoman Kode Etik merupakan Pedoman internal Perseroan yang memuat Sistem Nilai, Etika usaha dan Etika Kerja. Pedoman ini sebagai upaya untuk menunjukkan arah yang benar dan diharapkan mampu meningkatkan motivasi, memandu sikap dan tindakan Insan PT PII, serta membentuk budaya kerja yang menjadi ciri khas PT PII. Pedoman Kode Etik PT PII telah diperbarui dan ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2018. Pedoman ini telah disampaikan kepada seluruh unit kerja yang berada di lingkungan PT PII.

TUJUAN KODE ETIK

Menjadi acuan perilaku Insan PT PII dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing maupun saat berinteraksi dengan *stakeholders*. Kewajiban melaksanakan Pedoman Kode Etik PT PII berlaku bagi seluruh Insan PT PII.



Kode Etik Perusahaan

KOMITMEN PT PII TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN

PT PII senantiasa membangun suasana yang kondusif dalam berinteraksi dengan *stakeholders* untuk mendapatkan nilai tambah bagi Perseroan dengan dilandasi itikad baik, saling percaya, konsekuen, transparan, akuntabel, kesetaraan/kewajaran, saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POKOK-POKOK/ISI KODE ETIK

Pedoman Kode Etik Perusahaan PT PII terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:

- Pendahuluan;
- Pernyataan Nilai Perusahaan;
- Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis Perusahaan;
- Petunjuk Pelaksanaan;
- Pelaporan dan Sanksi Pelanggaran.

Intisari atau pokok-pokok isi kode etik Perusahaan adalah tentang:

1. Pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Integritas;
3. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan;
4. Benturan Kepentingan;
5. Etika Profesional dalam Bekerja;
6. Etika dalam Berhubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Keterlibatan dalam aktivitas politik;
8. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
9. Pelaporan keuangan;
10. Pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;
11. Komitmen terhadap Perlindungan Aset Perusahaan;
12. Mekanisme penegakan Pedoman Kode Etik Perusahaan termasuk pelaporan dan sanksi atas pelanggaran.

PENGUNGKAPAN KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode Etik PT PII berlaku bagi seluruh level organisasi meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan tanpa pengecualian dalam melakukan hubungan

bisnis dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk karyawan yang baru direkrut akan memperoleh dokumen Kode Etik Perusahaan dan menandatangani pernyataan untuk mentaati seluruh isi Kode Etik Perusahaan. Penerapan Kode Etik menjadi salah satu komitmen Perusahaan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola, serta upaya dalam mencapai Visi dan Misi Perseroan yang telah ditetapkan.

Setiap tahun segenap Insan Perusahaan wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik Perusahaan ini dengan menandatangani Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan.

SANKSI UNTUK MASING-MASING PELANGGARAN KODE ETIK

PT PII menghormati hak membela diri dari Insan Perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan. Namun, apabila melalui penelaahan terbukti bahwa Insan Perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran, maka Insan Perusahaan tersebut akan diberikan sanksi pelanggaran yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Pihak yang berwenang di dalam Perseroan akan mengeksekusi sanksi dengan menetapkan tingkat pelanggaran, sanksi pelanggaran dan pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi, yang sesuai dengan peraturan perusahaan atau ketentuan yang berlaku. Mekanisme penanganan pelanggaran Pedoman Kode Etik dilaksanakan mengacu pada Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT PII.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK DAN SANKSI YANG DIBERIKAN PADA TAHUN 2019

Setiap pihak dapat menyampaikan laporan mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan PT PII melalui Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3). Sepanjang tahun 2019 dan 2018, tidak ada pelanggaran kode etik. Hal ini mencerminkan bahwa tren kualitas penerapan kode etik yang dilakukan PT PII dalam dua tahun terakhir telah membentuk budaya perilaku jujur sejalan dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan Budaya Perusahaan

PT PII dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi budaya yang hidup dalam organisasi PT PII. Saat ini PT PII telah memiliki nilai-nilai budaya yang dikenal sebagai InTIME, yakni *Integrity, Teamwork, Think Big, Mutual Trust* dan *Excellence*.

NILAI-NILAI UTAMA: IN TIME

Integrity/Integritas

1. Bekerja dengan standar etika tertinggi.
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain dalam segala urusan.
3. Mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak-pihak lain.
4. Menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas.
5. Mentaati aturan Perseroan.
6. Bertanggung jawab dalam seluruh tindakan.

Teamwork/Kerja Sama

1. Beroperasi sebagai sebuah tim.
2. Memberi kontribusi keterampilan dan pengetahuan demi kepentingan tim.
3. Mengutamakan kepentingan tim untuk mencapai tujuan Perseroan.

Think Big/Berpikiran Luas

1. Memiliki pemikiran luas dan mutakhir.
2. Mempertimbangkan berbagai alternatif untuk hasil yang lebih baik bagi Perusahaan dan bagi pemangku kepentingan.
3. Menggali secara terus menerus ide-ide baru untuk perkembangan Perseroan.
4. Terbuka terhadap berbagai perkembangan yang ada di lingkungan demi hasil terbaik tanpa meninggalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Mutual Trust/Saling Percaya

1. Memegang teguh etika bisnis bersama seluruh komponen internal Perseroan maupun dengan mitra Perseroan.
2. Konsisten memenuhi standar layanan yang dijanjikan.
3. Mempercayai dan menghormati satu sama lain dengan itikad baik untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan kerja dan mitra bisnis.

Excellence/Keunggulan

1. Berkomitmen untuk menjadi yang terunggul dalam melaksanakan apapun yang dilakukan.
2. Berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus.
3. Memiliki pengetahuan mendalam guna mendukung kegiatan dan mendapatkan hasil yang melebihi harapan.

Kebijakan Anti Gratifikasi

PT PII senantiasa mengutamakan pengelolaan Perusahaan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. PT PII menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, *vendor*, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga hubungan bisnis tetap berada pada koridor etika dan prinsip-prinsip GCG serta guna mewujudkan pengelolaan bisnis Perseroan yang bersih, sehat dan benar, maka Perseroan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap pengendalian gratifikasi. Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan Kode Etik Perseroan yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh pegawai Perusahaan. Perseroan juga telah memiliki Pedoman Gratifikasi yang dijadikan acuan dalam pengendalian dan pengelolaan gratifikasi.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pedoman gratifikasi adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Insan Perusahaan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi di lingkungan PT PII;
2. Sebagai bentuk tanggung jawab PT PII dalam mewujudkan pola bisnis yang sehat dan terpercaya, dengan berdasar pada pengelolaan perusahaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
3. Menghindari benturan kepentingan dari pihak tertentu yang diwujudkan melalui kebijakan formal; dan
4. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman merupakan hal-hal yang terkait dengan penerimaan dan pemberian segala bentuk gratifikasi, klasifikasi tindakan gratifikasi, batasan, serta pelaporan penerimaan dan pemberian yang berlaku bagi Insan Perusahaan dan seluruh *stakeholders*.

PRINSIP DASAR

Sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, penyusunan pedoman didasarkan oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

Transparansi

Prinsip keterbukaan ini tercermin dengan adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan PT PII. Mekanisme pelaporan tersebut merupakan sarana bagi Insan Perusahaan untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku Insan Perusahaan.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban dari Insan Perusahaan yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian yang tidak wajar dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkannya kepada fungsi yang diberikan kewenangan untuk mengelola laporan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Independensi

Bagi penerima gratifikasi yang melaporkan hasil penerimaan gratifikasi, prinsip independensi ini ditunjukkan dengan sikap menolak pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.

Perlindungan Pelapor

Pelapor pelanggaran gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (a) UU No. 30/2002. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, diwajibkan adanya perlindungan terhadap pelapor gratifikasi dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.

MEDIA PELAPORAN GRATIFIKASI

PT PII menyediakan saluran pelaporan untuk pelaporan gratifikasi, melalui:

1. *Website* PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. Melalui surat, dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place, Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710;
3. E-mail: pelaporan@iigf.co.id.

SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kebijakan pengendalian gratifikasi ini telah disosialisasikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan melalui portal internet dan *website* perusahaan. Tujuan dari sosialisasi adalah memberikan *awareness* kepada seluruh Insan Perusahaan atas peneapan Pedoman Gratifikasi yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Bersama Nomor SK-005/BOD/ CSC/1018 dan Nomor KEP-10/KOM/PII/10/2018 tentang Pedoman Gratifikasi.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2019

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat laporan gratifikasi yang diterima PT PII. Hal ini mencerminkan PT PII telah membentuk budaya perilaku jujur sejalan dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada diharapkan dapat menegah potensi terjadinya pelanggaran di lingkungan Perseroan.

Adapun rincian laporan pengendalian gratifikasi sebagai berikut:

Jenis Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan
Laporan Penerimaan Gratifikasi	Nihil
Laporan Penolakan Gratifikasi	Nihil
Laporan Pemberian Gratifikasi	Nihil
Laporan Pemberian atas Permintaan Gratifikasi	Nihil

Kebijakan Anti Korupsi

PT PII telah mengatur tentang kebijakan Anti Korupsi yang tertuang di dalam Kode Etik Perusahaan. Selain itu, dalam rangka mendukung penerapan Kebijakan Anti Korupsi, PT PII memiliki *whistleblowing system* sebagaimana dijelaskan di dalam laporan tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di dalam Laporan Tahunan ini.



Governance Risk and Compliance Forum 2019:

Catatan Akhir Tahun 2019 Praktik *Governance* di Indonesia - *Lessons to Learn*

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

KEBIJAKAN LHKPN

PT PII memiliki pedoman dalam pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-024/DIR/COS/HR/0817 tanggal 2 Agustus tahun 2017 tentang Penetapan Kebijakan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Kebijakan ini mengatur mengenai pegawai Perseroan yang wajib melaporkan harta kekayaan, tata cara penyampaian, unit kerja pengelola, hingga sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya.

PENGELOLA LHKPN

Pengelola pelaksanaan LHKPN di lingkungan PT PII adalah Unit Pengelola LHKPN atau disebut sebagai UPL (Unit Pengelola LHKPN). Koordinator UPL adalah Senior Vice President Corporate Service yang dibantu oleh Admin Instansi dan Admin Unit, yaitu karyawan yang ditunjuk berdasarkan surat tugas. Tugas Koordinator UPL adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan *monitoring* dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN para wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN.
2. Mengingatkan wajib lapor untuk mematuhi kewajiban penyampaian pengelolaan data wajib lapor.
3. Melakukan monitor terhadap Admin Instansi dan Admin Unit dalam melakukan pengelolaan data wajib lapor.
4. Memberikan atau melaksanakan koordinasi terkait pendampingan pengisian LHKPN bagi wajib lapor.
5. Mengusulkan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN atau terlambat menyampaikan LHKPN.

WAJIB LAPOR LHKPN

Wajib Lapor LHKPN adalah Pejabat Struktural di lingkungan PT PII yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris
2. Anggota Direksi

Pelaporan LHKPN Tahun 2019

Nama	Jabatan	Tanggal Lapor
Ayu Sukorini	Komisaris Utama	21 Maret 2019
M. Rahman Ritza	Komisaris	29 Maret 2019
Mariatul Aini	Komisaris	22 Maret 2019
M. Wahid Sutopo	Direktur Utama	27 Maret 2019
Salusra Satria	Direktur	29 Maret 2019



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Penerapan WBS menjadi rangkaian kebijakan Perusahaan dalam memberantas terjadinya praktik korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, serta sebagai wujud komitmen manajemen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan upaya pengendalian internal, PT PII memiliki dan mengimplementasikan kebijakan serta sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System* - WBS). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran yang disahkan oleh Direksi pada tanggal 28 Desember 2017, dan melakukan peningkatan secara bertahap baik mengenai mekanisme pelaporan hingga sosialisasi media pelaporan. Pedoman tersebut memuat aturan dan kaidah-kaidah *Whistleblowing System* yang sesuai dengan peraturan dan perundangan. WBS adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance*.

PT PII melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Penerapan WBS menjadi rangkaian kebijakan Perusahaan dalam

memberantas terjadinya praktik korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, serta sebagai wujud komitmen manajemen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari Pemangku Kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai.

1. Mendorong setiap Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan/melaporkan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur operasi, kebijakan manajemen dan hal-hal lainnya yang dipandang dapat merugikan/membahayakan Perusahaan.



2. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Perusahaan.
3. Meningkatkan keyakinan kepada setiap Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai adanya perlindungan dari hukuman, tindakan balasan dan atau perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil kepada Pelapor apabila yang bersangkutan mengungkapkan pelanggaran, dengan berdasarkan itikad baik dan bukti memadai.
4. Mendukung terwujudnya budaya keterbukaan, akuntabilitas dan integritas.
5. Meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal dan kinerja pegawai maupun organisasi.

PRINSIP DASAR PELAPORAN

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas dan Profesionalisme

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perusahaan harus berkomitmen dan mendukung sepenuhnya penerapan kebijakan Perusahaan mengenai sistem pelaporan pelanggaran, sehingga tidak ada kesempatan bagi Insan Perusahaan untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas suatu keputusan/jabatan.

2. Kerahasiaan Data dan Asas Praduga Tak Bersalah

Perusahaan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pelaporan dari masyarakat dan karyawan terkait dengan pelanggaran, penyimpangan

Sistem Pelaporan Pelanggaran

dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan Perusahaan sehingga terdapat kerahasiaan informasi dan seseorang dianggap tidak bersalah sampai terdapat bukti-bukti yang mendukung kesalahan tersebut.

3. Keadilan

Perusahaan harus sedapat mungkin bertanggung jawab dan bersikap adil terhadap pelaporan pelanggaran dan penyimpangan yang diterima oleh Perusahaan, baik menyangkut karyawan, Direksi maupun Dewan Komisaris.

4. Itikad Baik

Pengungkapan/pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari pada kehendak buruk/fitnah.

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

Pelapor menyampaikan dugaan Pelanggaran secara tertulis melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang dikelola Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3).

Apabila pelapor menarik kembali Pelaporan yang telah dilakukan, maka Pelapor wajib memberikan alasan terkait pembatalan pelaporan tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelapor anonim (tanpa identitas).

Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan fasilitas dan media komunikasi saluran pelaporan pelanggaran melalui:

1. *Website* di alamat : www.ptpii.co.id;
2. Surat yang ditujukan kepada pejabat yang berwenang dengan alamat sebagai berikut:
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Gedung Capital Place Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 18,
Jakarta 12170, Indonesia;
3. E-mail: pelaporan@iigf.co.id.

Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor

1. PT PII menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, berupa:
2. Jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor dan isi laporan selama dugaan pelanggaran belum terbukti;
3. Jaminan keamanan bagi pelapor dari internal Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan, diskriminasi, tekanan dan/atau intimidasi dalam segala bentuk serta catatan yang merugikan dalam *file* pribadi.
4. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
5. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan pelapor.

Penanganan Pelaporan

Setiap informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) akan memilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan syarat 3W1H (*What, When, Who* dan *How*).

Pada laporan yang disertai dengan identitas pelapor berikut nomor/*e-mail* yang dapat dihubungi, apabila dianggap perlu informasi tambahan, TP3 akan menghubungi pelapor secara rahasia untuk meminta informasi tambahan yang diperlukan. Namun apabila pihak pelapor tidak bersedia memberikan nomor/*e-mail* yang dapat dihubungi, maka bila Perusahaan membutuhkan informasi tambahan akan disampaikan melalui saluran pelaporan.

Apabila informasi awal dianggap sudah cukup, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyimpulkan valid atau tidaknya laporan tersebut. Pihak pelapor akan mendapatkan informasi terkait status laporannya melalui TP3. Apabila laporan yang diberikan tidak relevan dengan ruang lingkup dari kebijakan WBS, maka TP3 akan meneruskan kepada pihak atau unit terkait agar ditindaklanjuti. TP3 wajib mengadministrasikan laporan pelanggaran.

Dalam rangka pengawasan termasuk proses investigasi pengaduan, maka TP3 secara berkala melaporkan hasil pengaduan pelanggaran kepada Direktur penanggung jawab WBS. Selanjutnya dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, laporan mengenai *whistleblowing* ini disampaikan secara berkala kepada komite setingkat Komisaris, yaitu Komite Audit.

TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) adalah tim yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem Pelaporan Pelanggaran dan pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran ini. TP3 paling sedikit beranggotakan 1 (satu) orang perwakilan Divisi Audit Internal, 1 (satu) orang perwakilan Komite Audit dan 1 (satu) orang perwakilan Divisi Corporate Secretary and Communication (CSR) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris.

Sosialisasi WBS

PT PII telah melakukan sosialisasi kepada Insan Perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam rangka memberikan pemahaman tentang sistem pelaporan pelanggaran (WBS) yang dikelola secara independen. Sosialisasi dilakukan melalui portal internal dan *website* Perseroan.

JUMLAH LAPORAN DAN TINDAK LANJUTNYA TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pelaporan atas dugaan pelanggaran yang masuk dalam kategori perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, peraturan/standar terkait dan peraturan internal Perusahaan yang meliputi hal-hal sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT PII. Mengingat tidak adanya pelaporan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan, maka tidak ada yang perlu ditindak lanjuti.

Uraian	2019	2018
Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir	Nihil	Nihil
Jumlah pengaduan yang diproses pada tahun buku terakhir	Nihil	Nihil
Jumlah pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku terakhir	Nihil	Nihil
Jumlah pengaduan yang belum selesai diproses	Nihil	Nihil



Pemenuhan Penyampaian Laporan Keberlanjutan 2019

PT PII telah menyusun dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan tahun 2019 yang memuat kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial termasuk pelaksanaan program dan kegiatan CSR Perusahaan. Laporan Keberlanjutan tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Praktik *Bad Corporate Governance*

PT PII menyadari bahwa kesadaran akan pengaruh negatif atas praktik-praktik *Bad Corporate Governance* dapat mengganggu penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sepanjang tahun 2019, PT PII berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Keterangan	Praktik
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan	Nihil
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan	Nihil
Kasus terkait buruh dan karyawan	Nihil
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan <i>listed</i>	Nihil
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan <i>hardcopy</i> dengan Laporan Tahunan <i>softcopy</i>	Nihil



Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Seluruh manajemen dan karyawan PT PII menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* dan tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, PT PII senantiasa melaksanakan prinsip Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajemen dan karyawan PT PII berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, memperhatikan kesetaraan dan kewajaran yang adil serta berkesinambungan guna mencapai tujuan bisnis Perseroan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



07



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



- 280 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
- 285 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan Operasi yang Adil**
- 287 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)**
- 289 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup**
- 293 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja**



297	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Tanggung Jawab terhadap Konsumen
299	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
301	Testimoni



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sejak berdiri, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII aktif melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan melalui dukungan kepada masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar lokasi proyek infrastruktur yang didukung oleh PT PII



Dana CSR tahun 2019

Rp1,38 miliar



Pada tahun 2019, Perseroan secara kumulatif mengalokasikan dana sebesar Rp1,38 miliar,

Sejak berdiri, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII aktif melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai bentuk kepedulian perusahaan melalui dukungan kepada masyarakat dan lingkungan yang berada di sekitar lokasi proyek infrastruktur yang didukung oleh PT PII.

DASAR PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha, PT PII memiliki komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan. Komitmen ini diwujudkan, antara lain, melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Program dan kegiatan CSR Perseroan diselenggarakan dengan senantiasa bertujuan untuk memberikan manfaat luas terhadap masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Bagi Perseroan, CSR menjadi bentuk kepedulian secara berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan CSR yang efektif dan efisien, serta sejalan dengan strategi bisnis, PT PII melakukan berbagai upaya, di antaranya menyelaraskan kegiatan CSR Perseroan dengan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/regulator, seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan



Program CSR Lingkungan-Membuat Eco Brick

Kemudian, Perseroan juga tengah berupaya untuk melaksanakan sistem keuangan berkelanjutan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup. Meskipun bukan perusahaan terbuka, PT PII menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia merupakan implementasi dari Peraturan POJK No.51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menjadi salah satu upaya Perseroan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelaksanaan program dan kegiatan CSR Perseroan tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan bentuk komitmen Perseroan untuk menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat dan lingkungan sekitar serta terlibat dalam pembangunan berkelanjutan. PT PII menginginkan agar keberadaannya dapat membawa dampak positif yang berkesinambungan bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selaras dengan visi Perseroan, untuk menjadi BUMN penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, PT PII berharap kehadirannya dapat berkontribusi terhadap bangsa dan negara Indonesia. PT PII meyakini

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

implementasi CSR dalam jangka panjang akan memberikan banyak manfaat bagi PT PII, terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada akhirnya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perseroan.

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi CSR yang sesuai dengan Visi dan Misi Keuangan Berkelanjutan, PT PII membangun sinergi dengan pihak internal dan eksternal. Sinergi tersebut antara lain diwujudkan melalui kerja sama dalam melaksanakan kegiatan CSR, sehingga dampak dari kegiatan CSR dapat lebih efektif, memiliki jangkauan yang lebih luas, serta menimbulkan dampak positif yang lebih kuat bagi masyarakat.

PT PII melaksanakan CSR dengan merujuk pada empat pilar utama kegiatan yang menjadi target penting dalam aktivitas CSR Perseroan, yaitu: Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sosial dan Budaya, serta Lingkungan. Selain itu, di luar Empat Pilar Utama tersebut, PT PII juga melaksanakan program-program CSR lain seperti donasi dan partisipasi *sponsorship*. Hal ini merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menjaga *relation* dan *engagement* dengan masyarakat, lingkungan maupun para pemangku kepentingan.

STRUKTUR PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung jawab pengelolaan program CSR di PT PII dilakukan oleh Divisi Corporate Secretary and Communication yang berada di bawah pengawasan Direksi. Divisi Corporate Secretary and Communication menyusun program CSR yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan mitra kerja pihak ketiga, yaitu akademik, instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan nasional dan lembaga sosial lokal sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program. Adapun terkait dengan aspek ketenagakerjaan dan tanggung jawab terhadap konsumen, dalam hal ini dikoordinasikan oleh Divisi Human Capital dan divisi terkait lainnya.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Komitmen dan Kebijakan

PT PII sebagai entitas bisnis memiliki komitmen untuk Indonesia yang lebih baik, mengemban tugas moral untuk mengembangkan kegiatan usaha pada saat yang sama turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian dalam negeri. Perseroan juga senantiasa melayani seluruh pemangku kepentingan dengan penuh integritas, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis.

Lebih lanjut, PT PII senantiasa memastikan bahwa operasional Perseroan senantiasa ramah terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola. Perseroan menyadari peran penting untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Karena itu, Perseroan akan terus berusaha untuk memahami kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda, dengan tetap memperhatikan dampak dari operasional bisnis. Selain itu, Perseroan secara berkala akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan atas proses keberlanjutan di dalam operasional bisnis Perusahaan dan perilaku investasi sehingga dapat mengelola risiko secara tepat, termasuk berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial di tempat Perseroan melakukan penjaminan terhadap proyek infrastruktur.

Metode dan Lingkup *Due Diligence* terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perseroan

PT PII secara mendalam melakukan *due diligence* atas dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas bisnis penjaminan infrastruktur yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam *due diligence* tersebut, Perseroan melihat dampak sosial dari aktivitas bisnis terdapat dalam beberapa dimensi di antaranya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dampak sosial terhadap masyarakat dilakukan dengan melaksanakan kebijakan tanggung jawab sosial yang memberikan dampak secara langsung bagi kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada aspek sosial kemasyarakatan juga diarahkan pada program yang bersifat memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi sekitar Perseroan berkegiatan.



Terkait dengan dampak ekonomi, Perseroan setiap tahun telah menyusun rencana jangka panjang perusahaan yang mengarah pada pemenuhan target-target yang telah ditetapkan.

Terkait dengan dampak lingkungan, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan lingkungan, di antaranya pelaksanaan Program Membuat *Eco Brick* dengan tujuan mendidik anak-anak peserta sekolah dasar (SD) menanamkan kebiasaan baik mencintai lingkungan di usia dini serta memberikan edukasi tentang lingkungan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan salah satu solusinya mengurangi sampah plastik, yaitu dengan mengolah limbah plastik menjadi *eco brick* sekaligus mengurangi risiko bencana.

Stakeholder Penting Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

PT PII melakukan pemetaan terhadap Pemangku Kepentingan berdasarkan tiga kriteria yang berkaitan erat dengan keberlanjutan bisnis Perseroan meliputi: keabsahan (*legitimacy*), kedekatan fisik (*proximity*) dan urgensi (*urgency*). Pemangku kepentingan prioritas dan metode pelibatangannya dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan meliputi:

- Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
- Karyawan
- Serikat karyawan
- Regulator
- Media

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Melebihi Kewajiban serta Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan dan Relevansinya dengan Bisnis Perusahaan

Perseroan senantiasa mematuhi Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di samping itu, Perseroan juga berupaya untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Peraturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan CSR Perseroan, meskipun belum terdapat penjelasan khusus mengenai ruang lingkup kegiatan CSR minimum dan kegiatan yang merupakan kewajiban bagi Perseroan. Namun demikian, Perseroan melaksanakan seluruh kegiatan CSR dan mengintegrasikannya dengan kegiatan usaha Perusahaan yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal serta dampak positif yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan.

Strategi dan Program Kerja Perusahaan dalam Menangani Isu Sosial Ekonomi dan Lingkungan

Strategi dan program kerja Perseroan dalam menangani isu sosial, ekonomi dan lingkungan, dilakukan dengan melakukan beberapa pendekatan, di antaranya:

- Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia termasuk tersedianya *set skill* baru karyawan yang dibutuhkan untuk merespons isu sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan,
- Menyusun kebijakan atau standar prosedur operasi dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis Perseroan,
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran melalui empat pilar utama kegiatan CSR.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

ANGGARAN DAN LINGKUP KEGIATAN CSR

PT PII memiliki empat pilar utama kegiatan yang menjadi target penting dalam aktivitas CSR Perseroan, yaitu: Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sosial dan Budaya, serta Lingkungan. PT PII juga melaksanakan program-program CSR lain seperti donasi dan partisipasi *sponsorship*, sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menjaga relation dan *engagement* dengan masyarakat, lingkungan maupun para pemangku kepentingan. Penjelasan program dan kegiatan masing-masing pilar tersebut diungkapkan dalam pembahasan selanjutnya dari laporan ini.

Pada tahun 2019, Perseroan secara kumulatif mengalokasikan dana sebesar Rp1,38 miliar, dengan alokasi penyaluran dana sebagai berikut:

No	Deskripsi Kegiatan CSR	Lokasi	Biaya yang Dikeluarkan (Rp)
1	Program CSR Pembangunan Surau Al Quran Rumah Anak, Padang	Padang	25.000.000
2	Program CSR Dukungan Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren	Tangerang Selatan	16.380.000
3	Program CSR Pembagian Paket Sembako untuk Masyarakat Tidak Mampu	Oku Timur	30.000.000
4	Program CSR Kegiatan Edukasi Jarak Jauh (<i>Teleteaching</i>) menghubungkan 3 kota, Jakarta-Natuna-Papua	Jakarta, Natuna, Papua	87.063.225
5	Kegiatan Berbagi Kebahagiaan Bulan Suci Ramadhan 1440 H/2019 M	Sesuai proposal	250.000.000
6	Donasi Hewan Qurban SMV Kementerian Keuangan, Idul Adha 1440 H	Jakarta	49.500.000
7	Program CSR Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Terkait Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Mandalika	199.638.000
8	Program CSR Pengembangan Kualitas Pendidik Tingkat SD-SMP Terkait Proyek KPBU Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	Bekasi	199.268.060
9	Program CSR Pendidikan - Sinergi SMV & Kemenkeu dalam Program Kemenkeu Mengajar	Jakarta	125.654.000
10	Program CSR Kesehatan - Operasi Bibir Sumbing pada Masyarakat Tidak Mampu	Lampung	195.850.000
11	Program CSR Lingkungan - Membuat <i>Eco Brick</i>	Jakarta	200.000.000
Jumlah Biaya CSR Sosial dan Kemasyarakatan			1.378.353.285

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan Operasi yang Adil



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Tanggung jawab sosial terkait dengan operasi yang adil merupakan salah satu subyek inti dalam ISO 26000. Dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan usaha yang adil, selain mengacu pada pedoman tersebut, PT PII juga menjalankan berbagai kebijakan internal yang bertujuan untuk memastikan terealisasinya operasi yang adil, di antaranya pemenuhan kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, komitmen dan kebijakan Perseroan dalam pelaksanaan CSR terkait dengan operasional bisnis yang adil tertuang dalam berbagai rumusan kebijakan. Praktik operasi yang adil menyangkut perilaku etis dalam hubungan Perseroan dengan perusahaan lain, termasuk juga hubungan dengan lembaga pemerintah, serta mitra bisnis.

PROSEDUR DAN MEKANISME DALAM MENANGANI KONFLIK TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perseroan memiliki prosedur dan mekanisme penanganan konflik/pengaduan serta pengelolaan

pengaduan eksternal sebagai berikut:

1. Staf Divisi Corporate Secretary and Communication sebagai *administrator*, menerima informasi dari pihak eksternal yang disampaikan melalui form Pengaduan dalam *website* PT PII dan melakukan pencatatan.
2. *Administrator* mengidentifikasi dan menyampaikan kepada divisi terkait yang memiliki kapasitas untuk menjawab/menindaklanjuti Pengaduan tersebut. Divisi-divisi yang ditujukan untuk menjawab/menindaklanjuti Pengaduan meliputi Divisi Project Monitoring and Claim Management, Divisi Underwriting Penjaminan, Divisi Environment and Social dan Divisi IIGF Institute.
3. Divisi terkait memberikan data/informasi sebagai jawaban/tanggapan atas Pengaduan yang dimaksud.
4. Divisi Corporate Secretary and Communication (fungsi corporate legal dan komunikasi) mengelola jawaban/tanggapan Pengaduan untuk memeriksa kelayakan konten dari sisi legal sebagai informasi yang dapat disampaikan kepada pihak eksternal.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait dengan Operasi yang Adil

5. Pimpinan Divisi Corporate Secretary and Communication memeriksa dan menyetujui konten hasil pengelolaan jawaban/tanggapan Pengaduan yang telah dirancang untuk disampaikan kepada pihak eksternal yang menyampaikan Pengaduan.
6. Staf Divisi Corporate Secretary and Communication sebagai *administrator*, menyampaikan jawaban/tanggapan atas Pengaduan yang telah disetujui Pimpinan Divisi Corporate Secretary and Communication kepada pihak eksternal yang menyampaikan Pengaduan melalui alamat email yang dituliskan dalam Form Pengaduan.
7. *Administrator* melakukan pencatatan Pengaduan dan tindak lanjutnya untuk dilaporkan kepada Direktur Utama dalam Laporan Sekretaris Perusahaan.

UPAYA PERUSAHAAN MEMPROMOSIKAN OPERASI YANG ADIL

Upaya mempromosikan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil dilaksanakan dengan menekankan pada upaya pencegahan benturan kepentingan serta penerapan anti korupsi. Penerapan anti korupsi diwujudkan melalui pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS), *Code of Conduct* serta kebijakan terkait lainnya.

Kegiatan dan Capaian

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang secara konsisten dilaksanakan oleh Perseroan meliputi berbagai hal. Dalam kegiatan usaha Perseroan, inisiatif praktik operasi yang adil terlihat pada kebijakan Perseroan terkait dengan penerapan WBS, anti korupsi, independensi dalam proses politik, pengadaan barang dan jasa, perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan hubungannya dengan perusahaan atau lembaga lain serta menghormati hak kekayaan intelektual atau hak cipta.

Implementasi WBS

Salah satu capaian Perseroan dari pelaksanaan kegiatan operasi yang adil pada tahun 2019 adalah tidak adanya pengaduan melalui WBS yang diterima, baik dari pegawai maupun pemangku kepentingan lainnya terkait praktik ketidakadilan yang berdampak material. Dengan demikian, sepanjang tahun 2019, secara tidak langsung Perseroan telah melaksanakan ISO 26000 melalui kegiatan operasional bisnis.

Hubungan dengan Mitra Kerja dan Organisasi Lain

Terkait dengan mitra kerja, Perseroan senantiasa berupaya untuk terus mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta citra negatif dalam berhubungan dengan mitra kerja. Dalam hubungannya dengan organisasi lain, Perseroan sepanjang tahun 2019 menghindarkan diri dari segala bentuk kolaborasi/persekutuan yang tidak patut dengan pihak lain.

Dalam hal *fair competition*, Perseroan secara berkelanjutan terus melakukan inovasi dan efisiensi, mengurangi beban usaha, dalam rangka mendorong pertumbuhan kinerja. Selain itu, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang konsisten sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta mempromosikan kesadaran karyawan tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan persaingan yang adil. Lebih lanjut, Perseroan juga senantiasa memperhatikan konteks sosial di mana Perseroan berkegiatan dan tidak memanfaatkan kondisi sosial untuk mencapai keuntungan yang tidak adil.

Inisiatif Anti Korupsi

Inisiatif anti korupsi Perseroan tertuang dalam berbagai kebijakan. Di samping itu, Perseroan juga terus mengoptimalkan adanya program-program yang efektif guna mendukung penerapan Kebijakan Anti Suap dan Korupsi serta benturan kepentingan di lingkungan PT PII.

Kegiatan dan Capaian Operasi yang Adil Lainnya

Dalam hal partisipasi politik, Perseroan menerapkan kebijakan internal yang melarang keterlibatan Perseroan maupun karyawan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Perseroan menerapkan kebijakan ini dalam rangka menjaga independensi dan profesionalisme Perusahaan dan karyawan.

Perseroan juga menerapkan inisiatif operasi yang adil dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pengadaan barang dan jasa. Perseroan mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan obyektif sehingga semua mitra kerja atau rekanan diperlakukan secara *fair* dan wajar.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)



Program CSR Pengembangan Kualitas Pendidik Tingkat SD-SMP

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perseroan memiliki kebijakan, rumusan, serta perencanaan kegiatan operasional yang senantiasa menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Sejalan dengan ISO 26000, bagi PT PII HAM bersifat inheren, tidak dapat dicabut, universal, tidak terpisahkan dan saling tergantung (*inherent, inalienable, universal, indivisible and interdependent*). Menjalankan aspek HAM memiliki arti bahwa Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip untuk tidak melanggar hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

ISU HAM YANG TERKAIT KEGIATAN ATAU YANG RELEVAN DENGAN BISNIS PERUSAHAAN

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, di antaranya berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerjaan jika ada sesuatu hal.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM)

RISIKO PERUSAHAAN DAN RISIKO PADA *STAKEHOLDERS* TERKAIT PELANGGARAN HAM

Terkait dengan HAM, Perseroan memberikan perhatian khusus jika melihat potensi dampak bisnis terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Mengantisipasi hal ini, Perseroan melakukan berbagai upaya yang dibutuhkan di antaranya menjalankan kebijakan pemenuhan hak karyawan dan mitra kerja.

MEKANISME DAN PROSEDUR PENERAPAN HAM PADA *STAKEHOLDERS*

Perseroan memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban untuk menghormati HAM. Menghormati HAM secara sempit dapat dimaknai bahwa Perseroan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu hak dan kebebasan karyawan serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam arti luas, Perseroan akan mengambil langkah-langkah secara aktif dan tegas terkait HAM seperti mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan pelanggaran serta penegakan HAM melalui uji tuntas yang tepat (*due diligence*) dalam setiap kegiatan operasi dan hubungan bisnisnya.

JANGKAUAN DAN LINGKUP HAM SERTA KEGIATAN TERKAIT PELAKSANAAN HAM

Inisiatif yang dilakukan Perseroan untuk menjunjung tinggi aspek HAM di antaranya terlihat dalam proses rekrutmen. Perseroan memberikan kesempatan kepada kandidat-kandidat terbaik untuk bergabung dan membangun karir bersama PT PII tanpa diskriminasi. Rekrutmen yang dilakukan dilandasi oleh prinsip dan asas kesetaraan tanpa membedakan aspek *gender*, suku, ras, agama yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku baik di internal maupun peraturan-peraturan eksternal. Perseroan juga mengimplementasikan prinsip HAM dalam hal pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan, serikat kerja serta hal terkait lainnya dengan bidang ketenagakerjaan. Di samping itu, Perseroan juga menjamin bahwa seluruh karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan usaha Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, PT PII berkomitmen untuk mendukung upaya pelestarian alam dan ekosistem yang terkandung di dalamnya untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan usaha. Di samping itu, Perseroan juga terus berupaya menjalankan komitmen yang berfokus pada bidang lingkungan hidup sesuai dengan prinsip *sustainability*/keberlanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan inisiatif yang berwawasan lingkungan.

PT PII berkomitmen untuk ikut terlibat pada upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, PT PII senantiasa memastikan agar dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kebijakan Perseroan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal PT PII. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk himbauan dan Peraturan Perusahaan dalam rangka meminimalisasi dampak operasional Perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Sebagai bentuk komitmen kepedulian PT PII terhadap lingkungan hidup, PT PII juga melakukan penilaian atas pemenuhan prinsip-prinsip lingkungan dan sosial terhadap proyek yang akan dijamin. Penilaian dilakukan berdasarkan kebijakan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang tertuang dalam Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial, yaitu:

- Penilaian Lingkungan dan Sosial
- Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
- Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi
- Kesehatan dan Keamanan Masyarakat
- Pengadaan Tanah dan Pemindahan Terpaksa
- Perlindungan Keragaman Hayati
- Warisan Budaya
- Masyarakat Adat

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup

Tujuan dari Kebijakan Lingkungan dan Sosial tersebut untuk memastikan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) memenuhi seluruh Peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Indonesia terkait perlindungan lingkungan dan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh proyek-proyek yang diberikan penjaminan oleh PII, dibangun dan dioperasikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku secara berkelanjutan selama dijamin oleh PT PII. Kebijakan tersebut juga mengarah pada upaya Perseroan untuk memitigasi risiko lingkungan dan sosial proyek-proyek yang dijamin dilakukan melalui tindakan perbaikan yang disepakati dan dilakukan oleh pihak terkait.

TARGET KEGIATAN

Target pelaksanaan CSR Perseroan bidang lingkungan hidup pada tahun 2019 antara lain menjalankan kebijakan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan internal Perseroan. Di samping itu, berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan, Perseroan menargetkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan bisnis yang dapat mendorong keberlanjutan usaha antara lain melalui pelaksanaan efisiensi serta kegiatan yang mendukung aspek ramah lingkungan. Perseroan juga menargetkan untuk melaksanakan kegiatan CRS lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

ISU-ISU LINGKUNGAN TERKAIT KEGIATAN USAHA

PT PII berkomitmen agar dalam setiap kegiatan penjaminan infrastruktur selalu berpegang pada ketentuan yang berlaku untuk menghindari kegiatan usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan.

Perseroan juga menargetkan kegiatan penghematan energi dan pengurangan emisi. Upaya ini merupakan bentuk nyata kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kantor pusat dalam mendukung pengelolaan kantor yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, manajemen beserta seluruh karyawan berupaya menerapkan berbagai program penghematan seperti hemat kertas, hemat listrik, dan

hemat air melalui sosialisasi dan anjuran. Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Perseroan.

Dalam operasional bisnis, Perseroan berkomitmen untuk melakukan penghematan pemakaian sumber daya energi dan SDA sesuai dengan Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan dengan cara memastikan proyek yang akan diberikan penjaminan telah memenuhi prinsip Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi yaitu telah berkomitmen dan berupaya untuk:

- Mencegah polusi dan mengelola dampak yang timbul dari proyek;
- Memastikan kesesuaian proyek dengan standar yang ada dan praktik terbaik;
- Mengedepankan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.

JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN TERHADAP STAKEHOLDERS TERKAIT ISU LINGKUNGAN

Jangkauan lingkup pengaruh dan dukungan Perseroan terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan usaha Perseroan baik itu operasional di Kantor Pusat maupun kegiatan bisnisnya di daerah proyek. PT PII berperan dalam penanganan isu lingkungan dan sosial di level proyek pada forum Tim Pemantauan Bersama/*Joint Monitoring Committee* dimana membantu para *stakeholder* dalam merumuskan solusi atas isu atau kendala proyek, termasuk isu-isu lingkungan. Salah satu mekanisme dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial adalah melakukan pemantauan risiko dengan *tools RMR* dan *Key Risk Indicator* (KRI).

1. PT PII berkomitmen dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam menjalankan bisnisnya, dimana salah satu pertimbangan dalam pemberian penjaminan adalah kelayakan aspek lingkungan dan sosial.
2. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan dengan menyusun Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial sebagai pedoman untuk memastikan penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur telah mengelola risiko-risiko

lingkungan dan sosial dengan tepat. Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia dan *best practice* yang ada dan dilakukan *review* secara berkala. Oleh sebab itu, *review* terhadap pemenuhan regulasi lingkungan hidup telah dilakukan secara berkala untuk memastikan proses bisnis telah memenuhi regulasi yang berlaku.

Terkait dengan *Stakeholder*, PT PII memastikan penjaminan yang diberikan terhadap proyek infrastruktur telah memenuhi Prinsip Penilaian Lingkungan dan Sosial yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Penapisan dan kategorisasi proyek
- Penilaian lingkungan dan sosial
- Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- Kapasitas Penanggung Jawab Proyek
- Keterlibatan pemangku kepentingan (*Stakeholder*)
- Pengelolaan Keluhan
- Pelaporan

Perumusan tanggung Jawab sosial dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria di atas dan keterlibatan *stakeholder* yang menentukan keberhasilan proyek. Hal ini dilakukan agar program-program yang disusun untuk tanggung Jawab sosial berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan dampak lingkungan dan sosial proyek serta mempertimbangkan masukan dan kepentingan dari *stakeholder*.

Terkait isu-isu lingkungan dan sosial yang terjadi terkait bisnis yang dilakukan PT PII, hingga saat ini masih pada tingkatan proyek yang dijamin dimana Penanggung Jawab Proyek telah memiliki sistem dalam mengelola isu-isu tersebut. Beberapa isu penting yang terkait proyek di antaranya:

- Penolakan masyarakat atau instansi yang asetnya terkena proyek infrastruktur sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap proyek tersebut;
- Keberatan atas nilai kompensasi atau ganti rugi atas aset yang terkena proyek meskipun penilaian kompensasi tersebut telah dilakukan oleh *independent appraisal*; serta
- Gangguan kenyamanan atas layanan fasilitas umum atau fasilitas sosial karena terdampak oleh proyek, terutama pada saat konstruksi berlangsung.

RISIKO LINGKUNGAN TERKAIT KEGIATAN USAHA DAN DAMPAKNYA

Pada proses penjaminan PT PII, aspek lingkungan dan sosial menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dan dianalisis pada tahapan penilaian kelayakan proyek serta merupakan hal yang akan dimonitor selama masa penjaminan. Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang telah memuat Prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial PT PII sebagai pedoman dalam melakukan penilaian risiko lingkungan dan sosial yang akan dijamin.

Pada proses penilaian risiko tersebut, PT PII akan melakukan analisis dampak lingkungan dan memberikan masukan kepada Penanggung Jawab Proyek sehingga dapat disusun Rencana Mitigasi Risiko (RMR) yang realistis untuk diimplementasikan. Salah satu risiko yang dijamin PT PII adalah pengadaan tanah proyek dimana pengelolaan isu-isu sosial proyek menjadi kunci sukses dalam keberhasilan pengadaan tanah. Oleh sebab itu, penguatan identifikasi risiko pada tahap penyiapan proyek dan rencana mitigasi risiko merupakan salah satu kunci sukses dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, PT PII melakukan monitoring terhadap isu/kendala yang dihadapi proyek yang dijamin termasuk isu-isu lingkungan dan sosial dengan berkoordinasi bersama PJPK.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN DAN PENGANGAN KEADAAN DARURAT KESELAMATAN DAN KONFLIK LINGKUNGAN

PT PII menjalankan kegiatan bisnis untuk melakukan penjaminan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan isu lingkungan dan sosial di level proyek. Meski demikian, PT PII terlibat dalam Tim Pemantauan Bersama (*Joint Monitoring Committee*) sebagai forum koordinasi antar *stakeholder* untuk membahas kendala atau isu proyek, salah satunya aspek lingkungan dan sosial. Forum ini akan membahas dan menyepakati penyelesaian isu atau kendala-kendala proyek.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup

Selain itu, PT PII telah membangun mekanisme pengelolaan keluhan dari *stakeholder* yang terdapat di *website* Perseroan yakni <https://ptpii.co.id/id/pengaduan>. Keluhan atas operasional PT PII dapat disampaikan melalui saluran dalam *website* tersebut. Keluhan yang terkait aspek lingkungan dan sosial akan diteruskan ke Divisi Environmental and Social (ENS) dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penanganan keadaan darurat atas keselamatan lingkungan dan konflik lingkungan di level proyek menjadi tanggung Jawab Badan Usaha Pelaksana (BUP) sesuai dengan lingkup tanggung jawab dalam perjanjian proyek yang disepakati bersama. PT PII sendiri telah memiliki mekanisme pengelolaan keluhan untuk menjadi salah satu media penyampaian keluhan terhadap proyek yang dijamin oleh PT PII. *Tools* yang digunakan oleh Penanggung Jawab proyek dalam mengelola aspek keselamatan lingkungan dan konflik lingkungan adalah kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), dan Rencana Mitigasi Risiko yang telah memuat rencana pengelolaan dan pemantauan dampak.

Perseroan senantiasa menanggulangi seluruh pengaduan yang diberikan dan dilengkapi dengan sistem pencatatan pengaduan sehingga setiap pengaduan yang tercatat dapat termonitor serta langsung dieskalasi ke unit terkait untuk segera ditangani dan diselesaikan. Selama tahun 2019, Perseroan tidak menerima pengaduan terkait masalah lingkungan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada tahun 2019, PT PII menyelenggarakan program kegiatan CSR di bidang lingkungan hidup melalui beragam kegiatan, antara lain:

1. Program Hemat Kertas dengan Memaksimalkan Penggunaan *e-mail* (*Soft Copy*)

PT PII terus mengurangi intensitas penggunaan kertas dengan memaksimalkan penggunaan *e-mail* (*soft copy*) dalam setiap bentuk komunikasi antar unit kerja di lingkungan Perseroan. Dengan program ini, diharapkan tercipta budaya *paperless* di lingkungan Perseroan.

2. Penggunaan Kertas Bekas ataupun Melaksanakan Cetak Bolak-balik

Dengan program ini diharapkan dapat meminimalisir kegiatan untuk melakukan pencetakan. Pencetakan menggunakan kertas hanya dilakukan bila hal tersebut sudah dianggap final, sementara hal-hal yang masih bersifat *draft*, pencetakan dilakukan menggunakan cetak bolak-balik.

3. Penghematan Listrik dan Air

PT PII mengimbau untuk melakukan penghematan listrik dengan melakukan sosialisasi dan anjuran untuk mematikan lampu dan listrik apabila tidak terpakai. Begitu pun dengan pemakaian air diharapkan untuk tidak boros dalam penggunaannya.

4. Untuk mengurangi penggunaan masalah plastik

PT PII secara berkelanjutan meneruskan kebiasaan baik yaitu mengganti botol air minum dalam kemasan yang sebelumnya dibagikan ke meja karyawan dengan beralih menggunakan botol *tumbler*.

5. Untuk menumbuhkan kesadaran peduli dan mencintai kebersihan

PT PII memberikan pelatihan tentang pentingnya membuang sampah sembarangan di beberapa tempat yang terletak dekat dengan proyek pembangunan yang dijamin Perseroan. Selain itu PT PII juga melakukan penanaman bibit pohon yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.

6. Pembuatan *Eco Brick*

PII telah melaksanakan kegiatan dalam Program Membuat *Eco Brick* dengan melibatkan target peserta sebanyak seribu (1.000) pelajar SD yang tersebar pada tiga sekolah di Jakarta Selatan dengan tujuan mendidik anak-anak peserta sekolah dasar (SD) menanamkan kebiasaan baik mencintai lingkungan dimulai usia dini serta memberikan edukasi tentang lingkungan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dengan salah satu solusinya mengurangi sampah plastik, yaitu dengan mengolah limbah plastik menjadi *eco brick* sekaligus mengurangi risiko bencana.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja



BIDANG KETENAGAKERJAAN

Komitmen dan Kebijakan

PT PII menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting bagi operasional kegiatan usaha yang berkelanjutan. Karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk memenuhi kepentingan karyawan dengan melaksanakan kebijakan dalam bidang Ketenagakerjaan, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

PT PII juga selalu memperhatikan kompetensi dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas serta profesionalisme setiap karyawan. Dalam menunjang performa karyawan, Perseroan juga bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesejahteraan setiap karyawannya. Hal itu dipenuhi melalui berbagai program dan keselamatan.

Dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan mengacu pada sejumlah regulasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan serikat karyawan.

Seluruh kebijakan ketenagakerjaan yang dilakukan Perseroan adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya, sebagai upaya meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hubungan kerja.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kemudian, dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Perseroan menempatkan aspek K3 sebagai hal penting dalam kegiatan operasional perusahaan yang dapat mendorong produktivitas, serta peningkatan kualitas hidup, baik bagi karyawan maupun seluruh pemangku kepentingan.

TARGET KEGIATAN

Target kegiatan CSR Perseroan terkait praktik ketenagakerjaan, antara lain menjalankan penerapan kebijakan penilaian karyawan berdasarkan kompetensi individu, mengedepankan aspek kesetaraan gender dan kesempatan kerja, meningkatkan keterikatan karyawan dalam mengurangi tingkat *turnover* karyawan, pemberian remunerasi yang baik, serta menjalankan mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sementara dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan menargetkan pelaksanaan kegiatan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan sebagai prioritas utama.

ISU-ISU, RISIKO, DAN JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN PADA BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Isu-isu, risiko, dan lingkup kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari pada program ketenagakerjaan meliputi kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan, penggunaan tenaga kerja lokal, remunerasi, promosi, kebebasan berserikat dan pelatihan pensiun. Selanjutnya, program pemberian fasilitas kesehatan serta program keselamatan kerja meliputi BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan perawatan, donor darah, *general check up*, biaya kacamata, serta penggantian biaya melahirkan.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

PT PII memberikan akses bagi karyawan untuk dapat mengadukan keluhan, ketidakpuasan, atau keberatan yang dirasakan terkait pelaksanaan tugas atau hal-hal bersifat ketenagakerjaan, melalui mekanisme yang telah ditentukan Perusahaan dalam hal pengaduan masalah ketenagakerjaan. Mekanisme tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Setiap keluhan dan pengaduan karyawan yang menyangkut ketenagakerjaan, pertama-tama diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan atasan langsung.
2. Bila penyelesaian belum mencapai hasil yang memuaskan, maka karyawan dapat meneruskan keluhan dan pengaduan kepada atasan yang lebih tinggi.
3. Dalam hal tidak tercapai kata sepakat antara perusahaan dengan organisasi pekerja maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2019 Perseroan tidak menerima laporan pengaduan masalah ketenagakerjaan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada tahun 2019, PT PII menyelenggarakan program dan kegiatan CSR dalam bidang ketenagakerjaan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kesempatan yang Sama dalam Pengembangan Kompetensi Karyawan

Program pengembangan kompetensi karyawan yang ada di lingkungan Perseroan dilakukan dengan menitikberatkan pada kesempatan yang terbuka bagi seluruh karyawan. Penguatan kompetensi SDM dilakukan dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan yang bersifat perubahan kompetensi dan pengembangan kompetensi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap strategi bisnis dan operasional. Pelatihan untuk perubahan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan kompetensi karyawan agar mampu menyikapi perubahan. Sementara itu, pelatihan untuk pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyiapkan karyawan dengan kompetensi tertentu guna mendukung portofolio bisnis PT PII.

Sepanjang tahun 2019, telah diselenggarakan sejumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Training	Total Peserta (orang)	Rata-Rata Peserta (orang)
<i>Inhouse Training</i>	11	418	38
<i>Knowledge Sharing</i>	6	312	52
<i>Public Training</i>	81	241	3

2. Kesenjangan Gender dan Kesempatan Kerja

Pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan mulai dari rekrutmen hingga program pensiun, senantiasa mengedepankan aspek kesetaraan gender dan kesempatan kerja. Wujud atas penerapan aspek kesetaraan dan kesempatan kerja terlihat dalam proses rekrutmen Perseroan yang memberikan kesempatan kepada kandidat-kandidat terbaik untuk bergabung dan membangun karir berdasarkan prinsip dan asas kesetaraan tanpa membedakan aspek gender, suku, ras, agama yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku baik di internal maupun peraturan-peraturan eksternal. Di samping itu, Perseroan juga mengimplementasikan aspek kesetaraan dan kesempatan dalam hal pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta hal terkait lainnya dengan bidang ketenagakerjaan. Perbedaan hanya terjadi apabila terdapat perbedaan atas kinerja kompetensi atau pengalaman kerja.

Hingga akhir tahun 2019, PT PII memiliki karyawan berjumlah 132 orang. Dari jumlah karyawan tersebut, sebanyak 73 orang merupakan karyawan laki-laki, dan sebanyak 59 orang karyawan perempuan. Demografi karyawan berdasarkan gender tersebut menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang diselenggarakan telah menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan pria dan wanita.

3. Tingkat *Turnover* Karyawan

Pada tahun 2019, tingkat *turnover* mencapai 6,8% lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,6%.

4. Hubungan Industrial

PT PII berupaya memastikan terjalinnya hubungan yang saling menghormati dan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, melalui komunikasi intensif dan keterlibatan antara PT PII dan karyawan dalam mencapai target Perseroan. PT PII mendayagunakan hubungan konstruktif dengan karyawan dengan menyelenggarakan pertemuan berkala guna mensosialisasikan kebijakan dan program manajemen serta untuk penyelesaian permasalahan hubungan industrial maupun penyelesaian keluhan karyawan.

5. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

PT PII senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan guna meningkatkan motivasi kerja serta loyalitas terhadap Perseroan. Perseroan memberikan remunerasi kepada para karyawannya berupa gaji pokok, insentif prestasi, tunjangan dan fasilitas lainnya berdasarkan jenjang jabatan, masa kerja, dan penilaian kinerja individu yang dicapai karyawan tanpa adanya unsur diskriminasi.

BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang difokuskan untuk mencapai tingkat kecelakaan nihil atau *zero accident*. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PII mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan ini diharapkan membantu terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi prioritas utama dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu penting bagi seluruh karyawan untuk memahami risiko dan bagaimana mengantisipasi potensi bahaya.

PT PII juga memiliki dan menjalankan Standar Operasional Prosedur Siaga Tanggap Darurat (SOP) yang digunakan sebagai panduan dalam rangka meningkatkan perlindungan Insan Perusahaan dalam situasi Siaga Tanggap Darurat di Lingkungan Perseroan. SOP tersebut juga menjelaskan proses pelaporan keadaan darurat, proses evakuasi serta jenis-jenis keadaan darurat. Adapun jenis-jenis keadaan darurat yang terakup dalam SOP tersebut antara lain meliputi keadaan gempa, kerusakan atau gangguan sipil, kebakaran, kegagalan ventilasi, proses evakuasi gedung, serta keadaan darurat lainnya.

DAMPAK KEGIATAN

Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan secara konsisten di lingkungan Perseroan membuahkan hasil. Sepanjang tahun 2019, tidak ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja maupun terjangkit penyakit serius di tempat kerja.

Di samping itu, pelaksanaan kegiatan CSR Perseroan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan K3 secara keseluruhan cukup efektif dalam rangka memenuhi kepentingan para karyawan serta selaras dengan tujuan Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan dampak kuantitatif yang terlihat dari perolehan jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2019 mencapai Rp1.008,03 miliar. Dengan jumlah karyawan di tahun 2019 yang mencapai 132 karyawan, maka tingkat produktivitas karyawan mencapai Rp7.637 juta per karyawan tetap pada tahun 2019.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Tanggung Jawab terhadap Konsumen



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Layanan kualitas terbaik merupakan kunci dalam meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan serta keberlangsungan bisnis Perseroan. PT PII menempatkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pelayanan yang fundamental dan penting. Hal ini didasari keyakinan bahwa pelanggan adalah salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai peran sentral dalam menjamin keberlangsungan usaha, sehingga merupakan partner utama dalam mengembangkan usaha di masa depan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa memberikan kualitas layanan dengan memberikan yang terbaik yang dapat menciptakan nilai Perusahaan.

Perseroan memiliki kebijakan untuk memastikan hal tersebut dijalankan melalui berbagai standar operasi

dan prosedur yang terkait dengan pelanggan guna memastikan pemenuhan standar pelayanan kepada pelanggan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh pelanggan.

ISU DAN RISIKO TERKAIT PELANGGAN ATAS KEGIATAN BISNIS PERUSAHAAN

Isu-isu dan risiko terkait pelanggan atas kegiatan operasional Perseroan menyangkut beberapa hal di antaranya kegiatan penyediaan akses informasi penjaminan yang diberikan serta kerjasama penjaminan infrastruktur yang mencakup pemberian bantuan teknis, perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur, kewajiban kontingensi Pemerintah, dan pengelolaan sektor infrastruktur.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Tanggung Jawab terhadap Konsumen

JANGKAUAN LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN TERKAIT ISU PELANGGAN

Dalam rangka mengoptimalkan jangkauan lingkup pengaruh Perseroan di bidang konsumen, Perseroan menargetkan untuk menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada pelanggan di antaranya program peningkatan kualitas layanan, penyediaan pusat pengaduan dan penanggulangan keluhan, serta penyediaan informasi yang komprehensif terkait bidang penjaminan Perseroan.

TARGET KEGIATAN

Perseroan menetapkan target tanggung jawab terhadap nasabah, salah satunya dengan berupaya memaksimalkan pelayanan terbaik dalam proses dan pelaksanaan penjaminan proyek infrastruktur sebagai bagian dari mitigasi dampak sosial dari pembangunan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, konsumen atau pelanggan PT PII adalah pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah) dan BUMN yang ditugaskan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dari proyek infrastruktur yang dikembangkan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sepanjang tahun 2019, PT PII secara rutin melaksanakan program peningkatan kapasitas dalam bentuk kunjungan, pelatihan dan sosialisasi kepada segenap pemangku kepentingan utama dari pemerintah dan BUMN yang ditugaskan bekerja sama dengan IIGF Institute, sebagai pusat pengetahuan yang dibentuk untuk mendorong pengembangan skema KPBU dan infrastruktur nasional.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan



Program CSR Pengembangan Kualitas Pendidik Tingkat SD-SMP

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PT PII sangat menyadari bahwa keberadaannya merupakan bagian dari masyarakat, di mana pertumbuhan usaha yang diraih Perseroan juga tak lepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu, Perseroan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. PT PII merealisasikan pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan Program CSR yang berfokus pada 5 (lima) kegiatan, yakni bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, keagamaan, dan bantuan korban bencana alam.

ISU-ISU SERTA RISIKO SOSIAL EKONOMI ATAS KEGIATAN BISNIS PERUSAHAAN YANG RELEVAN

Sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, PT PII telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi pada kegiatan tanggung sosial perusahaan terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan. Isu serta risiko sosial ekonomi atas kegiatan bisnis Perseroan yang relevan di antaranya meliputi risiko penyalahgunaan bantuan, risiko kesalahan pemberian bantuan serta risiko pada ketidakabsahan pada proposal bantuan. Oleh karena itu, Perseroan melakukan survei dalam menilai kelayakan setiap proposal kegiatan sosial yang masuk, yang dilakukan antara lain dengan memantau obyek bantuan dan kelayakan jumlah bantuan yang akan diberikan, serta melakukan *monitoring* baik sebelum, pada saat penyerahan maupun setelah pemberian bantuan pada kegiatan CSR tersebut.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat

ISU SOSIAL PELIBATAN *STAKEHOLDERS* YANG RELEVAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Dalam pelaksanaan program CSR nya, PT PII melibatkan institusi pendidikan dan lembaga sosial masyarakat/ LSM setempat sebagai mitra kerjasama yang memiliki pengetahuan dan kearifan lokal untuk dapat lebih efektif menjangkau dan memenuhi kebutuhan sesungguhnya dari komunitas masyarakat yang dituju. Pelaksanaan program senantiasa melibatkan peran serta warga masyarakat untuk meningkatkan rasa memiliki warga.

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan	Frekuensi
Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat	Program dan Kegiatan CSR Perseroan	Beberapa kali dalam setahun
Karyawan	<i>Gathering, Media Elektronik/e-mail</i>	Setiap saat
Serikat karyawan	- Pertemuan dan Diskusi, - Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Berkala
Regulator	- Kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku - Prinsip kehati-hatian dalam operasional bisnis	Berkala
Media	<i>Media Gathering</i> <i>Media Briefing</i>	Berkala

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sepanjang tahun 2019, PT PII telah melaksanakan program dan kegiatan CSR dalam bidang sosial dan kemasyarakatan dengan nilai investasi mencapai Rp1,38 miliar. Adapun informasi mengenai program dan kegiatan CSR yang telah dijalankan sebagai berikut:

- Program CSR Pembangunan Surau Al Quran Rumah Anak, Padang
- Program CSR Dukungan Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren
- Program CSR Pembagian Paket Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu
- Program CSR Kegiatan Edukasi Jarak Jauh (*Teleteaching*) menghubungkan 3 Kota, Jakarta-Natuna-Papua
- Kegiatan Berbagi Kebahagiaan Bulan Suci Ramadhan 1440 H/2019 M
- Donasi Hewan Qurban SMV Kementerian Keuangan, Idul Adha 1440 H
- Program CSR Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Terkait Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
- Program CSR Pengembangan Kualitas Pendidik Tingkat SD-SMP Terkait Proyek KPBU Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
- Program CSR Pendidikan - Sinergi SMV & Kemenkeu dalam Program Kemenkeu Mengajar
- Program CSR Kesehatan - Operasi Bibir Sumbing pada Masyarakat Tidak Mampu
- Program CSR Lingkungan - Membuat *Eco Brick*

Testimoni



Testimoni Perwakilan Peserta Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

Sagung Masayu PKNL Officer ITDC

Program yang diberikan oleh PT PII kepada Kelompok ibu-ibu di Desa Kuta sangat tepat sasaran dan bermanfaat bagi pengembangan usaha masing-masing kelompok. Program Pelatihan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga dapat menyokong pengembangan KEK Mandalika Kedepan.

Emur Kelompok Putri Nyale

Luar Bisa Setelah saya dapat Pelatihan ini usaha semakin maju apa lagi ada peralatan yang dikasih, Terima kasih PT PII mudah-mudahan tahun depan akan ada pendampingan, pembinaan, pelatihan, hingga studi banding sampai kami berhasil.

**Leni Marlina** Kelompok UM3

Semakin semangat menjalani usaha dan sebagai motivasi dalam mengembangkan usaha, terima kasih saya ucapkan kepada PT PII yang telah memfasilitasi kami, memberikan kami ilmu yang bermanfaat dan semoga apa yang kami dapatkan berguna untuk kami, masyarakat, terutama untuk orang lain. Saya berharap nantinya akan ada pengembangan dari pihak ITDC untuk membuat toko/warung agar produk kami bisa masuk/diterima oleh banyak orang, baik lokal maupun wisatawan.

Sumani Kelompok Emak-Emak Kreatif

Saya jadi lebih bersemangat dalam berwirausaha dan mendapatkan lebih banyak ilmu tentang membuat jajan dan kue-kue. Semoga ke depannya lebih maju dan terus maju tanpa henti-henti dan semakin sukses.

Fitri Andriani Kelompok Ujuk Daye/Ingin Maju

Saya merasa senang, Bahagia dan sangat bersyukur karena adanya Pelatihan ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Semoga ke depan saya bisa lebih baik dari sebelumnya dan akan lebih maju lagi.



Testimoni Perwakilan Peserta Program Pengembangan Kualitas Pendidik

Asep Kusnadi SDN Bojongmangu 03

Alhamdulillah berkat adanya Lokakarya tentang strategi pembelajaran yang diselenggarakan PT PII, saya pribadi khususnya, mendapatkan banyak manfaat terutama dalam hal cara mengajar yang baik dan kreatif di zaman modern sekarang ini. Saya berharap kegiatan seperti ini rutin diadakan karena sangat bermanfaat dan menjadi salah satu penunjang bagi kemajuan bangsa.

Imas Mulyati SDN 01 Medal Krisna

Terima kasih PT PII yang telah melibatkan saya dalam Lokakarya guru ini. Setelah mengikuti lokakarya ini saya menjadi lebih tahu tentang berbagai macam strategi pembelajaran serta mendapat tambahan ilmu tentang pendidikan. Singkatnya lokakarya ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru untuk dapat mengemas pembelajaran agar lebih efektif.

Adjid Kepala Sekolah SDN 01 Medal Krisna

Terima kasih kepada PT PII yang telah memberikan pelatihan kepada guru-guru di sekolah kami. Kami bersyukur karena masih ada pihak swasta yang peduli terhadap dunia pendidikan. Alhamdulillah, setelah mengikuti pelatihan ini guru-guru lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Kedepannya, saya berharap kegiatan ini terus berlanjut. Terima kasih.

Agung Suganda Camat Bojongmangu

Kami berterima kasih kepada PT PII yang telah peduli kepada dunia pendidikan khususnya di dinas pendidikan Kabupaten Bekasi dan telah menunjuk wilayah kami sebagai tempat CSR PT PII. Sebagai wilayah yang paling selatan dari Kabupaten Bekasi, sangat membutuhkan 'sentuhan' dunia luar. Semoga program CSR ini akan mengembangkan kualitas tenaga pendidikan di Bojongmangu menjadi lebih berkembang lagi.



Informasi Keuangan Audited



- 310 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
- 311 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
- 312 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
- 313 Laporan Arus Kas Konsolidasian
- 314 Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian



**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

31 DESEMBER/*DECEMBER* 2019

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SERTA UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Wahid Sutopo
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot
Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
Alamat Rumah : Jalan Taman Wijaya Kusuma I
No. 2-A, RT 009, RW 002,
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021 - 5795 0550
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Salusra Satria
Alamat Kantor : Capital Place Office Tower,
Lantai 7 dan 8, Jl. Jenderal Gatot
Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
Alamat Rumah : Jl. Bacang II No. 11
RT 005, RW 001, Kebayoran
Baru Jakarta
Nomor Telepon : 021 - 5795 0550
Jabatan : Direktur Eksekutif Keuangan dan
Penilaian Proyek

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(PERSERO)**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2019 AND FOR
THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019**

We, the undersigned:

1. Name : M. Wahid Sutopo
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal Gatot
Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
Residential address : Jalan Taman Wijaya Kusuma I
No. 2-A, RT 009, RW 002,
Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan
Telephone : 021 - 5795 0550
Title : President Director
2. Name : Salusra Satria
Office address : Capital Place Office Tower,
7th & 8th Floor Jl. Jenderal Gatot
Subroto Kav. 18, Jakarta 12710
Residential address : Jl. Bacang II No. 11
RT 005, RW 001, Kebayoran
Baru Jakarta
Telephone : 021 - 5795 0550
Title : Executive Director of Finance and
Project Valuation

declare that:

1. we are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
2. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. all information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero);
b. the financial statements of the PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. we are responsible for the internal control system of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 28 Februari/February 2020

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors


M. Wahid Sutopo
Direktur Utama/
President Director


Salusra Satria
Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek/
Executive Director of Finance and Project Valuation



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00210/2.1025/AU.1/09/0222-5/1/II/2020

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) as of 31 December 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
28 Februari/February 2020



Drs. M. Jusuf Wibisono, M.Ec., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0222

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 1 - Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	26,809,275	5	1,699,179,176	Cash and cash equivalents
Investasi	10,881,161,304	6	8,673,173,668	Investments
Piutang usaha	113,188,744	7	79,986,175	Account receivables
Piutang lainnya	12,580,889		8,978,218	Other receivables
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1,570,106		2,447,948	Prepaid expenses and advances
Aset tetap	14,499,093	8	18,775,630	Fixed assets
Aset takberwujud	1,824,262	9	1,194,708	Intangible assets
Beban tangguhan	26,696,986	10	43,360,044	Deferred expenses
Pajak dibayar dimuka	4,209,864	12a	367,577	Prepaid income tax
Aset pajak tangguhan	23,330,447	12d	88,106,326	Deferred tax asset
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	5,369,039		5,346,039	Refundable deposits
JUMLAH ASET	<u>11,111,240,009</u>		<u>10,620,915,509</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang usaha	3,772,094	11	7,481,344	Account payables
Utang pajak	2,439,268	12b	4,816,449	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain	37,990,850	13	42,912,741	Accrued expenses, provisions and other payables
Pendapatan tangguhan	10,967,630	14	8,509,750	Unearned income
Pinjaman penerusan	55,126,686	15	55,126,686	Two-step loans
Liabilitas imbalan kerja	29,160,538	16	21,397,862	Employee benefits obligation
JUMLAH LIABILITAS	<u>139,457,066</u>		<u>140,244,832</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar, 9.000.000 lembar - ditempatkan dan disetor penuh 8.000.000 lembar, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	8,000,000,000	17	8,000,000,000	Share capital - authorised, 9,000,000 shares - issued and paid 8,000,000 shares, with par value of Rp 1,000,000 (full amount) per share
Laba/(rugi) belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual	6,403,866		(111,375,416)	Unrealised gain/(loss) from available for sale financial assets
Keuntungan aktuarial, setelah pajak	212,119		842,648	Gain from actuarial, net of tax
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib	140,000,338	19	116,446,338	Appropriated - statutory reserve
Belum ditentukan penggunaannya	2,825,166,620		2,474,757,107	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	<u>10,971,782,943</u>		<u>10,480,670,677</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>11,111,240,009</u>		<u>10,620,915,509</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	
Pendapatan				Revenues
Pendapatan penjaminan	104,040,390	20	46,623,783	Revenue from guarantee
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	28,126,795	20	32,716,363	Revenue from project preparation and transaction advisory
Pendapatan pengelolaan dana	<u>875,867,391</u>	20	<u>754,911,821</u>	Income from investments
Jumlah pendapatan	<u>1,008,034,576</u>		<u>834,251,967</u>	Total revenues
Beban usaha				Operating expenses
Beban pajak final	(162,190,954)	12c	(139,868,101)	Final tax expense
Administrasi dan umum	(115,664,595)	21	(108,417,029)	General and administrative
Penjaminan	(81,315,373)	21	(60,044,438)	Guarantee
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	(28,319,024)	21	(33,272,365)	Project preparation and transaction advisory
Pengembangan usaha	(14,046,452)	21	(7,654,438)	Business development
Penyusutan	(8,467,317)	8	(6,493,044)	Depreciation
Beban bunga pinjaman	(4,616,860)		(4,191,603)	Interest expense
Amortisasi	(414,309)	9	(561,923)	Amortisation
(Kerugian)/keuntungan kurs, bersih	(67,041)		999,746	Foreign exchange (loss)/gain, net
Penghasilan keuangan, kotor	1,128,496		2,632,192	Finance income, gross
Lain-lain	<u>344,421</u>		<u>84,047</u>	Others
Jumlah beban usaha	<u>(413,629,008)</u>		<u>(356,786,956)</u>	Total operating expenses
Laba sebelum pajak penghasilan	594,405,568		477,465,011	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	<u>(64,986,055)</u>	12c	<u>(6,384,835)</u>	Income tax expenses
Laba tahun berjalan	529,419,513		471,080,176	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan:				Other comprehensive income for the year:
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit and loss:
Keuntungan/(kerugian) aset keuangan tersedia untuk dijual tahun berjalan	<u>117,779,282</u>		<u>(143,731,473)</u>	Available for sale financial asset gain/(loss) for the year
	<u>117,779,282</u>		<u>(143,731,473)</u>	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit and loss:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja	(840,705)		4,038,800	Remeasurement from post-employment benefits obligation
Pajak penghasilan terkait	<u>210,176</u>		<u>(1,009,700)</u>	Related income tax
	<u>(630,529)</u>		<u>3,029,100</u>	
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>117,148,753</u>		<u>(140,702,373)</u>	Other comprehensive income/(loss) for the year, net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>646,568,266</u>		<u>330,377,803</u>	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 3 - Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali
dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019**
(Expressed in thousand of Rupiah, unless
otherwise stated)

		Labai/(rugi) belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan tersedia untuk dijual/ Unrealised gain/(loss) from available for sale financial assets				Kerugian aktuarial, setelah pajak/ Actuarial loss, net of tax		Saldo laba/Retained earnings		Jumlah/ Total	
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital					Ditentukan penggunaannya - cadangan wajib/ Appropriated - statutory reserve	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
Saldo 1 Januari 2018											
Pencadangan saldo laba	19	8.000.000.000	32.356.057	(2.186.452)	-	92.922.338	2.128.351.931	(23.524.000)	-	10.251.443.874	Balance at 1 January 2018
Appropriation of retained earnings											
Comprehensive income for the year:											
Profit for the year:											
Dividend:											
- Laba tahun berjalan											
- Dividen											
- Penghasilan komprehensif lain:											
- Aset keuangan tersedia untuk dijual											
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca-kerja, setelah pajak											
3.029.100											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											
-											

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 4 - Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Laba sebelum pajak penghasilan	594,405,568	477,465,011	Profit before income tax
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas:			Add items not affecting cash flows:
- Beban penyusutan	8,467,317	6,493,044	Depreciation -
- Beban amortisasi	414,309	561,923	Amortisation -
- Beban penyesuaian imbalan kerja	9,193,213	5,358,574	Provision for employee benefits obligation -
- Penyisihan beban tangguhan	10,726,388	-	Provision of deferred expenses -
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	<u>623,206,795</u>	<u>489,878,552</u>	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			Changes in operating assets and liabilities
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:			(Increase)/decrease in operating assets:
- Piutang usaha	(33,202,569)	(5,149,797)	Account receivables -
- Piutang lainnya	(3,602,671)	(1,999,577)	Other receivables -
- Biaya dibayar dimuka dan uang muka	877,842	(392,132)	Prepaid expenses and advances -
- Beban tangguhan	5,936,670	(1,694,823)	Deferred expenses -
- Pajak dibayar dimuka	(3,842,287)	-	Prepaid tax -
(Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi:			(Decrease)/increase in operating liabilities:
- Utang usaha	(3,709,250)	4,139,506	Account payables -
- Utang pajak	(2,377,181)	1,332,207	Taxes payable -
- Biaya masih harus dibayar, penyesuaian dan utang lain-lain	(4,921,891)	15,062,874	Accrued expenses, provisions and other payables -
- Pembayaran manfaat imbalan kerja	(2,271,242)	(215,342)	Payment of employee benefit -
- Beban front-end	-	763,384	Front-end fee -
- Pendapatan tangguhan	2,457,880	424,417	Unearned income -
	<u>(44,654,699)</u>	<u>12,270,717</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>578,552,096</u>	<u>502,149,269</u>	Net cash flow provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Penempatan investasi	(2,090,208,354)	(143,929,806)	Placement for investments
Pembelian aset tetap dan aset takberwujud	(5,234,643)	(9,766,483)	Acquisition of fixed assets and intangible assets
Penempatan uang jaminan yang dapat dikembalikan	(23,000)	-	Refundable deposit
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(2,095,465,997)</u>	<u>(153,696,289)</u>	Net cash flow used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembayaran dividen	(155,456,000)	(101,151,000)	Dividend payment
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan	-	(1,021,017)	Payment for corporate social responsibility programme
Penerimaan dari pinjaman penerusan	-	9,850,306	Proceeds from two-step loans
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(155,456,000)</u>	<u>(92,321,711)</u>	Net cash flow used in financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	<u>(1,672,369,901)</u>	<u>256,131,269</u>	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	<u>1,699,179,176</u>	<u>1,443,047,907</u>	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>26,809,275</u>	<u>1,699,179,176</u>	Cash and cash equivalents at end of year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/1 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 tanggal 30 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Notaris Arry Supratno, S.H. No. 28 tanggal 13 Agustus 2019 terkait penyesuaian dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan ("KMK") No. 603/KMK.06/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 201/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Pada Perusahaan Perseroan Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Selanjutnya, perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0322445 Tahun 2019 pada tanggal 29 Agustus 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur.

Perusahaan merupakan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur ("BUPI") yang beroperasi sebagai suatu entitas "single window" dalam melakukan proses, penilaian (*appraisal*) dan penyusunan struktur (*structuring*) untuk penjaminan yang diberikan Pemerintah Indonesia pada proyek infrastruktur yang diajukan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK"). Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan memiliki dukungan pemenuhan kelayakan dan kapasitas oleh, bila diperlukan, Pemerintah Republik Indonesia, lembaga keuangan multilateral atau kombinasinya – untuk mewujudkan fleksibilitas operasional yang lebih baik dalam penyediaan penjaminan infrastruktur.

Tujuan utama dari Perusahaan adalah untuk memberikan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur. Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan, antara lain:

1. GENERAL

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed of Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LLM No. 29 dated 30 December 2009. The Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-04444.AH.01.01.Tahun 2010, dated 27 January 2010.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment was in accordance with Notarial Deed of Arry Supratno, S.H. No. 28 dated 13 August 2019 related to adjustment in accordance to issuance of KMK No. 603/KMK.06/2019 regarding Amendment of the Company's Article of Association (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia as implementation of PMK No. 201/PMK.06/2018 regarding Procedures for the Elimination and Transfer of Fixed Assets in Companies under the Guidance and Supervision of the Minister of Finance. Subsequently, the amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republik of Indonesia through his decree No. AHU-AH.01.03-0322445 Year 2019 dated 29 August 2019.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company's objective is to provide the Government guarantees in the infrastructure sector.

The Company is BUPI that operates as a "single window" entity for the processing, appraisal and structuring of all guarantees provided by the Government of Indonesia for infrastructure projects proposed by the Government's Contracting Agencies ("GCA"). Guarantees provided by the Company have eligibility and capacity supports by, as necessary, the Government of Indonesia ("GOI"), a multilateral financing agency or a combination thereof – for greater operational flexibility in providing guarantees for infrastructure projects.

The primary objective of the Company is to provide Government guarantee in infrastructure sector. In achieving its objective, the Company may do, among others:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

- a) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial Pemerintah dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ("KPBU") di bidang infrastruktur yang mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan kewajiban kontijensi Pemerintah dan meningkatkan kelayakan kredit dari proyek infrastruktur.
- b) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban pembayaran Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dan/atau afiliasinya terkait penyediaan infrastruktur dalam hal pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan lembaga keuangan dan penerbitan obligasi dan/atau instrumen keuangan lainnya.
- c) Memberikan penjaminan terhadap kewajiban finansial dari pihak lain selain butir a) dan b) di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Memberikan dukungan fasilitasi persiapan proyek infrastruktur, penilaian kelayakan dan pemantauan risiko serta hal lain terkait penyediaan penjaminan pemerintah dan jasa konsultasi terkait.
- e) Kerjasama dengan pihak lain termasuk lembaga keuangan multilateral dalam rangka pelaksanaan pemberian penjaminan.
- f) Kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, berkedudukan di Capital Place Office Tower, Lantai 7 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2019
Komisaris Utama	Ayu Sukorini ¹⁾
Komisaris	Mariatul Aini M. Rahman Ritza ¹⁾
Direktur Utama	Muhammad Wahid Sutopo ²⁾
Direktur	Salusra Satria -

- 1) Berdasarkan KMK No. 631/KMK.06/2014, masa jabatan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 2) Berdasarkan akta notaris Arry Supratno, S.H. No. 08 pada tanggal 5 Desember 2019, Pemegang saham menunjuk Muhammad Wahid Sutopo dari jabatan Direktur sebagai Direktur Utama mulai tanggal 29 November 2019 menggantikan Armand Hermawan. Berdasarkan KMK No. 890/KMK.06/2019, Armand Hermawan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 26 Agustus 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki 132 pegawai (2018: 128 pegawai) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

- a) To provide guarantee for the Government's financial obligation in the Public Private Partnership ("PPP") cooperation agreement in infrastructure sectors which is able to realise the accountability of managing Government's contingent obligations and improving the creditworthiness of the respective infrastructure projects.
- b) To provide guarantee from payment obligations of State-Owned Enterprises ("SOEs") and/or its affiliates related infrastructure sector in term of execution loan agreement with financial institution and issuance of bonds and/or other financial instruments.
- c) To provide guarantee of other party's financial obligation other than point a) and b) above, in accordance with the laws and regulation.
- d) To provide facilitation support of project preparation, feasibility assessment and risk monitoring and other matters related to provision of government guarantee and the related project consultancy services.
- e) To collaborate with other parties including multilateral financial institution in the context of implementing the guarantee.
- f) Other activities in achieving the Company's objective in accordance with the law and regulations.

The Company is domiciled in Indonesia, its office is located at Capital Place Office Tower, 7th and 8th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta. The Company started its commercial operations in 2010.

As at 31 December 2019 and 2018, the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors were as follows:

	2018	
Komisaris Utama	Ayu Sukorini	President Commissioner
Komisaris	Mariatul Aini M. Rahman Ritza	Commissioners
Direktur Utama	Armand Hermawan	President Director
Direktur	Salusra Satria Muhammad Wahid Sutopo	Directors

- 1) Based on KMK No. 631/KMK.06/2014, term of office has ended on 31 December 2019.
- 2) Based on notarial deed Arry Supratno, S.H. No. 08 on 5 December 2019, Shareholders appointed Muhammad Wahid Sutopo from the position of Director to President Director starting date 29 November 2019 replacing Armand Hermawan. Based on KMK No. 890/KMK.06/2019, Armand Hermawan no longer officiate as President Director as of 26 August 2019.

As at 31 December 2019, the Company has 132 employees (2018: 128 employees) (unaudited).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/3 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan Perusahaan diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 28 Februari 2020.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat. Seluruh angka dalam mata uang selain Rupiah dinyatakan dalam jumlah penuh.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Company were completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 28 February 2020.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the Company's financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis. The financial statements are prepared under the historical cost convention, as modified for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The cash flows statement is prepared based on the indirect method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah, unless otherwise stated. Amounts in currencies other than Rupiah are stated in full amount.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019***(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)***2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)****a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut berlaku efektif pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan dimuka";
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan";
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja";
- Amandemen PSAK 26 "Biaya Pinjaman";
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"; dan
- Amandemen PSAK 66 "Pengendalian Bersama".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak mengakibatkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi pada Perusahaan serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

b. Penjabaran mata uang asing**a. Mata uang fungsional dan penyajian**

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations that effective on 1 January 2019 as follows:

- *ISFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";*
- *ISFAS 34 "Uncertainty Over Income Tax Treatments";*
- *Amendment to SFAS 22 "Business Combination";*
- *Amendment to SFAS 24 "Employee Benefit";*
- *Amendment to SFAS 26 "Borrowing Cost";*
- *Amendment to SFAS 46 "Income Taxes"; and*
- *Amendment to SFAS 66 "Joint Arrangements".*

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company accounting policies and had no significant impact on the amounts reported for current of prior financial years.

b. Foreign currency translation**a. Functional and presentation currency**

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (the "functional currency").

The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the functional and presentation currency of the Company.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**b. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)****b. Transaksi dan saldo**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, kas di bank, deposito yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Aset dan liabilitas keuangan**Aset keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo atau yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan ini pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**b. Foreign currency translation (continued)****b. Transactions and balances**

Transactions denominated in foreign currency are converted into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, foreign currency monetary assets and liabilities are translated using the closing exchange rate prevailing at that date. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Bank Indonesia. Foreign exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, cash in banks, deposits held at call with banks and short-term investments with original maturities of three months or less, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted.

d. Financial assets and liabilities**Financial assets**

The Company classifies its financial assets in the following categories: at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity investments or available for sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading, which is acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term. The Company has no financial assets at fair value through profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)****(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, investasi dalam deposito berjangka, piutang usaha dan uang jaminan yang dapat dikembalikan.

(iii) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada nilai wajar dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan perubahan ekuitas hingga dihentikan pengakuannya. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

(iv) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Investasi Perusahaan pada obligasi tertentu diklasifikasikan dalam kategori ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Financial assets (continued)****(ii) Loans and receivables**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Company's loans and receivables comprise of cash and cash equivalents, investment in time deposits, account receivables and refundable deposits.

(iii) Available for Sale ("AFS") financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated in this category or not classified in any other categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealised gains or losses recognised in stockholders' equity until the financial assets are derecognised. The Company's investments in certain bonds are classified in this category.

(iv) Held to Maturity ("HTM") investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that management has the positive intention and ability to hold them to maturity. These financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method. The Company's investment in certain bonds is classified in this category.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Liabilitas keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan klasifikasi liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, penyisihan dan utang lain-lain, dan pinjaman penerusan diklasifikasikan dalam kategori ini.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Financial liabilities**

The Company classifies its financial liabilities in the category of (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortised cost.

At the reporting date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to this classification are not disclosed.

Financial liabilities measured at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit or loss fall into this category and are measured at amortised cost.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value minus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Account payables, accrued expenses, provisions and other payables, and two-step loans are classified in this category.

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Penentuan nilai wajar (lanjutan)**

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service* atau *regulatory agency*) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang sejenis atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diamortisasi dan diakui dalam laba rugi sepanjang umur dari instrumen tersebut.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Determination of fair value (continued)**

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is amortised and recognised in profit or loss on over the life of the instrument.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Penentuan nilai wajar (lanjutan)**

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh *LIBOR yield curve*, nilai tukar mata uang asing, volatilitas dan *counterparty spreads*) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa dimasa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya

Kontrak jaminan keuangan yang dimiliki Perusahaan baik penjaminan KPBU maupun penjaminan kewajiban pembayaran BUMN (Non-KPBU) adalah dalam bentuk perjanjian penjaminan, yang mengharuskan Perusahaan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban finansial sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (untuk KPBU) maupun Perjanjian Pinjaman (untuk Non-KPBU), yang tidak dapat dipenuhi oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("PJPK") kepada Badan Usaha (untuk KPBU) atau yang tidak dapat dipenuhi oleh BUMN Terjamin kepada pemberi pinjaman (untuk Non-KPBU).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Determination of fair value (continued)**

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, LIBOR yield curve, foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Financial guarantee contracts and other commitment receivables

Financial guarantee contracts that the Company has both PPP guarantees and guarantees for SOEs payment obligation (Non-PPP) is in form of guarantee agreements, which requires the Company to make payments to the Investors when Government's Contracting Agencies ("GCA") is unable to fulfill its financial obligation in accordance with the terms in a Cooperation Agreements (for PPP) or requires the Company to make payments to the lenders when guaranteed SOEs is unable to fulfill its financial obligation, in accordance with the terms in a Loan Agreements (for Non-PPP).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)****Kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya (lanjutan)**

Pendapatan premi dari kontrak jaminan keuangan yang diperoleh (*recurring fee*), diamortisasi selama jangka waktu penjaminan dengan menggunakan metode garis lurus.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit dihitung berdasarkan analisa spesifik untuk masing-masing risiko dalam perjanjian penjaminan.

Perusahaan memiliki perjanjian regres dengan PJPK terkait dengan penjaminan KPBU, yang akan memberikan hak tagih kepada PJPK atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Badan Usaha ("BU") akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU.

Perusahaan juga memiliki perjanjian regres dengan BUMN Terjamin terkait dengan penjaminan atas gagal bayar dari BUMN yang melakukan pinjaman dan/atau penerbitan obligasi untuk membiayai penyediaan infrastruktur, yang akan memberikan hak tagih kepada BUMN atas pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada pemberi pinjaman akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran BUMN kepada pemberi pinjaman.

e. Investasi

Investasi terdiri dari deposito berjangka, obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar uang dan di bursa efek serta Obligasi Pemerintah dan reksa dana.

Obligasi Pemerintah adalah surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dibeli dari pasar.

Bank telah mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai diukur pada nilai biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK No. 110 "Akuntansi Sukuk".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Financial assets and liabilities (continued)****Financial guarantee contracts and other commitment receivables (continued)**

The guarantee fee income earned from financial guarantee contracts (recurring fee), is amortised over the period of guarantee using the straight line method.

Allowance for impairment on financial guarantee contracts with credit risk are assessed based on each specific risk under the guarantee agreement.

The Company has recourse agreement with GCA related to PPP's guarantee, which will give the Company the rights to claim or recourse back to GCA for any payment that have been made by the Company to the Investors, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors.

The Company also has recourse agreement with guaranteed SOEs related to guarantees of SOEs' loan and/or bond issuance payment defaults in financing infrastructure developments, which will give the Company the rights to claim or recourse back to SOEs for any payment that have been made by the Company to the lenders, due to inability of SOEs in fulfilling its financial obligations to the lenders.

e. Investments

Investments consist of time deposits, corporate bonds traded in the money market and at the stock exchange and Government Bonds and mutual funds.

Government bonds represent bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia purchased from the market.

The Bank has classified all investment in sukuk as amortised cost in accordance with SFAS No. 110 "Accounting for Sukuk".

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**e. Investasi (lanjutan)**

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode jatuh tempo dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Tahun/Years

Prasarana kantor
Peralatan komputer
Peralatan kantor, perabotan
dan perlengkapan

4
4
4

Leasehold improvement
Computer equipments
Office equipments, furnitures
and fixtures

Nilai sisa aset dan masa manfaat aset tetap ditelaah, dan disesuaikan bila perlu, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi selama periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Jika aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**e. Investments (continued)**

At cost measurement, investment in sukuk are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity based on straight line method.

f. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is computed using the straight-line method over the following estimated useful lives, as follows:

The assets residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**g. Aset takberwujud**

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Perusahaan diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Aset takberwujud diakui sebesar harga perolehan, dikurangi dengan akumulasi amortisasinya. Amortisasi aset takberwujud dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

h. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah diberlakukan atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**g. Intangible assets**

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Company are recognised as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortisation. Amortisation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of 4 years.

h. Taxation

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity. The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the reporting date.

Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax assets is realised or the deferred income tax liability is settled.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**h. Perpajakan (lanjutan)**

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak di masa yang akan datang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dimanfaatkan.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

i. Liabilitas imbalan kerja**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pensiun

Perusahaan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan kewajiban imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini liabilitas pasti pada tanggal pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang berasal dari program pensiun yang ada. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah jangka panjang pada tanggal pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**h. Taxation (continued)**

Deferred income tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretations. Where appropriate, it established provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

i. Employee benefits obligation**Short-term employee benefits**

Short-term employee benefits are recognised when they are accrued to the employees.

Pension benefits

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in Law No. 13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the balance sheet date less the fair value of plan assets. The defined benefits obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of reporting date of Government Bonds that are denominated in the Rupiah currency in which the benefit will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**i. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)****Imbalan pensiun (lanjutan)**

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran program pensiun baik karena diwajibkan, berdasarkan kontrak atau sukarela. Namun karena Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 mengharuskan Perusahaan membayar jumlah tertentu kepada para karyawan yang telah memasuki usia pensiun yang ditentukan berdasarkan masa kerja, Perusahaan rentan terhadap kemungkinan untuk membayar kekurangan apabila iuran kumulatif kurang dari jumlah tertentu. Sebagai akibatnya untuk tujuan pelaporan keuangan, program iuran pasti secara efektif diberlakukan seolah-olah sebagai program imbalan pasti.

Biaya jasa kini dibebankan pada saat terjadinya.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**i. Employee benefits obligation (continued)****Pension benefits (continued)**

For defined contribution plans, the Company pays contributions to pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. However, since Labour Law No. 13 of 2003 requires an entity to pay to a worker entering into pension age a certain amount based on, the worker's length of service, the Company is exposed to the possibility of having to make further payments to reach that certain amount in particular when the cumulative contributions are less than that amount. Consequently for financial reporting purposes, defined contribution plans are effectively treated as if they were defined benefit plans.

Current service costs are expensed in the prevailing period.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Past service costs arising from amendment of curtailment programs are recognised as expense in profit or loss when incurred.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**j. Utang usaha dan lain-lain**

Utang usaha dan lain-lain merupakan liabilitas keuangan. Utang usaha dan lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

k. Penyisihan

Provisi diakui saat Perusahaan memiliki kewajiban (hukum atau konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah liabilitas tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

l. Pendapatan dan beban

Pendapatan dari penjaminan terdiri dari pendapatan premi serta pendapatan provisi dan komisi.

Pendapatan premi terdiri dari *guarantee fee* dan *processing fee*. Pendapatan dari *guarantee fee* diakui berdasarkan jangka waktu dari periode penjaminan tergantung dari pengaturan dalam kontrak. Pendapatan dari *processing fee* diakui pada saat pendapatan diperoleh.

- (i) *Guarantee fee* merupakan pendapatan yang diterima atas jaminan yang diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan jaminan *exposure* oleh Perusahaan.
- (ii) *Processing fee* merupakan pendapatan yang diterima atas adanya aktivitas pemrosesan yang dilakukan jika klaim disampaikan kepada pihak penjamin.

Pendapatan provisi dan komisi terdiri dari *upfront fee* dan pendapatan provisi dan komisi lainnya.

- (i) *Upfront fee* adalah pendapatan yang diterima pada saat kontrak penjaminan ditandatangani dan/atau pada saat penjaminan telah efektif, sesuai dengan kesepakatan dalam surat imbal jasa, dan tidak dapat dikembalikan.
- (ii) Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat diperoleh.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**j. Account and other payables**

Account and other payables are financial liabilities. Account and other payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

k. Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of past events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Provisions are not recognised for future operating losses.

l. Revenue and expenses

Revenue from guarantee consists of premium income, fees and commissions.

Premium income consists of *guarantee fee* and *processing fee*. Revenue from *guarantee fee* is recognised based on the duration of guarantee period depending on the arrangement in the contract. Revenue from *processing fee* is recognised when earned.

- (i) *Guarantee fee* is earned for guarantee provided to the beneficiaries on the basis of guarantee exposure of the Company.
- (ii) *Processing fee* is earned for services process if there is a claim submitted to the guarantor.

Fees and commissions consist of *upfront fee* and other fees and commissions.

- (i) *Upfront fee* is recognised upon signing of guarantee contract and/or the effectiveness of guarantee, in accordance with fee letter, and non-refundable.
- (ii) Other fees and commission is recognised as incurred.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**l. Pendapatan dan beban (lanjutan)**

Pendapatan jasa dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui ketika jasa telah dilaksanakan, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan biaya-biaya yang terjadi dapat diukur secara handal. Pendapatan diakui sebesar biaya-biaya yang terjadi ditambah margin yang diakui untuk semua penyelesaian tahapan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pendapatan dari pendapatan bunga deposito dan investasi pendapatan tetap diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan proses penjaminan, ditangguhkan terlebih dahulu dan disajikan sebagai beban tangguhan. Biaya tersebut akan dibebankan pada laporan laba rugi Perusahaan, ketika Perusahaan mengakui pendapatan penjaminan.

m. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 7, tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" yang didefinisikan antara lain:

- i. perusahaan di bawah pengendalian Perusahaan;
- ii. perusahaan asosiasi;
- iii. investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
- iv. perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam catatan III di atas;
- v. karyawan kunci dan anggota keluarganya;
- vi. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada Catatan 22.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**l. Revenue and expenses (continued)**

Revenue from project preparation and transaction advisory is recognised when services have been rendered, where it is probable that economic benefits will flow to the Company and expenses incurred can be reliably measured. Revenue is recognised from costs incurred plus recognised margin for all the work in process up to the stage completion as agreed.

Revenue from interest income of time deposits and investment in fixed income are recognised using the effective interest method.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Costs that are directly related to the guarantee process will be deferred and presented as deferred charges. The costs will be expensed to the Company's profit or loss, when Company recognised revenue from guarantee.

m. Transactions with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 7, "Related Party Disclosures" which are defined, among others, as:

- i. entities under the control of the Company;
- ii. associated companies;
- iii. investors with an interest in the voting that gives them significant influence;
- iv. entities controlled by investors under note III above;
- v. key employees and family members;
- vi. entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government.

All significant transactions with related parties have been disclosed in Note 22.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**a. Faktor risiko keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen menelaah dan menetapkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

(1) Risiko pasar**(i) Risiko nilai tukar mata uang asing**

Perusahaan tidak mempunyai risiko yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Perusahaan dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak signifikan terhadap laba rugi setelah pajak Perusahaan untuk tahun berjalan.

(ii) Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Aset Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah investasi. Investasi Perusahaan terutama terdiri dari deposito dan investasi dengan pendapatan tetap. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan bunga Perusahaan, oleh karena deposito Perusahaan memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun (jangka pendek), sementara pengelolaan dana investasi lainnya terutama merupakan investasi dengan pendapatan tetap (*fixed income*).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**a. Financial risk factors**

The main risks arising from the Company's financial instruments are market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. Management reviews and agrees policies for managing each of these risks. The Company applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial markets on the Company's financial performance. The summary of the financial risk management policies are as follows:

(1) Market risk**(i) Foreign currency exchange rate risk**

The Company has no significant foreign exchange risks since the Company's transactions are performed using the Company's functional currency. As at 31 December 2019 and 2018, the Company has no material financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Company's functional currency will not significantly impact to the Company's current year profit after tax.

(ii) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company's financial assets which are exposed to interest rate risk are investments. The Company's investments mostly consist of time deposit and fixed income investment. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest income, since the time deposit will mature within 1 (one) year (short term), while most of the other investment are fixed rate investment.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)****(1) Risiko pasar (lanjutan)****(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)**

Lebih lanjut, perubahan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi Perusahaan karena investasi Perusahaan dikategorikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Liabilitas Perusahaan yang terekspos dengan risiko suku bunga adalah pinjaman penerusan dengan suku bunga variabel yang menggunakan SUN Benchmark dengan tenor 20 tahun. Perubahan kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi beban bunga Perusahaan.

(2) Risiko kredit

Perusahaan memitigasi risiko kredit dengan menetapkan kebijakan investasi yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengatur mandat investasi untuk jenis, batasan alokasi, serta kriteria *counterparty* yang selektif.

Deposito berjangka, deposito dan kas di bank ditempatkan pada bank-bank domestik yang memiliki reputasi yang tinggi sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
AAA	5,964,771,727	2,559,489,468	AAA
AA+	293,253,644	3,011,430,000	AA+
AA	<u>1,422,325,618</u>	<u>1,801,130,638</u>	AA
	<u>7,680,350,989</u>	<u>7,372,050,106</u>	

Untuk investasi yang ditempatkan pada efek hutang dengan pendapatan tetap, Perusahaan menempatkan investasinya pada surat berharga hutang di luar Pemerintah dengan peringkat investasi paling rendah AA.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**a. Financial risk factors (continued)****(1) Market risk (continued)****(ii) Interest rate risk (continued)**

Moreover, the changes in interest rate will not impact the Company's profit and loss due to the financial assets are classified as available for sale investments and held to maturity investments.

The Company's financial liabilities which are exposed to interest rate risk are two-step loans with variable interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The changes due to higher or lower interest rate in market will not significantly impact the Company's interest expense.

(2) Credit risk

The Company mitigates its credit risk by setting a prudent investment policy, including investment mandates for type of investment, portfolio, allocation as well as selective criteria for counterparty.

Time deposits, time deposits classified as cash and cash equivalents and cash in bank are placed with highly reputable domestic banks as follows:

For placement of investment in fixed income debt securities, the Company places its investments on debt securities outside Government with investment grade at the lowest of AA.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/19 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Faktor risiko keuangan (lanjutan)

(2) Risiko kredit (lanjutan)

Sedangkan untuk investasi yang ditempatkan pada reksa dana, Perusahaan menempatkan investasinya melalui Manajer Investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kas dan setara kas	26,367,345	1,698,666,922
Investasi	10,881,161,304	8,673,173,668
Piutang usaha	113,188,744	79,986,175
Piutang lainnya	12,580,889	8,978,218
Uang jaminan yang dapat dikembalikan	<u>5,369,039</u>	<u>5,346,039</u>
	<u>11,038,667,321</u>	<u>10,466,151,022</u>

Semua aset keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

(3) Risiko likuiditas

Perusahaan tidak mempunyai risiko likuiditas yang signifikan. Risiko likuiditas timbul ketika Perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen pengelolaan risiko likuiditas termasuk di dalamnya menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memantau arus kas perkiraan dan aktual dan menyesuaikan profil tanggal jatuh tempo dari aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain dan pinjaman penerusan yang jumlahnya tidak material terhadap aset likuid Perusahaan. Perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi dalam bentuk kas dan setara kas dan investasi.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financial risk factors (continued)

(2) Credit risk (continued)

For placement of investment in mutual funds, the Company places its investments on Investment Manager registered in Financial Services Authority ("OJK").

The maximum credit risk on the Company's financial assets as at 31 December 2019 and 2018 are as follows:

Cash and cash equivalents
Investments
Account receivables
Other receivables
Refundable deposits

All of the Company's financial assets as at 31 December 2019 and 2018 are neither past due nor impaired. Therefore, the Company has provided no allowances for impairment losses.

(3) Liquidity risk

The Company has no significant liquidity risk. Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As at 31 December 2019 and 2018, the Company's financial liabilities consist of account payables, accrued expenses and other payables and two-step loans which are immaterial to the total Company's liquid assets. The Company is highly liquid as it has financial instruments in form of cash and cash equivalents and investments.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**b. Manajemen risiko modal**

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi jumlah utang.

Perusahaan menelaah dan mengelola struktur permodalannya untuk memastikan struktur modal dan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang dan efisiensi modal dari Perusahaan, keuntungan masa lalu dan proyeksi masa depan, proyeksi arus kas operasional, proyeksi pengeluaran modal dan proyeksi kesempatan investasi strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat menggunakan pendanaan internal untuk mengurangi utang.

c. Estimasi nilai wajar

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- **Tingkat 1**
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- **Tingkat 2**
Input diluar harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- **Tingkat 3**
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**b. Capital risk management**

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Company periodically reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may use internal funding to reduce debt.

c. Fair value estimation

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- **Level 1**
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- **Level 2**
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities; either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- **Level 3**
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/21 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas Perusahaan yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2019 dan 2018.

31 Desember/December 2019					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available for sale financial assets
Investasi pada instrumen utang	2.680.003.978	-	2.680.003.978	-	2.680.003.978
					Debt investments
Jumlah	2.680.003.978	-	2.680.003.978	-	2.680.003.978
					Total
31 Desember/December 2018					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset keuangan tersedia untuk dijual					Available for sale financial assets
Investasi pada instrumen utang	2.334.006.794	-	2.334.006.794	-	2.334.006.794
					Debt investments
Reksa dana	2.999.243	-	2.999.243	-	2.999.243
					Mutual funds
Jumlah	2.337.006.037	-	2.337.006.037	-	2.337.006.037
					Total

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

- (i) Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan

Nilai wajar dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya dan uang jaminan yang dapat dikembalikan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar (level 2 – hirarki nilai wajar).

- (ii) Investasi pada instrumen utang

Nilai wajar dari investasi pada instrumen utang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan yield yang serupa (level 2 – hirarki nilai wajar).

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation (continued)

The following table presents the Company's asset and liabilities that are measured at fair value at 31 December 2019 and 2018.

Financial instrument not measured at fair values

- (i) Cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits

The fair value of cash and cash equivalents, account receivables, other receivables and refundable deposits were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of cash and cash equivalents, account receivables and other receivables were a reasonable approximation of its fair value (level 2 – fair value hierarchy).

- (ii) Debt investments

The fair value of debt investments are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity (level 2 – fair value hierarchy).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

3. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**c. Estimasi nilai wajar (lanjutan)**

- (iii) Utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain

Nilai wajar dari utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh tempo di bawah satu tahun (level 2 – hirarki nilai wajar).

- (iv) Pinjaman penerusan

Nilai wajar dari pinjaman penerusan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pemakaian terakhir diperkirakan adalah sebesar nilai tercatatnya (level 2 – hirarki nilai wajar).

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Perusahaan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu kewajiban pensiun yang terkait.

3. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**c. Fair value estimation (continued)**

- (iii) Account payables, accrued expenses and other liabilities

The fair value of account payables, accrued expenses and other liabilities are approximating their carrying amounts since the maturity is below one year (level 2 – fair value hierarchy).

- (iv) Two-step loans

The fair value of two-step loans are estimated using discounted cash flows based on the effective interest rate charged by the lenders for the latest utilisation are approximating their carrying amounts (level 2 – fair value hierarchy).

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Employee benefits obligation

The present value of the pension obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)**

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perusahaan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuakannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

Penyisihan atas kewajiban terkait perjanjian penjaminan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah kewajibannya atas proyek KPBU dan non-KPBU, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Untuk proyek KPBU, Perusahaan memiliki hak regres kepada PJPK terkait segala pembayaran klaim yang akan dilakukan Perusahaan, akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban finansial PJPK kepada BU. Untuk proyek non-KPBU, Perusahaan juga memiliki hak regres kepada BUMN Terjamin terkait risiko gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan.

Beban tangguhan dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi keseluruhan bukti objektif bahwa proyek-proyek yang dibentuk dan memiliki beban tangguhan masih dapat direalisasikan sebagai pendapatan penjaminan pada setiap akhir periode pelaporan. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan apakah proyek-proyek yang sedang berlangsung dapat mencapai penandatanganan perjanjian, utamanya berdasarkan kondisi terkini dan informasi resmi mengenai kelanjutan proyek yang bersumber dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pevelangan proyek pada akhir tiap periode pelaporan.

Penyisihan penurunan nilai sebesar nilai penuh beban tangguhan ke laba rugi dibentuk ketika Perusahaan mendapatkan informasi dan konfirmasi mengenai realisasi proyek tidak dapat terjadi.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)**Employee benefits obligation (continued)**

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

Claim provision related to guarantee agreement

At each reporting date, the Company assess its obligations for KPBU and non-KPBU project, in form of potential claim and/or claim on risks covered by the Company under guarantee agreements, to determine whether such liabilities should be recognised in the financial statements. For KPBU project, the Company has recourse to GCA in relation with any payments that would be made by the Company, due to inability of GCA in fulfilling its financial obligations to the Investors. For non-KPBU project, the Company also has recourse to guaranteed SOEs related to risk of default of the loans.

Deferred charges and allowance for impairment losses

The Company continually evaluates objective evidences of projects that had deferred charges could be recognised as revenues as at the end of each reporting period. The Company uses its judgement to assess whether the project will achieve financial close that are mainly based on latest conditions and existing official information about the continuity of project issued by the stakeholders in regards to the tender process at the end of each reporting period.

Provision for impairment losses in full amount on deferred charges to profit and loss is recorded when the Company obtained informations and confirmations on project realisation can not be occurred.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/24 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Kas	441,930	512,254	Cash on hand
Bank	26,367,345	51,236,922	Cash in banks
Deposito	<u>-</u>	<u>1,647,430,000</u>	Time deposits
	<u>26,809,275</u>	<u>1,699,179,176</u>	

Tidak ada deposito dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang di akhir tahun 2019 (2018: 7,52% - 8,25%).

There are no time deposits with original maturities of three months or less at the end of 2019 (2018: 7.52% - 8.25%).

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

6. INVESTASI

6. INVESTMENTS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Deposito berjangka	7,653,983,644	5,673,383,184	Time deposits
Investasi dengan pendapatan tetap			Fixed income investments
- Investasi tersedia untuk dijual	2,680,003,978	2,334,006,794	Available for sale investments -
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo	409,852,712	560,051,994	Held to maturity - investments
- Investasi diukur pada biaya perolehan	137,320,970	102,732,453	Investments at cost -
Reksa dana			Mutual funds
- Investasi tersedia untuk dijual	<u>-</u>	<u>2,999,243</u>	Available for sale investments -
	<u>10,881,161,304</u>	<u>8,673,173,668</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

a) Deposito berjangka

a) Time deposits

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Swasta	4,091,140,000	4,009,383,184	Private banks
Pemerintah	<u>3,562,843,644</u>	<u>1,664,000,000</u>	State-Owned banks
	<u>7,653,983,644</u>	<u>5,673,383,184</u>	

Deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7,85% - 9% per tahun di 2019 (2018: 6,5% - 9%).

Time deposits with original maturities more than three months and up to one year period earned interest rates ranging between 7.85% - 9% per annum in 2019 (2018: 6.5% - 9%).

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/25 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI (lanjutan)

b) Investasi dengan pendapatan tetap

- Investasi tersedia untuk dijual

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Obligasi BUMN	1,535,033,200	1,244,254,200
Obligasi Pemerintah	1,133,031,478	1,078,101,944
Obligasi korporasi	<u>11,939,300</u>	<u>11,650,650</u>
	<u>2,680,003,978</u>	<u>2,334,006,794</u>

- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi pada obligasi dengan periode jatuh tempo 1 - 11 tahun dan menghasilkan pendapatan dengan tingkat suku bunga berkisar antara 7,9% - 12,55% per tahun (2018: 7,9% - 12,55%).

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Obligasi BUMN	250,079,092	400,480,016
Obligasi Pemerintah	127,647,743	127,329,563
Obligasi korporasi	<u>32,125,877</u>	<u>32,242,415</u>
	<u>409,852,712</u>	<u>560,051,994</u>

- Investasi diukur pada biaya perolehan

Investasi diukur pada biaya perolehan merupakan investasi pada obligasi Sukuk yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK 110 "Akuntansi Sukuk".

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Obligasi BUMN	126,860,000	92,181,000
Obligasi Pemerintah	<u>10,460,970</u>	<u>10,551,453</u>
	<u>137,320,970</u>	<u>102,732,453</u>

c) Investasi reksa dana

- Investasi tersedia untuk dijual

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Reksa dana	-	2,999,243

Manajemen berkeyakinan bahwa semua investasi dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penurunan nilai investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

6. INVESTMENTS (continued)

b) Fixed income investments

- Available for sale investments

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	1,535,033,200	1,244,254,200	SOEs bonds
	1,133,031,478	1,078,101,944	Government bonds
	<u>11,939,300</u>	<u>11,650,650</u>	Corporate bonds
	<u>2,680,003,978</u>	<u>2,334,006,794</u>	

- Held to maturity investments

Investments in bonds with 1 - 11 years maturities and earned interest rates ranging between 7.9% - 12.55% per annum (2018: 7.9% - 12.55%).

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	250,079,092	400,480,016	SOEs bonds
	127,647,743	127,329,563	Government bonds
	<u>32,125,877</u>	<u>32,242,415</u>	Corporate bonds
	<u>409,852,712</u>	<u>560,051,994</u>	

- Investments at cost

Investments at cost represents investments in Sukuk bonds which is recorded in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk".

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	126,860,000	92,181,000	SOEs bonds
	<u>10,460,970</u>	<u>10,551,453</u>	Government bonds
	<u>137,320,970</u>	<u>102,732,453</u>	

c) Mutual funds investments

- Available for sale investments

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
	-	2,999,243	Mutual funds

Management believes that all investments are recoverable, and no provision for impairment of investments is necessary as at 31 December 2019 and 2018.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/26 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA

7. ACCOUNT RECEIVABLES

	2019	2018	
Bunga yang belum diterima	57,126,333	57,148,678	Interest receivables
Penjaminan	41,460,133	8,500,000	Guarantee
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	14,602,278	14,337,497	Project preparation and transaction advisory
	<u>113,188,744</u>	<u>79,986,175</u>	

Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang usaha dapat dipulihkan, dan tidak ada cadangan kerugian yang diperlukan atas penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Management believes that all account receivables are recoverable, and no provision for impairment of account receivables is necessary as at 31 December 2019 and 2018.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

8. ASET TETAP

8. FIXED ASSETS

2019						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	136,400	557,621	-	(694,021)	-	Construction in progress
Prasarana kantor	20,053,105	133,744	-	95,830	20,282,679	Leasehold improvement
Peralatan komputer	5,298,655	3,040,316	-	-	8,338,971	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	9,432,961	459,099	-	598,191	10,490,251	Office equipments, furnitures and fixtures
	34,921,121	4,190,780	-	-	39,111,901	
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Prasarana kantor	(7,846,606)	(5,031,588)	-	-	(12,878,194)	Leasehold improvement
Peralatan komputer	(3,540,769)	(1,012,066)	-	-	(4,552,835)	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(4,758,116)	(2,423,663)	-	-	(7,181,779)	Office equipments, furnitures and fixtures
	(16,145,491)	(8,467,317)	-	-	(24,612,808)	
Nilai buku	18,775,630				14,499,093	Net book value

2018						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset kepemilikan langsung:						Direct ownership assets:
Harga perolehan:						Acquisition cost:
Aset dalam penyelesaian	-	7,647,306	-	(7,510,906)	136,400	Construction in progress
Prasarana kantor	13,448,712	411,493	-	6,192,900	20,053,105	Leasehold improvement
Peralatan komputer	4,404,585	663,076	-	230,994	5,298,655	Computer equipments
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	8,065,664	280,285	-	1,087,012	9,432,961	Office equipments, furnitures and fixtures
	25,918,961	9,002,160	-	-	34,921,121	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/27 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSETS (continued)

2018					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Akumulasi penyusutan:					
Prasarana kantor	(4,197,899)	(3,648,707)	-	-	(7,846,606)
Peralatan komputer	(2,695,371)	(845,398)	-	-	(3,540,769)
Peralatan kantor, perabotan dan perlengkapan	(2,759,177)	(1,998,939)	-	-	(4,758,116)
	(9,652,447)	(6,493,044)	-	-	(16,145,491)
Nilai buku	16,266,514				18,775,630

Accumulated depreciation:
Leasehold improvement
Computer equipments
Office equipments, furnitures and fixtures

Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Management believes that no impairment in fixed assets value as at 31 December 2019 and 2018.

9. ASET TAKBERWUJUD

9. INTANGIBLE ASSETS

2019					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Harga perolehan:					
Aset dalam penyelesaian	335,042	650,395	-	(668,342)	317,095
Piranti lunak	5,375,731	393,468	-	668,342	6,437,541
	5,710,773	1,043,863	-	-	6,754,636
Akumulasi amortisasi:					
Piranti lunak	(4,516,065)	(414,309)	-	-	(4,930,374)
	(4,516,065)	(414,309)	-	-	(4,930,374)
Nilai buku	1,194,708				1,824,262

Acquisition cost:
Construction in progress
Software

Accumulated amortisation:
Software

Net book value

2018					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>
Harga perolehan:					
Aset dalam penyelesaian	-	488,330	-	(153,288)	335,042
Piranti lunak	4,946,450	275,993	-	153,288	5,375,731
	4,946,450	764,323	-	-	5,710,773
Akumulasi amortisasi:					
Piranti lunak	(3,954,142)	(561,923)	-	-	(4,516,065)
	(3,954,142)	(561,923)	-	-	(4,516,065)
Nilai buku	992,308				1,194,708

Acquisition cost:
Construction in progress
Software

Accumulated amortisation:
Software

Net book value

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Management believes that no impairment in intangible assets value as at 31 December 2019 and 2018.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/28 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

10. BEBAN TANGGUHAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban tangguhan	50,809,756	56,746,426
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(24,112,770)</u>	<u>(13,386,382)</u>
	<u>26,696,986</u>	<u>43,360,044</u>

Beban tangguhan terutama merupakan biaya atas jasa konsultasi yang terkait langsung dengan kegiatan pemrosesan dan pengaturan penjaminan jangka panjang dan akan dibebankan pada saat pendapatan dari penjaminan tersebut diakui.

Beban tangguhan juga mencakup biaya pelaksanaan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi dan akan dibebankan ke laba rugi pada saat pendapatan dari penyiapan proyek dan pendampingan transaksi diakui.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mengakui tambahan cadangan kerugian penurunan nilai atas beban tangguhan proyek sebesar Rp 10.726.388 untuk Proyek Minemouth 9 dan 10.

Kecuali untuk jumlah beban tangguhan yang telah dibentuk penyesuaian, manajemen berkeyakinan bahwa proyek-proyek terkait dan memiliki saldo beban tangguhan, akan dapat mencapai penandatanganan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu, beban tangguhan terus diakui di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

10. DEFERRED EXPENSES

*Deferred expenses
Allowance for impairment
losses*

Deferred expenses mainly represent advisory costs which directly attributable to the processing and arranging activities in providing long-term guarantees and will be expensed upon the recognition of such fees.

Deferred expenses also included costs for project preparation and transaction advisory and will be recognised to profit and loss when revenue from project preparation and transaction advisory was recognised.

In 2019, the Company had recognised additional allowance for impairment for deferred expenses amounting to Rp 10,726,388 for Minemouth 9 and 10 Project.

Except for deferred expenses that has been provided with impairment provision, management believes that outstanding projects, related to deferred expenses, could achieve the signing of guarantee of the project. Therefore, the deferred expenses continue to be recognised in the Company's statement of financial position as at 31 December 2019 dan 2018.

Management believes that the provision for impairment losses on deferred expenses is adequate.

11. UTANG USAHA

Utang usaha terutama merupakan pembayaran yang belum dilakukan untuk jasa konsultasi terkait dengan penyediaan penjaminan dan operasional Perusahaan.

11. ACCOUNT PAYABLES

Account payables mainly represent payables for advisory related to the guarantee provision and the Company's operational costs.

12. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Lebih bayar:		
- Pajak penghasilan badan 2018	367,577	367,577
- Pajak Pertambahan Nilai	<u>3,842,287</u>	<u>-</u>
	<u>4,209,864</u>	<u>367,577</u>

12. TAXATION

a. Prepaid income tax

*Overpayment of:
Corporate income tax -
of 2018
Value Added Tax -*

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/29 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pajak lain-lain:		
- Pasal 21	1,652,178	3,934,731
- Pajak Pertambahan Nilai	730,831	848,448
- Lainnya	<u>56,259</u>	<u>33,270</u>
	<u>2,439,268</u>	<u>4,816,449</u>

c. Beban pajak penghasilan

Beban pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pajak tangguhan	<u>(64,986,055)</u>	<u>(6,384,835)</u>
	<u>(64,986,055)</u>	<u>(6,384,835)</u>

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>594,405,568</u>	<u>477,465,011</u>
Beban pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	(148,601,392)	(119,366,253)
Pengaruh atas:		
- Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	219,248,972	189,386,003
- Rugi pajak yang dibebankan di tahun berjalan	(87,684,182)	(34,751,962)
- Beban yang tidak dapat diperhitungkan	<u>(47,949,453)</u>	<u>(41,652,623)</u>
Beban pajak penghasilan	<u>(64,986,055)</u>	<u>(6,384,835)</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	594,405,568	477,465,011
Beda waktu	25,894,375	7,768,776
Beda tetap	191,797,808	166,610,494
Pendapatan yang sudah dikenakan pajak final	<u>(876,995,887)</u>	<u>(757,544,012)</u>
Rugi pajak berjalan	<u>(64,898,136)</u>	<u>(105,699,731)</u>
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	(371,829,238)	(319,146,706)
Rugi pajak yang tidak bisa dikompensasi ditahun berjalan	<u>85,990,646</u>	<u>53,017,199</u>
Akumulasi kerugian pajak	<u>(350,736,728)</u>	<u>(371,829,238)</u>

12. TAXATION (continued)

b. Taxes payable

Other taxes:
Article 21 -
Value Added Tax -
Others -

c. Income tax expenses

Tax expenses of the Company consist of the following:

Deferred tax

A reconciliation between the tax expense and the amounts computed by applying the prevailing tax rates to profit before income tax is as follows:

Profit before income tax
Tax calculated at applicable tax rate
Effects of:
Revenues subjected to - final income tax
Tax loss charged - in current year
Non-deductible expenses -
Income tax expenses

A reconciliation between profit before income tax and the Company's taxable income is as follows:

Profit before income tax
Timing differences
Permanent differences
Revenues subjected to final income tax
Current tax loss
Tax loss carry forward
Tax loss expired in current year
Accumulated tax losses

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)**12. TAXATION (continued)****c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)****c. Income tax expenses (continued)**

Berikut ini adalah rincian akumulasi kerugian fiskal:

Below are details of accumulated fiscal losses:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Tahun fiskal:			Fiscal year:
2019	(64,898,136)	-	2019
2018	(105,699,731)	(105,699,731)	2018
2017	(87,786,471)	(87,786,471)	2017
2015	(92,352,390)	(92,352,390)	2015
2014	-	(85,990,646)	2014
	<u>(350,736,728)</u>	<u>(371,829,238)</u>	

Termasuk di dalam koreksi fiskal beda tetap adalah beban pajak sebesar Rp 162.190.954 (2018: Rp 139.868.101) yang dibayarkan atas penerimaan bunga dari deposito berjangka, pendapatan tetap dan rekening giro.

Included in the fiscal correction of the fixed difference is the tax expense of Rp 162,190,954 (2018: Rp 139,868,101) paid for interest income from time deposits, fixed income and current accounts.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

The above corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2019 was a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return ("SPT").

d. Aset pajak tangguhan**d. Deferred tax asset**

	2019				
	1 Januari/ January 2019	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to statements of profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Credited to equity	31 Desember/ December 2019	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	71,459,648	(71,459,648)	-	-	Tax loss carry forward
Penyisihan gaji dan bonus	4,607,778	720,417	-	5,328,195	Provision for salaries and bonus
Beban penyisihan imbalan kerja	5,349,467	1,730,493	210,176	7,290,136	Provision for employee benefits obligation
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	1,215,400	726,616	-	1,942,016	Differences between accounting and tax fixed assets net book value
Pendapatan tangguhan penjaminan	2,127,437	614,470	-	2,741,907	Guarantee unearned revenue
Penyisihan penurunan nilai	<u>3,346,596</u>	<u>2,681,597</u>	<u>-</u>	<u>6,028,193</u>	Provision for impairment
	<u>88,106,326</u>	<u>(64,986,055)</u>	<u>210,176</u>	<u>23,330,447</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/31 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

	2018				
	1 Januari/ January 2018	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to statements of profit or loss	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December 2018	
Rugi pajak yang bisa dikompensasi	79,786,677	(8,327,029)	-	71,459,648	<i>Tax loss carry forward</i>
Penyisihan gaji dan bonus	4,623,026	(15,248)	-	4,607,778	<i>Provision for salaries and bonus</i>
Beban penyisihan imbalan kerja	5,073,358	1,285,809	(1,009,700)	5,349,467	<i>Provision for employee benefits obligation</i>
Perbedaan antara buku dan pajak dari nilai buku bersih aset tetap	649,871	565,529	-	1,215,400	<i>Differences between accounting and tax fixed assets net book value</i>
Pendapatan tangguhan penjaminan	2,021,333	106,104	-	2,127,437	<i>Guarantee unearned revenue</i>
Penyisihan penurunan nilai	<u>3,346,596</u>	-	-	<u>3,346,596</u>	<i>Provision for impairment</i>
	<u>95,500,861</u>	<u>(6,384,835)</u>	<u>(1,009,700)</u>	<u>88,106,326</u>	

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal (*tax losses carry forward*) karena ketidakpastian tersedianya penghasilan kena pajak di masa depan dimana akumulasi kerugian pajak dapat dimanfaatkan.

As at 31 December 2019, the Company does not recognise deferred assets relating to the tax losses carry forward due to uncertainty about the availability of future taxable income where the tax losses carry forward can be utilised.

e. Pemeriksaan pajak

Tahun pajak 2018

- Pajak pertambahan nilai

Pada tanggal 2 April 2019, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2018.

Pada tanggal 26 Desember 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp 1.380.905, yang pembayarannya telah diterima Perusahaan pada tanggal 5 Februari 2020.

- Pajak penghasilan

Pada tanggal 28 Juni 2019, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak terkait pajak penghasilan untuk tahun pajak 2018. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, pemeriksaan pajak masih dalam proses.

e. Tax audit

Fiscal year 2018

- Value added tax

On 2 April 2019, the Company received tax audit letter related to Value Added Tax for fiscal year 2018.

On 26 December 2019, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter for Value Added Tax for fiscal year 2018 amounting to Rp 1,380,905, which payment has been received by the Company on 5 February 2020.

- Income tax

On 28 June 2019, the Company received tax audit letter related to income tax for fiscal year 2018. Up to the date of these financial statements, the tax audit is still in process.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)**e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)****Tahun pajak 2015****- Pajak Penghasilan dan Pajak
Pertambahan Nilai**

Pada tanggal 27 Agustus 2019, Perusahaan menerima surat perintah pemeriksaan pajak untuk semua perpajakan Perusahaan untuk tahun pajak 2015. Surat Ketetapan Pajak ("SKP") telah diterbitkan dengan koreksi atas rugi fiskal sebesar Rp 17.882 pada tanggal 24 Januari 2020, sehingga penyesuaian untuk rugi fiskal tahun 2015 akan dilakukan Perusahaan pada tahun 2020.

12. TAXATION (continued)**e. Tax audit (continued)****Fiscal year 2015****- Income Tax and Value Added Tax**

On 27 August 2019, the Company received tax audit letter related to all taxes for fiscal year 2015. Tax Assessment Letter has been issued with fiscal correction amounting to Rp 17,882 on 24 January 2020, therefore the year 2015 fiscal losses will be adjusted by the Company in 2020.

**13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR,
PENYISIHAN DAN UTANG LAIN-LAIN****13. ACCRUED EXPENSES, PROVISIONS AND
OTHER PAYABLES**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Bonus dan gaji	21,312,779	18,431,112	Bonus and salary
Beban jasa konsultasi	14,850,648	23,406,263	Advisory fees
Lainnya	<u>1,827,423</u>	<u>1,075,366</u>	Others
	<u>37,990,850</u>	<u>42,912,741</u>	

14. PENDAPATAN TANGGUHAN

Pendapatan tangguhan merupakan pendapatan premi *recurring* yang diterima dimuka dan akan diakui setiap bulannya sepanjang masa pertanggungan.

14. UNEARNED INCOME

Unearned income represents guarantee recurring income received in advance and will be recognised on monthly basis along the guarantee period.

15. PINJAMAN PENERUSAN

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan menandatangani perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah atas dana pinjaman dari *International Bank for Reconstruction and Development*.

Pinjaman penerusan adalah pinjaman yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yaitu Bank Dunia, yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman.

15. TWO-STEP LOANS

On 27 May 2013, the Company entered into a two-step loans agreement with the Government in regards to the fund provided by the *International Bank for Reconstruction and Development*.

Two-step loans are loans obtained by the Government from international bank which is World Bank, which are then re-loaned to the Company. The loans were recorded and payable in Rupiah based on the exchange rate at the date of drawdown.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan)

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai peningkatan kapasitas penjaminan Perusahaan dan pengadaan konsultan jasa atas proyek KPBU di bidang infrastruktur. Pokok pinjaman akan dilunasi dengan angsuran semesteran setelah masa tenggang selama 9 (sembilan) tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tahun 2029.

Pada tanggal 22 Februari 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat No. S-1504/MK.5/2016 sebagai amandemen atas perjanjian penerusan pinjaman No. SLA-1251/DSMI/2013 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan, dengan perubahan pada tingkat suku bunga, yaitu menggunakan SUN *Benchmark* dengan tenor 20 tahun. Batas penarikan pinjaman penerusan telah berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah akumulasi penarikan pinjaman penerusan adalah sebesar Rp 55.126.686. Pinjaman penerusan ini menggunakan SUN *Benchmark* sebagai acuan tingkat suku bunga.

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuarial PT Dayamandiri Dharmakonsilindo untuk masing-masing untuk tahun 2019 dan 2018 tertanggal 12 Februari 2020 dan 22 Februari 2019 untuk penyisihan imbalan kerja Perusahaan menggunakan metode "Projected Unit Credit", masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

15. TWO-STEP LOANS (continued)

The loans are intended for the development of underwriting capacity of the Company and procurement of service consultants on PPP in infrastructure projects. The loan principal are payable in semi-annual installments after grace period of 9 (nine) years and are due up to 2029.

On 22 February 2016, Ministry of Finance Republic of Indonesia issued a letter No. S-1504/MK.5/2016 as an amendment of loan agreement No. SLA-1251/DSMI/2013 between the Government of Indonesia and the Company, with the amendment of interest rate using SUN Benchmark with 20 years tenor. The loans drawdown expired on 30 April 2019.

As at 31 December 2019 and 2018, the withdrawal of accumulated two-step loans are amounting to Rp 55,126,686. This loan used SUN Benchmark as reference of interest rate.

The Company has complied with the covenants in the borrowing agreements above.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

The Company provides employee benefits based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated 25 March 2003.

The following are the key matters disclosed in the actuarial report of PT Dayamandiri Dharmakonsilindo for the Company's provisions year ended 2019 and 2018 dated 12 February 2020 and 22 February 2019 for employee benefit using the "Projected Unit Credit" method, as at 31 December 2019 and 2018, respectively:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/34 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Liabilitas imbalan kerja diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	18,250,946	14,312,277	<i>Pension and other post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>10,909,592</u>	<u>7,085,585</u>	<i>Other long-term benefits</i>
	<u>29,160,538</u>	<u>21,397,862</u>	

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in the profit or loss is as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	4,761,686	4,590,047	<i>Pension and other post-employment benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>4,431,527</u>	<u>768,527</u>	<i>Other long-term benefits</i>
	<u>9,193,213</u>	<u>5,358,574</u>	

Asumsi utama yang digunakan untuk menentukan kewajiban imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining the post-employment benefits obligation as at 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Usia pensiun normal	56	56	<i>Retirement age</i>
Tingkat diskonto	8.00%	8.40%	<i>Discount rate</i>
Tingkat mortalita	TMI '11	TMI '11	<i>Mortality rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	10.00%	10.00%	<i>Salary increment rate</i>
Tingkat pengunduran diri	5% dari usia sebelum 25 tahun dan menurun secara bertahap menjadi 0% pada usia 56 tahun/ 5% from age before 25 and reduced to 0% at age 56	5% dari usia sebelum 25 tahun dan menurun secara bertahap menjadi 0% pada usia 56 tahun/ 5% from age before 25 and reduced to 0% at age 56	<i>Resignation rate</i>

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya

Pension and other post-employment benefits

Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Pension and other post-employment benefits recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Liabilitas imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya	18,250,946	14,312,277	<i>Pension and other post-employment benefits obligation</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/35 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)**

**Pension and other post-employment benefits
(continued)**

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Net expense recognised in the profit or loss is as follows:

	2019	2018	
Biaya jasa kini	2,911,475	3,535,472	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	1,132,654	968,192	<i>Interest cost</i>
Biaya jasa lalu	233,875	86,383	<i>Past service cost</i>
Kelebihan pembayaran imbalan	483,682	-	<i>Excess of benefit paid</i>
	<u>4,761,686</u>	<u>4,590,047</u>	

Mutasi imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

The movement in the pension and other post-employment benefits is as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun	14,312,277	13,879,152	<i>Balance at the beginning of the year</i>
Beban tahun berjalan	4,761,686	4,590,047	<i>Employee benefit expense charged in the current year</i>
Pengukuran kembali:			<i>Remeasurement:</i>
Kerugian/(keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	840,705	(4,038,800)	<i>Loss/(gain) from changes in financial assumptions</i>
Pembayaran imbalan kerja	(1,663,722)	(118,122)	<i>Benefit paid</i>
	<u>18,250,946</u>	<u>14,312,277</u>	

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on pension and post-employment benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2019			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption
Tingkat diskonto	1.00%	(1,969,677)	2,316,141
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	3,214,967	(2,749,614)
			<i>Discount rate Rate of salary increase in the future</i>
31 Desember/December 2018			
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption
Tingkat diskonto	1.00%	(1,363,779)	1,590,793
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	2,275,515	(1,957,009)
			<i>Discount rate Rate of salary increase in the future</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/36 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya
(lanjutan)**

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 15 tahun (2018: 14 tahun).

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	2019
Kurang dari 1 tahun	1,034,929
1 sampai 2 tahun	187,086
2 sampai 5 tahun	3,700,024
Lebih dari 5 tahun	279,109,349

Imbalan jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	2019
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya	10,909,592

Beban bersih yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Biaya jasa kini	1,923,269	1,850,402
Biaya jasa lalu	5,011,323	67,936
Beban bunga	964,761	421,456
Keuntungan aktuarial	<u>(3,467,826)</u>	<u>(1,571,267)</u>
	<u>4,431,527</u>	<u>768,527</u>

Mutasi liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Saldo awal tahun	7,085,585	6,414,278
Beban tahun berjalan	4,431,527	768,527
Pembayaran imbalan kerja	<u>(607,520)</u>	<u>(97,220)</u>
	<u>10,909,592</u>	<u>7,085,585</u>

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

**Pension and other post-employment benefits
(continued)**

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2019 is 15 years (2018: 14 years).

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follow:

	2018	
1,656,604		Less than a year
1,207,671		Between 1 - 2 years
1,937,818		Between 2 - 5 years
226,352,458		Over than 5 years

Other long-term benefits

Other long-term benefits obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	2018	
7,085,585		Other long-term benefits obligation

Net expense recognised in the profit or loss is as follows:

	2018	
1,850,402		Current service cost
67,936		Past service cost
421,456		Interest cost
(1,571,267)		Actuarial gains

The movement in the employee benefits obligation is as follows:

	2018	
6,414,278		Balance at the beginning of the year
768,527		Employee benefit expense charged in the current year
(97,220)		Benefit paid

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/37 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial yang signifikan pada imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

**16. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

Other long-term benefits (continued)

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in significant actuarial assumptions on other long-term benefits obligation are as follow:

31 Desember/December 2019				
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.00%	(651,150)	731,059	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	758,409	(688,305)	Rate of salary increase in the future
31 Desember/December 2018				
Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.00%	(413,711)	462,840	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	484,003	(440,373)	Rate of salary increase in the future

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted after other long-term benefits is as follow:

	2019	2018	
Kurang dari 1 tahun	1,381,094	670,977	Less than a year
1 sampai 2 tahun	1,272,742	1,458,150	Between 1 - 2 years
2 sampai 5 tahun	5,029,635	6,260,319	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	53,159,505	43,629,640	Over than 5 years

17. MODAL SAHAM

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

17. SHARE CAPITAL

The composition of Company's shareholder as at 31 December 2019 and 2018 is as follows:

	2019 dan/and 2018			
	Jumlah saham/ Number of shares	Kepemilikan/ Ownership (%)	Nilai/ Value	
Pemerintah Republik Indonesia	8,000,000	100	8,000,000,000	Government of the Republic of Indonesia

18. DIVIDEN

Pada tahun 2019, berdasarkan akta notaris Arry Supratno, S.H. No. 40 tanggal 23 Mei 2019, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2018 sejumlah Rp 155.456.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2019.

18. DIVIDEND

In 2019, based on notarial deed of Arry Supratno, S.H. No. 40 dated 23 May 2019, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders approved amount of dividend for 2018 amounting to Rp 155,456,000 that has been paid on 20 June 2019.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/38 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

18. DIVIDEN (lanjutan)

Pada tahun 2018, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn. No. 11 tanggal 23 Mei 2018, Pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun 2017 sejumlah Rp 101.151.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2018.

18. DIVIDEND (continued)

In 2018, based on notarial deed No. 11 of Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn. dated 23 May 2018, Shareholder through Annual General Meeting of Shareholders approved amount of dividend for 2017 amounting to Rp 101,151,000 that has been paid on 22 June 2018.

**19. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGUNAANNYA - CADANGAN WAJIB**

Berdasarkan Undang-undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

**19. APPROPRIATED RETAINED EARNING -
STATUTORY RESERVE**

Based on Limited Liability Company Law No. 40 Year 2007, the Company shall appropriate a certain amount of its profit in each year for general reserve if there are available retained earnings, until the general reserve has reached at least 20% of the issued and paid-up capital.

Pada tahun 2019, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 23.554.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 140.000.338. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Arry Supratno, S.H. No. 40 tanggal 23 Mei 2019.

In 2019, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 23,554,000, as the reserve balance became Rp 140,000,338. This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders as covered by notarial deed Arry Supratno, S.H. No. 40 dated 23 May 2019.

Pada tahun 2018, Perusahaan membentuk tambahan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 23.524.000, sehingga saldo cadangan menjadi sebesar Rp 116.446.338. Cadangan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam surat keterangan dari notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn. No. 11 tanggal 23 Mei 2018.

In 2018, the Company has made additional appropriation of retained earnings, amounting to Rp 23,524,000, as the reserve balance became Rp 116,446,338. This general reserve was approved in the Circular Decision General meeting of Shareholders as covered by notarial deed Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn. No. 11 dated 23 May 2018.

Manajemen bermaksud untuk meningkatkan cadangan tersebut di masa datang.

Management plans to increase the general reserve in the future.

20. PENDAPATAN

20. REVENUES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pendapatan penjaminan:			Revenue from guarantee:
- Pendapatan provisi dan komisi	69,300,000	19,400,000	Fees and commission -
- Pendapatan premi	<u>34,740,390</u>	<u>27,223,783</u>	Premium income -
	<u>104,040,390</u>	<u>46,623,783</u>	
Pendapatan penyiapan proyek dan pendampingan transaksi	<u>28,126,795</u>	<u>32,716,363</u>	Revenue from project preparation and transaction advisory

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/39 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PENDAPATAN (lanjutan)

20. REVENUES (continued)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pendapatan pengelolaan dana:			<i>Income from investments:</i>
- Deposito	618,505,349	486,085,684	<i>Time deposits -</i>
- Investasi dengan pendapatan tetap:			<i>Fixed income: -</i>
Pendapatan bunga	257,301,433	267,411,045	<i>Interest income</i>
- Investasi reksa dana:			<i>Mutual funds investment: -</i>
Laba atas penjualan reksa dana	60,609	1,415,092	<i>Gain from sale of mutual funds</i>
	<u>875,867,391</u>	<u>754,911,821</u>	
	<u>1,008,034,576</u>	<u>834,251,967</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

21. BEBAN USAHA

21. OPERATING EXPENSES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Administrasi dan umum:			General and administrative:
- Pegawai	58,032,032	52,615,561	<i>Employee cost -</i>
- Sewa	28,354,750	24,987,647	<i>Rent -</i>
- Jasa profesional	7,005,923	9,968,107	<i>Professional fees -</i>
- Perjalanan dinas	4,187,700	3,823,258	<i>Travelling -</i>
- Rapat dan konferensi	3,837,249	4,104,741	<i>Meeting and conference -</i>
- Outsourcing	3,724,851	3,168,730	<i>Outsourcing -</i>
- Beban bina karyawan	3,588,751	3,093,587	<i>Employee development -</i>
- Pelatihan	2,892,898	2,756,800	<i>Training -</i>
- Pemeliharaan	1,144,881	848,047	<i>Maintenance -</i>
- Perlengkapan kantor	1,140,961	1,209,189	<i>Office equipment -</i>
- Transportasi	1,068,131	1,007,679	<i>Transportation -</i>
- Air dan Listrik	391,312	415,449	<i>Water & electricity -</i>
- Komunikasi	190,549	240,090	<i>Communication -</i>
- Lainnya	104,607	178,144	<i>Others -</i>
	<u>115,664,595</u>	<u>108,417,029</u>	
Penjaminan:			Guarantee:
- Pegawai	49,891,926	41,323,342	<i>Employee cost -</i>
- Konsultan	27,548,374	14,023,539	<i>Consultancy -</i>
- Perjalanan dinas	1,855,374	1,743,686	<i>Travelling -</i>
- Loka-karya	1,404,750	2,109,033	<i>Workshop -</i>
- Rapat dan konferensi	614,949	844,838	<i>Meeting and conference -</i>
	<u>81,315,373</u>	<u>60,044,438</u>	
Penyiapan proyek dan pendampingan transaksi:			Project preparation and transaction advisory:
- Konsultan	15,092,373	25,955,015	<i>Consultancy -</i>
- Pegawai	10,774,082	4,856,475	<i>Employee cost -</i>
- Rapat dan konferensi	1,287,875	1,736,788	<i>Meeting and conference -</i>
- Perjalanan dinas	657,064	142,849	<i>Travelling -</i>
- Loka-karya	387,493	581,238	<i>Workshop -</i>
- Iklan	120,137	-	<i>Advertising -</i>
	<u>28,319,024</u>	<u>33,272,365</u>	

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/40 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

21. BEBAN USAHA (lanjutan)

21. OPERATING EXPENSES (continued)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pengembangan usaha:			Business development:
- IIGF Institute	5,885,303	3,414,161	IIGF Institute -
- Loka-karya	4,485,758	1,189,756	Workshop -
- Iklan dan promosi	1,592,932	1,147,689	Advertising and promotion -
- Sumbangan sosial	1,429,818	1,083,470	Social contribution -
- Representasi	652,641	819,362	Representation -
	<u>14,046,452</u>	<u>7,654,438</u>	

Informasi terkait pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 22.

Information in respect of related parties is disclosed in Note 22.

22. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN

22. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION

Sifat pihak berelasi

Nature of relationship

- Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan.
- Direksi adalah orang-orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perencanaan, pengarahannya dan pengendalian aktivitas-aktivitas Perusahaan.
- Bank dan BUMN merupakan entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan penempatan investasi dalam bentuk deposito dan obligasi.

- The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company.
- The directors are persons who have authority and responsibility for planning, directing and controlling the Company's activities.
- Banks and SOEs are entities under common controls where the Company places its investments in time deposits and bonds.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company enters into certain transactions with related parties, including the following:

- Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows:

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Balances arising from related parties transactions

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Kas dan setara kas	23,682,615	968,485,000	Cash and cash equivalents
Investasi	6,745,956,127	4,616,898,175	Investments
Piutang usaha	65,527,880	65,533,091	Account receivables
Pinjaman penerusan	55,126,686	55,126,686	Two-step loans
	<u>6,890,293,308</u>	<u>5,706,042,952</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>62.01%</u>	<u>53.72%</u>	Percentage of total assets

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/41 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

- a. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

22. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Nature of relationship (continued)

- a. The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows: (continued)

Balances arising from related parties transactions (continued)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pendapatan			Revenues
			<i>Government of the -</i>
- Pemerintah Republik Indonesia	129,366,851	176,760,668	<i>Republic of Indonesia</i>
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	103,018,330	3,802,016	<i>PT Bank Negara Indonesia - (Persero) Tbk</i>
- PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	89,868,965	58,181,702	<i>PT Bank Rakyat Indonesia - Agroniaga Tbk</i>
- PT Bank Mandiri Taspen Pos	45,861,434	25,311,064	<i>PT Bank Mandiri Taspen Pos -</i>
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - UUS	36,208,193	58,647,559	<i>PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk - UUS</i>
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	23,760,736	14,695,194	<i>PT Sarana Multi Infrastruktur - (Persero)</i>
- PT Pegadaian (Persero)	18,037,000	15,234,078	<i>PT Pegadaian (Persero) -</i>
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17,108,887	18,582,109	<i>PT Bank Rakyat Indonesia - (Persero) Tbk</i>
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	13,920,938	7,122,500	<i>PT Pelabuhan Indonesia - (Persero)</i>
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12,963,644	114,526,031	<i>PT Bank Tabungan Negara - (Persero) Tbk</i>
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	12,806,708	12,115,056	<i>Lembaga Pembiayaan Ekspor - Indonesia (Indonesia Eximbank)</i>
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12,750,000	18,179,869	<i>PT Bank Mandiri - (Persero) Tbk</i>
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	12,057,666	7,537,361	<i>PT Sarana Multigriya Finansial - (Persero)</i>
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	9,157,457	9,184,388	<i>PT Telekomunikasi Indonesia - (Persero) Tbk</i>
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	8,556,939	5,617,865	<i>PT Perusahaan Listrik Negara - (Persero)</i>
- PT Pupuk Indonesia (Persero)	7,600,000	7,506,250	<i>PT Pupuk Indonesia (Persero) -</i>
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5,565,000	-	<i>PT Semen Indonesia - (Persero) Tbk</i>
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk	3,719,051	3,802,211	<i>PT Adhi Karya (Persero) Tbk -</i>
- PT Angkasa Pura (Persero)	2,413,475	2,150,000	<i>PT Angkasa Pura (Persero) -</i>
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2,092,389	1,840,625	<i>PT Kereta Api Indonesia - (Persero)</i>
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1,665,000	1,665,000	<i>PT Waskita Karya - (Persero) Tbk</i>
- PT Marga Lingkar Jakarta	1,490,000	1,469,306	<i>PT Marga Lingkar Jakarta -</i>
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1,218,907	1,886,352	<i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk -</i>
- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	1,004,383	5,000,000	<i>Indonesia Tourism Development Corporation (Persero)</i>

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/42 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

- a. Perusahaan menempatkan dana dalam bentuk deposito dan obligasi dari pihak pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disepakati. Rincian pendapatan pengelolaan dana kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan (lanjutan)		
- PT Aneka Tambang Tbk	469,797	475,086
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	6,710,338
- PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	-	3,196,202
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	-	1,906,787
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	-	1,863,356
- PT Hutama Karya (Persero)	-	1,754,783
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	1,188,368
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	1,159,167
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	1,133,622
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	-	607,066
	<u>572,681,750</u>	<u>590,811,979</u>

Persentase terhadap jumlah pendapatan	<u>56.81%</u>	<u>70.82%</u>

- b. Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Dewan Komisaris		
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	5,027,935	4,357,397
Direksi		
- Gaji dan imbalan kerja jangka pendek	<u>11,622,613</u>	<u>12,152,992</u>
	<u>16,650,548</u>	<u>16,510,389</u>

22. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Nature of relationship (continued)

- a. The Company invested their funds in time deposit and bonds from related parties which were made according to agreed terms and conditions. The details of investments income from related parties is as follows: (continued)

Balances arising from related parties transactions (continued)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Revenues (continued)		
PT Aneka Tambang Tbk - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara		
PT Hutama Karya (Persero) - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk		
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat		

- b. The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commissioners and Directors. The total of salary and allowance, bonus/tantiem for Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows:

**Board of Commissioners
Salary and short term - employee benefit**

**Board of Directors
Salary and short term - employee benefit**

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/43 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

22. INFORMASI PIHAK-PIHAK BERELASI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sifat pihak berelasi (lanjutan)

- b. Perusahaan memberikan remunerasi dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan Direksi. Jumlah gaji dan tunjangan, bonus/tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>2019</u>
Persentase terhadap jumlah beban usaha	<u>4.03%</u>

22. SIGNIFICANT RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Nature of relationship (continued)

- b. The Company provides remuneration and facilities to support the operational duties of their Board of Commissioners and Directors. The total of salary and allowance, bonus/tantiem for Board of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows: (continued)

	<u>2018</u>	
	<u>4.63%</u>	Percentage of total operating expenses

23. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Penjaminan

Hal-hal berikut adalah perjanjian penjaminan yang telah ditandatangani oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2019:

KPBU

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP)

Pada tanggal 6 Oktober 2011, Perusahaan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Bhimasena berupa *arranging fee* dan *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan perolehan pembiayaan, sedangkan *processing fee* dan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 21 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama ("PKS") antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 6 Juni 2016, penandatanganan perolehan pembiayaan proyek dilakukan antara pemberi pinjaman dan Bhimasena. Pada saat yang bersamaan, penjaminan proyek sudah efektif.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS

Guarantee Agreement

The following are the guarantee agreement entered by the Company as at 31 December 2019:

PPP

1. Batang East Java Power Plant Project (CJPP)

On 6 October 2011, the Company together with the Government of the Republic of Indonesia (the "Government") entered into a guarantee agreement with PT Bhimasena Power Indonesia ("Bhimasena") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Bhimasena in form of *arranging fee* and *upfront fee* at the signing date and financial close date, while *processing fee* and *guarantee* are received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 21 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 6 June 2016, signing of financial close was held between lender and Bhimasena. At the same time, guarantee of the project has been effective.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**KPBU (lanjutan)

1. Proyek PLTU Batang Jawa Tengah (CJPP) (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sebesar Rp 300 miliar (nilai penuh) kerugian pertama yang meliputi risiko politik dan terminasi.

2. Proyek Palapa Ring Barat

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Barat berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJKP.

Pada tanggal 10 November 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 310 miliar (nilai penuh) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh Palapa Barat dan PJKP.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 2 Maret 2018.

3. Proyek Palapa Ring Tengah

Pada tanggal 4 Maret 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") selaku BU.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**PPP (continued)

1. Batang East Java Power Plant Project (CJPP) (continued)

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to the first loss of Rp 300 billion (full amount) covering political risk and termination.

2. Western Package Palapa Ring Project

On 29 February 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Ring Barat ("Palapa Barat") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Palapa Barat in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 November 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 310 billion (full amount) covering the financial liability of Availability Payment, and 80% from termination cost approved by Palapa Barat and GCA.

The project operates starting on 2 March 2018.

3. Central Package Palapa Ring Project

On 4 March 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT LEN Telekomunikasi Indonesia ("LTI") as the Investor.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**KPBU (lanjutan)

3. Proyek Palapa Ring Tengah (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari LTI berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 30 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 336 miliar (nilai penuh) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh LTI dan PJPk.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Desember 2018.

4. Proyek Palapa Ring Timur

Pada tanggal 29 September 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Palapa Timur berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 29 Maret 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**PPP (continued)

3. Central Package Palapa Ring Project (continued)

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from LTI in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 30 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 336 billion (full amount) covering the financial liability of Availability Payment), and 80% from termination cost approved by LTI and GCA.

The project operates starting on 21 December 2018.

4. Eastern Package Palapa Ring Project

On 29 September 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Palapa Timur Telematika ("Palapa Timur") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Palapa Timur in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 29 March 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**KPBU (lanjutan)**4. Proyek Palapa Ring Timur (lanjutan)**

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 826 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 1) dan Rp 570 miliar (nilai penuh untuk sub-paket 2) yang merupakan kewajiban finansial atas *Availability Payment*, dan 80% dari Biaya Pengakhiran yang ditanggung yang disepakati oleh Palapa Timur dan PJPK.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 29 Agustus 2019.

5. Proyek Tol Batang - Semarang

Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Semarang Batang berupa *upfront fee* pada saat tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 20 Juni 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.450 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 21 Januari 2019.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**PPP (continued)**4. Eastern Package Palapa Ring Project (continued)**

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 826 billion (full amount for sub-package 1) and Rp 570 billion (full amount for sub-package 2) covering the financial liability of Availability Payment, and 80% from termination cost approved by Palapa Timur and GCA.

The project operates starting on 29 August 2019.

5. Batang - Semarang Toll Road Project

On 27 April 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Semarang Batang ("Jasamarga Semarang Batang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Semarang Batang in form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 20 June 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,450 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

The project operates starting on 21 January 2019.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/47 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

6. Proyek Tol Pandaan - Malang

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Pandaan Malang berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 3 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 5,6 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 13 Mei 2019 dan 30 Oktober 2019 untuk sebagian seksi.

7. Proyek Tol Manado - Bitung

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Manado Bitung berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

6. Pandaan - Malang Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Pandaan Malang ("Jasamarga Pandaan Malang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Pandaan Malang in form of *upfront fee* at the effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 3 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 5.6 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

The project operates starting on 13 May 2019 and 30 October 2019 for some sections.

7. Manado - Bitung Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Manado Bitung ("Jasamarga Manado Bitung") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Manado Bitung in form of *upfront fee* at the effective date of guarantees, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**KPBU (lanjutan)**7. Proyek Tol Manado - Bitung (lanjutan)**

Pada tanggal 6 Oktober 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 3,4 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

8. Proyek Tol Balikpapan - Samarinda

Pada tanggal 9 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Balikpapan Samarinda berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 2 Desember 2016, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 6,1 triliun (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah, dana likuiditas terbatas dan pengakhiran akibat keadaan kahar.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**PPP (continued)**7. Manado - Bitung Toll Road Project (continued)**

On 6 October 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 3.4 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

8. Balikpapan - Samarinda Toll Road Project

On 9 June 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Balikpapan Samarinda ("Jasamarga Balikpapan Samarinda") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Balikpapan Samarinda in form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 2 December 2016, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 6.1 trillion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund, limited liquidity fund and termination due to force majeure.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/49 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

9. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ("SPAM") Umbulan

Pada tanggal 21 Juli 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Meta berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 10 Februari 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 180 miliar (nilai penuh) yang meliputi cicilan janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 30 Desember 2019.

10. Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek II *Elevated*

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated*") selaku BU.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

9. *Water Supply System Umbulan Project*

On 21 July 2016, the Company entered into a guarantee agreement with PT Meta Adhya Tirta Umbulan ("Meta") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Meta in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 10 February 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 180 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

The project operates starting on 30 December 2019.

10. *Jakarta - Cikampek II Elevated Tol Road Project*

On 22 February 2017, the Company entered into a Jalan Layang Cikampek ("Jasamarga Jakarta - Cikampek Elevated") as the Investor.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**KPBU (lanjutan)**10. Proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Elevated (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Jakarta - Cikampek *Elevated* berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian penjaminan dan surat imbal jasa penjaminan. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 8 Mei 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 600 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif dan risiko politik.

Proyek ini telah beroperasi pada tanggal 12 Desember 2019.

11. Proyek Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Citra Karya berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**PPP (continued)**10. Jakarta - Cikampek II Elevated Tol Road Project (continued)**

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Jakarta - Cikampek Elevated in form of *upfront fee* at the signing date of guarantee agreement and fee letter. Meanwhile, *guarantee fee* at the effective date of guarantee until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 8 May 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 600 billion (full amount) covering tariff adjustment and political risk.

The project operates starting on 12 December 2019.

11. Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Citra Karya Jabar Tol ("Citra Karya") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Citra Karya in form of *upfront fee* at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/51 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

11. Proyek Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan (lanjutan)

Pada tanggal 22 Februari 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.430 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

12. Proyek Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Waskita Bumi berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPk.

Pada tanggal 7 Desember 2017, penjaminan proyek telah efektif untuk ruas Krian - Legundi - Bunder dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan. Untuk ruas Bunder-Manyar masih menunggu terpenuhinya syarat efektivitas penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 649 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik dan keterlambatan pengadaan tanah.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

11. Cileunyi - Sumedang - Dawuan Toll Road Project (continued)

On 22 February 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,430 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

12. Krian - Legundi - Bunder - Manyar Toll Road Project

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Waskita Bumi Wira ("Waskita Bumi") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Waskita Bumi in form of *upfront fee* at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 7 December 2017, the guarantee of the project has been effective for Krian - Legundi - Bunder segment road since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled. For Bunder-Manyar segment road still waiting fulfillment all the requirements in the guarantee agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 649 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk and delay in land acquisition.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**KPBU (lanjutan)**13. Proyek Tol Serang - Panimbang**

Pada tanggal 22 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Wika Sepang berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan surat imbal jasa penjaminan, serta Perusahaan telah menerima dan menyampaikan secara tertulis persetujuan atas Berita Acara Pengadaan Tanah. Sedangkan, *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 17 November 2017, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 1.443 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

Pada bulan Oktober 2018, dilakukan amandemen atas nilai maksimum penjaminan dana talangan tanah sehingga estimasi maksimum nilai penjaminan proyek ini menjadi Rp 2.053 miliar (nilai penuh).

14. Proyek Tol Probolinggo - Banyuwangi

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") selaku BU.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**PPP (continued)**13. Serang - Panimbang Toll Road Project**

On 22 February 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Wika Sepang") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Wika Sepang in form of upfront fee at the signing date of guarantee agreement and fee letter, and also the Company has received and submitted approval of minutes of land acquisition. Meanwhile, guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 17 November 2017, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 1,443 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

In October 2018, there was an amendment of land bailout fund maximum guarantee therefore the estimated maximum guarantee of the project become Rp 2,053 billion (full amount).

14. Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("Jasamarga Probowangi") as the Investor.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)****KPBU (lanjutan)****14. Proyek Tol Probolinggo - Banyuwangi (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Probawangi berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.281 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

15. Proyek Tol Jakarta - Cikampek II Selatan

Pada tanggal 29 Desember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari Jasamarga Japek Selatan berupa *upfront fee* pada tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 27 Juni 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.280 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah dan dana talangan tanah.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)****PPP (continued)****14. Probolinggo - Banyuwangi Toll Road Project (continued)**

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Citra Karya in form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,281 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

15. Jakarta - Cikampek II South Toll Road Project

On 29 December 2017, the Company entered into a guarantee agreement with PT Jasamarga Japek Selatan ("Jasamarga Japek Selatan") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from Jasamarga Japek Selatan in form of upfront fee at the effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 27 June 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,280 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition and land bailout fund.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**KPBU (lanjutan)**16. Proyek SPAM Lampung**

Pada tanggal 14 Februari 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ATL berupa *upfront fee* pada saat ditandatanganinya perjanjian dan tanggal efektif penjaminan, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Pada tanggal 14 Agustus 2018, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 150 miliar (nilai penuh) yang meliputi cicilan janji pembayaran bulanan dan 80% atas harga pembelian proyek yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

17. Proyek SPAM Semarang Barat

Pada tanggal 23 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Air Semarang Barat ("ASB") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ASB berupa *upfront fee* yang terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**PPP (continued)**16. Water Supply System Lampung Project**

On 14 February 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Adhya Tirta Lampung ("ATL") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from ATL in form of upfront fee at the signing date and effective date of guarantees, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

On 14 August 2018, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 150 billion (full amount) covering the breach of monthly payment promise and 80% of project purchase price to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

17. Water Supply System West Semarang Project

On 23 November 2018, the Company entered into a guarantee agreement with PT Air Semarang Barat ("ASB") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from ASB in form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)****KPBU (lanjutan)****17. Proyek SPAM Semarang Barat (lanjutan)**

Pada tanggal 29 Mei 2019, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 169 miliar (nilai penuh) yang meliputi biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung (termasuk bunga keterlambatan pembayaran) dan biaya pengakhiran yang ditanggung sesuai dengan perjanjian penjaminan.

18. Proyek Kereta Api Makassar - Parepare

Pada tanggal 5 April 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Celebes Railway Indonesia ("CRI") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari CRI berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 14 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 439 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan 70% atas biaya pengakhiran yang ditanggung yang wajib dibayar oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

19. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah

Pada tanggal 3 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Satelit Nusantara Tiga ("SNT") selaku BU.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)****PPP (continued)****17. Water Supply System West Semarang Project (continued)**

On 29 May 2019, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 169 billion (full amount) covering non-termination costs (including late payment interest) and termination costs in accordance with the guarantee agreement.

18. Makassar - Parepare Railway Train Project

On 5 April 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Celebes Railway Indonesia ("CRI") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from CRI in form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 14 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 439 billion (full amount) that is non-termination costs and 70% of termination costs in to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

19. Government Multifunction Satellite Project

On 3 May 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Satelit Nusantara Tiga ("SNT") as the Investor.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**KPBU (lanjutan)**19. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari SNT berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 12 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 2.670 miliar (nilai penuh) yang merupakan biaya yang bukan pengakhiran yang ditanggung dan biaya pengakhiran yang ditanggung mana yang lebih rendah antara Rp 7.200 miliar (nilai penuh) atau 80% atas biaya pengakhiran yang wajib dibayarkan oleh PJPK ke BU sesuai PKS.

20. Proyek Tol Semarang - Demak

Pada tanggal 23 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ("PPSD") selaku BU.

Berdasarkan perjanjian penjaminan ini, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PPSD berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat ditandatanganinya perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif dan selama mana yang lebih cepat dari 15 tahun setelah tanggal operasional komersial, tanggal berakhirnya perjanjian penjaminan atau tanggal berakhirnya PKS antara BU dan PJPK.

Sampai dengan tanggal pelaporan, penjaminan proyek belum efektif.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**PPP (continued)**19. Government Multifunction Satellite Project (continued)**

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from SNT in form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 12 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 2,670 billion (full amount) that is non-termination costs and termination costs whichever is lower between Rp 7,200 billion (full amount) or 80% of termination costs in to be paid by GCA to Investor as agreed in cooperation agreement.

20. Semarang - Demak Toll Road Project

On 23 September 2019, the Company entered into a guarantee agreement with PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ("PPSD") as the Investor.

Based on this guarantee agreement, the Company is entitled to receive fees from PPSD in form of *upfront fee* that payable at the signing date, while *guarantee fee* is received on the effective date of guarantee and until whichever is earlier between 15 years after the date of commercial operation, the date of which the guarantee agreement is terminated or the date of which the cooperation agreement between the Investor and GCA is expired.

As at the reporting date, the guarantee of the project has not been effective.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/57 - Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perjanjian Penjaminan (lanjutan)

KPBU (lanjutan)

20. Proyek Tol Semarang - Demak (lanjutan)

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah Rp 5.167 miliar (nilai penuh) yang meliputi penyesuaian tarif, risiko politik, keterlambatan pengadaan tanah, dana talangan tanah dan terminasi.

Non-KPBU

1. Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur pariwisata KEK Mandalika dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") selaku BU.

2. Proyek Hydropower Programme

Pada tanggal 5 September 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan pinjaman proyek pembangunan fasilitas infrastruktur penyediaan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Sulawesi dan lainnya dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") dimana penjaminan telah efektif bersamaan dengan penandatanganan perjanjian penjaminan.

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal yang sama, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari PLN berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 14 tahun.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah maksimum sebesar EUR 42.099.000 (nilai penuh).

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Guarantee Agreement (continued)

PPP (continued)

20. Semarang - Demak Toll Road Project (continued)

Estimated maximum guarantee from this project is amounting to Rp 5,167 billion (full amount) covering tariff adjustment, political risk, delay in land acquisition, land bailout fund and termination.

Non-PPP

1. Special Economic Zone (SEZ) Mandalika Project

On 31 December 2018, the Company entered into a loan guarantee agreement for the construction of SEZ Mandalika tourism infrastructure facilities with Indonesia Tourism Development Corporation ("ITDC") as the Investor.

2. Hydropower Programme Project

On 5 September 2019, the Company entered into a loan guarantee agreement for the infrastructure development in providing hydroelectric power plants in Sulawesi region and others with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") which the guarantee of the project has been effective along with the signing of the guarantee agreement.

Based on the loan guarantee implementation agreement that signed on the same date, the Company is entitled to receive fees from PLN in form of upfront fee that payable at the signing date, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 14 years.

Estimated maximum guarantee from this project is at the maximum amounting to EUR 42,099,000 (full amount).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Perjanjian Penjaminan (lanjutan)**Non-KPBU (lanjutan)**2. Proyek Hydropower Programme (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pelaksanaan penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan berhak menerima imbal jasa penjaminan dari ITDC berupa *upfront fee* yang terhutang pada saat penandatanganan perjanjian dengan tahapan pembayaran sesuai dengan perjanjian, sedangkan *guarantee fee* diperoleh sejak tanggal efektif selama 35 tahun.

Pada tanggal 22 Maret 2019, penjaminan proyek telah efektif bersamaan dengan efektifnya Perjanjian Pinjaman.

Estimasi maksimum nilai penjaminan dari proyek ini adalah sampai dengan 15,5% dari nilai pinjaman sebesar USD 248.400.000 (nilai penuh) beserta biaya bunga dan biaya lainnya.

Kontijensi

Terkait risiko keterlambatan pengadaan tanah, batas akhir serah terima tanah untuk beberapa proyek jalan tol yang dijamin Perusahaan telah terlewati. Dalam hal adanya kompensasi tunai atas keterlambatan penyerahan tanah tersebut dapat diajukan oleh BU kepada PJP 7 hari setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi ("SLO"). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, hanya 3 (tiga) proyek yang telah terbit SLO. Dalam hal PJP tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka BU dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan. Estimasi potensi klaim kepada PJP yang dapat diajukan kepada Perusahaan untuk keseluruhan proyek adalah sebesar Rp 298,5 miliar (nilai penuh) dengan asumsi keterlambatan pengadaan tanah adalah maksimal 6 bulan (tidak diaudit).

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Guarantee Agreement (continued)**Non-PPP (continued)**2. Hydropower Programme Project (continued)**

Based on the loan guarantee implementation agreement that signed on 28 December 2018, the Company is entitled to receive fees from ITDC in form of upfront fee that payable at the signing date with payment stage in accordance to the agreement, while guarantee fee is received on the effective date of guarantee for 35 years.

On 22 March 2019, the guarantee of the project has been effective along with the effectiveness of Loan Agreement.

Estimated maximum guarantee from this project is amounting up to 15.5% of the principal loan amounting to USD 248,400,000 (full amount) plus interests and other charges.

Contingencies

Regarding the risk of delay in land acquisition, the due date of land acquisition for few toll road project that guaranteed by Company have passed. In case of any cash compensation incurred due to delay in these land acquisition could be submitted by the Investor to GCA 7 days after the issuance of the Operation Worthiness Certificate ("OWC"). As at 31 December 2019, only 3 (three) projects that issued OWC. If the GCA did not fulfill the obligation to pay cash compensation in accordance with the time limit stipulated in the cooperation agreement, the investor could submit a claim to the Company. The estimated potential claims to GCA for all guaranteed projects that could be submitted to the Company is Rp 298.5 billion (full amount), assuming the delay reaches maximum limit of 6 months (unaudited).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**Kontijensi (lanjutan)**

Dalam penjaminan Non-KPBU, jika BUMN Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayar sesuai perjanjian pinjaman kepada pemberi pinjaman, Perusahaan akan mengambil alih kewajiban pembayaran tersebut sesuai dengan perjanjian penjaminan sebelum terjadinya gagal bayar BUMN Terjamin atas pinjaman yang diberikan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah menelaah kewajibannya, baik dalam bentuk potensi klaim dan/atau klaim aktual atas risiko-risiko yang ditanggung Perusahaan dalam perjanjian penjaminan, untuk menilai apakah suatu liabilitas harus diakui dalam laporan keuangan. Atas penilaian tersebut, pada tanggal 31 Desember 2019 tidak ada penyisihan atas klaim yang dibentuk oleh Perusahaan.

Atas semua perjanjian penjaminan yang dimiliki di atas, Perusahaan juga menandatangani perjanjian dengan para PJPK (KPBU) atau BUMN Terjamin (Non-KPBU) masing-masing proyek yang mengatur tata cara pengembalian hak regres pada saat pembayaran klaim dilakukan.

Perjanjian sewa kantor dengan PT Mahkota Prima Properti

Pada tanggal 22 Agustus 2016 Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Mahkota Prima Properti. Periode sewa adalah untuk 4 (empat) tahun dimulai dari 1 September 2016 dan berakhir pada 31 Agustus 2020.

Perjanjian sewa ini meliputi area yang digunakan untuk ruangan kantor. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sewa, jasa pemeliharaan dan biaya lainnya terkait sewa ke PT Mahkota Prima Properti. Pembayaran untuk seluruh jumlah sewa dan jasa pemeliharaan dibayarkan setiap bulan. Sebagai tambahan, Perusahaan juga membayar dimuka atas deposit sekuriti yang ditahan oleh PT Mahkota Prima Properti tanpa kewajiban untuk membayar bunga kepada Perusahaan. Seluruh deposit tersebut akan dikembalikan pada waktu berakhirnya perjanjian sewa ini, jika Perusahaan tidak berniat untuk melanjutkan sewa.

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**Contingencies (continued)**

In non-PPP guarantee, if guaranteed SOEs are unable to fulfill payment obligation according to the loan agreement to the lenders, the Company will take over the payment obligations in accordance with guarantee agreement before the default of guaranteed SOEs' loan.

As at 31 December 2019, the Company has reviewed its obligation, whether in the form of potential claims and/or actual claims over the risks borne by the Company as stipulated in the guarantee agreement, to assess whether any provision required to be recognised in the financial statements. Based on the assessment, on 31 December 2019, there was no provision of claims deemed necessary to be made by the Company.

Upon the signing of guarantee agreements above, the Company also signed agreement with GCA (PPP) or guaranteed SOEs (Non-PPP) of each projects which stipulates term and conditions of recourse right when the Company make any claim payment.

Rent office agreement with PT Mahkota Prima Properti

On 22 August 2016, the Company entered into a lease agreement with PT Mahkota Prima Properti. The lease period is for 4 (four) years starting from 1 September 2016 and expires on 31 August 2020.

This lease agreement covers an area that is used for office space. Based on this agreement, the Company has an obligation to pay rent, service charges and other charges to PT Mahkota Prima Properti. Payment for the full amount of rent and service charges was charged monthly. In addition, the Company also paid in advance for security deposit, which is held by the PT Mahkota Prima Properti without liability to the Company for interest. All deposits will be refunded on the expiration of this lease, if the Company does not intend to continue the lease.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

24. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas yang penting adalah sebagai berikut:

	2019
Pencadangan saldo laba	23,554,000
Perubahan nilai pasar atas aset keuangan tersedia untuk dijual	117,779,282

24. NON-CASH TRANSACTIONS

The principal non-cash transactions are as follows:

	2018	
	23,524,000	Appropriation retained earnings
	(143,731,473)	Changes in fair value of financial assets available for sale

25. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi - Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan"; dan
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan Akuntansi".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

25. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2019 as follows:

- SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";
- Amendment to SFAS 62 "Insurance contract - Implementation of SFAS 71: Financial Instruments";
- Amendment to SFAS 71 "Financial instruments: prepayment features with negative compensation";
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of financial statements"; and
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimated and Errors".

The above standards will be effective on 1 January 2020.

- SFAS 112 "Accounting for Endowments".

The above standards will be effective on 1 January 2021.

As at the authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Company's financial statements.

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Lampiran - 5/61 - Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
NERACA**

Perjanjian Penjaminan

Proyek Tol Semarang - Demak

Pada tanggal 9 Januari 2020, penjaminan proyek telah efektif dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian penjaminan.

Informasi terkait perjanjian penjaminan proyek pada Catatan 23 KPBU No. 20.

Proyek Bandar Udara Labuan Bajo

Pada tanggal 7 Februari 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian penjaminan dengan PT Cinta Airport Flores selaku BU.

26. SUBSEQUENT EVENTS

Guarantee Agreement

Semarang - Demak Toll Road Project

On 9 January 2020, the guarantee of the project has been effective since all the requirements in the guarantee agreement have been fulfilled.

Information in respect of guarantee agreement is disclosed in Note 23 PPP No. 20.

Labuan Bajo Airport Project

On 7 February 2020, the Company entered into a guarantee agreement with PT Cinta Airport Flores as the Investor.



2019

Laporan Tahunan

**Jaga Infrastruktur
untuk Indonesia Maju**

Capital Place, Lt 7 & 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710 - Indonesia
Tel : 021-5795 0550
Fax : 021-5795 0040
Website : www.ptpii.co.id

#Jagainfrastruktur
#Indonesiamaju



PT PII Channel



PII_Persero



**Jaga Infrastruktur
untuk Indonesia Maju**

2019
Laporan Tahunan